



REKOMENDASI PANITIA KERJA KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL

Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Tahun 2018 - 2019



Diterbitkan oleh:
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Rekomendasi Panitia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2018 - 2019

c Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain termasuk organisasi regional / internasional yang menghimpun parlemen - parlemen dan / atau anggota - anggota parlemen negara lain.

Lebih lanjut lihat www.ksap.dpr.go.id

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak - hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

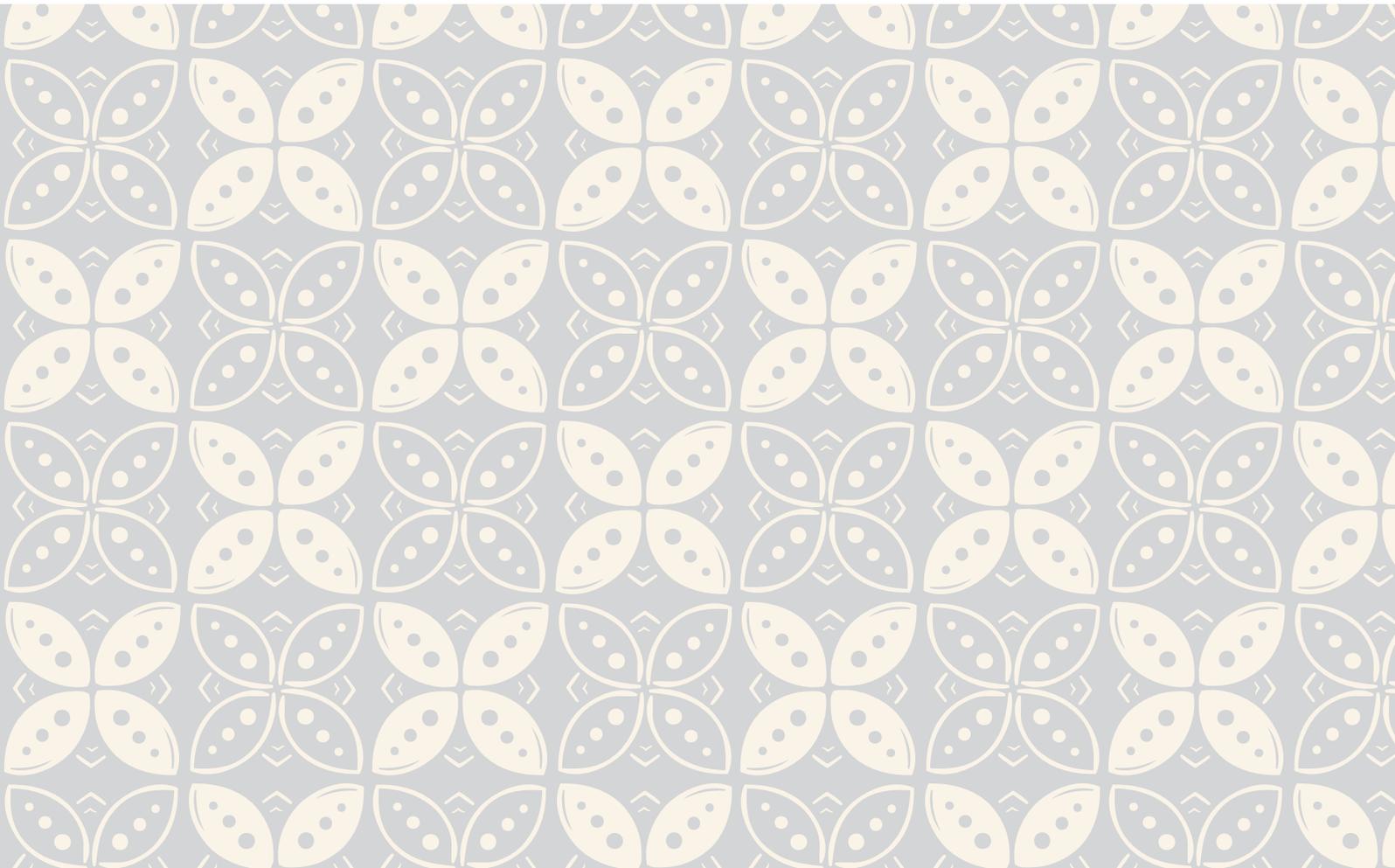
Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI
Gedung Nusantara III Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Indonesia
Tel. : 021-5715814, 5715907
Faks. : 021-5734460
Email : biro_ksap@dpr.go.id

270 halaman; 21cm x 29.7cm
ISBN : 978-602-51087-2-3



REKOMENDASI PANITIA KERJA KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL

Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Tahun 2018 - 2019



Tim Penyusun

Pengarah

Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP / Ketua Panja KER

Penanggung Jawab

Endah T. D. Retnoastuti, S.S., M.Phil.

Redaktur

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS.

Editor

Rd. Anne Widiana, S.S., M.Si.
Rifan Rachman SA., S.Sos., M.H.

Pembuat Artikel

Dewi Amelia Tresna Wijayanti, M.A.
Heriyono Adi Anggoro
Tide Aji Pratama

Design Grafis & Fotografer

Wiryawan Narendro Putro

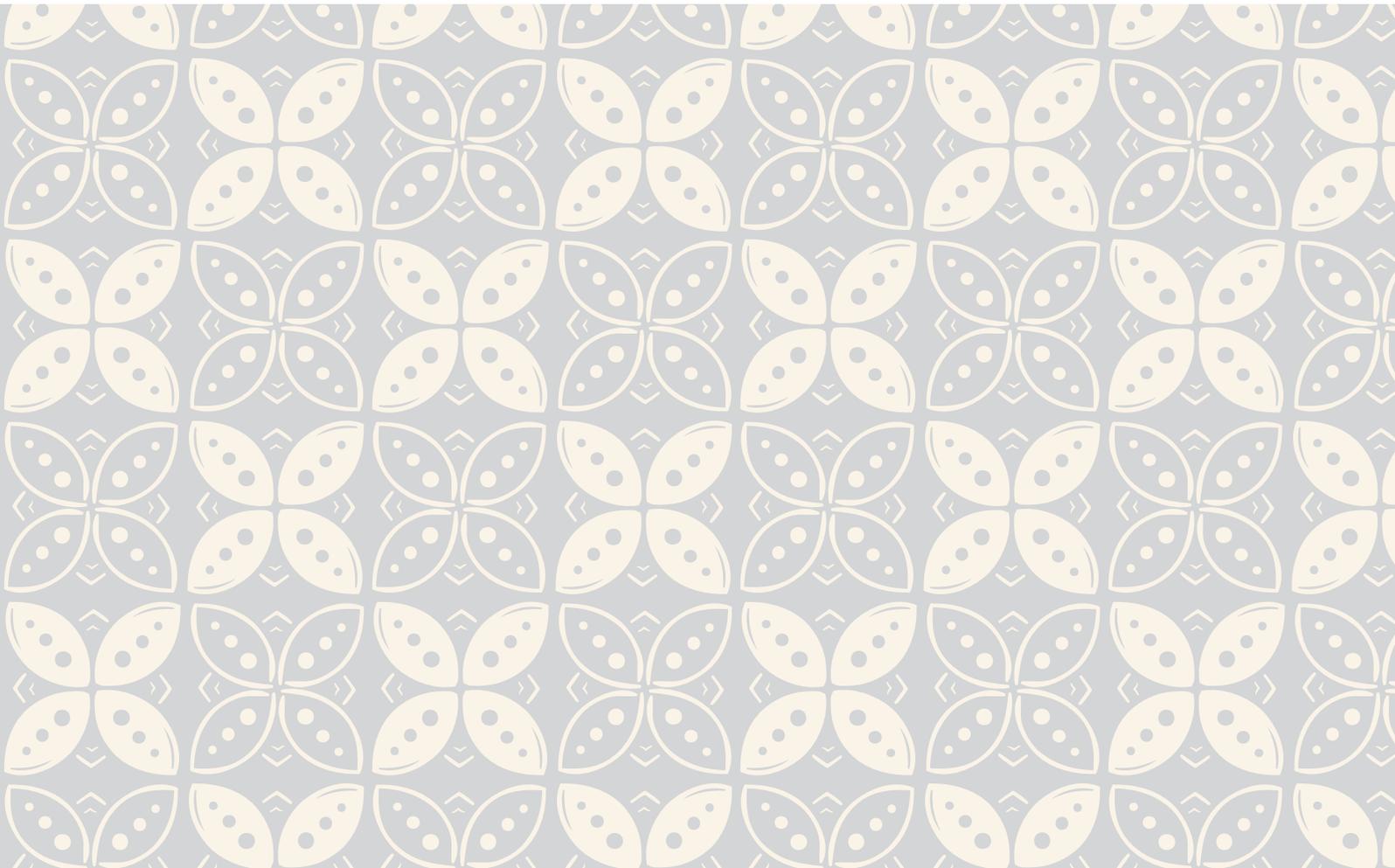
Sekretariat

Hilda Kurnia Ningsih, S.H.
Anie Pujie Lestari
Ahmadi
Siti Masitoh
Gadis Anggiani Marha, S.Sos.



REKOMENDASI PANITIA KERJA KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL

Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Tahun 2018 - 2019





DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Panja KER BKSAP DPR RI	9
Susunan Anggota Panja KER BKSAP DPR RI	11
Latar Belakang	
• Pembentukan Panja KER BKSAP	15
• Perkembangan Negosiasi <i>ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)</i>	19
Best Practices Panja KER BKSAP DPR RI Tahun 2018	
• Pengalaman beberapa Provinsi Indonesia	
- Provinsi Kepulauan Riau	31
• Best Practices Kerjasama Ekonomi	
- Bucharest, Rumania	42
- Vienna, Austria	48
Best Practices Panja KER BKSAP DPR RI Tahun 2019	
• Pengalaman beberapa Provinsi Indonesia	
- Provinsi Banten	54
- Provinsi Nusa Tenggara Barat	60
• Best Practices Kerjasama Ekonomi	
- Budapest, Hungaria	64
- Roma, Italia	70
Rekomendasi Panja KER BKSAP Tahun 2018 - 2019	77
Lampiran Laporan Kunjungan Kerja	87
Lampiran Kliping Media	207



KATA PENGANTAR

Ketua Panitia Kerja
Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP DPR RI /
Ketua Panja KER
Fraksi PDI Perjuangan

Integrasi ekonomi ASEAN di tahun 2015 sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi bersama membuka kesempatan yang lebih luas bagi negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi terutama dengan mitra-mitra dialog ASEAN. Visi pembentukan kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata serta terintegrasi penuh dengan ekonomi global memberikan kesempatan bagi negara anggota ASEAN untuk akselerasi dan intensifikasi kerjasama ekonomi dengan negara mitra baik melalui kerangka kawasan perdagangan bebas maupun kemitraan komprehensif. Indonesia termasuk salah satu ekonomi di kawasan yang tengah gencar berpartisipasi aktif dalam perjanjian-perjanjian perdagangan dan mengikatkan diri dengan ekonomi dunia. Di tengah kenyataan tersebut, Panja Kerja sama Ekonomi Regional (KER) hadir untuk memenuhi amanat konstituen agar pelaksanaan butir-butir perjanjian kerjasama perdagangan yang mengikat NKRI sesuai dengan koridor kepentingan nasional dan bermanfaat semaksimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat.

Di dua tahun terakhir masa bakti Panja ini telah menyepakati sejumlah agenda program yang akan mendukung visi Panja untuk mencermati daya saing ekonomi nasional di era perdagangan bebas. Performa ekonomi RI di tahun 2018 ditutup defisit kembar neraca perdagangan sebesar 2,05 miliar dollar Amerika Serikat (AS) di bulan November 2018 dan neraca transaksi berjalan senilai 8,8 miliar dolar AS di Kuartal III. Hal ini semakin memacu Panja untuk



mengintensifkan kegiatan semaksimal mungkin dan berkontribusi bagi penguatan diplomasi ekonomi yang menjadi salah satu fokus Pemri. Panja berperan pula dalam mengeksplorasi peluang-peluang kerjasama dan membidik akses ke pasar-pasar non tradisional Indonesia.

Industri manufaktur dan industri jasa mendapat porsi perhatian yang seimbang di tahun 2018-2019 ini. Panja telah berkunjung ke berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di dua bidang tersebut dan mendapati berbagai rekomendasi yang mendukung penguatan baik di sektor manufaktur maupun sektor jasa. Untuk industri manufaktur, sektor manufaktur Indonesia masih unggul di ASEAN. *Manufacturing Value Added (MVA)* Indonesia mampu mencapai kisaran 4,84 persen di atas rata-rata ASEAN yaitu 4,5 persen. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah saat ini yang berorientasi pada pendekatan rantai pasok industri nasional agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global. Namun, Panja mendapati masih terdapat tantangan dalam pengelolaan persaingan antar kawasan industri terutama untuk kawasan industri yang telah mengalami titik jenuh dari sisi upah minimum provinsi.

Untuk sektor jasa, perkembangan di dalam negeri juga cukup menggembirakan. Saat ini sektor jasa mendominasi 60 persen perekonomian nasional. Kunjungan Panja ke kawasan ekonomi khusus jasa pariwisata mendapati bahwa perbaikan dari sisi kualitas SDM menjadi satu hal yang sangat krusial. Penandatanganan *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)* di sela-sela pertemuan *ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat* ke-25 bulan April 2019 semakin memperkuat urgensi penguatan sektor jasa dalam negeri. Hal ini mengingat ATISA semakin memperkuat liberalisasi sektor jasa di ASEAN.

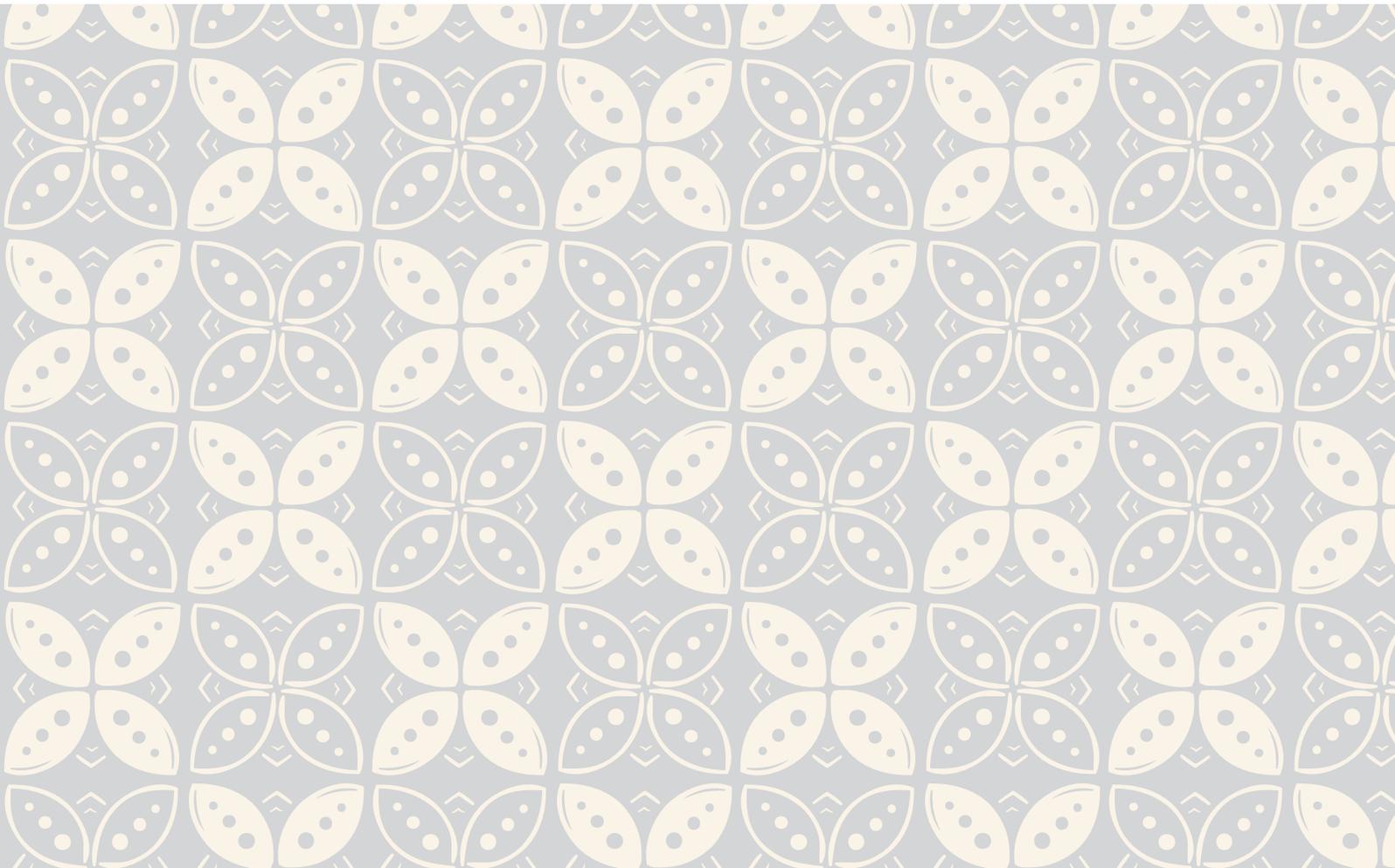
Demikian seutas pengantar singkat hasil rekomendasi yang didapat Panja pada dua tahun terakhir masa bakti DPR RI periode 2014-2019. Ikhtisar lengkap mengenai rekomendasi maupun kerja-kerja Panja tersaji lebih lengkap dalam buku ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Akhir kata, mewakili rekan-rekan anggota Panja KER, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan teknis dan keahlian yang diberikan Sekretariat Bagian Kerjasama Regional dan Tenaga Ahli BKSAP DPR RI bagi terlaksananya program kerja Panja.



SUSUNAN ANGGOTA PANJA

Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Surat Keputusan Pimpinan DPR RI No.: 26/PIMP/1/2019-2020





Juliari P. Batubara	Ketua Panja KER / Wakil Ketua BKSAP	F- PDI Perjuangan
Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si	Ketua BKSAP	F- P.Demokrat
Dave Akbarshah Fikarno, ME	Wakil Ketua BKSAP	F- P.Golkar
Dr. KH. Surahman Hidayat, MA	Wakil Ketua BKSAP	F- PKS
H. Achmad Fariat	Wakil Ketua BKSAP	F- PPP
Ir. Nazarudin Kiemas (Alm.)	Anggota Panja	F- PDI Perjuangan
Ono Surono	Anggota Panja	F- PDI Perjuangan
Mercy Christy Barends	Anggota Panja	F- PDI Perjuangan
Jalaludin Rakhmat	Anggota Panja	F- PDI Perjuangan
Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom	Anggota Panja	F- P.Golkar
H. Muhidin Mohammad Said, SE., MBA	Anggota Panja	F- P.Golkar
Dr. Jerry Sambuaga	Anggota Panja	F- P.Golkar
Ir. Dwita Ria Gunadi	Anggota Panja	F- P.Gerindra
Susi Marleny Bachsin, SE., MM	Anggota Panja	F- P.Gerindra

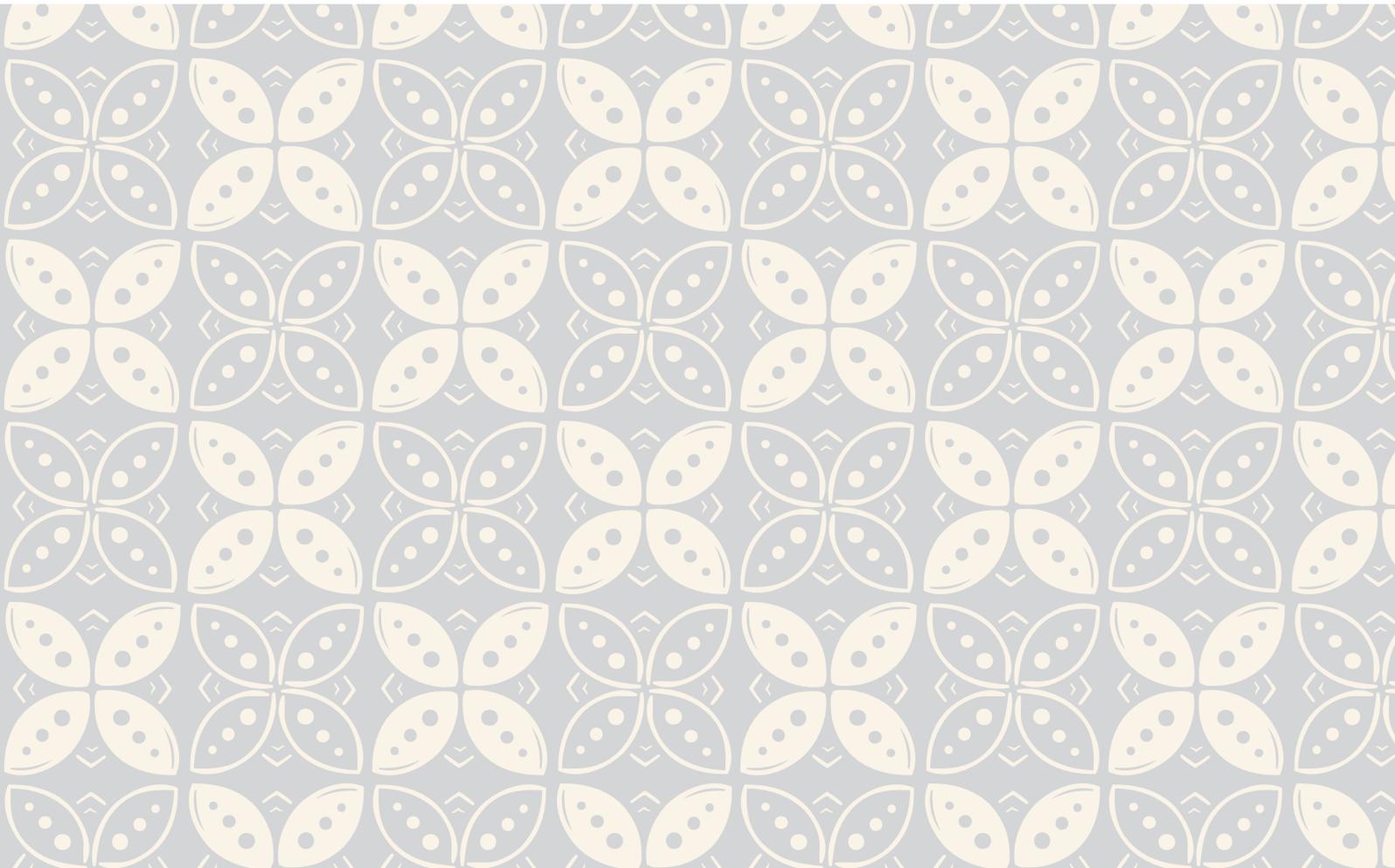


H. Nurzahedi, SE	Anggota Panja	F- P.Gerindra
Mohamad Hekal, MBA	Anggota Panja	F- P.Gerindra
Hj. Melani Leimena Suharli	Anggota Panja	F- P.Demokrat
KRMT. Roy Suryo Notodiprojo	Anggota Panja	F- P.Demokrat
H. Jon Erizal, SE., MBA	Anggota Panja	F- PAN
Bara K. Hasibuan, MA	Anggota Panja	F- PAN
Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si	Anggota Panja	F- PKB
H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag	Anggota Panja	F- PKB
H. Rofi` Munawar, Lc	Anggota Panja	F- PKS
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA	Anggota Panja	F- PKS
H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS	Anggota Panja	F- PPP
Prananda Surya Paloh	Anggota Panja	F- P.Nasdem
Zairini, S.IP	Anggota Panja	F- P.Hanura



PEMBENTUKAN PANITIA KERJA

Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia





Penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019. Upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI dilakukan antara lain melalui upaya fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Saat ini tengah dilakukan negosiasi 16 perjanjian dagang, 6 diantaranya diharapkan selesai dalam waktu dekat. Keenam perjanjian tersebut yakni *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, pengembangan Indonesia-Pakistan *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Indonesia-Chile Trade In Goods Agreement (TIGA)*, *Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA*, *ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (FTA)*, dan pengembangan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*.

Untuk itu, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai alat kelengkapan DPR RI yang memiliki jaringan kerja yang luas secara internasional, dapat berperang lebih aktif dalam upaya diplomasi ekonomi melalui Panitia Kerja. Dasar dari pembentukan Panitia Kerja ini adalah adanya sebuah kebutuhan untuk membangun dialog dan berbagi pengalaman dengan parlemen negara-negara lainnya dan mendukung misi diplomasi ekonomi Pemerintah RI.

Diharapkan dengan adanya Panja ini dapat memberikan rekomendasi pada bidang perdagangan terutama terkait kinerja perdagangan luar negeri dan pengembangan produk unggulan Indonesia, pariwisata, investasi dan kerja sama pembangunan agar nantinya partisipasi Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagu rakyat Indonesia.



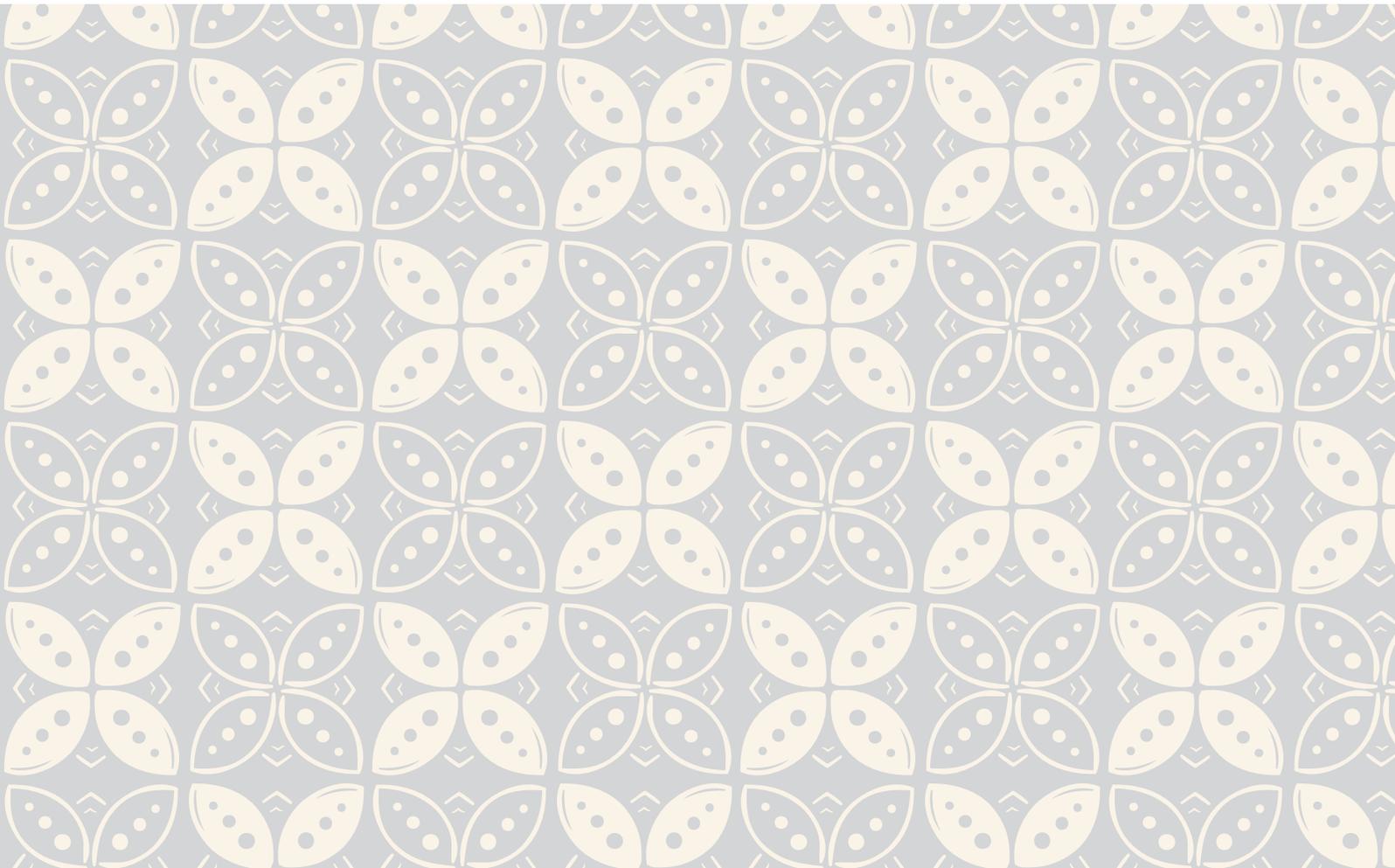
Pembentukan Panitia Kerja yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BKSAP memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud peran serta Parlemen dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI;
2. Sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu bagi Anggota Panitia Kerja dalam membuat legislasi/perundang-undangan dan melakukan pengawasan menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif;
3. Memberikan saran/rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Anggota Panitia Kerja yang bersifat lintas komisi dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasan-pembahasan di komisinya;
5. Menggalang kerjasama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, dsb.



PERKEMBANGAN NEGOSIASI ASEAN *FREE TRADE* *AGREEMENT (AFTA)*

Ringkasan Perkembangan terkini
Kerja Sama Ekonomi Regional dalam lingkup ASEAN
Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia





Terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015 menjadi batu pijakan akan agenda yang lebih besar yakni integrasi ekonomi regional di ASEAN sekaligus memperlebar sayap kerja sama ekonomi ASEAN dengan mitra ekonomi di luar ASEAN (baik ASEAN+1, ASEAN+3 hingga ASEAN+6 dan lainnya). Berangkat dari argumen tersebut, kerja sama ekonomi baik dalam konteks intra-ASEAN dan ASEAN dengan mitra ekonomi menjadi satu hal yang perlu mendapatkan pantauan reguler Kerja sama ekonomi dalam konteks ASEAN mencakup ragam banyak hal. ASEAN saat ini memiliki sejumlah upaya untuk memperluas kerja sama baik perdagangan dan jasa, baik yang berlangsung intra-ASEAN maupun dengan mitra ekonomi lainnya. ASEAN dengan penduduk lebih dari 622 juta jiwa dan pasar senilai lebih dari US\$ 2.6 triliun merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh di dunia.

Liberalisasi perdagangan di ASEAN dimulai sejak penandatanganan *ASEAN Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA)* tahun 1992. Namun, perjanjian ini diperluas menjadi *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* yang ditandatangani 2009 dan berlaku sejak Mei 2010 hingga sekarang. Dua tahun pascapenandatanganan CEPT-AFTA, *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* disahkan dan menjadi salah satu hal yang fundamental dalam integrasi ekonomi ASEAN.

Sementara dalam konteks memperluas daya jangkau kemitraan ekonomi, ASEAN mulai menjalin kerja sama mendorong liberalisasi perdagangan dengan negara mitra yang dimulai sejak tahun 2002 melalui *ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation and its annexes*. Hingga saat ini, ASEAN memiliki sedikitnya enam



perjanjian perdagangan bebas dengan enam mitra yakni Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Australia dan Selandia Baru. Selain itu, saat ini ASEAN juga tengah melakukan proses perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang merupakan *Mega Free Trade Area (FTA)* regional melibatkan negara anggota ASEAN dan 6 Negara Mitra FTA (Australia, Selandia Baru, RRT, Jepang, Korea Selatan dan India) sebagai upaya konsolidasi ASEAN+1FTAs yang telah terbangun sebelumnya.

A. Perkembangan intra-ASEAN

1. *Trade in Goods*

a. Liberalisasi Tarif

Sejak tanggal 1 Januari 2010, ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) telah menghapuskan bea masuk sebanyak 99,20% dari pos tarif yang diperdagangkan, sementara ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) menghapus bea masuk sebanyak 90,86% dari pos tarif yang diperdagangkan menjadi 0-5% pada tahun 2018.

Saat ini, ASEAN telah menghapus 98,64% dari total tarif tahun 2019 dengan bea masuk impor sebesar 0-5%, kecuali produk-produk yang masuk dalam kelompok



Highly Sensitive (HS) List dan *General Exceptions List (GEL)* tarifnya masih dipertahankan tidak diliberalisasi. Indonesia masih mempertahankan beras, gula dan minuman alkohol untuk tidak diliberalisasi tarifnya yaitu Beras (9 HS dengan tarif 25%), Gula (7 HS –Gula mentah tarif 5% & gula rafinasi 10%); Minuman Alkohol (GEL - tarif MFN).

b. Kebijakan Non-Tariff (*Non-Tariff Measures*)

Walaupun tarif bea masuk beberapa produk di ASEAN rata-rata telah 0 – 5 %, ternyata total perdagangan intra ASEAN sampai sekarang masih berkisar 25%, hal ini diduga karena anggota ASEAN meningkatkan penerapan kebijakan non tarif untuk melindungi produk dalam negerinya masing-masing. Untuk mencapai peningkatan total perdagangan intra ASEAN sebesar dua kali lipat, maka ASEAN telah menyiapkan beberapa hal, antara lain: penyiapan *ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicator (ASTFI)* dalam menghitung pengurangan *trade transaction cost* di ASEAN, menyetujui *Guidelines Non Tariff Measures* di ASEAN pada tahun 2018 sebagai panduan dalam membuat peraturan ekspor impor di masing-masing negara ASEAN sesuai dengan disiplin penetapan kebijakan non tarif dengan kesepakatan di ATIGA dan klasifikasi *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*. Saat ini ASEAN dalam proses implementasi *Guidelines Non Tariff Measures* di ASEAN yang akan dimonitor hasilnya oleh *ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC)*.

c. Fasilitas Perdagangan

ASEAN terus menerus melakukan perundingan untuk meningkatkan fasilitas perdagangan barang di ASEAN dengan mengaktifkan peran ATF-JCC serta bekerjasama dengan badan sektoral lainnya di ASEAN seperti *ASEAN Coordinating Committee on ATIGA (CCA)*, *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)* dan lainnya, untuk mencapai peningkatan total perdagangan intra ASEAN sebesar dua kali lipat dengan membentuk beberapa fasilitas perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di ASEAN seperti *ASEAN Trade Repository (ATR)* dan *ASEAN Solutions for Investment, Service and Trade (ASSIST)*. ATR dibentuk dari 10 *National Trade Repository (NTR)* yang berfungsi sebagai gerbang pusat informasi peraturan ekspor impor semua negara anggota ASEAN dalam satu portal yang mudah diakses pelaku usaha di ASEAN. Khusus Indonesia, update INTR dilakukan oleh Pengelola Portal Indonesia Nasional *Single Window*.

Sementara ASSIST merupakan bentuk fasilitas perdagangan terbaru di ASEAN berupa mekanisme pengaduan online yang bersifat B to G, dapat diakses oleh pelaku usaha di ASEAN melalui website <http://assist.asean.org>. untuk memberikan solusi bagi pelaku bisnis yang berlokasi di ASEAN yang menghadapi kendala/pertanyaan terkait ekspor/impor di ASEAN.

d. *ASEAN Single Windows (ASW)*

Sejak 1 Januari 2018 sampai 1 Juli 2019, beberapa negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam telah melakukan Pertukaran data Form D secara elektronik (*live operation e-Form D*) melalui sistem ASW, dimana dokumen yang dikirim mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Form D manual untuk mendapatkan tarif preferensi ATIGA. Filipina, Myanmar dan Laos diharapkan dapat mengimplementasikan *live operation e-Form D* melalui ASW sebelum tahun 2019 berakhir.



Selain *e-Form D* yang dikirim melalui sistem ASW, ASEAN juga dalam proses melakukan pertukaran dokumen lain/pembahasan seperti *ASEAN Customs Declaration Document (ACDD)* dan *Electronic Sertifikat Sanitary and Phyto-Sanitary (e-SPS)*.

e. *Self-Certification*

fasilitasi perdagangan lebih jauh melalui skema *Self Certification*/sertifikasi mandiri (penyiapan dokumen tarif preferensi skema ATIGA secara mandiri oleh eksportir, yang telah tersertifikasi oleh otoritas di negara-negara ASEAN), guna mendapatkan tarif preferensi ATIGA yang diyakini akan lebih mudah dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di ASEAN dalam melakukan ekspor di ASEAN. Saat ini, ASEAN dalam proses finalisasi dokumen pendukung persiapan implementasi *Self Certification* yang ditargetkan dilaksanakan pada bulan Maret 2020.

f. Standardisasi, Regulasi Teknis, dan Penilaian Kesesuaian

Salah satu contoh penerapan standarisasi yang diberlakukan oleh salah negara anggota ASEAN adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk impor ke Indonesia. SNI dianggap merupakan suatu instrumen yang berperan penting dalam menentukan mutu produk yang masuk ke Indonesia dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) dalam rangka memberikan kepastian perlindungan konsumen di Indonesia.

Saat ini, ASEAN dalam proses (i) melakukan proses harmonisasi standar sesuai standar internasional di sektor karet, kayu, otomotif, pangan olahan, elektronik dan perlengkapan listrik, serta obat tradisional dan suplemen kesehatan; (ii) mengembangkan/mengimplementasikan Sectoral MRA di sektor pangan olahan, elektronik dan perlengkapan listrik, farmasi, dan tahap finalisasi MRA untuk sektor otomotif dan *Building and Construction*, sehingga kedepan pengujian ulang di negara tujuan ekspor di ASEAN sudah tidak dibutuhkan lagi; dan (iii) mengembangkan harmonisasi regulasi teknis di sektor elektronik dan perlengkapan listrik dan kosmetik, sehingga ada keseragaman peraturan di ASEAN.

2. *Trade in Services*

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) mewajibkan Negara-negara Anggota untuk melakukan negosiasi mengenai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perdagangan di sektor jasa tertentu, dan outputnya harus ditetapkan dalam jadwal komitmen. Pascapenandatanganan AFAS tahun 1995 dibentuklah *Coordinating Committee on Services (CCS)* untuk mengelola liberalisasi perdagangan jasa.

Saat ini, terdapat beberapa working group yang berada dibawah CCS, yaitu: *ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners (AJCCM)*; *ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners (AJCCD)*; *ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN)*; *Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG)*; *ASEAN Architects Council (AAC)*; *ASEAN Architect Education Committee (AAEC)*; *ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACPECC)*; *Surveying Meeting*; *Logistic and Transport Services Sectoral Working Group (LTSSWG)*; *ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC)*;



Telecommunication and IT Sectoral Working Group (TISSWG); dan Business Services Sectoral Working Group (BSSWG).

Penyelesaian AFAS dilakukan melalui paket per paket dan saat ini telah berada dalam Paket 10 yang merupakan paket terakhir yang harus diselesaikan oleh negara anggota ASEAN. Pada AFAS Paket ke-10, Indonesia memberikan komitmen sebanyak 112 subsektor jasa, meningkat 15 subsektor dibandingkan dengan komitmen AFAS paket ke-9 yang telah mengkomitmenkan sebanyak 97 subsektor. Adapun 15 subsektor baru tersebut terdapat dalam Jasa Bisnis; Jasa Telekomunikasi; Jasa Distribusi; Jasa Lingkungan; Jasa Kesehatan dan Jasa Transportasi.

Komitmen yang diberikan Indonesia terkait dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) maupun peraturan domestik lainnya, dengan besaran kepemilikan modal asing antara 49% - 70%. Namun khusus untuk sektor tertentu seperti jasa pariwisata (hotel dan resort bintang 3, 4 dan 5) dan jasa rekreasi dan olahraga (*golf courses and other facilities* serta *tourist resort*), Indonesia membuka peluang investasi dengan kepemilikan modal asing sebesar 100% hanya untuk wilayah Indonesia bagian Timur; Kalimantan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur dengan tujuan menarik investasi untuk mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi destinasi pariwisata prioritas.

Diharapkan melalui paket-paket liberalisasi, perdagangan jasa di ASEAN menjadi lebih bebas melalui tingkat komitmen yang progresif dan peraturan yang lebih pasti di berbagai subsektor, seperti:

- Transportasi udara: penjualan dan pemasaran jasa transportasi udara, reservasi komputer, perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang, dan lain-lain.



- Jasa Bisnis: Jasa Teknologi informasi, akuntansi, audit, hukum, arsitektur, rekayasa, penelitian dan pengembangan, jasa terkait komputer, periklanan, dan lain-lain.
- Konstruksi: konstruksi bangunan komersial, rekayasa sipil, instalasi pekerjaan, penyewaan peralatan konstruksi, dan lain-lain.
- Distribusi: Jasa komisi keagenan, perdagangan grosir, perdagangan eceran, dan lain-lain.
- Pendidikan: pendidikan dewasa, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lain-lain.
- Lingkungan: pembuangan limbah, sanitasi, pengurangan kebisingan, jasa perlindungan alam dan lanskap, dan lain-lain.
- Jasa Keuangan: perbankan, asuransi, sekuritas dan lembaga perantara, penasihat keuangan, keuangan konsumen, dan lain-lain.
- Kesehatan: Jasa medis dan gigi, jasa rumah sakit, jasa keperawatan, ambulan, dan lain-lain.
- Telekomunikasi: Jasa telepon suara, jasa telepon seluler, jasa perusahaan jaringan, transmisi data dan pesan, e-mail, dan lain-lain.
- Transportasi: transportasi penumpang dan barang internasional, pemeliharaan dan perbaikan peralatan transportasi, penyimpanan dan pergudangan, pengiriman barang, dan lain-lain.
- Pariwisata: jasa hotel dan penginapan, penyajian makanan, operator tur, agen perjalanan, dan lain-lain.

Dengan selesainya putaran perundingan AFAS tidak membuat sektor jasa di ASEAN berhenti. Negara-negara ASEAN sepakat untuk melanjutkan liberalisasi lebih lanjut dari AFAS dengan menggabungkan seluruh komitmen AFAS yang ada pada berbagai sektor di dalam satu perjanjian yaitu *ASEAN Trade In Services Agreement (ATISA)*.



B. ASEAN + Mitra

1. ASEAN + 1 FTA

<p>ASEAN China FTA (ACFTA)</p>	<p>Pada tanggal 21 November 2015, telah ditandatangani <i>the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Agreements thereunder between the ASEAN and the People's Republic of China (ACFTA Upgrading Protocol)</i> yang mengubah ketentuan-ketentuan berikut guna lebih baik memfasilitasi perdagangan antara seluruh Pihak: Aturan Khusus Produk; aturan <i>de minimis</i>; <i>Operational Certification Procedures</i>; <i>Customs Procedures and Trade Facilitation</i>; Peningkatan sektor pada Perdagangan Jasa; Penguatan promosi investasi; dan Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi dan Teknis. Namun demikian, protokol ini baru diimplementasikan pada tanggal 1 Agustus 2019.</p> <p>Saat ini ASEAN dan RRT sedang membahas isu-isu implementasi dalam skema ACFTA, dan upaya untuk meningkatkan liberalisasi bidang barang dan kerja sama di isu-isu terkait perdagangan seperti e-commerce dan hambatan non tarif (Non Tariff Barriers/NTBs).</p>
<p>ASEAN Korea FTA (AKFTA)</p>	<p>Saat ini ASEAN dan Korea sedang membahas isu-isu implementasi dalam skema AKFTA, dan upaya untuk meningkatkan liberalisasi bidang barang dan kerja sama bidang ekonomi dan teknis</p>
<p>ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)</p>	<p>Pada 2019, setelah melalui 18 putaran perundingan, para Menteri Ekonomi ASEAN dan Jepang menandatangani <i>First Protocol To Amend The Agreement On Comprehensive Economic Partnership Among Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And Japan</i> (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, selanjutnya disebut Protokol Pertama Perubahan AJCEP) pada tahun secara ad-referendum pada tanggal 27 Februari 2019 di Tokyo, Jepang, tanggal 2 Maret 2019 di Siem Reap, Kamboja dan tanggal 24 April 2019 di Hanoi, Vietnam. Perundingan itu untuk memasukkan aspek Perdagangan jasa (termasuk di dalamnya <i>Movement of Natural Persons</i>, selanjutnya disebut MNP) dan investasi ke dalam Persetujuan AJCEP.</p> <p>Saat ini, seluruh Pihak sudah mulai melakukan proses pengesahannya masing-masing secara domestik.</p>



ASEAN India FTA (AIFTA) Ditahun 2018, Indonesia telah mensahkan AITISA (perdagangan jasa) melalui Perpres No. 109 Tahun 2018 pada tanggal 12 November 2018 (diundangkan pada 14 November 2018) dan telah menyampaikan notifikasi diselesaikannya ratifikasi Perjanjian ini kepada Para Pihak melalui ASEAN Secretariat pada tanggal 18 Desember 2018.

AIIA (investasi) ditandatangani pada tanggal 12 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang mencakup pilar proteksi, promosi, dan fasilitasi investasi. Indonesia juga telah mensahkan AIIA di tahun 2018 melalui Perpres No. 97 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 (diundangkan pada 18 Oktober 2018) dan telah dinotifikasikan pada 18 Februari 2019 kepada seluruh Pihak AIFTA melalui ASEAN Secretariat.

Saat ini, para Pihak sedang mempertimbangkan untuk melakukan reaktivasi review AITIGA (perdagangan barang), meski disadari bahwa pelaksanaan review baru dapat dilakukan tahun depan setelah perundingan RCEP selesai.

ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA)

Pada tanggal 1 Oktober 2015, para Pihak sepakat untuk implementasi *The First Protocol to Amend the AANZFTA* yang menyederhanakan ketentuan Rules of Origin. Terkait proses penyesuaian instrument hukum domestic, Indonesia baru memberlakukan Protokol ini secara efektif pada tanggal 1 Maret 2019.

Saat ini tengah dilakukan *General Review* untuk meng-upgrade AANZFTA. *Terms of Reference (TOR)*-nya telah disepakati pada tahun 2017, yang memuat elemen perjanjian yang disepakati bersama untuk ditingkatkan cakupan dan kualitas komitmennya, antara lain: 1) *Rules of Origin (ROO)*, 2) *Customs Procedures*, 3) *Trade in Services*, 4) *e-Commerce*, 5) *Investment*, 6) *Competition*, 7) *Government Procurement*, dan 7) *Trade and Sustainable Development*.

Pada Pertemuan *AANZFTA Joint Committee* bulan April/Mei 2019 di Melbourne, Australia, para Pihak telah membahas dan menyusun *work plan Upgrading AANZFTA* tersebut dan disepakati Round 1 Perundingan Upgrading AANZFTA akan dilaksanakan pada Pertemuan ke-12 AANZ-FJC bulan April/Mei 2020 di Selandia Baru.



ASEAN Hongkong, China
FTA (AHKFTA)

Modalitas AHKFTA untuk Perjanjian bidang Barang disepakati menghapus 85% dari total pos tarif nasional, dan Hong Kong akan meliberalisasi 100% dari total pos tarifnya.

Di bidang jasa, Hong Kong memberikan komitmen liberalisasi jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa keuangan, jasa pariwisata, dan jasa transportasi dengan FEP rata-rata mencapai 100% kecuali untuk public purpose. Sedangkan Indonesia hanya memberikan komitmen liberalisasi pada sektor jasa konstruksi, jasa keuangan non bank dan jasa pariwisata dengan FEP sebesar 49-51%.

Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian ratifikasi AHKFTA dan AHKIA yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2019.

2. ASEAN RCEP

RCEP diluncurkan oleh 16 Kepala Negara/Pemerintahan pada a bulan November Tahun 2012 dengan mengadopsi *"the Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP"*



Tujuan dari perundingan RCEP adalah menciptakan perjanjian regional yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan memberikan keuntungan baik bagi ASEAN maupun Negara Mitra FTAs ASEAN.

Beranggotakan 16 negara, kekuatan RCEP cukup signifikan di dunia dimana, total GDP negara-negara RCEP mewakili 31,60% GDP dunia dan mewakili 28,5% perdagangan global. Lima belas negara peserta RCEP mewakili 56,2% ekspor Indonesia ke dunia dan 70% impor Indonesia dari dunia. RCEP juga merupakan 48,21% sumber FDI bagi Indonesia.

Perundingan ini mulai dirundingkan pada tahun 2013. Cakupan dari bidang yang dirundingkan antara lain: (i) Perdagangan Barang; (ii) *Rules of Origin*; (iii) Standard dan Kesesuaian (STRACAP); (iv) Prosedur Pabean dan Fasilitasi Perdagangan; (v) SPS; (vi) Perdagangan Jasa; (vii) Jasa Keuangan; (viii) Jasa Telekomunikasi; (ix) Investasi; (x) Kerja Sama Ekonomi dan Teknis; (xi) UKM; (xii) Kekayaan Intelektual; (xiii) Kompetisi; (xiv) Penyelesaian Sengketa; (xv) e-Commerce; (xvi) *Government Procurement*; (xvii) *Movement of Natural Person*; dan (xviii) *Trade Remedies*.

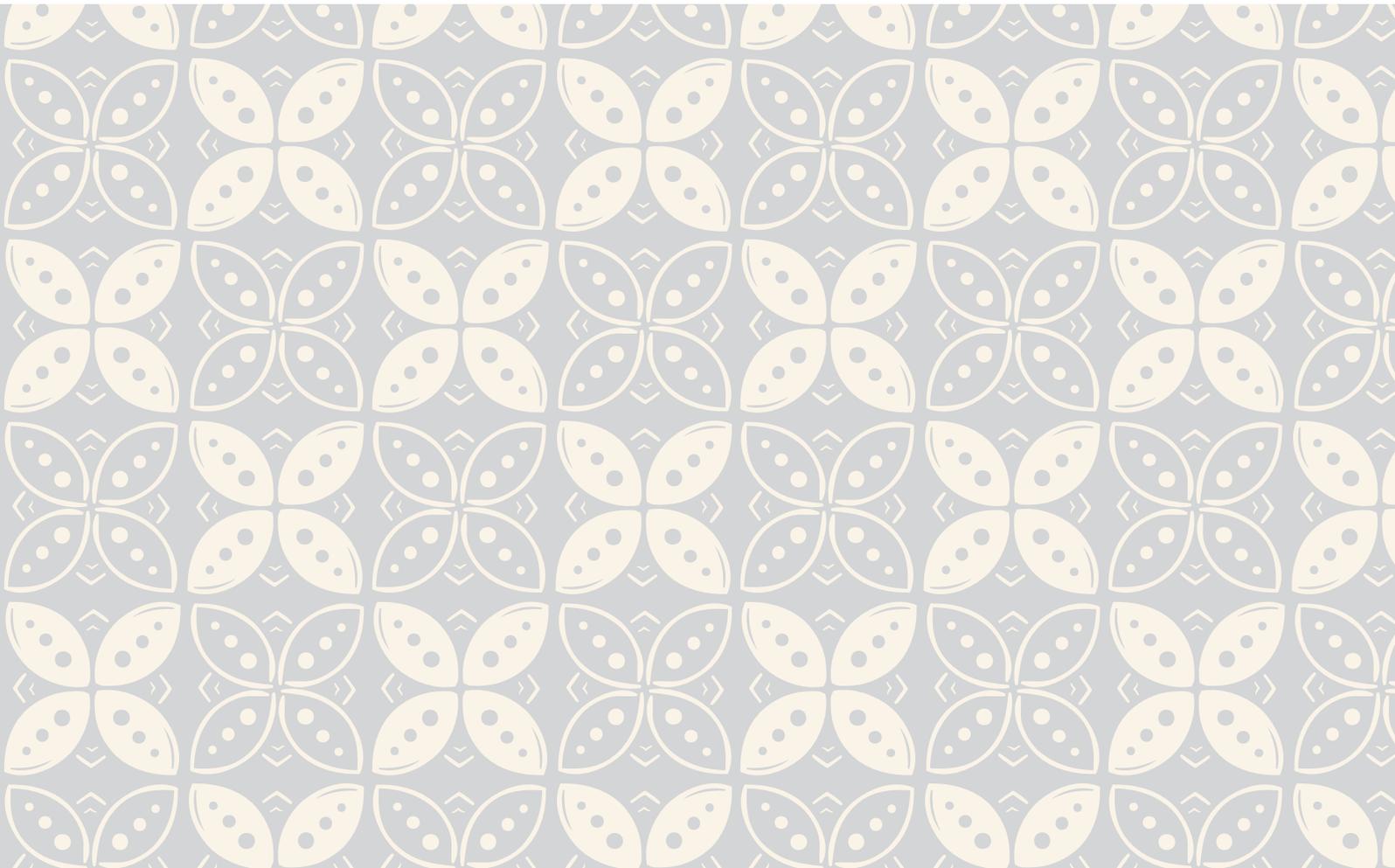
Tahun ini merupakan tahun ketujuh perundingan RCEP digulirkan. Saat ini telah diselesaikan tujuh bab dan 3 lampiran, meliputi, bab UKM; Kerja Sama Ekonomi dan Teknis; Standard dan Kesesuaian (STRACAP); Prosedur Pabean dan Fasilitasi Perdagangan; SPS; *Government Procurement*; *Institutional Provision*; Jasa Telekomunikasi, Jasa Keuangan; Jasa Profesi.

Penyelesaian substansial perundingan RCEP ditargetkan akan diumumkan pada KTT ASEAN ke-3 di Bulan November 2019 di Thailand.



BEST PRACTICES TAHUN 2018

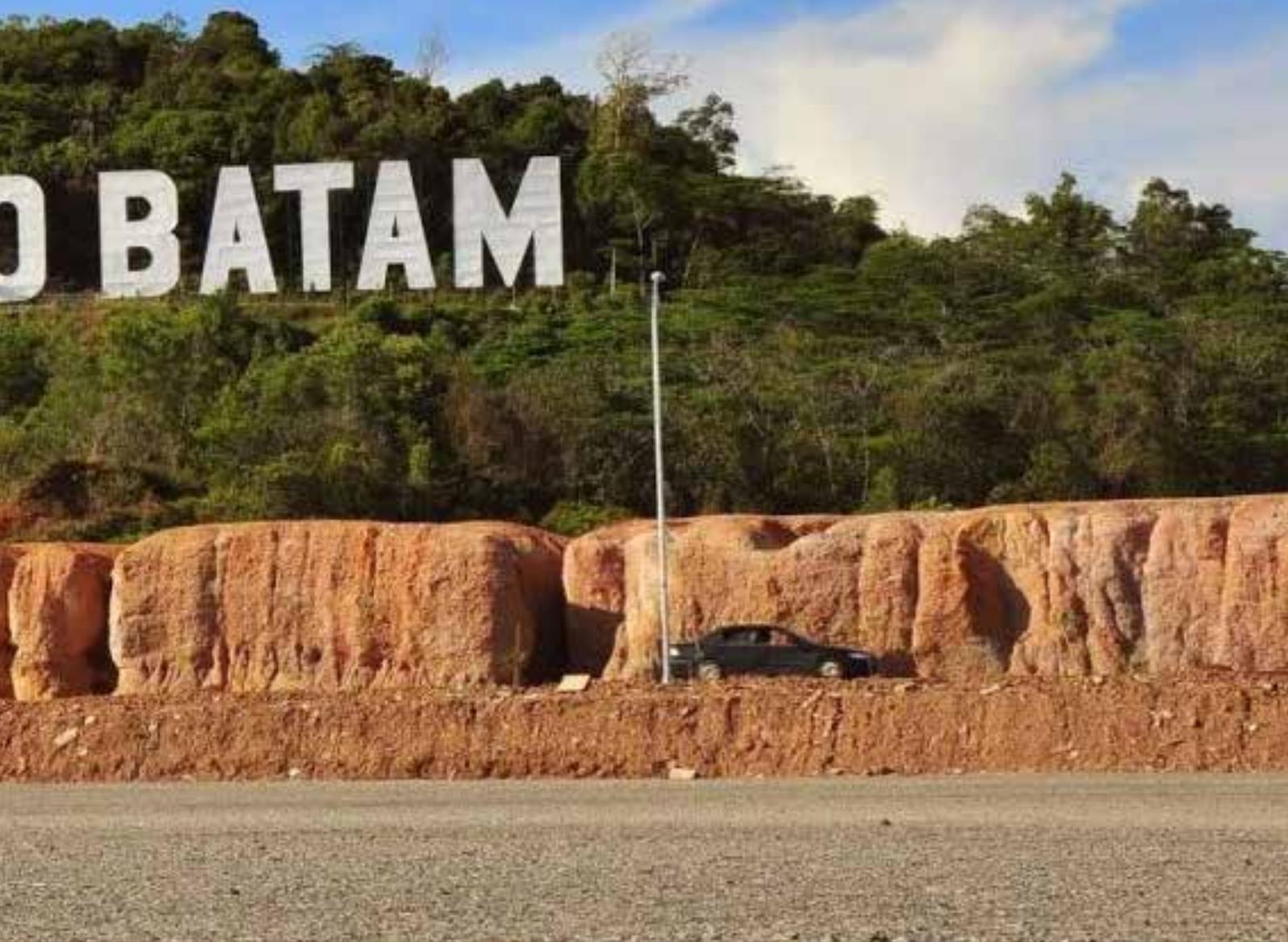
Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia





PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Batam Sebagai Pusat Ekonomi Digital dan
Pentingnya Peningkatan Konektivitas Untuk Mendongkrak
Daya Saing di Provinsi Kepulauan Riau



Sebagai kota dengan letak yang strategis dan salah satu daerah terdepan Indonesia, Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota Batam juga memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Tingkat pertumbuhan kota Batam merupakan salah satu yang terpesat di Indonesia. Sejak dibangun pada tahun 1970-an, pertumbuhan penduduk kota Batam telah bertumbuh dari sekitar 6.000 hingga 158 kali lipat dalam waktu 40 tahun. Selain pertumbuhan penduduknya yang pesat, Batam juga merupakan salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perubahan status Batam dari *Free Trade Zone (FTZ)* menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diharapkan untuk meningkatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Batam sehingga mampu menjadi salah satu lokomotif ekonomi Indonesia.

Batam juga merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari skema kerja sama *Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle (IMSGT)* yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara ketiga negara dan membuat sub-kawasan ini menjadi lebih menarik bagi investor regional dan internasional. Dengan modal posisi yang strategis dan potensi ekonomi yang dimiliki, Batam dipilih oleh pemerintahan Presiden Joko



Widodo sebagai pusat pengembangan ekonomi digital. Rencana pemerintah ini diawali melalui pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan tersebut kedua negara bersepakat untuk memposisikan Batam sebagai kota yang penting dalam hubungan kerja sama ekonomi kedua negara, untuk kemudian dikembangkan menjadi pusat ekonomi digital untuk kawasan Asia Tenggara.

Pengembangan dan pembangunan Batam sebagai pusat ekonomi digital tidak hanya diarahkan hanya untuk perusahaan rintisan digital baru, tetapi juga untuk industri-industri yang nantinya akan didigitalisasi agar dapat menjadi lebih kompetitif dan efisien di era perekonomian global yang bergerak menuju digitalisasi. Disamping itu penentuan Batam sebagai pusat ekonomi digital juga dalam rangka meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia yang pada akhirnya bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi bukti upaya strategis berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan era revolusi industri 4.0.

Salah satu realisasi dari pengembangan Batam sebagai pusat ekonomi digital adalah melalui pembangunan Nongsa Digital Park (NDP). Dengan luas 100 hektar, pembangunan NDP merupakan proyek komersial berskala besar pertama yang dilaksanakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. NDP merupakan kerjasama antara Perusahaan Media dan Kreatif yang berbasis di Singapura, Infinite Studio yang mengusulkan ide dibangunnya NDP, dengan Induk Perusahaannya yaitu Citramas Group yang akan bertanggung jawab akan pengembangan



NDP. Ini juga menjadi proyek pertama bagi Indonesia dan Singapura, melalui sektor swasta, untuk merealisasikan Batam sebagai pusat pengembangan ekonomi digital.

Melalui pengembangan Batam sebagai pusat ekonomi digital, Indonesia menargetkan untuk menciptakan 1000 perusahaan rintisan digital baru pada tahun 2020 melalui peluncuran Nongsa Digital Park dengan total nilai sebesar USD 10 miliar. Ini juga akan menjadi solusi terbaik bagi kedua negara, karena NDP mengizinkan Singapura untuk memperluas sektor informasi dan komunikasi serta teknologinya. Terdapat potensi investasi bernilai lebih dari USD 500 juta yang akan diinvestasikan di NDP. Ini karena NDP dirancang untuk menjadi taman digital terpadu yang menyediakan tempat bagi bisnis digital untuk berkembang, sekaligus merupakan lokasi yang ideal untuk dijadikan pengembangan pusat data. Saat ini NDP telah terintegrasi dengan kawasan wisata Nongsa yang merupakan kawasan wisata terpadu seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Village dan Lapangan Golf. Kerja sama digital ini tentu akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Singapura. Bukan hanya melalui potensi investasi, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui transfer teknologi dan inovasi yang tercipta melalui kerja sama ini.

Kunjungan Panja KER ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam pada tahun 2018, dimaksudkan untuk memastikan bahwa peran pengawasan atas kerja sama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta

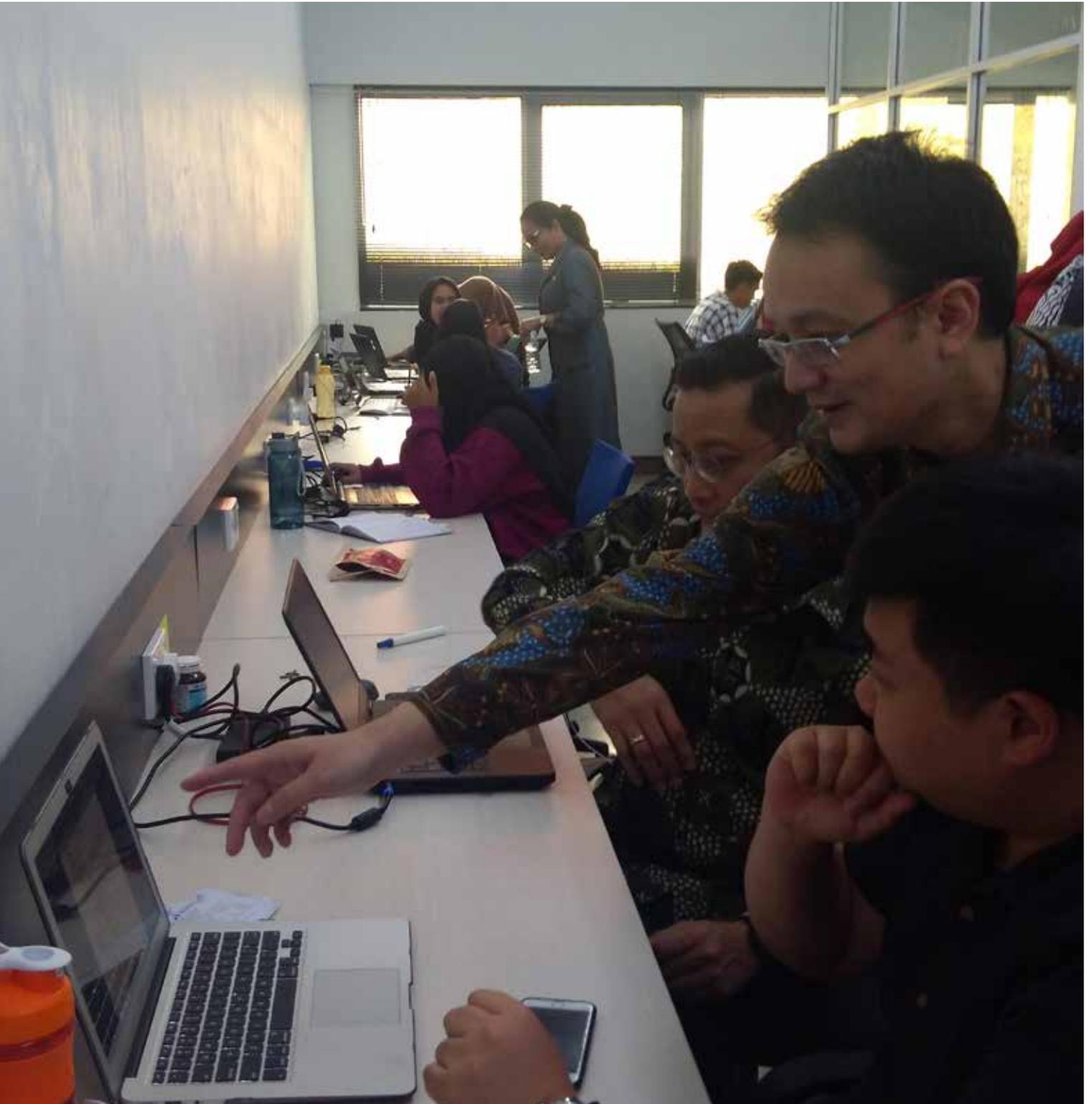


memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pada kunjungan tersebut delegasi Panja KER berkesempatan untuk meninjau langsung NDP, dimana saat ini telah ada tiga dari sembilan bangunan yang direncanakan akan dibangun. Bangunan yang telah ada, dua diantaranya adalah studio animasi dan studio film, telah menyerap kurang lebih 1500 tenaga kerja yang rata-rata adalah anak muda. Rencana pengembangan lainnya seperti jalur untuk sepeda listrik yang ramah lingkungan, toko makanan dan minuman serta toko ritel diprediksi akan menciptakan suasana kerja dan kehidupan yang optimal bagi pengusaha digital, dan juga para pekerja.

Beberapa rekomendasi dari Panja KER mengenai pengembangan Batam sebagai pusat ekonomi digital:

1. Pemerintah agar dapat lebih intensif dalam mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Batam, khususnya NDP di kawasan Asia Tenggara. Promosi yang lebih intensif dapat mempercepat tercapainya target investasi USD 500 Juta di bidang industri digital dan start up kreatif, yang diharapkan mampu menyerap kesempatan kerja baru bagi 10.000 pekerja.
2. Memanfaatkan NDP sebagai “jembatan digital” bagi kerjasama bilateral dengan sentra ekonomi digital yang terdapat di Indonesia.
3. Mendorong kemajuan industri digital di Batam sehingga sektor ini nantinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan negara, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di masa yang akan datang.

Keberadaan Nongsa Digital Park ini menegaskan bahwa sebagai daerah terdepan, Batam memiliki posisi strategis untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pembangunan di daerah terdepan, melalui kerjasama ekonomi dengan negara tetangga seperti Singapura. Kerja sama RI-Singapura ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi implementasi konsep KEK.





Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km². Dimana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang di rangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Secara geografis, sebagai provinsi terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang strategis karena terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura. Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan pintu masuk utama ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi geografisnya yang strategis yakni berada di Selat Malaka, dimana Selat Malaka adalah jalur perdagangan laut utama yang menghubungkan kawasan Asia dan Australia, menjadikan kegiatan pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau sebagai salah satu pelabuhan dengan kegiatan tersibuk di Indonesia. Sebagai provinsi terluar, Kepulauan Riau juga ditunjang dengan adanya kota Batam yang memiliki potensi yang sangat baik dalam hal peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung meningkatnya nilai perdagangan luar negeri, khususnya dengan



kawasan lain. Dalam hal ini dengan Uni Eropa. Sektor perdagangan yang didominasi oleh perdagangan luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Dalam bidang perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang cukup tinggi dalam hal Produksi Perikanan Budidaya Laut yang telah mencapai 77.746,10 Ton, serta Produksi Perikanan Tangkap yang telah mencapai 303.411.28 Ribu Ton. Sementara itu Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan berkat naiknya pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Provinsi ini.

Namun demikian dengan posisi yang strategis dan potensi ekonomi yang luar biasa, Provinsi Kepulauan Riau masih harus meningkatkan daya saingnya terutama dalam rangka mendukung peningkatan posisi strategis Batam sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi di tingkat sub-regional. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021, berencana untuk melakukan peningkatan konektivitas melalui sejumlah proyek pembangunan infrastruktur guna mendukung daya saing yang lebih baik. Misi dari RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata untuk meningkatkan keterhubungan (konektivitas) antar kabupaten/kota;



2. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;
3. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
4. Serta meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Dalam misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tersebut, terdapat beberapa poin yang berkaitan erat dengan isu-isu yang menjadi perhatian Panja KER, terutama mengenai peningkatan daya saing daerah, dan perlunya peningkatan konektivitas dalam rangka mendukung Kerjasama Ekonomi Regional. Konektivitas Nasional Indonesia dapat dikatakan merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Keterhubungan bisa dibangun dengan mewujudkan konektivitas fisik seperti; konektivitas udara melalui pembangunan bandara, konektivitas maritim melalui pembangunan pelabuhan, konektivitas infrastruktur sebagai penghubung antara pelabuhan, bandara dengan pusat-pusat perekonomian untuk mempermudah perpindahan barang dan jasa. Peningkatan konektivitas juga bisa dilakukan melalui pembukaan sejumlah jalur penerbangan dan destinasi wisata dari mancanegara ke daerah tujuan, misalnya Batam. Peningkatan konektivitas diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui nilai perdagangan yang meningkat karena dan jumlah wisatawan yang bertambah karena dibukanya rute-rute baru.

Peningkatan konektivitas ini juga merupakan hal yang menjadi fokus dari sejumlah kerjasama regional, baik antara Indonesia dengan kawasan lain, misalnya Eropa, ataupun dalam kerangka kerja sama IMS-GT. Jika merujuk pada hasil kunjungan Panja KER ke Rumania dan Austria, prospek-prospek kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dari kunjungan ke kedua negara tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan konektivitas. Misalnya dalam hal pengembangan pelabuhan untuk menjadi pintu masuk bagi aktifitas perdagangan antar kawasan yang menjadi bahasan di Rumania, dan potensi pengembangan ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh Indonesia melalui dibangunnya Nongsa Digital Park berpeluang untuk bisa dihubungkan lebih lanjut dengan keinginan Rumania untuk menjadi IT Hub di Eropa.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa program prioritas yang terkait dengan peningkatan konektivitas, utamanya melalui pembangunan infrastruktur dan bidang perhubungan. Kedua bidang tersebut merupakan komponen utama yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan konektivitas. Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan menggunakan dua strategi pendekatan:

1. Mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah BBKT (Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang), agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera khususnya dalam jasa dan perdagangan, industri dan pariwisata, serta;
2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah NAL (Natuna, Anambas, Lingga) sesuai dengan potensi yang dominan di wilayah tersebut seperti perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata dan migas.

Beberapa Usulan Proyek Strategis di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah khususnya dalam hal ekonomi, antara lain:

1. Pembangunan Jembatan Batam – Bintan
2. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang



4. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam
5. Pengembangan pelabuhan Batu Ampar
6. Pengembangan dan Modernisasi Sarana Bandara Hang Nadim
7. Pembangunan Batam Light Rapid Transit (LRT)

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam realisasi dan keberlangsungan Usulan Proyek Strategis di Kepulauan Riau ini meliputi; belum ditetapkannya skema pembangunan dan pengelolaan, perijinan dan penentuan status lokasi proyek yang belum selesai (misalnya perubahan status lokasi dari kawasan hutan menjadi kawasan industri). Disamping itu Usulan Proyek Strategis ini juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui ditetapkannya usulan menjadi Proyek Strategis Nasional serta adanya dukungan dalam bentuk penyesuaian aturan untuk realisasi skema pembiayaan proyek melalui joint venture antara investor asing, swasta dan lokal. Oleh karena itulah Kunjungan Panja KER ke Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat bermanfaat sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Pusat.

Salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang berkaitan erat dengan konektivitas adalah Pariwisata. Jika potensi daerah lain yang berasal dari hasil alam seperti kelapa sawit bisa sewaktu-waktu mengalami kemunduran, maka pariwisata bisa dikatakan bisa lebih lama bertahan asalkan dikelola dan dikembangkan dengan baik. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari tiga daerah penyumbang devisa terbesar dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, beberapa Usulan Proyek Strategis seperti pembangunan jembatan Batam – Bintan serta Pengembangan dan Modernisasi Bandara Internasional Hang Nadim juga berkaitan erat dengan pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau.



RUMANIA BUCHAREST

Rumania dan Peluang Peningkatan Kerjasama Perdagangan
di tengah Perlembatan Ekonomi Dunia



Pertumbuhan ekonomi dunia pada kurun waktu tiga tahun terakhir diwarnai pelambatan dan hanya bergerak di rentang 3-3,1%. Kinerja ekspor RI pun mengalami tren penurunan sebesar -6.59 selama periode 2011-2015. Menyiasati pelambatan ekonomi dunia dan sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekspor, penguatan diplomasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi salah satu program prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam Renstra Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan 2014-2019. Diplomasi ekonomi diterjemahkan antara lain dengan memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub perdagangan internasional.

Rumania merupakan salah satu pasar prospektif bagi produk ekspor Indonesia dan Rumania sangat mendorong penyelesaian perundingan Indonesia – EU CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Dengan adanya Indonesia – EU CEPA, kebijakan perdagangan Rumania dengan Indonesia akan terintegrasi dengan kebijakan di tingkat supranasional yaitu Uni Eropa. Pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait di Bucharest membantu Panja KER dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki peluang peningkatan kerjasama.



Sektor utama yang mendapatkan perhatian khusus adalah kerjasama pelabuhan. Pelabuhan Constanta yang terletak di tepi laut hitam memiliki keunggulan letak geografis yang dapat dimanfaatkan sebagai hub logistik untuk memperluas penetrasi pasar ekspor Indonesia. Saat ini Rumania tengah mengembangkan kualitas pelayanan dan infrastruktur pelabuhan Constanta agar sejajar dengan pelabuhan Rotterdam yang saat ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tertua di dunia serta umum digunakan sebagai pintu masuk ekspor negara-negara ASEAN ke Uni Eropa. Dalam hal ini, Rumania menyambut baik pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memandang posisi strategis Indonesia sebagai negara utama di kawasan Asia Tenggara dapat membantu ekspansi kerja sama perdagangan Rumania dengan negara-negara anggota ASEAN.

Dalam bidang komoditas, Rumania melihat prospek untuk peningkatan volume perdagangan CPO dan Kopi. Terkait CPO, Rumania menyambut baik komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup terutama dalam industri kelapa sawit. Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk membenahi industri kelapa sawit. DPR RI saat ini tengah membahas RUU Perkelapasawitan sebagai payung hukum pembenahan industri ini dari hulu hingga ke hilir, DPR RI juga mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat standarisasi *Crude Palm Oil (CPO)* melalui penguatan standar *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* yang telah mencakup aspek legalitas, tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang berlaku secara universal. Langkah korektif secara berkesinambungan terus dilakukan Indonesia terutama melalui moratorium perluasan lahan untuk kelapa sawit, pembenahan skema kolaborasi



antara pemerintah dan swasta, restorasi lahan gambut dan praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Upaya peningkatan kerjasama perdagangan didukung pula oleh infrastruktur kelembagaan kedua negara. Saat ini Kerja sama antara Kadin Indonesia dan Kadin Rumania telah terjalin dengan baik. Hal ini ditandai salah satunya dengan penandatanganan MoU antara KADIN Rumania dan KADIN Indonesia di sela-sela kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Rumania, Lazar Comanescu, ke Indonesia pada tahun 2016. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menlu Rumania dan Wamenlu RI, A.M. Fachir. Penandatanganan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antar pengusaha kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi dan promosi dagang serta investasi. Dalam kesempatan penandatanganan MoU tersebut, Rumania pun telah menyampaikan kesiapan untuk menjadi pintu masuk bagi Indonesia ke kawasan Eropa Timur. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pembentukan seksi khusus di Kamar Dagang dan Industri Rumania untuk meningkatkan permasalahan perdagangan dan perindustrian antar Rumania dan Indonesia.

Rumania saat ini tengah berambisi pula untuk mengembangkan bidang informasi dan teknologi. Hal ini didorong oleh visi untuk menjadikan Rumania sebagai hub teknologi informasi kawasan Eropa. SIVECO Rumania merupakan satu-satunya perusahaan perangkat lunak Rumania yang menyediakan layanan teknologi informasi bagi *European Commission*. Indonesia tentunya dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peluang kerja sama teknologi informasi sejalan dengan semakin mengemukanya trend penerimaan devisa



negara dari sektor industri kreatif dan e-commerce. Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang didominasi oleh teknologi automasi dan pertukaran data melalui program Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, peningkatan kemampuan dalam bidang IT dapat membantu Indonesia untuk mengkapitalisasi potensi kreatif generasi muda seiring dengan bonus demografi di tahun 2030.







AUSTRIA VIENNA

Austria memetik manfaat dari fokus R&D yakni ekonomi menguat dan swasta semakin inovatif



Austria merupakan negara ekonomi pasar yang berkembang dengan baik. Ia memiliki tenaga kerja yang terampil, standar kehidupan yang tinggi dan sangat terkait dengan entitas ekonomi Uni Eropa lainnya, terutama dengan Jerman. Perekonomiannya memiliki sektor jasa yang besar, sektor industri yang relatif sehat, dan sektor pertanian kecil namun sangat maju. Saat ini GDP Austria 49.200 dollar Amerika berada di peringkat ke 32 dunia. Penyumbang terbesar GDP Austria berasal dari sektor jasa (70,5%), industri 28,2% dan agrikultur 1,2%.

Austria merupakan salah satu negara terdepan dalam riset dan inovasi. OECD dalam laporan spesifik terkait Austria dalam hal kajian kebijakan inovasinya (2018), mengungkapkan bahwa negara tersebut berkembang signifikan dalam hal sains, teknologi dan inovasi. Investasi dalam riset dan pengembangan (*research and development /R&D*) meningkat luar biasa sejak tahun 1990an. Target EU terkait dana R&D yakni 3% dari GDP terpenuhi pada 2014. Pada 2016, mencapai 3.09%, enam tertinggi antarnegara OECD dan kedua tertinggi di UE28. Proyeksi R&D pada 2018 mencapai 3.19% dan kemungkinan akan dapat memenuhi target ambisius R&D 3.76% di 2020.

Dalam konteks tersebut, Austria memfokuskan R&D-nya salah satunya dalam bidang energi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam bidang energi terbarukan misalnya,



Austria merupakan sebagai salah satu pemimpin pasar dalam hydroelectricity. Potensi energi berdasarkan *World Energy Resources 2016* yang diterbitkan *World Energy Council*, mencapai 150 TWh/tahun. Yang potential diberdayakan mencapai 75 TWh/tahun dengan 75% diantaranya dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Saat ini kapasitas total terpasang mencapai 13.200 MW; dengan total generasi mencapai 37 TWh.

Kerja sama di bidang energi dan pembangunan berkelanjutan itulah yang terus menerus ditawarkan Austria kepada Indonesia. Menurut catatan, Setidaknya dua *Memorandum of Understanding (MoU)* terjalin sejak 2014 yakni dalam bidang kerja sama pembangkit tenaga listrik dan kerja sama transportasi. Terkait hydropower, Austria membangun dua proyek percontohan hidrometrik di Indonesia, salah satunya adalah di Dam Perjaya, Palembang.

Pada pertemuan dengan Delegasi BKSAP pada 2017, Parlemen Austria menerangkan bahwa saat ini gerakan lingkungan memang menjadi sentral isu di kawasan Eropa. Dan pada konteks itulah, Austria menyambut baik kerja sama di bidang lingkungan, baik pemetaan karbon dan teknologi energi terbarukan. Bahkan, Austria melalui swasta telah berhasil mengembangkan sistem pendingin dengan memanfaatkan energi panas matahari.

Sebagai bentuk kesuksesan inovasi, sektor swasta Austria sangatlah maju, termasuk dalam hal penyediaan mobilitas publik seperti transportasi rel. Austria menjadi basis markas *Siemens AG Mobility Division* yang secara kualitas terbukti di Eropa maupun benua lainnya menyediakan transportasi berbasis rel. Siemens memaparkan sejumlah proyek yang saat ini





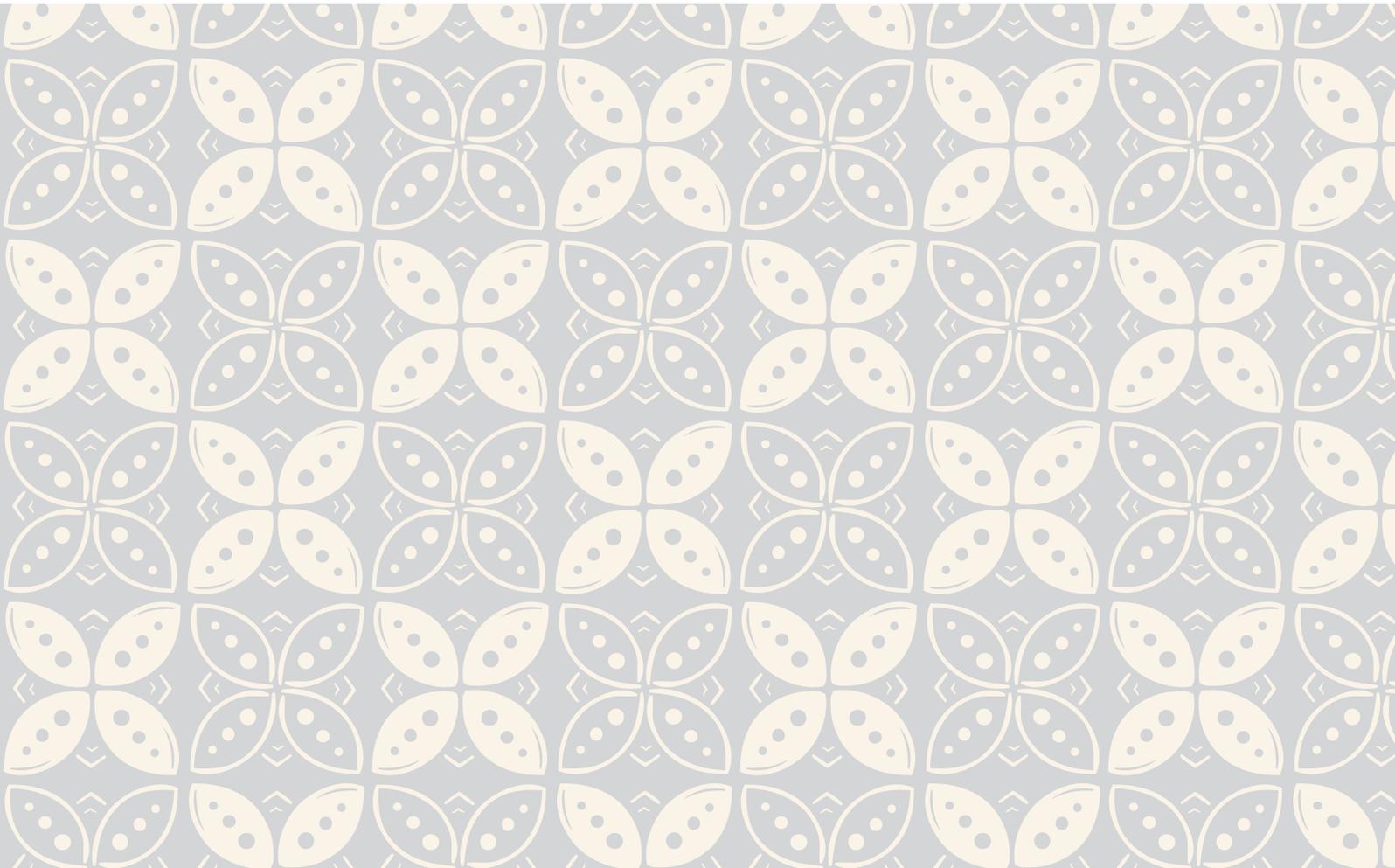
digarap termasuk projek besar di Amerika Serikat yakni untuk penyediaan 152 kendaraan rel ringan (*light rail vehicles*) berjenis S-70 yang melayani Seattle dan *Area Central Puget Sound*. Di Asia, Siemens Mobility Division terlibat dalam penyediaan gerbong untuk kereta Metro Kuala Lumpur, Malaysia dan juga di Thailand. Rata-rata tingkat keawetan produk kereta Siemens mencapai 30 tahun. Siemens berkomitmen pula untuk memasuki pasar mobilitas Indonesia sedianya terbuka kesempatan untuk berkompetisi secara kualitas.





BEST PRACTICES TAHUN 2019

Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia





PROVINSI BANTEN

Banten dan tantangan dalam mengelola koordinasi Pemerintah Pusat dengan Daerah serta persaingan antar Kawasan Industri



Industri manufaktur masih menjadi salah satu unggulan Indonesia. Kementerian Perindustrian mencatat sektor manufaktur yang kinerjanya di atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional antara lain industri alat angkut yang tumbuh sebesar (11,3 persen), industri pakaian jadi (10,9 persen) industri logam dasar (9,94 persen), serta industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (7,36 persen). Oleh karena itu di tahun 2019 ini Pemerintah RI masih tetap berfokus pada mendorong pengembangan sektor manufaktur terutama dalam menghadapi persaingan yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan. Di tataran ASEAN, sektor manufaktur Indonesia pun masih unggul. *Manufacturing Value Added (MVA)* Indonesia mampu mencapai kisaran 4,84 persen di atas rata – rata ASEAN yaitu 4,5 persen. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah saat ini yang berorientasi pada pendekatan rantai pasok industri nasional agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global.

Memasuki tahun 2018, tatanan perdagangan dunia menghadapi tantangan kebijakan normalisasi perdagangan yang diterapkan Pemerintah Amerika Serikat untuk mereduksi defisit neraca perdagangan. Kebijakan – kebijakan tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip – prinsip perdagangan bebas yang selama ini berupaya untuk mengeliminasi hambatan perdagangan dan menjauhkan diri dari proteksionisme. Pengenaan tarif impor bagi beberapa produk manufaktur termasuk baja telah memantik perang dagang antara Amerika



Serikat dengan beberapa kekuatan ekonomi dunia termasuk Cina, Uni Eropa, Meksiko dan Kanada. Penerapan tarif dan bea masuk tentunya akan berdampak bagi daya saing produk – produk Indonesia yang secara langsung memasuki pasar Amerika Serikat maupun secara tidak langsung bagi industri – industri yang menjadi bagian dari rantai pasok global.

Kunjungan Panja KER ke Banten mendapati bahwa selain mempersiapkan industri manufaktur akan kemungkinan guncangan yang ditimbulkan faktor eksternal seperti perang dagang, masih banyak pekerjaan rumah di dalam negeri. Provinsi Banten merupakan daerah di Indonesia yang perekonomiannya masih sangat didominasi oleh industri manufaktur. Terdapat sekitar 20 kawasan industri yang tersebar di Banten, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Hal ini karena pembangunan kawasan industri yang terintegrasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional karena mampu menyediakan lapangan kerja yang luas dan membawa multiplier effect bagi lingkungan sekitar. Dalam lingkup Kabupaten Tangerang, saat ini pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mendorong percepatan realisasi pembangunan lima kawasan industri di wilayahnya agar pengawasan dan pengendalian industri lebih efektif karena berada dalam sebuah kawasan. Kelima kawasan industri tersebut adalah Kawasan Industri Millenium, Kawasan Industri Cikupa Mas, Kawasan Industri Balaraja, Kawasan Industri Laksana Business Park, serta Kawasan Industri Cileles. Pembentukan kawasan industri ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Industri yang sesuai dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2014.



Populasi penduduk Tangerang tercatat sekitar 3,5 juta orang dengan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu 3 persen dan diproyeksi akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2022. Selain itu terdapat sekitar 60 ribu kaum urban yang datang ke Tangerang khusus untuk mencari pekerjaan. Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, terdapat jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 5,62 juta orang. Hal itu naik sekitar 108 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2017. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,75 persen menjadi 7,77 persen. TPT lulusan SMP menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 12,02 persen pada Februari 2018. Secara umum, industri padat karya yang saat ini berada di Kabupaten Tangerang mengalami tantangan dari segi Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang hampir mencapai batas maksimal di besaran Rp. 3,826,000. Hal ini memberatkan pengusaha dan banyak perusahaan memilih pindah dari Tangerang ke daerah yang memiliki biaya operasional lebih rendah seperti Solo dan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini tengah gencar melakukan revitalisasi tata ruang dan mengembangkan kota – kota satelit baru sebagai kota industri. Konsep kota industri berbeda dengan kawasan industri dan konsep kota yang mengintegrasikan kawasan industri, hunian dan komersial dengan konsentrasi kegiatan penduduk yang tinggi dengan konektivitas yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya. Belajar dari Bintaro dan BSD, pembangunan kota – kota satelit ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect dan pengaruh polarisasi kekuatan lokal yang sangat besar. Pengembangan kota industri akan turut mendorong



pertumbuhan berbagai sektor di daerahnya, termasuk potensi sosio-ekonomi dan sumber daya lokal.

Dalam dialog dengan jajaran SKPD, Panja mendapati pula bahwa terdapat tumpang tindih dalam implementasi produk-produk legislasi. Yang paling mengemuka adalah implementasi UU Otonomi Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014). Pasal 7 Ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Dengan adanya pasal tersebut, terjadi pemisahan fungsi pengawasan yang dipindahkan kewenangannya ke daerah tingkat I. Sedangkan dalam hal ini fungsi penyelesaian yang masih menjadi wewenang daerah tingkat II. Tantangan ini terutama dihadapi Kabupaten Tangerang dalam penyelesaian isu-isu ketenagakerjaan. Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mencatat saat ini terdapat 5415 perusahaan dan industri di Tangerang yang terdiri dari 3789 perdagangan dan jasa serta 1626 industri. Pada tahun 2018 nilai perdagangan mencapai 1,4 miliar USD untuk 10 komoditas terbesar yaitu alas kaki, garmen, makanan dan minuman ringan, keramik, kerajinan tangan, sepeda dan suku cadangnya, metal, bulu mata palsu, plastik dan produk kimia dan hasil awalnya dengan negara tujuan ekspor utama China, Belgia, Jepang, Korea, Jerman, Australia dan Arab. Dengan adanya kewenangan antara daerah tingkat II dan tingkat I tentunya menyulitkan Pemkab yang tidak memiliki kewenangan pengawasan operasional sehari-hari tetapi bertanggung jawab akan penyelesaian masalah.





PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membangun sektor jasa pariwisata kelas dunia dari Lombok



Kwartal ketiga tahun 2018 menjadi masa-masa terberat bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bencana gempa bumi magnitudo 7 di awal Agustus meluluhlantakan berbagai infrastruktur dan mengakibatkan kemunduran di sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan NTB. Data Dinas Pariwisata NTB mencatat 3 juta wisatawan telah mengunjungi NTB pada tahun 2019.

Pembangunan kawasan pariwisata berkelanjutan menjadi visi kawasan Asia Tenggara. Hal ini sebagaimana termuat dalam ASEAN Tourism Strategic Plan 2025 dimana ASEAN diharapkan menjadi destinasi wisata berkualitas yang menawarkan pengalaman ASEAN yang unik dan beragam. Penekanan dilakukan pada pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif dan seimbang sehingga dapat secara signifikan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat ASEAN. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di selatan Lombok memberikan secercah harapan bagi akselerasi pemulihan sektor pariwisata pasca bencana. KEK Mandalika dibangun dengan konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berorientasi pada kelestarian nilai-nilai lokal dan kualitas lingkungan masyarakat sekitar.



KEK Mandalika ditetapkan sebagai KEK Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Terdapat dua pertimbangan yaitu keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika sebagai objek wisata bahari dan keunggulan geostrategis dari sisi konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan serta lokasi yang berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok. KEK Mandalika memiliki luas 1.035,67 ha dan terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Diperkirakan KEK Mandalika dapat menarik dua juta wisatawan setiap tahunnya dan semakin memajukan industri pariwisata di NTB serta memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat setempat. Jumlah wisatawan ke NTB tentunya diharapkan dapat membantu pencapaian target pemerintah 20 juta wisatawan asing dan 275 juta wisatawan nusantara yang akan menghasilkan devisa 260 Trilyun dari sektor pariwisata.

Untuk menarik aliran investasi ke KEK, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No 91 tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Kemudahan Berusaha. Hingga pertengahan tahun 2018, jumlah investasi yang masuk sudah berada di atas 20 triliun yang berasal dari 10 kontrak kerja sama. Diperkirakan KEK Mandalika dapat menarik investasi sebesar Rp 28,63 triliun hingga tahun 2025 dan setelah beroperasi akan mempekerjakan 58.700 sumber daya manusia. Berbagai fasilitas dan kemudahan baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal diberikan, seperti potongan pajak untuk barang impor, kemudahan perizinan dalam 3 jam dan HGB di atas HPL sampai 80 tahun. Investasi senilai 14,5 triliun rupiah telah dikucurkan untuk membangun lintasan sirkuit di Mandalika dan menempati bidang seluas 131 hektar.



Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tentunya menjadi krusial sehingga nantinya pengembangan KEK Mandalika sebagai pusat perhelatan event-event akbar kelas dunia dapat dilakukan secara maksimal. Beberapa catatan diberikan Panja KER setelah melakukan tinjauan lapangan, termasuk di dalamnya Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas pendukung sebagai upaya meningkatkan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan event kelas dunia.



HUNGARIA BUDAPEST

Hungaria: Keberhasilan Transformasi Ekonomi yang didorong oleh Integrasi Ekonomi Regional



Sejak peralihannya dari sistem ekonomi terpusat (ekonomi komunis) menjadi sistem ekonomi pasar, perekonomian Hungaria mengalami pertumbuhan yang signifikan dan saat ini tergolong sebagai salah satu negara maju di dunia. Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Hungaria adalah sebesar US\$283,6 miliar dengan Pendapatan Perkapita sebesar US\$28.900,. Sedangkan pertumbuhannya pada tahun 2017 adalah sekitar 3,2%. Tulang punggung perekonomian Hungaria diantaranya adalah Pertambangan, Metalurgi, bahan-bahan bangunan, pengolahan makanan, tekstil, bahan-bahan kimia (terutama Farmasi) dan juga kendaraan bermotor. Namun demikian, sebagaimana halnya dengan Indonesia yang mengikuti arus perkembangan perekonomian global, Hungaria juga mulai mengembangkan ekonomi digital. Hal ini juga merupakan salah satu yang menandai transformasi ekonomi Hungaria.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Hungaria juga didukung dengan serangkaian kebijakan moneter oleh Bank Sentral Hungaria (MNB). Terlebih lagi setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 2008, dimana Hungaria juga menerima dampaknya. Permasalahan kebijakan moneter diatasi dengan beberapa kebijakan perpajakan, yakni dengan mengganti sistem pajak dari pajak buruh ke pajak konsumsi. Keadaan ini mengakibatkan penyerapan tenaga kerja meningkat signifikan dan utang publik menurun. Kebijakan moneter MNB lainnya, adalah



pembuatan kerangka kebijakan moneter baru. Setelah terjadinya krisis, MNB mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan moneter ekspansionaris. Salah satu di antaranya, MNB meminjamkan dana melalui Skema Pertumbuhan Pendanaan (*Funding Growth Scheme*) dimulai dari Juli 2013 hingga Maret 2017, dengan bunga hanya sebesar 2,5% per tahun dan menargetkan UKM. Dengan bunga yang kecil tersebut, tentunya akan mendorong SME untuk lebih mudah mendapatkan pendanaan dan meningkatkan produktivitasnya.

Transformasi ekonomi yang terjadi di Hungaria, terutama pasca krisis ekonomi 2008 memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia pasca krisis ekonomi 1997. Kesamaan ini membuat Hungaria merasa perlu belajar dari kisah Indonesia saat itu. Di samping itu, saat ini pemerintah Hungaria juga sedang mempererat hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia yang harapannya dapat terus ditingkatkan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. Hungaria sendiri saat ini merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-7 di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Khusus untuk kerjasama antara Indonesia dengan Hungaria, bank ekspor impor Hungaria telah menentukan batas kredit baru sebesar 200 juta euro untuk mendukung berkembangnya kemitraan bisnis antara perusahaan Hungaria dan Indonesia.

Kunjungan Panja KER ke Hungaria yang dilakukan pada bulan Maret 2019, utamanya bertujuan untuk; Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara di kawasan Eropa terkait integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut, Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan



dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional melalui perspektif negara mitra wicara ASEAN, serta untuk memahami bagaimana posisi Hongaria sebagai bagian dari Uni Eropa terhadap perdagangan multilateral dan liberalisasi ekonomi. Selama kunjungan Delegasi Panja KER melakukan dialog dan berdiskusi secara mendalam mengenai perekonomian, investasi dan permasalahan lain seputar hubungan bilateral kedua negara, dengan beberapa pihak mulai dari Kamar Dagang (KADIN) Hungaria, Parlemen, hingga Kementerian Perdagangan dan Urusan Luar Negeri.

Hal menarik yang perlu dicermati dari pembicaraan antara Delegasi Panja KER dengan beberapa pihak di Hungaria, khususnya Grup Persahabatan antar Parlemen dalam konteks best practices terkait dengan kerja sama ekonomi regional adalah, bahwa melalui keanggotaannya di Uni Eropa, Hungaria mendapatkan akses pasar yang sangat luas bagi produk - produknya, terutama dengan dipangkasnya seluruh pajak dan tarif bagi produk Hungaria di seluruh negara anggota Uni Eropa. Ini menyebabkan keuntungan dalam hal perdagangan yang didapatkan oleh Hungaria bisa optimal. Namun demikian, kebijakan perdagangan Hungaria tidak bisa sepenuhnya diterapkan sesuai keinginan Hungaria. Ini dikarenakan sebagai bagian dari Uni Eropa, Hungaria terikat untuk mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Uni Eropa mengenai perdagangan. Dalam konteks integrasi ekonomi regional, hal-hal semacam ini lazim terjadi. Ada sejumlah keuntungan dan manfaat besar bagi negara ketika memutuskan untuk berintegrasi secara ekonomi, tetapi juga ada 'pengorbanan' yang harus dilakukan. Melalui keanggotaannya di Uni Eropa transformasi ekonomi Hungaria menjadi sangat terbantu.





Sementara itu, hal menarik lainnya yang menjadi perhatian Delegasi Panja KER saat berdiskusi dengan Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria dalam urusan peningkatan ekspor adalah bagaimana Hungaria sebagai sebuah negara berdaulat bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari keanggotaannya di Uni Eropa. Dalam hal ini dengan adanya kenyataan bahwa ternyata Hungaria tidak bisa serta merta menentukan kebijakan perdagangannya sendiri dan harus mengikuti ketentuan Uni Eropa. Diskusi mengenai hal ini mengemuka khususnya ketika Delegasi Panja KER membahas mengenai kebijakan perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Hungaria seputar impor dan ekspor. Dimana saat ini Indonesia memberikan berbagai kemudahan bagi Hungaria, sementara hal ini belum berlaku sebaliknya. Hal ini menjadi penting untuk ditanyakan bukan saja dalam konteks perdagangan bilateral kedua negara, tetapi juga mengingat Indonesia dalam konteks ASEAN, perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi *ASEAN Economic Community*.

Dalam diskusi tersebut Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria menjelaskan bahwa pada dasarnya lebih banyak keuntungan yang mereka peroleh jika tetap bersama Uni Eropa. Misalnya peluang dalam hal pendidikan yang terbuka luas bagi masyarakat Hungaria jika ingin bersekolah dimanapun di Eropa, atau peluang ekonomi bagi masyarakat Hungaria yang ingin bekerja dimanapun di Eropa. Keanggotaan dalam Uni Eropa memberikan lebih banyak kesempatan bagi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sehingga disparitas antara negara-negara anggotanya tidak terpaut jauh. Ini merupakan salah satu keunggulan dari dilaksanakannya integrasi ekonomi regional. Khusus mengenai pemerataan, Menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Community* dapat tercipta pemerataan kesempatan ekonomi dan kesejahteraan yang sama sebagaimana dengan yang terjadi di Uni Eropa, mengingat bahwa saat ini disparitas antara negara-negara di ASEAN cukup mencolok dalam hal ekonomi dan teknologi.



ITALIA ROMA

Italia: Berpihak pada UKM dan Ekonomi Kreatif



Italia merupakan salah satu founding father Uni Eropa yang telah bergabung sejak 1958. Negara seluas 302,073 km² ini memiliki populasi sebanyak 60,7 juta jiwa atau sekitar 12% dari total populasi Uni Eropa. Beribukota di Roma, bahasa Italia menjadi bahasa resmi negara tersebut. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Italia tercatat sebesar USD 1,825 triliun pada 2015 dan USD 1,85 triliun pada 2016. GDP per kapita Italia merupakan yang terbesar ke-16 di Uni Eropa, yaitu mencapai USD 30.294 pada 2016.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Italia mulai mengalami penurunan bahkan sebelum terjadinya krisis global 2008. Dengan tingkat pengangguran yang mencapai 11,1% pada April 2017, rendahnya produktifitas ditengarai sebagai salah satu penyebab utama perlambatan ekonomi di negara tersebut. Situasi politik yang kerap kian tak menentu, membuat ekonomi Italia mengalami ketidakpastian.

Pada saat kunjungan BKSAP ke Italia terkait isu kerja sama ekonomi dilakukan pada Mei 2019, Italia usai mengalami penyusutan pertumbuhan 0.2% pada tiga bulan terakhir 2018. Tapi pada kuartal pertama 2019, ekonomi bertumbuh kembali 0.2%. Sementara pada kuartal kedua (Q2) 2019, berdasarkan data Istat, estimasi awal memperkirakan bahwa Q2 tidak bertumbuh baik secara kuartal dan tahunan (+0.1% QoQ dan -0.1% YoY pada 1Q19).



Kendati demikian, Italia relatif masih dapat bertahan di tengah badai ekonomi dengan juga mengeluarkan ragam kebijakan ekonomi yang menyentuh UKM dan juga ekonomi kreatif.

Pada Maret 2019, Kementerian Pengembangan Ekonomi meluncurkan *National Innovation Fund (NIF)* sebagai salah satu inisiatif terkait permodalan usaha. NIF memiliki dana awal senilai 1 miliar Euro dikelola oleh Dana Pinjaman dan Simpanan Italia. NIF bertujuan untuk menyatukan dan melipatgandakan sumberdaya publik dan privat untuk topik khusus yakni inovasi. Bentuk investasinya dilakukan melalui modal ventura, yang berarti, investasi, baik langsung tidak langsung, dalam porsi minoritas yang layak dalam permodalan perusahaan inovasi. Tujuannya untuk mendukung start-ups, scale-ups, dan Perusahaan Kecil Menengah inovatif untuk menghindari penjualan dan penyebaran bakat-bakat tinggi ke luar negeri, hak kekayaan intelektual dan aset strategis lainnya.

Kementerian juga menerbitkan sebuah buku panduan incentivi.gov.it untuk membuka informasi kepada seluruh perusahaan kecil dan menengah dalam prosesnya mendapatkan insentif dari negara. Insentif terkait start-up perusahaan baru, investasi inovasi, pertumbuhan, penguatan asset, investasi di alat berat, pabrik dan perangkat lunak, internasionalisasi, investasi training, riset dan pengembangan, efisiensi energi, rekrutmen baru hingga kelonggaran pajak.

Selain itu, Italia sebagai bagian dari pusat kreatif dunia juga menerapkan sistem integrasi



pengembangan industri kreatifnya. Hal yang paling kentara salah satunya adalah studio Film Cinecittaa yang merupakan perusahaan studio film terbesar di daratan Eropa dan kerap disebut sebagai Hollywood-nya Eropa. Fasilitas studio film tersebut memiliki lima ribu professional dan telah menggarap lebih dar 3.000 produksi film termasuk Ben Hur dan Cleopatra. Cinecitta berdiri lebih dari 80 tahun dan sedikitnya 51 film dari studio tersebut memenangkan Oscar.

Cinecitta memiliki luas ruang produksi mencapai 400,000 meter persegi di tengah Kota Roma. Ia memiliki 19 soundstages, 400 ruang ganti, make-up, dan kantor. Empat set permanen dan 100,000 backlot. Cinecitta sempat dalam pengelolaan swasta selama 20 tahun, namun sejak Juli 2017, studio tersebut dikelola oleh Institut Luce-Cinecitta, yang merupakan perusahaan publik dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan.

Cinecitta memproyeksikan agenda modernisasi dan pembangunan kompleks tersebut untuk menjadi hub Italia dalam sektor audiovisual. Proyek yang digarap saat ini adalah” dua teater besar terkini dan pusat kajian permanen layar hijau (green screen), kolam renang untuk perekaman dalam air, Museum Audiovisual Italia, dan sejumlah proyek lainnya.

Adanya keterpaduan skema bisnis Cinecitta mendorong dampak lanjutan dari kawasan perfilm-an tersebut. Studio Film Cinecitta yang merupakan studio film terbesar di Eropa memiliki



kompleks dan manajemen pengelolaan yang terpadu. Cinecitta tidak hanya menjadi lokasi pengambilan gambar, tetapi juga sebagai tempat belajar dan institut sinema sekaligus sebagai lokasi wisata. Cinecitta juga melibatkan kelompok usaha kecil dan menengah dalam penyiapan beragam properti studio. Patut digarispawahi penguatan ekonomi kreatif harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif dengan tujuan menghasilkan multiplier effect yang merata dan berimbang pada seluruh lapisan ekonomi, termasuk pada industri kecil dan menengah.

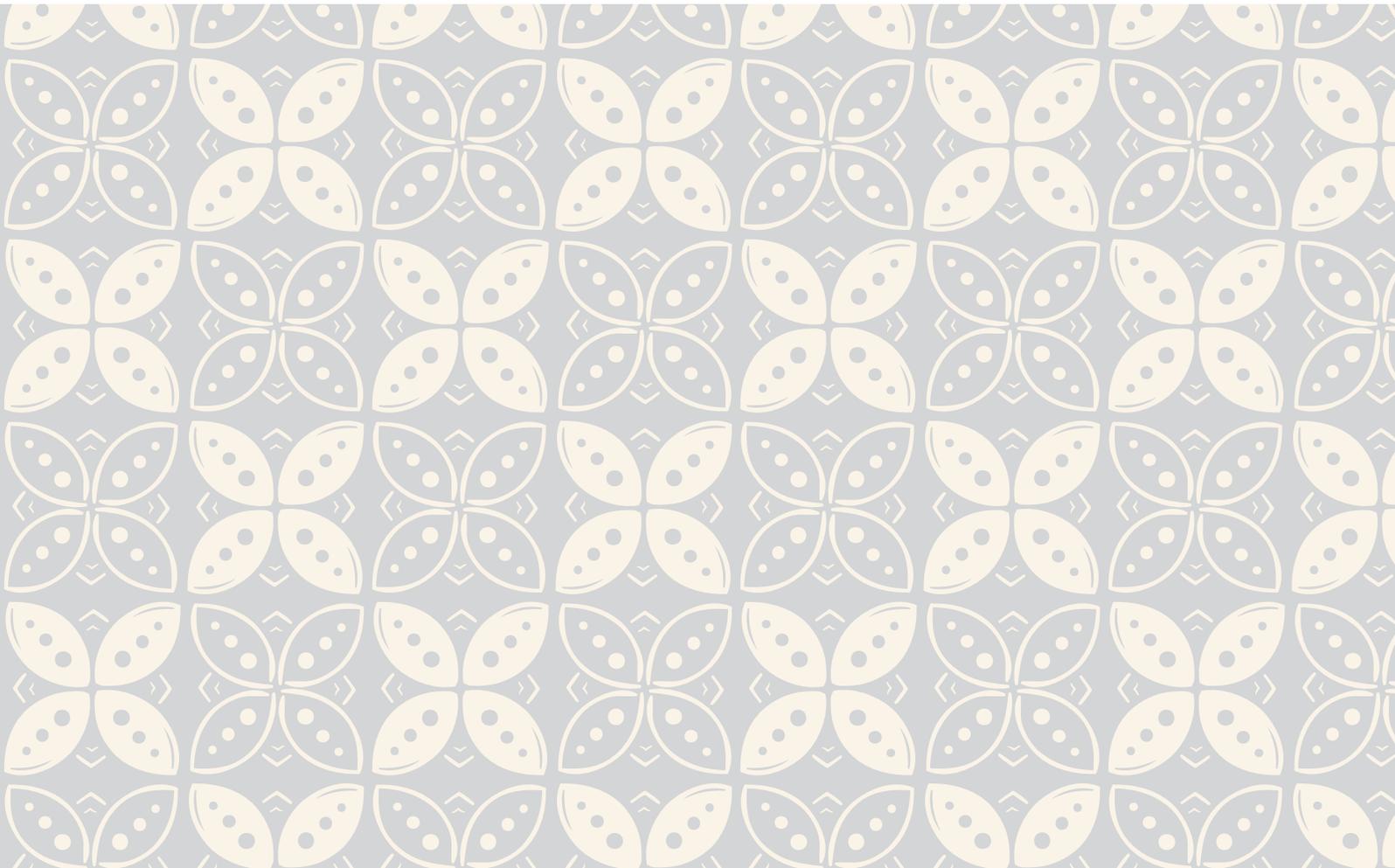






REKOMENDASI PANITA KERJA

Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia





Berdasarkan kunjungan kerja Panja dan dialog dengan berbagai *stakeholders* di tahun 2018, Panja merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengawasan atas ratifikasi, negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan bebas

Tahun 2018 diwarnai oleh situasi perdagangan dunia yang semakin tidak menentu. Penerapan mekanisme proteksionisme dalam bentuk tarif bea masuk oleh kekuatan ekonomi dunia menekan volume perdagangan internasional dan kinerja ekspor di berbagai negara terutama negara – negara berkembang. Beban pembiayaan ekspor merupakan salah satu faktor karena ketergantungan yang tinggi atas bea ekspor dalam dolar Amerika. Dalam menyikapi hal ini, berbagai langkah strategis dapat ditempuh Pemerintah RI. Indonesia dapat menjadi *focal point* yang secara proaktif menyerukan liberalisasi perdagangan melalui implementasi perjanjian – perjanjian perdagangan bebas dan mengajak negara – negara di kawasan untuk mengeliminir kebijakan yang bersifat proteksionistik. Selain itu, Indonesia dapat mengaktifkan kerjasama selatan – selatan sebagai salah satu upaya ekspansi akses pasar dan penetrasi ke negara – negara sebagai alternatif tujuan pasar tradisional ekspor Indonesia saat ini. Hal ini untuk mengurangi pula ketergantungan ekspor Indonesia ke negara – negara maju yang tengah terlibat perang dagang.

Di akhir tahun 2018 Indonesia berhasil menyelesaikan negosiasi *Indonesia-European Free Trade Association Free Trade Agreement* (Indonesia-EFTA FTA) dengan Switzerland, Lichtenstein, Norway dan Iceland yang telah ditandatangani pada bulan Desember. Di tahun 2019, Indonesia menargetkan penandatanganan 13 perjanjian perdagangan bebas. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara negara – negara ASEAN dengan mitra dialognya menjadi prioritas utama. Apabila diimplementasikan nanti, RCEP akan mewakili 45% kekuatan ekonomi dunia. Kemitraan komprehensif ini tentunya dapat menjadi salah satu solusi menyeimbangkan kebijakan perdagangan unilateral yang diterapkan Amerika Serikat.

Mekanisme pengawasan oleh DPR RI tetap harus menjadi prioritas. Perdagangan internasional bukan merupakan *zero sum game*. Oleh karenanya, prinsip kerja sama perdagangan internasional harus selalu berpegang teguh pada tujuan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan berpartisipasi dalam *global value chain* seraya berperan aktif menciptakan sistem dan praktek perdagangan yang lebih adil.

2. Pemanfaatan kerangka kerjasama ekonomi sub-regional secara lebih optimal

Berdasarkan lampiran Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 kerjasama ekonomi dengan negara tetangga saat ini adalah ASEAN Community, *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS – GT)*, *Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA)*, *Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT – GT)* dan *Australian-Indonesia*



Development Area (AIDA). Landasan hukum bagi Kerjasama Ekonomi Sub – Regional (KESR) yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub – Regional; Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP – 117/M.EKON/12/2012 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub – Regional; dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa sasaran utama dari kerja sama sub – regional sendiri adalah percepatan peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata. KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat daerah dalam pemberdayaan ekonomi di wilayah masing – masing. Pada akhirnya nanti, KESR diharapkan menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, dalam kerangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas.

Kunjungan kerja Panja ke daerah menemukan bahwa daerah-daerah terdepan Indonesia telah memiliki kesadaran akan potensi strategis daerahnya. Salah satu contoh di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari kerjasama sub – kawasan IMS – GT. Peningkatan daya saing daerah agar tidak tertinggal dari Johor dan Singapura telah mendapatkan posisi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021. Pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar kabupaten/kota, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal menjadi poin – poin strategis dalam mendukung posisi Batam sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi di tingkat sub – regional.

Namun tentunya implementasi RPJMD tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kerjasama dengan negara – negara yang menjadi mitra daerah. Dalam hal ini Panja KER melihat daerah harus lebih proaktif dalam mengusulkan rencana dan agenda kerjasama dalam forum koordinasi dan pertemuan dengan mitra – mitra tersebut. Selain itu diperlukan penyediaan informasi terbaru secara berkala tentang peluang usaha dan investasi. Ke dalam negeri, informasi tersebut dapat menjadi acuan bagi strategi pengembangan, sedangkan bagi negara – negara yang menjadi mitra sub – regional di perbatasan hal ini menjadi upaya penyebaran informasi dan promosi prospek kerjasama.

3. Penguatan keunggulan kompetitif Klaster Ekonomi di wilayah terdepan Indonesia untuk menunjang kerjasama ekonomi regional

Salah satu arah pembangunan jangka panjang nasional yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2005-2025 adalah mewujudkan daya saing nasional dan



pemerataan pembangunan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional jangka panjang salah satunya diarahkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun konektivitas dan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan jasa melalui pembentukan klaster-klaster ekonomi khusus yang dikenal dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pembentukan KEK juga bertujuan untuk memperkuat konsep pengembangan kawasan ekonomi strategis nasional yang telah lebih dulu ada seperti Kawasan Berikat (KB) atau *Bonded Zone*, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), maupun *Free Trade Zone (FTA)*. Disamping itu, pembentukan KEK juga merupakan suatu langkah pembaharuan yang bertujuan untuk mendorong minat para investor untuk menginvestasikan dananya di berbagai KEK di wilayah Indonesia.

Dalam kunjungan Panja KER ke beberapa daerah seperti Provinsi Kepulauan Riau, pembentukan KEK yang bertujuan untuk menaikkan daya saing dan potensi ekonomi daerah, menjadi salah satu prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti pembangunan Nongsa Digital Park di Nongsa, Batam yang diproyeksikan untuk menjadi pusat ekonomi digital utama di tingkat regional, ataupun pengajuan pembentukan KEK baru di kawasan Bintan dan Batam yang bertujuan menaikkan potensi lokal untuk mendorong terciptanya daya saing regional maupun internasional yang lebih baik.

Namun demikian yang harus menjadi perhatian khusus adalah perlunya peningkatan penanaman modal sehingga keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang ingin ditonjolkan dalam setiap KEK dapat terealisasi dengan baik. Kemudian diperlukan juga adanya fasilitas khusus yang dapat meningkatkan daya tarik melalui pemberian insentif seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), Regulasi yang mempermudah proses investasi dan kegiatan ekonomi, dan juga peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di tiap daerah yang dibentuk menjadi KEK.

4. Peningkatan konektivitas antar negara dan pemanfaatan peluang kerja sama dalam bidang infrastruktur

Salah satu visi Nawacita yang diusung Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah membangun Indonesia dari kawasan – kawasan terdepan Indonesia terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Peralihan dari sentralisasi menuju desentralisasi menjadi fokus utama. Menghadirkan negara untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi poin utama, dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi poin ketiga Nawacita.

Pemerataan pembangunan tidak terlepas dari pemerataan infrastruktur yang bermuara pada konektivitas antar wilayah baik dalam satu negara, di antara negara yang berbatasan maupun secara global. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Kunjungan kerja Panja ke berbagai negara mendapati potensi ketertarikan negara – negara tersebut untuk menjalin kerjasama infrastruktur dan konektivitas. Rumania menyampaikan mengenai Pelabuhan Constanta yang memiliki keunggulan letak



geografis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai hub logistik untuk memperluas penetrasi pasar ekspor Indonesia di Eropa Timur. Sedangkan Austria mengemukakan potensi kerjasama infrastruktur perkeretaapian.

Dalam kaitan dengan infrastruktur dan konektivitas dalam lingkup kerjasama sub – wilayah, peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan selayaknya lebih ditingkatkan. Hal ini untuk menjembatani kebutuhan infrastruktur dan konektivitas yang mendukung peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara – negara mitra sekaligus menjadi solusi pembiayaan pembangunan yang masih sulit ditutupi APBD. Selain menjadi pihak yang menyediakan fasilitas pendukung untuk investasi sektor swasta, pemerintah harus lebih proaktif dalam mempromosikan skema *public – private partnership* bagi pembiayaan – pembiayaan proyek infrastruktur yang umumnya membutuhkan investasi awal yang sangat besar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, *public private partnership* didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Skema keterlibatan pihak swasta dapat menjadi salah satu solusi bagi tantangan gap pembiayaan yang saat ini dihadapi. Berdasarkan proyeksi BAPPENAS, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 4.796,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dari total tersebut, APBN/APBD hanya mampu memenuhi sekitar 41,3% dan BUMN sekitar 22,2% sehingga sektor swasta diharapkan dapat berpartisipasi memenuhi gap yang dibutuhkan .

5. Penjajakan komoditas ekspor unggulan sebagai alternatif kelapa sawit

Dengan perkembangan terbaru isu pengaturan biofuel, bioliquid dari minyak kelapa sawit di Eropa yang berawal dari penghapusan total menjadi “pembatasan dan pengurangan” sebagai hasil dari kesepakatan *trilogue*, potensi ekspor minyak kelapa sawit untuk produk biofuel dan bioliquid terancam menurun untuk tahun-tahun berikutnya pasca-2019. Terlebih apabila dianggap masuk dalam kategori ILUCF risiko tinggi. Potensi penurunan juga dapat terjadi seiring dengan inisiatif Uni Eropa menyusun Rencana Aksi untuk mengatasi deforestasi pada 2019.

Untuk itu, sudah selayaknya Indonesia menjajaki pengembangan komoditas ekspor unggulan lainnya sebagai pengganti kelapa sawit. Komoditas unggulan tersebut dapat berfungsi sebagai alternatif produk dari minyak kelapa sawit ataupun komoditas lain di luar kelapa sawit yang dapat menggantikan potensi peluang ekspor bagi negara. Adapun alternatif produk minyak kelapa sawit yang potensial dikembangkan di Indonesia di antaranya adalah minyak berbahan baku ulat Jerman (*Zophobas Morio*), ragi jenis *metschnikowia pulcherrima* yang umum ditemukan pada buah-buahan dan bunga, minyak dari ganggang laut, hingga kedelai, rapeseed, jojoba dan sebagainya. Kendati demikian, proses alternatif pengganti minyak kelapa sawit tersebut membutuhkan dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan komoditas-komoditas tersebut. Beberapa inisiatif start up seperti



BiteBack asal Indonesia juga tengah mengembangkan mekanisme pengganti minyak kelapa sawit melalui minyak ulat Jerman.

Dukungan pendanaan untuk riset dan pengembangan komoditas tersebut perlu ditingkatkan. Hal ini juga sejalan dengan temuan BKSAP untuk integrasi ekonomi dan ekonomi regional ke Austria yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran riset dan pengembangan untuk negara-negara maju relatif tinggi hingga mencapai 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Dalam konteks pengganti peluang ekspor, Pemerintah perlu menggali dan meningkatkan masuknya produk andalan ekspor Indonesia ke Uni Eropa lainnya seperti furniture/perabot, dekorasi rumah/kerajinan, peralatan olahraga, peralatan dapur, produk apparel, produk makanan dan minuman, kopi, rempah-rempah, sepatu, kulit, fashion design, karet alam, briket, kopra dan peralatan medis. Produk-produk unggulan tersebut juga menyimpan peluang permintaan pasar yang tinggi. Data *International Trade Statistic* bahkan menyebut *technically specified natural rubber* (karet alam) terdata secara global memiliki total nilai ekspor (Indonesia) mencapai US\$ 7 miliar, terbesar kedua setelah produk kelapa sawit. Namun demikian, Indonesia juga menghadapi beberapa masalah akses pasar ke UE seperti persyaratan teknis dan kesehatan, hambatan non-tarif (untuk produk perikanan, pertanian, elektronik, mebel dan kosmetik). Momentum kesepakatan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dengan *European Free Trade Association/EFTA* menjadi pintu masuk akses pasar produk unggulan Indonesia ke Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Islandia. Sementara negosiasi Indonesia EU CEPA dapat didorong untuk secara detail membahas aspek terkait akses pasar khususnya dalam memastikan minimnya hambatan non-tarif bagi perdagangan kedua pihak. Sementara itu, melalui jaringan antarparlemen dan koneksi *people-to-people*, DPR perlu untuk menjajaki dan memetakan pasar-pasar baru di Eropa untuk peningkatan produk-produk unggulan Indonesia lainnya.

Pada awal tahun 2018, Parlemen Eropa menyetujui sebuah rancangan petunjuk energi terbarukan yang menggantikan aturan lama (biasa disebut—*Renewable Energy Directives/RED II*) dengan target spesifik yakni menghapuskan produk biofuel dan bioliquid dari minyak kelapa sawit pada 2021. Situasi demikian tentunya berpotensi memukul industri kelapa sawit dimanapun berada, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut juga mengabaikan upaya Indonesia untuk terus mengembangkan mekanisme produksi dan produk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui skema *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Dalam konteks aturan yang bersifat diskriminatif tersebut, Pada Mei 2018, Delegasi BKSAP untuk Integrasi Ekonomi dan Ekonomi Regional mengunjungi Austria. Austria merupakan Presiden Dewan Uni Eropa (UE) per Juli. Misi kunjungan salah satunya mendorong proses dialog tiga pihak (*trilogue*) antara Dewan UE, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa untuk menghasilkan kesepakatan mengenai RED II yang bersifat non-diskriminatif. Menganggap produk tanaman tertentu berkontribusi terhadap deforestasi sementara lainnya tidak adalah diskriminasi.

Pada Juni 2018, negosiasi tiga pihak mengenai RED II berujung pada kesepakatan dan juga menghilangkan teks yang spesifik menarget penghapusan *biofuel* dan *bioliquid* dari minyak kelapa sawit pada 2021 dari rancangan terkait. Kesepakatan



tersebut bahkan tidak menyebut minyak kelapa sawit dalam bentuk apapun. Namun demikian, peluang pembatasan biofuel dan bioliquid dari minyak kelapa sawit tidak berhenti pada hilangnya pasal penghapusan pada 2021.

Potensi pembatasan dan pengurangan biofuel dan bioliquid dari minyak kelapa sawit dapat pula timbul dari adanya ketentuan mengenai rencana pembatasan dan pengurangan yang dikenakan terhadap emisi yang ditimbulkan dari *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Pasal baru (62bis) dari kesepakatan trialog tersebut menyebutkan bahwa risiko tertinggi dari ILUC teridentifikasi dari biofuel, bioliquid dan biomassa yang diproduksi menggunakan ekspansi lahan yang signifikan menjadi perhatian/catatan. Dalam aturan tersebut, apabila ditemukan *biofuel*, *bioliquid* dan *biomassa* yang diproduksi dari ILUC dengan risiko tertinggi, maka, konsumsi produk *biofuel*, *bioliquid* dan *biomassa* tersebut dibatasi tidak boleh melebihi konsumsi penggunaan masing-masing negara di tahun 2019, dengan pengurangan batas hingga 0% pada 2030 dimulai dari 2023.

DPR dan pemerintah perlu memantau perkembangan langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Uni Eropa berkaitan dengan penentuan metodologi risiko tinggi ILUC dan juga mencermati perkembangan penyusunan aturan turunan untuk menentukan kriteria sertifikasi ILUC dengan risiko tinggi dan rendah. Langkah itu diperlukan mengingat kelapa sawit berpotensi dianggap sebagai risiko tinggi ILUC melalui basis perhitungan tersebut. Tenggat waktu yang dimiliki sangat terbatas. UE menargetkan Komisi Eropa pada 1 Februari 2019 telah menyampaikan laporan ekspansi lahan yang ada di dunia untuk basis pakan dan pangan dan menerbitkan aturan turunan terkait sertifikasi ILUC dengan risiko tinggi dan rendah menggunakan data saintifik yang tersedia.

6. Penelaahan lebih lanjut mengenai dampak Brexit terhadap kerjasama perdagangan baik secara Bilateral Indonesia – UK maupun antar kawasan ASEAN – EU

Referendum yang dilakukan pada tahun 2016 berakhir pada keputusan UK melepaskan keanggotaan di Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan Brexit. Hal ini mendapatkan perhatian lebih dari banyak kalangan mengingat Uni Eropa merupakan salah satu contoh sukses integrasi tingkat keempat yaitu Custom Union. Keluarnya UK menandakan perpecahan dapat saja terjadi bahkan pada kerjasama regional yang paling sukses sekalipun, dan menarik untuk mengikuti bagaimana hal ini mempengaruhi kerjasama regional lainnya.

Banyak pihak berpandangan Brexit akan membawa sisi positif peluang kerjasama perdagangan bilateral yang lebih intensif antara Indonesia dan UK. Hal ini dikarenakan UK memiliki fleksibilitas untuk mengatur sendiri kerjasama perdagangan dengan negara – negara sahabat.

Tahun lalu, ekspor UK naik 9,2 persen (52,8 miliar GBP) menjadi 628,8 miliar GBP. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh peningkatan perdagangan dengan negara – negara yang mengalami pertumbuhan pesat di luar Uni Eropa.



ASEAN merupakan negara tujuan ekspor UK terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Setelah melepaskan keanggotaan di Uni Eropa, UK semakin berkomitmen untuk meningkatkan performa perdagangan dengan negara – negara ASEAN. Pembukaan *UK Mission to ASEAN* yang direncanakan pada tanggal 31 Oktober 2019 merupakan salah satu komitmen UK untuk meningkatkan intensitas hubungan dengan ASEAN .

Pandangan – pandangan di atas tentunya masih berwujud skenario karena sampai saat ini negosiasi paket Brexit antara Uni Eropa dan UK masih berlangsung. Dapat dipastikan Brexit akan mengubah *regional governance* di Eropa. Tetapi sejauh mana Brexit akan berpengaruh pada geopolitik global? Hal inilah yang harus ditelaah lebih lanjut.

Selanjutnya, di tahun 2019 Panja merumuskan rekomendasi tambahan yang melengkapi hasil – hasil kunjungan kerja Panja yaitu:

1. Sinergi kebijakan dan legislasi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II

Terkait implementasi kebijakan dan UU, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah sinergi antara provinsi dan kabupaten. Hal ini terutama dengan adanya pemisahan fungsi pengawasan yang dipindahkan kewenangannya ke daerah tingkat I dengan fungsi penyelesaian yang masih menjadi wewenang daerah tingkat II menyusul implementasi UU Otonomi Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

2. Manajemen persaingan antar kawasan industri di Indonesia

Pembangunan kawasan industri terutama ditujukan untuk peningkatan daya saing daerah. Pemusatan industri di satu kawasan diharapkan dapat menawarkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam membangun ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional. Pada perjalanannya, beberapa faktor menghadirkan persaingan antar kawasan industri terutama faktor modal dan upah minimum provinsi. Beberapa kawasan industri yang berada di provinsi dengan UMP terbilang tinggi memilih untuk memindahkan operasional ke kawasan yang dirasa memiliki UMP lebih menarik. Hal ini membuat kawasan industri yang ditinggalkan tidak saja mengalami kerugian dari sisi kehilangan investasi namun harus menghadapi tantangan peningkatan jumlah pengangguran di wilayahnya. Tidak dipungkiri, pemerintah harus mampu mengelola persaingan di antara kawasan industri secara nasional sehingga mampu mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki.

3. Rencana pembangunan kawasan sektor kreatif unggulan harus komprehensif, terpadu dan berkelanjutan

Gagasan Pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Kreatif untuk mendorong peningkatan industri kreatif Indonesia patut diapresiasi. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya menciptakan keunggulan komparatif Indonesia



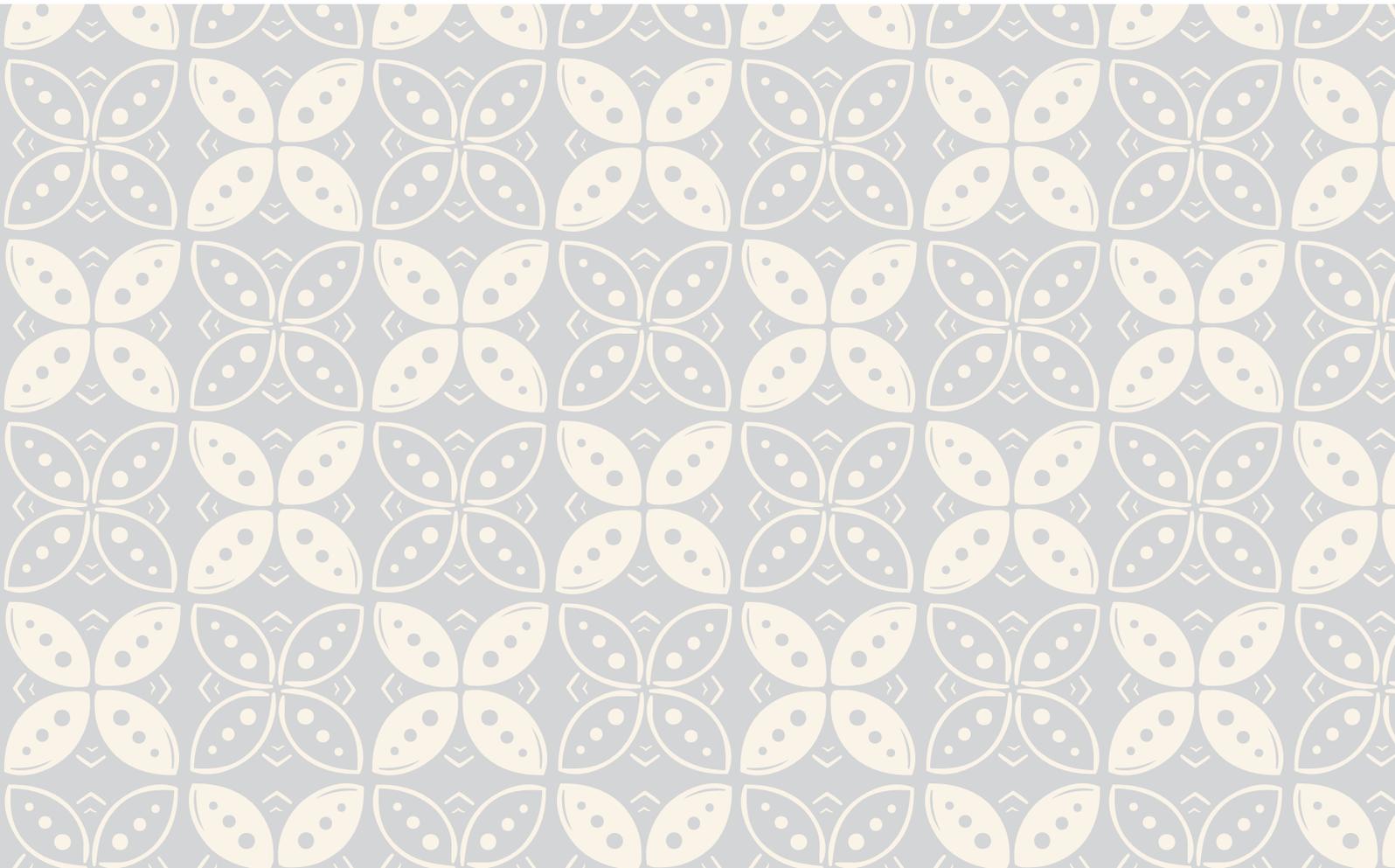
semestinya dapat menjadi prioritas pada tahun-tahun ke depan, mengingat figur data menunjukkan peningkatan signifikan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari sektor tersebut. PDB dari ekonomi kreatif misalnya pada tahun 2014 mencapai Rp 784 triliun dan pada 2015 menjadi Rp 852 triliun. Sementara hingga tahun 2016, PDB-nya telah tumbuh mencapai Rp 922 triliun dan diproyeksikan mencapai Rp 1.102 triliun pada 2018.

Melihat data tersebut, pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun-tahun berikutnya perlu lebih gencar dan mendalam. Rencana pengembangan Kawasan Kreatif melalui *Bekraf Creative District (BCD)* dapat disetujui sepanjang memiliki pengertian bahwa pengembangannya dilakukan dengan perencanaan matang, komprehensif, terpadu/integratif dan berkelanjutan. Dalam sejumlah kunjungan lapangan ke sejumlah negara, BKSAP menyoroti bahwa konsep keterpaduan dalam pengembangan sebuah kawasan ekonomi harus jelas untuk mendorong efek *multiplier* yang tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga pada aspek sosial.



LAMPIRAN LAPORAN KUNJUNGAN

Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 11 – 13 DESEMBER 2018, BATAM - PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional (Panja KER) BKSAP DPR RI ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 11 – 13 Desember 2018 didasarkan pada Surat Tugas Nomor: 155/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Surat Tugas Nomor: 159/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSR/12/2018 tanggal 10 Desember 2018.

B. SUSUNAN ANGGOTA PANJA

Susunan anggota panja adalah sebagai berikut:

1. Sdr. Juliari P. Batubara, Wakil Ketua BKSAP/Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional/F-PDIP
2. Sdri. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, Anggota Panja/F-PDIP
3. Sdri. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., Anggota Panja/F-PDIP
4. Dr. Jerry Sambuaga, Anggota Panja/F-PG
5. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie, S.I.Kom., Anggota Panja/F-PG
6. Sdri. Susi Marleny Bachsin, S.E., MM., Anggota Panja/F-PGerindra
7. Ir. Dwita Ria Gunadi, Anggota Panja/F-PGerindra
8. Hj. Melani Leimena Suharli, Anggota Panja/F-PD
9. Sdr. Jon Erizal S.E., M.B.A., Anggota Panja/F-PAN

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN PANJA

1. Sosialisasi mengenai peran serta Parlemen dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI.



2. Diskusi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi kerjasama ekonomi dan perdagangan sub-regional lintas batas negara.
3. Menyerap aspirasi stakeholders di daerah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi menyusul implementasi kerjasama ekonomi pemerintah daerah di tingkat regional.
4. Mendapatkan masukan pemerintah daerah dan DPRD untuk DPR sebagai bahan perumusan kebijakan untuk skala nasional.
5. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
6. Sebagai salah satu daerah terdepan Indonesia, Batam juga merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi ini diharapkan akan menjadikan Batam sebagai salah satu lokomotif ekonomi Indonesia;
7. Batam memiliki posisi strategis untuk menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi di tingkat sub-regional;
8. Batam merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari skema kerja sama *Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara ketiga negara dan membuat sub-kawasan ini menjadi lebih menarik bagi investor regional dan internasional.
9. Saat ini, lebih dari 80 persen perdagangan barang internasional dilakukan melalui laut. Di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN menyadari bahwa konektivitas laut menjadi sektor pendukung logistik dan layanan yang penting. Sebagai sebuah provinsi yang wilayahnya mayoritas adalah laut, Kepulauan Riau memiliki potensi pengembangan ekonomi maritim yang bisa dioptimalkan dengan dukungan peningkatan konektivitas. Konektivitas laut merupakan katalis untuk pembangunan ekonomi dan daya saing internasional. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pemerintah provinsi Kepulauan Riau mempersiapkan daerahnya dari sisi konektivitas dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi kunjungan lapangan dipersiapkan oleh tim pendamping Panja yang terdiri dari Tenaga Ahli BKSAP dan Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP. Materi disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Untuk persiapan teknis, Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP telah melakukan peninjauan dan komunikasi intensif dengan Pemda Provinsi Kepulauan Riau.

II. ISI LAPORAN

A. URAIAN TENTANG KUNJUNGAN PANJA

Penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019. Upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI



dilakukan antara lain melalui upaya fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan memiliki mandat untuk melaksanakan diplomasi parlemen. Dalam melaksanakan mandat tersebut, BKSAP dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi dan mendukung DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan atas kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut dijalankan BKSAP salah satunya melalui pembentukan Panja Kerja Sama Ekonomi Regional.

Setelah kunjungan Panja ke beberapa Negara anggota Uni Eropa, salah satu hal yang mengemuka adalah keinginan negara-negara tersebut untuk menjadi alternatif pintu masuk barang-barang ekspor nasional Indonesia ke pasar Uni Eropa. Letak geografis beberapa pelabuhan seperti di Rumania dan Kroasia yang lebih dekat dibanding pelabuhan Amsterdam menjadi *selling point* yang mereka tawarkan. Di beberapa kesempatan, telah ditawarkan peluang kerja sama pelabuhan kargo (*transshipment*) dan galangan kapal. Sebaliknya, Indonesia dapat menjadi pintu masuk produk-produk Uni Eropa ke pasar ASEAN sejalan dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan penyelesaian negosiasi Indonesia – *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.

Hal ini menjadikan Panja Kerja Sama Ekonomi Regional berkeinginan untuk melihat secara langsung potensi di lapangan sekaligus mendiseminasikan peluang-peluang kerja sama yang didapat dari berbagai kunjungan tersebut kepada *stakeholders* di daerah terkait.

Sejalan dengan pengembangan ekonomi digital, terdapat pula potensi kerjasama pengembangan teknologi digital. Beberapa Negara anggota Uni Eropa saat ini tengah mengembangkan diri untuk menjadi hub IT dan teknologi komunikasi. Kerjasama ini dapat dieksplorasi lebih lanjut terutama karena Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang didominasi oleh teknologi automasi dan pertukaran data melalui program *Making Indonesia 4.0* yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, peningkatan kemampuan dalam bidang IT dapat membantu Indonesia untuk mengkapitalisasi potensi kreatif generasi muda seiring dengan bonus demografi di tahun 2030.

Sebagai salah satu provinsi terluar di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Kepulauan Riau merupakan pintu masuk utama ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi geografisnya yang strategis yakni berada di Selat Malaka, dimana Selat Malaka adalah jalur perdagangan laut utama yang menghubungkan kawasan Asia dan Australia, maka kegiatan pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Sektor perdagangan yang didominasi oleh perdagangan luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau



memegang peranan terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau.

Beberapa potensi yang telah diidentifikasi antara lain bidang maritim, pariwisata, industri dan ekonomi kreatif. Batam juga merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari skema kerja sama *Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara ketiga negara dan membuat sub-kawasan ini menjadi lebih menarik bagi investor regional dan internasional.

B. AGENDA KUNJUNGAN LAPANGAN

Agenda kunjungan lapangan Delegasi Panja KER selama berada di Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Nongsa Digital Park
2. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepri, serta Perwakilan DPRD Provinsi Kepri

C. HASIL-HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan ke Nongsa Digital Park, Batam

Kunjungan Panja KER dimaksudkan untuk memastikan bahwa peran pengawasan atas kerja sama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pada kunjungan tersebut delegasi Panja KER berkesempatan untuk mengunjungi Nongsa Digital Park yang merupakan realisasi daripada pengembangan ekonomi digital. pada tahun 2017 lalu Indonesia dan Singapura sepakat untuk menandatangani sejumlah kerjasama. Salah satunya adalah pengembangan ekonomi digital di Batam. Batam menjadi pilihan karena dua pimpinan negara menganggap pulau ini terletak di antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Salah satu investor terbesar dan terkemuka di Nongsa Digital Park adalah Infinite Studio milik PT. Kinema Systrans Multimedia sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi film dan animasi, serta konten media digital.

Dalam keterangannya Ketua Panja KER, Bapak Juliari Batubara mengungkapkan bahwa hendaknya pemerintah dapat lebih intensif mempromosikan potensi yang dimiliki oleh kota Batam, khususnya Nongsa Digital Park minimal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini khususnya karena mengingat bahwa Nongsa Digital Park diproyeksikan untuk bisa menarik investasi sebesar 500 juta dollar di bidang industri digital dan start up kreatif yang diharapkan mampu menyerap kesempatan kerja baru



bagi 10.000 pekerja. Pembangunan NDP ini juga merupakan upaya realisasi pemerintah untuk mendukung berkembangnya revolusi industri 4.0 dan menyikapi trend masa depan ekonomi dunia. Lebih jauh lagi, Nongsa Digital Park akan dimanfaatkan sebagai "jembatan digital" kerja sama bilateral dengan sentra ekonomi digital di Indonesia. Lebih jauh Juliari Batubara menjelaskan, bahwa saat ini Batam memiliki studio pembuatan film dan animasi yang fasilitasnya sangat baik dan telah berhasil bekerjasama dengan industri perfilman dan animasi yang ada didunia.

Perwakilan Infinite Studio juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan pelatihan pembuatan animasi untuk anak-anak muda Indonesia. Program pelatihan pembuatan animasi ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia di Batam, dan daerah sekitarnya yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil khususnya dalam bidang teknologi digital. Setelah selesai mengikuti pelatihan pembuatan animasi, anak-anak muda Indonesia ini nantinya akan memiliki peluang untuk bisa bekerja di Infinite Studio. Saat ini Infinite Studio mempekerjakan sebanyak 280 orang pekerja, dengan mayoritas animator dari Indonesia. Senada dengan Ketua Panja KER, Anggota Komisi XI Ibu Meilani Leimena Suharli berharap kemajuan industri perfilman dan animasi Indonesia saat ini dapat memiliki kontribusi yang signifikan pada pendapatan negara, dan mampu bersaing dengan negara-negara maju di masa yang akan datang.

NDP sendiri telah diresmikan pada 20 Maret 2018 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Dr. Vivian Balakrishnan. Nongsa Digital Park dirancang untuk menjadi taman digital terpadu yang menyediakan tempat bagi bisnis digital untuk berkembang, sekaligus merupakan lokasi yang ideal untuk dijadikan pengembangan pusat data. Saat ini Nongsa Digital Park telah terintegrasi dengan kawasan wisata Nongsa yang merupakan kawasan wisata terpadu seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Village dan Lapangan Golf yang saat ini dioperasikan oleh pihak swasta yaitu Grup Citramas.

Keberadaan Nongsa Digital Park ini menegaskan bahwa sebagai daerah terdepan, Batam memiliki posisi strategis untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pembangunan di daerah terdepan, melalui kerjasama ekonomi dengan negara tetangga seperti Singapura. Kerja sama RI-Singapura ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi implementasi konsep KEK. Sementara kerangka kerja sama pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun tetap merupakan kebijakan Indonesia, pengalaman keberhasilan Singapura mengembangkan kawasan serupa di berbagai negara diharapkan mendukung implementasi yang efektif. Sekalipun demikian, kerja sama kedua negara itu tidak menghalangi Indonesia membina kerja sama serupa dengan negara lain di tiga pulau itu maupun wilayah lainnya.

Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu untuk terus meningkatkan daya saing produknya agar bisa bersaing di pasar Internasional. Selain



itu, penguatan produksi domestik mutlak diperlukan agar Provinsi Kepulauan Riau tidak terlalu bergantung pada barang impor yang dapat mematikan produsen dalam negeri. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan peningkatan konektivitas yang didukung oleh ketersediaan sarana penunjang. Disamping itu juga perlu ditingkatkan kerja sama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama terkait peningkatan kualitas produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau ini, Delegasi Panja KER juga berkesempatan menemui jajaran Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Wakil Gubernur, **Yth. Sdr. Isdianto, S.Sos., M.M.**, mewakili Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si yang sedang berhalangan hadir. Dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur didampingi oleh Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, serta Perwakilan DPRD Provinsi Kepri

Ketua Panja KER BKSAP DPR RI, **Sdr. Juliari Batubara**, mengawali pertemuan menjelaskan bahwa kunjungan dimaksudkan untuk meninjau sejauh mana Kerjasama Ekonomi Regional yang telah ada, memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia. Produk akhir daripada Panja KER BKSAP DPR RI merupakan rekomendasi dari hasil kunjungan kerja ke luar negeri dan daerah. mengingat bahwa Panja KER ini beranggotakan anggota DPR RI dari lintas fraksi dan lintas komisi, maka diharapkan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki permasalahan dengan program pembangunan dan membutuhkan atensi dari DPR RI bisa langsung berkomunikasi dan berdiskusi dengan anggota dari Komisi terkait yang hadir pada hari ini. Disamping itu kunjungan juga dimaksudkan untuk meninjau secara langsung daya saing daerah yang memang membutuhkan peningkatan, dengan mempertimbangkan fakta bahwa saat ini Indonesia bahkan tidak masuk kedalam kelompok empat besar negara dengan daya saing yang baik di ASEAN.

Pertemuan dilanjutkan dengan paparan singkat mengenai profil umum Provinsi Kepulauan Riau oleh Wakil Gubernur Isdianto, S.Sos, M.M. Dalam paparan singkatnya Wakil Gubernur menyampaikan kondisi ekonomi makro Provinsi Riau yang antara lain terdiri dari data Perekonomian Kepulauan Riau pada triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp65,19 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp43,68 triliun. Sementara Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan III-2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,74 persen. Disamping itu Sebagai provinsi terluar, Kepulauan Riau ditunjang adanya kota Batam yang memiliki potensi yang sangat baik dalam hal peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung meningkatnya nilai perdagangan luar negeri, khususnya dengan kawasan lain. Dalam hal ini dengan Uni Eropa. Kontribusi kelima pelabuhan terhadap kumulatif ekspor Januari hingga Oktober



2018 sebesar 89,26 persen. Wakil Gubernur Isdianto, juga memaparkan data mengenai Produksi Perikanan Budidaya Laut yang telah mencapai 77.746,10 Ton, serta Produksi Perikanan Tangkap yang telah mencapai 303.411.28 Ribu Ton. Keduanya merupakan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Riau dalam bidang perikanan.

Pada pertemuan tersebut Wakil Gubernur juga memaparkan Visi dan Misi daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021 secara singkat. Berdasarkan pemaparan singkat dari 9 poin Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tersebut, terdapat beberapa poin yang memiliki kaitan erat dengan isu-isu yang menjadi perhatian Panja KER, terutama yang terkait dengan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendukung peningkatan posisi strategis Batam sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi di tingkat sub-regional. Poin-poin dari Misi RPJMD tersebut antara lain:

1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata untuk meningkatkan keterhubungan (konektivitas) antar kabupaten/kota;
2. Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;
3. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
4. Serta meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Keempat poin Misi RPJMD ini memiliki kaitan erat dengan perlunya peningkatan konektivitas dalam rangka mendukung Kerjasama Ekonomi Regional.

Konektivitas Nasional Indonesia dapat dikatakan merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Keterhubungan bisa dibangun dengan mewujudkan konektivitas fisik seperti; konektivitas udara melalui pembangunan bandara, konektivitas maritim melalui pembangunan pelabuhan, konektivitas infrastruktur sebagai penghubung antara pelabuhan, bandara dengan pusat-pusat perekonomian untuk mempermudah perpindahan barang dan jasa. Peningkatan konektivitas juga bisa dilakukan melalui pembukaan sejumlah jalur penerbangan dan destinasi wisata dari mancanegara ke daerah tujuan, misalnya Batam. Peningkatan konektivitas diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui nilai perdagangan yang meningkat karena dan jumlah wisatawan yang bertambah karena dibukanya rute-rute baru.

Peningkatan konektivitas ini juga merupakan hal yang menjadi fokus dari sejumlah kerjasama regional, baik antara Indonesia dengan kawasan lain, misalnya Eropa, ataupun dalam kerangka kerja sama IMS-GT. Jika merujuk pada hasil kunjungan Panja KER ke Rumania dan Austria, prospek-prospek kerjasama yang bisa ditindaklanjuti



dari kunjungan ke kedua negara tersebut sangat erat kaitannya dengan peningkatan konektivitas. Misalnya dalam hal pengembangan pelabuhan untuk menjadi pintu masuk bagi aktifitas perdagangan antar kawasan yang menjadi bahasan di Rumania, dan potensi pengembangan ekonomi digital yang sedang dikembangkan oleh Indonesia melalui dibangunnya Nongsa Digital Park berpeluang untuk bisa dihubungkan lebih lanjut dengan keinginan Rumania untuk menjadi IT Hub di Eropa.

Sejalan dengan pentingnya peningkatan konektivitas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menetapkan Program Prioritas 2016 -2021, yang mengutamakan pembangunan pada bidang infrastruktur dan bidang perhubungan. Kedua bidang tersebut merupakan komponen utama yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan konektivitas. Lebih jauh, Wakil Gubernur juga menjelaskan dalam paparannya bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dengan menggunakan dua strategi pendekatan:

- 1) Mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah BBKT (Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang), agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang sudah lebih maju dan sejahtera khususnya dalam jasa dan perdagangan, industri dan pariwisata, serta;
- 2) Mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah NAL (Natuna, Anambas, Lingga) sesuai dengan potensi yang dominan di wilayah tersebut seperti perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata dan migas.

Pada pertemuan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si yang diwakili oleh Wakil Gubernur dan jajarannya juga memaparkan beberapa Usulan Proyek Strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah khususnya dalam hal ekonomi, antara lain:

1. Pembangunan jembatan Batam – Bintan

Jembatan ini direncanakan untuk menghubungkan Batam dan Bintan dengan jarak sepanjang 13 km. Melalui pembangunan jembatan ini diharapkan terjadi peningkatan aktifitas ekonomi yang didorong oleh semakin mudahnya mobilitas orang, kendaraan, barang industri dan jasa.

2. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh

Direncanakan sebagai Pelabuhan Peti Kemas modern, *container yard*, dan Kawasan Industri Terpadu, pengolahan dan penyimpanan gas serta sebagai *Logistic Hub* dan *Port Gateway* di Wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu keberadaan KEK Tanjung Sauh juga diharapkan dapat memangkas *dwelling time* pelabuhan. Terintegrasi dengan pembangunan jembatan Batam - Bintan dan ditargetkan untuk memiliki kapasitas 5 juta TEUs/ tahun.

3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang

KEK Galang Batang sudah ditetapkan dengan PP Nomor 42 Tahun 2017 dan saat ini telah dilengkapi dengan beberapa infrastruktur seperti; Pelabuhan Laut dan



Kantor Administrator. Nilai Investasi yang sudah direalisasikan sebesar Rp 1,1 triliun hingga akhir 2017 dari total rencana investasi Rp36,2 triliun. Rencana pembangunan dalam waktu dekat; PLTU 6x25 MW, Waduk, Jalan dan utilitas lainnya.

4. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam

Sebagai pusat pengumpul migas, industri dan *container yard* dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Kapasitas simpan 4 juta kubik meter(cbm). Nilai investasi USD\$ 2 Miliar. Dalam tahapan proses verifikasi kelengkapan administrasi pengusulan KEK.

5. Pengembangan pelabuhan Batu Ampar

Daya saing pelabuhan Batu Ampar saat ini sangat tertinggal dengan pelabuhan-pelabuhan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Jurong, Tanjong Pagar, Pasir Gudang dan Tanjung Pelepas). Pengembangan bertujuan untuk memodernisasi sarana dan prasarana, pengembangan *container yard*, pengembangan *port management system*. Peningkatan kapasitas hingga 1 juta TEUs/Tahun. Untuk melakukan pengembangan ini dibutuhkan investasi sebesar US\$ 200 juta.

6. Pengembangan dan Modernisasi Sarana Bandara Hang Nadim

Daya saing bandara Hang Nadim saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Padahal, lokasi bandara Hang Nadim di kota Batam sangat strategis. Oleh karena itu rencana pengembangan dengan konsep aeropolis Bandara Internasional Hang Nadim meliputi penambahan kapasitas tamping dari kapasitas saat ini yaitu 5,2 juta penumpang per-tahun menjadi 32,6 juta penumpang per-tahun pada tahun 2033. Kemudian rencana pengembangan meliputi; Perluasan Terminal 1, pembangunan Terminal 2, perluasan Terminal Kargo, pengembangan kawasan komersial aeropolis, pengembangan fasilitas maintenance, repair, overhaul (MRO).

7. Pembangunan Batam Light Rail Transit (LRT)

Penyediaan transportasi transportasi massal, murah dan mampu mengatasi kemacetan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam realisasi dan keberlangsungan Usulan Proyek Strategis di Kepulauan Riau ini meliputi; belum ditetapkannya skema pembangunan dan pengelolaan, perijinan dan penentuan status lokasi proyek yang belum selesai (misalnya perubahan status lokasi dari kawasan hutan menjadi kawasan industri). Disamping itu Usulan Proyek Strategis ini juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui ditetapkannya usulan menjadi Proyek Strategis Nasional serta adanya dukungan dalam bentuk penyesuaian aturan untuk realisasi skema pembiayaan proyek melalui *joint venture* antara investor asing, swasta dan lokal.



Dalam kesempatan ini Wakil Gubernur juga menjelaskan salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau adalah Pariwisata. Jika potensi daerah lain yang berasal dari hasil alam seperti kelapa sawit bisa sewaktu-waktu mengalami kemunduran, maka pariwisata bisa dikatakan bisa lebih lama bertahan asalkan dikelola dan dikembangkan dengan baik. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari tiga daerah penyumbang devisa terbesar dalam industri pariwisata. Oleh karena itu menurut Wakil Gubernur, beberapa Usulan Proyek Strategis seperti pembangunan jembatan Batam – Bintan serta Pengembangan dan Modernisasi Bandara Internasional Hang Nadim juga berkaitan erat dengan pengembangan pariwisata di Kepulauan Riau. Wakil Gubernur berharap bahwa dengan adanya kunjungan dari Panja KER BKSAP DPR RI ini bisa membantu mengkomunikasikan kebutuhan Provinsi Riau kepada pemerintah pusat, terutama dalam hal usulan pembentukan daerah khusus pariwisata. Pembentukan daerah khusus pariwisata ini diharapkan dapat mempermudah perijinan di tingkat pemerintah pusat, dan mempermudah investor asing dalam melakukan investasi di bidang pariwisata.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Fokus pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang dipaparkan oleh Wakil Gubernur baik yang sesuai dengan RPJMD, Program Prioritas 2016 -2021 ataupun Usulan Proyek Strategis telah mencerminkan pentingnya peningkatan konektivitas dan daya saing Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka meningkatkan kedudukan provinsi tersebut sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan mempertimbangkan posisinya yang strategis untuk menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi di tingkat regional.
2. Dukungan penuh dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk realisasi Usulan Proyek Strategis, khususnya dalam hal perizinan dan perubahan status daerah yang akan dijadikan lokasi proyek, serta penyesuaian aturan untuk realisasi skema pembiayaan proyek. Apakah itu melalui *joint venture* antara investor asing, swasta maupun lokal.
3. Di bidang pariwisata, usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Daerah Khusus Pariwisata perlu dipertimbangkan dan dikaji potensinya mengingat selama ini Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari tiga daerah penyumbang devisa terbesar yang berasal dari sektor pariwisata.

B. SARAN

1. Hasil kunjungan lapangan Panja sekiranya dapat dikomunikasikan ke Komisi-komisi terkait khususnya Komisi 1, Komisi 6, Komisi 9, Komisi 10 dan Komisi 11 guna mendapatkan tindak lanjut yang sesuai dengan harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait Usulan Proyek Strategis Gubernur Kepulauan Riau.



2. Hasil kunjungan Panja ini dapat menjadi pertimbangan bagi kunjungan lapangan Panja selanjutnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan konektivitas di daerah dalam rangka mendukung daya saing yang lebih baik.
3. Khusus mengenai potensi pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau, perlu ditindaklanjuti oleh komisi terkait mengenai adanya usulan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai Daerah Khusus Pariwisata.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 9 (sembilan) Anggota DPR RI, 1 (satu) orang Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, 3 (dua) orang staf Sekretariat BKSAP (Sekretaris Delegasi), 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP, 1 (satu) orang wartawan 1 (satu) orang wartawan TV Parlemen, dan 1 (satu) orang wartawan Media Indonesia adalah sebesar Rp 291.008.700,- (seratus dua puluh juta dua puluh empat ribu rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- Brosur informasi Nongsa Digital Park
- Materi paparan Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
- Materi paparan Usulan Proyek Strategis Gubernur Kepulauan Riau
- Kliping Berita;

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Panja Kerjasama Ekonomi Regional BKSAP DPR RI yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Desember 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Atas nama Panja, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 20 Desember 2018
Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional,

Juliari P. Batubara
A-168



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN DELEGASI BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI ASEAN INTER-
PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) DAN ASIA PACIFIC
PARLIAMENTARY FORUM (APPF) TERKAIT INTEGRASI REGIONAL DAN
REGIONALISME EKONOMI
KE BUCHAREST – RUMANIA, 18 – 24 MARET 2018**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019. Upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI dilakukan antara lain melalui upaya fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Saat ini tengah dilakukan negosiasi 16 perjanjian dagang, 6 diantaranya diharapkan selesai dalam waktu dekat. Keenam perjanjian tersebut yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pengembangan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Chile Trade In Goods Agreement (TIGA), Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (FTA), dan pengembangan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Dalam hal ini Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) sebagai ujung tombak diplomasi parlemen dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia. Diplomasi Parlemen ini juga dapat mendukung DPR RI dalam melakukan peran pengawasan negosiasi-negosiasi kerjasama ekonomi yang diambil pemerintah selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.



Dalam konteks regionalisme, BKSAP senantiasa berupaya berkontribusi ikut menyukseskan visi ekonomi pemerintah melalui kerja sama antar parlemen baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Sebagai negara yang terkemuka di kawasan, Indonesia mendukung penuh perdagangan bebas regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan di awal tahun 2016 dan kerja sama ekonomi dalam kerangka Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Salah satu program kerja BKSAP adalah melakukan kunjungan sebagai *follow up* bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA dan APPF.

Sidang Umum ke-38 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, menghasilkan beberapa resolusi di bidang ekonomi yakni: *Resolution on Supporting the Implementation of Financial Inclusion Programs in ASEAN*; *Resolution on Promoting an Inclusive and Innovation-Led Growth for the ASEAN Economic Community (AEC)*; dan *Resolution on Intra-Regional Economic Cooperation for Equitable Development and Inclusive Growth in the ASEAN Economic Community*.

Sidang Tahunan ke-26 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) yang diselenggarakan pada tanggal 17 - 21 Januari 2018 di Ha Noi - Vietnam, menghasilkan beberapa resolusi di bidang ekonomi yakni: *Resolution on Promoting Economic Growth and Free Trade*; *Resolution on Supporting the Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in the Digital Age*; dan, *Resolution on the Role of Parliaments in Promoting Seamless Regional Economic Integration*;

Selain untuk menelaah tantangan integrasi regional dan liberalisasi perdagangan dalam kerangka regionalisme ekonomi, kunjungan ditujukan pula untuk melakukan diplomasi ekonomi di negara-negara yang bukan merupakan pasar tradisional produk-produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi pasar bagi ekspor RI.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi Badan Kerja sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) terkait kerja sama ekonomi regional pada tanggal 18 – 24 Maret 2018 ke Bucharest didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 39/PIMP/IV/2017-2018 tertanggal 12 Maret 2018.

II. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) adalah sebagai berikut:



Sdr. Juliari P. Batubara
Watua BKSAP/Ketua Delegasi
F-PDI-P



H. Rofi' Munawar, Lc
Watua BKSAP/Anggota Delegasi
F-PKS



Hj. Nurhayati Monoarfa
Watua BKSAP/Anggota Delegasi
F-PPP



Sdr. Dony Maryadi Oekon, ST
Anggota Delegasi
F-PDIP



Sdri. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S
Anggota Delegasi
F-PDIP



Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME
Anggota Delegasi
F-PG



Sdri. Susi Marleni Bachsin, SE, MM
Anggota Delegasi
F-P GERINDRA



Ir. Dwita Ria Gunadi
Anggota Delegasi
F-P GERINDRA



H. Jon Erizal, SE., MBA
Anggota Delegasi
F-PAN / A-463



H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.S
Anggota Delegasi
F-PKB / A-55



Drs. H. Mahfuz Sidik, M. Si
Anggota Delegasi
F-PKS / A-105

Selama kunjungan, Delegasi didampingi oleh Pejabat dan staf KBRI Bucharest, Pejabat dan staf KSR BKSAP, Tenaga Ahli BKSAP, serta jurnalis Bisnis Indonesia.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam konteks kerja sama regional adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara di kawasan Eropa terkait integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.



2. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional melalui perspektif negara mitra bicara ASEAN.
3. Meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen dengan negara-negara yang tergabung dalam kerangka kerjasama ekonomi regional Uni Eropa.
4. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama regional.
5. Bertukar pandangan (*sharing best practices*) terkait tugas-tugas keparlemen yang meliputi penyusunan legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama yang berhubungan dengan kerja sama regional.

IV. PERSIAPAN DELEGASI

Sebagai salah satu persiapan kunjungan kerja ke Rumania, Delegasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional telah melakukan pertemuan dengan Dubes Rumania untuk Indonesia, **H.E. Madam Valerica Epure**, pada tanggal 14 Maret 2018 di Kantor Kedutaan Besar Rumania untuk Indonesia, Menteng - Jakarta. Duta Besar Rumania mendukung tujuan utama Panja Kerjasama Ekonomi Regional ke Rumania untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Secara konkrit, kerja sama dapat dilakukan dalam bidang industri galangan kapal, serta bidang ketenagakerjaan untuk industri perhotelan dan pekerja konstruksi. Bidang-bidang kerja sama ini telah pula didiskusikan oleh delegasi Kementerian Perdagangan dan Chamber of Commerce and Industry Rumania dengan Kementerian Luar Negeri RI di sela-sela Trade Expo Indonesia 2017 di Jakarta.

Wakil Ketua BKSAP selaku Ketua Delegasi, **Sdr. Juliari P. Batubara** didampingi oleh anggota Delegasi, **Sdri. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS**. Beliau menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Rumania, yang akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan langsung dengan pejabat Kementerian Lingkungan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Rumania yang dijadwalkan berlangsung di Bucharest dalam rangkaian kunjungan Delegasi. Ketua Delegasi juga menyampaikan bahwa kunjungan ini dilaksanakan karena DPR RI, melalui BKSAP, ingin menggali informasi sebanyak mungkin dari para mitra dialog di Rumania mengenai peluang kerja sama yang potensial dikembangkan kalangan dunia usaha kedua negara antara lain dalam bidang



industri galangan kapal, serta bidang ketenagakerjaan untuk industri perhotelan dan pekerja konstruksi. Bidang-bidang kerja sama ini telah pula didiskusikan oleh delegasi Kementerian Perdagangan dan Chamber of Commerce and Industry Rumania dengan Kementerian Luar Negeri RI di sela-sela Trade Expo Indonesia 2017 di Jakarta

Dubes Valerica Epure mengatakan pihaknya berharap banyak dari hasil kunjungan BKSAP ke negaranya agar kerja sama perdagangan dan investasi dapat lebih dipacu lagi. Menurut dia, pelaku bisnis kedua negara, baik swasta maupun BUMN, sangat terbuka untuk menjalin kerja sama bisnis yang lebih erat, karena masing-masing memiliki keunikan yang bisa dimanfaatkan. Valerica menjelaskan Rumania sudah sejak lama dikenal kuat untuk industri kereta api, galangan kapal, komoditas pertanian hingga pengelolaan pelabuhan.

Selain itu, Dubes Rumania menyinggung mengenai peluang Port Constanța sebagai pintu masuk ekspor Indonesia ke Eropa mengingat lokasi pelabuhan tersebut yang strategis dan lebih dekat dengan Indonesia jika dibandingkan dengan Port Rotterdam yang saat ini dipergunakan Indonesia.

Dubes Rumania menggarisbawahi pula mengenai peluang ekspor kopi Indonesia ke Rumania mengingat kualitas kopi Indonesia dan Rumania memiliki budaya minum kopi yang kuat.

Lima besar produsen kopi masa tanam 2016-2017¹:

1.	Brazil	55,000,000
2.	Vietnam	25,500,000
3.	Colombia	14,500,000
4.	Indonesia	11,491,000
5.	Ethiopia	6,600,000

Lima besar negara eksportir kopi tahun 2016-2017:

1.	Brazil	34,500,000
2.	Vietnam	23,200,000
3.	Colombia	12,800,000
4.	Indonesia	6,891,000
5.	Honduras	5,589,000

¹ <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/kopi/item186>



Delegasi mendengarkan paparan Duta Besar Rumania untuk RI, Hon. Valerica Epure mengenai perkembangan ekonomi Rumania

Sekilas Mengenai Rumania



Populasi	: 22.202.000 jiwa (data Badan Statistik Rumania per Juli 2017)
Luas Wilayah	: 238.391 km ²
Bentuk Pemerintahan	: Parlementer/Semi-Presidensial
Kepala Negara	: Presiden Klaus Iohannis
Perdana Menteri	: Madam Vasilica Viorica Dancila
President Chamber of Deputies	: Nicolae-Liviu Dragnea (Partai Sosial Demokrat)
President Senate	: Călin Popescu-Tăriceanu
GDP (total)	: USD 425.039 Milyar (2016)
GDP (per-kapita)	: USD 9.471 (2016)

Fokus Hubungan RI-Rumania dan Potensi Rumania

- Mitra bagi kerjasama di forum internasional.
- Merupakan mitra dagang ke-5 Indonesia di kawasan Eropa Timur dan Tenggara.

Isu yang menjadi perhatian Indonesia

- Peningkatan perdagangan bilateral, investasi dan kunjungan wisatawan asal Rumania.
- Meminta dukungan Rumania untuk menerima lebih banyak komoditas unggulan Indonesia.
- Dukungan Rumania terhadap pencalonan Indonesia di organisasi internasional.



- Kemudahan mendapatkan visa Rumania bagi WNI.

Isu yang menjadi perhatian Rumania

- Peningkatan perdagangan RI – Rumania.
- Dukungan RI terhadap pencalonan Rumania di Organisasi Internasional.
- Ratifikasi Protokol Perubahan pada Persetujuan Jangka Panjang mengenai Kerja Sama Ekonomi, Teknik dan Ilmu Pengetahuan (KSET) yang ditandatangani pada 17 Juli 2006.
- Mendorong peningkatan kerja sama dengan partisipasi aktif dari pelaku bisnis dan instansi teknis melalui revitalisasi Sidang Komisi Bersama.

Informasi Kunci

- Rumania menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Januari 2007. Namun, Rumania belum menggunakan mata uang bersama Uni Eropa, Euro, dan belum menjadi salah satu negara yang menerapkan visa Schengen.
- Rumania bergabung dengan NATO pada 29 Maret 2004. Menjadi anggota NATO memberikan jaminan keamanan dan stabilitas eksternal Rumania, yang merupakan hal penting dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kerja sama Ekonomi

- Perdagangan: Rumania merupakan mitra dagang RI terbesar ke-5 di Eropa Timur dan Tenggara. Nilai perdagangan bilateral:
2017: Jan-Agus USD 113,52 juta, surplus di pihak Indonesia USD 52,54 juta
2016: USD 134,55 juta, surplus di pihak Indonesia USD 50,40 juta
2015: USD 117,64 juta, surplus di pihak Indonesia USD 67,50 juta
2014: USD 152,93 juta, surplus di pihak Indonesia USD 79,35 juta
2013: USD 138,33 juta, surplus di pihak Indonesia USD 55,89 juta
- Jumlah wisatawan Rumania ke Indonesia, 9.758 (Jan-Okt 2016); 9.020 (2015); 7.802 (2014); 7.508 (2013); 6.303 (2012).
- Jumlah WNI di Rumania: 139 orang (KBRI Bucharest, April 2016).

Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Terorganisir dan Transnasional

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional, Terorisme dan jenis Kejahatan lainnya ditandatangani pada 10 Juli 2006 di Bucharest, dan telah berlaku sejak 7 Oktober 2016.



Kerjasama Pertahanan

Indonesia menyampaikan usulan draft persetujuan kerja sama pertahanan pada FKB ke-2 di Bucharest, Januari 2005 dan kemudian menjadi Cooperation in the Military Field. Pihak Rumania menyampaikan counterdraft pada Februari 2006.

Pihak Rumania kembali menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pembahasan draft perjanjian kerja sama melalui nota diplomatik pada bulan Mei 2014. Hingga saat ini pembahasan masih pada Kementerian Pertahanan RI.

Sementara itu, terkait pengadaan kapal perusak rudal TNI AL yang dipesan ke Perusahaan Damen Schelde di Belanda, sebagian modulnya (bagian dari kapal) dibuat di Galatia, Rumania dan sebagian dibuat oleh PT PAL Surabaya.

Kerjasama bidang Pencucian Uang

Pada tanggal 12 Oktober 2004 di Bucharest telah ditandatangani MoU Concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering antara PPATK-Indonesia dan NOPCML (National Office for Prevention and Control of Money Laundering)-Rumania. Kerja sama ini telah berjalan mulai tanggal ditandatangani.

Kerja Sama Perdagangan

Rumania merupakan mitra dagang terbesar ke-5 di kawasan Eropa Timur dan Tenggara bagi Indonesia. Secara umum, kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara menunjukkan fluktuasi. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa terdapat penurunan pertumbuhan nilai perdagangan RI-Rumania selama lima tahun (periode 2012-2017) sebesar -6,39%.

Di tahun 2016, total nilai perdagangan kedua negara mencapai \$134,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar 12,2% dibanding nilai tahun 2015. Indonesia secara konsisten mengalami surplus perdagangan dalam lima tahun terakhir.

Hingga bulan Agustus 2017, terjadi kenaikan nilai perdagangan sebesar 22,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2016, dengan kenaikan nilai ekspor sebesar 41,69%.



FLEGT – VPA Uni Eropa

Rumania merupakan salah satu negara anggota UE yang masih dalam proses internal untuk bisa mengikuti implementasi UE terkait FLEGT. Hal tersebut disebabkan hambatan internal dari instansi teknis di Rumania. Namun demikian, Rumania tidak menyatakan keberatan atas proses implementasi FLEGT RI – UE. Dalam pertemuan Dubes RI Bucharest dengan pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup Rumania, pihak Rumania menyatakan akan mengikuti implementasi FLEGT apabila telah menyelesaikan hambatan internal pada instansi teknisnya.

Kerja sama investasi

Data realisasi investasi Rumania di Indonesia di tahun 2016 dengan total realisasi investasi sebesar USD 420 ribu. Realisasi investasi Rumania di Indonesia pada semester pertama 2016 tercatat menduduki peringkat ke-57. Sektor-sektor usaha pada investasi tersebut antara lain:

1. Hotel dan Restoran sebesar USD 320 ribu berupa 1 proyek
2. Perdagangan dan Reparasi sebesar USD 100 ribu berupa 1 proyek.

Kerjasama maritim

DMT Marine Equipment, perusahaan Rumania yang berkedudukan di Galati, pada 2015 telah bersepakat melakukan kerja sama dengan PT Daya Radar Utama Lampung dalam pengadaan 15 tugboat (kapal tarik/penyeret). DMT Marine Equipment juga telah menjalin kerja sama dengan PT Dumas Tanjung Perak Shipyard dalam proyek sejenis.

Energi Terbarukan

Rumania mengusulkan kerja sama di bidang energi terbarukan. Usulan ini telah disampaikan kepada Biro KLN Kementerian ESDM melalui Surat No.13527/BK/07/2014/39 tanggal 4 Juli 2014.

Biro KLN Kementerian ESDM melalui suratnya No.5034/05/SJR/2014 tanggal 8 Agustus 2014 mengusulkan bentuk kerja sama di bidang pemanfaatan tenaga air, angin dan matahari, adalah:

- peningkatan investasi di Indonesia,
- transfer teknologi dan pengetahuan,



- penelitian bersama, kediklatan dan lokakarya teknologi dan
- pertukaran pengalaman serta implementasi teknologi.

Selain itu di bidang bioenergi, Kementerian ESDM mengusulkan untuk bekerja sama dalam bentuk peninjauan kerja sama teknis dan promosi investasi.

Kerja sama Pertanian

MoU Kerja Sama Pertanian RI – Rumania telah ditandatangani pada 18 September 2006. Pemberitahuan pemberlakuan internal di pihak Indonesia disampaikan melalui Nota Diplomatik No. D/00040/01/2014. Pada tanggal 31 Juli 2014, Kemlu Rumania melalui Nota Diplomatik No. H2-1/3230 menyampaikan pemberitahuan penyelesaian prosedur internal pihak Rumania sehingga MoU Kerja Sama Pertanian RI - Rumania diberlakukan terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014.

Memperhatikan aspek kesesuaian area kerja sama dalam MoU dengan rencana strategis pembangunan pertanian ke depan, terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi prototipe skema kerja sama awal, seperti:

- Teknologi perbenihan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan.
- Teknologi pembibitan dalam mendorong peningkatan populasi sapi pedaging dan sapi perah untuk meningkatkan sumber protein hewani nasional.
- Teknologi pengairan modern.

Peninjauan Kerja Sama Energi oleh PT Dalle Energy di Rumania

Pada 25 Februari – 1 Maret 2017 PT. Dalle Energy berkunjung ke Rumania dalam rangka peninjauan kerja sama di bidang energi. PT. Dalle Energy merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang manajemen produksi dan pengolahan energi. Pada kunjungan tersebut, dilaksanakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha Rumania di bidang energi, yaitu Eco Hornet, Eco Solution, Intec (COPA International Energy Consultants), dan Enevo Group, dan kunjungan lapangan ke salah satu instalasi untuk produksi energi di daerah Brasov, Rumania.

Peninjauan Kerja Sama Transportasi oleh Astra Rail Industries di Indonesia

Pada 15 – 21 Mei 2017, delegasi Astra Rail Industries Rumania berkunjung ke Indonesia, dalam rangka peninjauan kerja sama di bidang transportasi. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Dubes RI Bucharest dengan CEO



perusahaan Astra Rail pada bulan April 2017 serta hasil pertemuan Menlu Rumania, Lazar Comanescu dengan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, pada kunjungannya ke Indonesia tanggal 12 Oktober 2016. Astra Rail Industries merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kereta penumpang, dan pada periode 1980an pernah menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Astra Rail bertemu dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perhubungan, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi, Komite Penyediaan Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPIP), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA). Di sela-sela pertemuan, delegasi juga melakukan kunjungan lapangan ke Depo KRL Bukit Duri, Balai Yasa Manggarai, Stasiun Bandung, Depo Lokomotif Bandung, dan Pabrik INKA di Madiun.

Sebagai tindak lanjut, PT INKA menawarkan Astra untuk bekerja sama pada proyek di India, khususnya pembuatan body kereta aluminium. PT INKA membutuhkan mitra yang berpengalaman pada pembuatan body kereta aluminium, namun demikian Astra mengakui tidak memiliki spesialisasi pada bidang tersebut. Negosiasi hingga saat ini masih berlangsung.

V. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Selama kunjungan kerja ke Bucharest, delegasi Panja Kerja Sama Ekonomi Regional mengadakan sejumlah pertemuan, yaitu:

Pertemuan Dengan Committee for Foreign Policy – the Parliament of Romania

Delegasi Panja KER mengawali kunjungan ke Bucharest dengan agenda pertemuan dengan Parlemen Rumania. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Panja KER diterima oleh **Hon. Mr. Ben-Oni Ardelean**, Wakil Ketua Parlemen (*Chamber of Deputies*) yang sekaligus merupakan Wakil Ketua *Committee for Foreign Policy*. Kedua parlemen mengapresiasi hubungan yang baik telah terjalin antara lembaga legislatif kedua negara. Selain itu Parlemen Rumania menyampaikan keinginan untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi antara kedua negara. Rumania menyambut baik kunjungan BKSAP dan memandang kunjungan ini sebagai langkah awal intensifikasi kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Rumania sangat mendorong penyelesaian perundingan Indonesia – EU CEPA

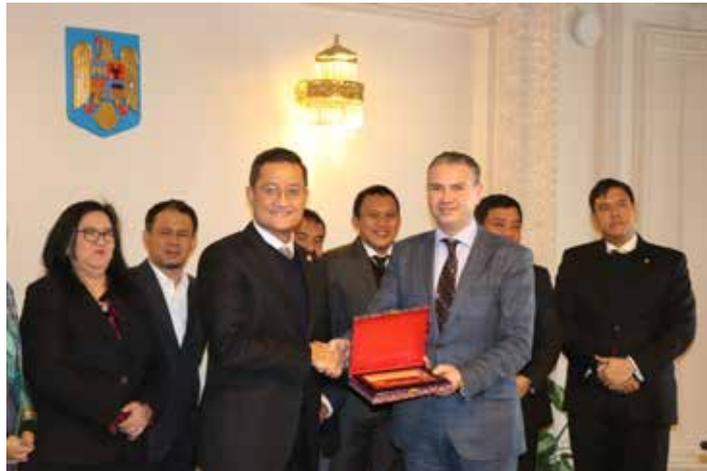
(Comprehensive Economic Partnership Agreement). Diharapkan Indonesia – EU CEPA dapat meningkatkan volume perdagangan Indonesia dan Rumania yang saat ini mengalami surplus di pihak Indonesia. Dengan adanya Indonesia – EU CEPA, kebijakan perdagangan Rumania dengan Indonesia akan terintegrasi dengan kebijakan di tingkat supranasional yaitu Uni Eropa.



Ketua Delegasi, Sdr. Juliari Batubara menyampaikan pandangannya terkait kerjasama Indonesia - Rumania



Wakil Ketua BKSAP, Sdri. Nurhayati Monoarfa memberikan tanggapan atas tawaran dari Parlemen Rumania



Delegasi BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Ketua Delegasi, Sdr. Juliari P. Batubara bertukar cinderamata dengan **Hon. Mr. Ben-Oni Ardelean**, Wakil Ketua Parlemen (*Chamber of Deputies*) yang sekaligus merupakan Wakil Ketua *Committee for Foreign Policy*.

Dalam kesempatan ini, delegasi Panja KER menyampaikan pula mengenai komitmen Indonesia untuk implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup terutama dalam industri kelapa sawit. Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk membenahi industri kelapa sawit. DPR RI saat ini tengah membahas RUU Perkelapasawitan sebagai payung hukum pembenahan industri ini dari hulu hingga ke hilir, DPR RI juga mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat standarisasi Crude Palm Oil (CPO) melalui penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah mencakup aspek legalitas, tanggung jawab sosial dan praktik bisnis yang berlaku secara universal. Langkah korektif secara berkesinambungan terus dilakukan terutama melalui moratorium perluasan lahan untuk kelapa sawit, pembenahan skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta, restorasi lahan gambut dan praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pertemuan dengan the Ministry of Business Environment, Commerce and Entrepreneurship

Dalam pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan, delegasi Panja KER membicarakan mengenai kerja sama ekonomi regional ASEAN dan Uni Eropa serta kerja sama ekonomi bilateral. Secretary of State at the Ministry of Business Environment, Commerce and Entrepreneurship, **Hon. Mrs. Paula-Marinela Pirvanescu** yang menerima delegasi Panja KER

menyampaikan bahwa Rumania memandang penting peningkatan kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Rumania berharap Indonesia dapat mempertimbangkan negaranya sebagai pintu masuk ekspor Indonesia. Pelabuhan Constanta memiliki keunggulan letak geografis yang dapat dimanfaatkan sebagai hub logistik untuk memperluas penetrasi pasar ekspor Indonesia. Saat ini Rumania tengah mengembangkan kualitas pelayanan dan infrastruktur pelabuhan Constanta agar sejajar dengan pelabuhan Rotterdam yang saat ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tertua di dunia serta umum digunakan sebagai pintu masuk ekspor negara-negara ASEAN ke Uni Eropa.



Anggota Delegasi, Sdr. Jon Erizal menyampaikan beberapa pertanyaan terkait regulasi impor yang berlaku di Rumania



Delegasi berfoto bersama Secretary of State at the Ministry of Business Environment, Commerce and Entrepreneurship, **Hon. Mrs. Paula-Marinela Pirvanescu**

Terkait peningkatan ekspor komoditas dari Indonesia, Rumania melihat prospek untuk peningkatan volume perdagangan CPO dan Kopi. Dua komoditas ini telah pula menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahun lalu antara Ministry of Business Environment, Commerce and Entrepreneurship dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selain itu, Rumania melihat potensi untuk mengimpor sabun dan kosmetik dari Indonesia. Kemudian berdasarkan pengalaman memimpin delegasi Pemerintah, Kadin dan Pengusaha Rumania untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2017 di Jakarta, Paula-Marinela Pirvanescu melihat adanya peluang kerja sama bidang jasa ketenagakerjaan di sektor infrastruktur bangunan dan perhotelan serta industri kapal dan peralatan pertanian. Selain itu, Rumania menyambut baik pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memandang posisi strategis Indonesia di kawasan dapat membantu ekspansi kerja sama perdagangan Rumania dengan negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu topik pembahasan yang mengemuka adalah kemungkinan Rumania memiliki aturan perdagangan bilateral dengan Indonesia di luar ikatan aturan-aturan supranasional di tingkat Uni Eropa. Menyikapi hal ini, Direktur Departemen Politik Perdagangan dan Politik Luar Negeri khusus Kerja Sama Indonesia – Rumania, **Mr. Legiana Codo**, menyampaikan bahwa kebijakan di tingkat Uni Eropa mewakili pula kepentingan Rumania. Setiap anggota Uni Eropa dapat memasukan produk khusus yang diminati ke dalam daftar produk impor. Negosiasi perdagangan

dilakukan dengan Komisi Uni Eropa yang mewakili kepentingan seluruh negara anggota Uni Eropa.

Pertemuan dengan the Chambers of Commerce and Industry of Romania (CCIR)

Kerja sama antara Kadin Indonesia dan Kadin Rumania telah terjalin dengan baik. Hal ini ditandai salah satunya dengan penandatanganan MoU antara KADIN Rumania dan KADIN Indonesia di sela-sela kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Rumania, Lazar Comanescu, ke Indonesia pada tahun 2016. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menlu Rumania dan Wamenlu RI, A.M. Fachir. Penandatanganan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antar pengusaha kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi dan promosi dagang serta investasi. Dalam kesempatan tersebut, Rumania menyampaikan kesiapan untuk menjadi pintu masuk bagi Indonesia ke kawasan Eropa Timur. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut adalah pembentukan seksi khusus di Kamar Dagang dan Industri Rumania untuk meningkatkan permasalahan perdagangan dan perindustrian antar Rumania dan Indonesia.





Dialog dengan *Chamber of Commerce and Industry of Romania* berlangsung secara aktif

yang diwakili oleh Director Department of Foreign Affairs, **Mr. Virgil Goaga**, menyampaikan kepada delegasi Panja KER bahwa secara konkrit, kerja sama dapat dilakukan dalam bidang ekspor kopi Indonesia ke Rumania, industri galangan kapal, serta bidang ketenagakerjaan untuk industri perhotelan dan pekerja konstruksi.

Kunjungan ke SIVECO Software

SIVECO merupakan flagship company Rumania yang mengembangkan dan mengekspor produk perangkat lunak dan proyek konsultasi TI dengan nilai tambah tinggi ke negara-negara di dalam Komunitas Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara dan wilayah Commonwealth of Independent States (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan). SIVECO Rumania merupakan satu-satunya perusahaan perangkat lunak Rumania yang menyediakan layanan TI langsung bagi European Commission. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan proyek TI yang besar dan kompleks untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, kepabeanan, institusi Eropa, perusahaan swasta dan sektor publik. Selama lebih dari 25 tahun beraktivitas, SIVECO Rumania telah menerima lebih dari 200 penghargaan nasional dan internasional.





Delegasi menyimak pemaparan dari pimpinan SIVECO salah satunya mengenai *e-election* di Rumania

Presentasi yang disampaikan oleh pihak Siveco sangat menarik minat delegasi yang hadir. Salah satu yang paling menarik adalah mengenai produk pengaturan pemilihan umum secara elektronik (*E-election*), karena SIVECO merupakan perusahaan pelaksananya di Rumania. Hal lain yang menjadi sorotan delegasi adalah mengenai keamanan data pribadi dalam *software* kesehatan terpadu nasional yang didesign SIVECO dipergunakan secara luas oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Rumania. Selain menangani klien Pemerintah Rumania, saat ini SIVECO juga menangani klien-klien pemerintah di luar Rumania yaitu *software* promosi pariwisata untuk Pemerintah Kazakhstan yang memanfaatkan kecanggihan *artificial intelligence*.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kunjungan Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) terkait kerja sama ekonomi regional pada tanggal 18 – 24 Maret 2018 telah berjalan dengan lancar dan sukses.



2. Delegasi Panja Kerjasama Ekonomi Regional ini telah menjalankan tugas sesuai dengan misi dari kunjungan dan telah mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat mengenai kebijakan ekonomi Rumania yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi di tingkat supranasional Uni Eropa.
3. Rumania sangat mendukung penyelesaian perundingan Indonesia – EU CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang saat ini tengah memasuki tahap perundingan keempat. Rumania mengungkapkan harapannya bahwa Indonesia – EU CEPA akan mendorong volume ekspor kedua negara dan menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk ke ASEAN.
4. Rumania saat ini tengah berambisi untuk mengembangkan bidang informasi dan teknologi. Hal ini didorong oleh visi untuk menjadikan Rumania sebagai hub IT kawasan Eropa.

B. Saran

1. Indonesia dan Rumania memiliki kesamaan pandangan terkait peningkatan volume perdagangan kedua negara. Dalam hal ini proposal Rumania yang mengajukan pelabuhan Constanta sebagai alternatif pintu masuk barang-barang ekspor nasional Indonesia ke pasar Uni Eropa layak untuk dikaji lebih lanjut. Perlu dipertimbangkan kapasitas pelabuhan (terpasang dan terpakai) dalam melayani aliran barang masuk dan keluar. Hal ini dapat dikomunikasikan oleh BKSAP dengan Komisi V terkait infrastruktur pelabuhan dan industri perkapalan, Komisi VI yang membidangi perdagangan internasional dan Komisi XI mengenai kepabeanan.
2. Memulihkan *image* mengenai produk kelapa sawit Indonesia masih menjadi tugas besar seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri. Saat ini dibutuhkan keterlibatan semua stakeholders untuk mengkampanyekan posisi terkini terutama terkait penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi komoditas kelapa sawit dan produk unggulan Indonesia lainnya. Mengingat kebijakan mayoritas negara anggota Uni Eropa sangat dipengaruhi oleh parlemen negara tersebut, penguatan aspek diplomasi parlemen oleh BKSAP DPR RI dapat berperan untuk memperkuat komunikasi antar parlemen dan menjembatani kepentingan diplomasi perdagangan yang dilakukan pemerintah RI.



3. Terkait proses negosiasi Indonesia – EU CEPA, selayaknya DPR RI melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Perdagangan. Selain untuk mendapatkan *progress* negosiasi, juga untuk mengawal kepentingan Indonesia telah terwakili dalam poin-poin hasil kesepakatan negosiasi tersebut.
4. Indonesia dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peluang kerja sama IT dengan Rumania. Hal ini sejalan dengan semakin mengemukanya *trend* penerimaan devisa negara dari sektor industri kreatif dan e-commerce. Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang didominasi oleh teknologi automasi dan pertukaran data melalui program *Making Indonesia 4.0* yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, peningkatan kemampuan dalam bidang IT dapat membantu Indonesia untuk mengkapitalisasi potensi kreatif generasi muda seiring dengan bonus demografi di tahun 2030.

VII. PENUTUP

A. Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 12 (duabelas) Anggota DPR RI, 3 (tiga) orang Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal DPR RI (Sekretaris Delegasi), 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP DPR RI, serta 1 (satu) orang jurnalis media nasional, adalah sebesar Rp. 1.484.310.200 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah)

B. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) terkait integrasi regional dan regionalisme ekonomi pada tanggal 18 – 24 Maret 2018 ke Bucharest. Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi,



kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

C. **Keterangan Lampiran**

Laporan ini dilengkapi oleh pemberitaan media.

Jakarta, Maret 2018

a.n. Delegasi,
Ketua

Juliari P. Batubara
A-168



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN
DELEGASI BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI ASEAN INTER-
PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) DAN ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY
FORUM (APPF) TERKAIT INTEGRASI REGIONAL DAN REGIONAL EKONOMI
VIENNA, AUSTRIA, 20-26 MEI 2018**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan bidang ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019. Upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI dilakukan antara lain melalui upaya fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Saat ini tengah dilakukan negosiasi 16 perjanjian dagang, 6 diantaranya diharapkan selesai dalam waktu dekat. Keenam perjanjian tersebut yakni Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pengembangan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (PTA), Indonesia-Chile Trade In Goods Agreement (TIGA), Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) CEPA, ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (FTA), dan pengembangan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Dalam hal ini Badan Kerja Sama Antar parlemen (BKSAP) sebagai ujung tombak diplomasi parlemen dapat mengambil peran dalam diplomasi ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia. Diplomasi Parlemen ini juga dapat mendukung DPR RI dalam melakukan peran pengawasan negosiasi-negosiasi kerja sama ekonomi yang diambil pemerintah selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks regionalisme, BKSAP senantiasa berupaya berkontribusi ikut menyukseskan visi ekonomi pemerintah melalui kerja sama antarpallemen baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Sebagai negara yang terkemuka di kawasan, Indonesia mendukung penuh perdagangan bebas regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan di awal tahun 2016 dan kerja sama ekonomi dalam kerangka Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Salah satu



program kerja BKSAP adalah melakukan kunjungan sebagai *follow up* bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA dan APPF.

Sidang Umum ke-38 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, menghasilkan beberapa resolusi di bidang ekonomi yakni: *Resolution on Supporting the Implementation of Financial Inclusion Programs in ASEAN*; *Resolution on Promoting an Inclusive and Innovation-Led Growth for the ASEAN Economic Community (AEC)*; dan *Resolution on Intra-Regional Economic Cooperation for Equitable Development and Inclusive Growth in the ASEAN Economic Community*.

Sidang Tahunan ke-26 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) yang diselenggarakan pada tanggal 17 - 21 Januari 2018 di Ha Noi, Vietnam menghasilkan beberapa resolusi di bidang ekonomi di antaranya: *Resolution on Promoting Economic Growth and Free Trade*; *Resolution on the role of the APPF in Promoting Partnership for Sustainable Development and Inclusive Growth in the Asia and Pacific*; *Resolution on the Role of Parliaments in Promoting Seamless Regional Economic Integration*; *Resolution on Supporting the MSMEs in the Digital Age*.

Selain untuk menelaah tantangan integrasi regional dan liberalisasi perdagangan dalam kerangka regionalisme ekonomi, kunjungan ditujukan pula untuk melakukan diplomasi ekonomi di negara-negara yang bukan merupakan pasar tradisional produk-produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi pasar bagi ekspor RI.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi Badan Kerja sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) terkait kerja sama ekonomi regional pada tanggal 20 - 26 Mei 2018 ke Vienna didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 214/ PIMP/ IV/ 2017-2018 tertanggal 14 Mei 2018.

II. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) adalah sebagai berikut:



Sdr. Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Delegasi
F-PDIP



Sdr. H. Rofi' Munawar, Lc.
Wakil Ketua BKSAP
F-PKS



Sdr. Nazarudin Kiemas
Anggota BKSAP
F-PDIP



Sdri. Dra. SB. Wiryanti Sukamdani
Anggota BKSAP
F PDIP



Sdr. Jalaludin Rakhmat
Anggota BKSAP
F-PDIP



Sdri. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom.
Anggota BKSAP
F-PG



Sdr. H. Syamsul Bachri
Anggota BKSAP
F-PG



Sdri. Rachel Maryam Sayidina
Anggota BKSAP
F-Gerindra



Sdri. Hj. Melani Leimena Suharli
Anggota BKSAP
F-PD



Sdr. Bara K. Hasibuan
Anggota BKSAP
F-PAN



Sdr. H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.
Anggota BKSAP
F-PKS



Sdr. H. Achmad Farial
Anggota BKSAP
F-PPP



Sdr. H. Ahmad Sahroni, SE
Anggota BKSAP
F-P.Nasdem



Sdr. Mukhtar Tompo, S.Psi.
Anggota BKSAP
F-P.Hanura

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam konteks kerja sama regional adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara di kawasan Eropa terkait integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.



2. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional melalui perspektif negara mitra wicara ASEAN.
3. Meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen dengan negara-negara Anggota Uni Eropa dalam kerangka kerjasama ekonomi regional.
4. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama regional.
5. Bertukar pandangan (*sharing best practices*) terkait tugas-tugas parlemen yaitu penyusunan legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama yang berhubungan dengan kerja sama regional.

IV. SEKILAS MENGENAI AUSTRIA

A. Politik Dan Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia Austria terjalin sejak tahun 1954. Di bidang politik, kedua negara aktif memberikan dukungan dalam pencalonan wakil masing-masing di berbagai badan PBB dan organisasi internasional lainnya. Kunjungan kenegaraan terakhir dilakukan Presiden Austria, Heinz Fischer, November 2010 ke Indonesia.

Kedua negara memiliki sejarah saling dukung dalam posisi pencalonan organisasi internasional yang baik. Bahkan saat ini kedua negara telah memiliki pengaturan saling dukung berupa: dukungan Austria ke Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan sebaliknya untuk Austria di posisi serupa pada periode 2027-2028. Kedua negara saling mendukung pencalonan kandidat mereka sebagai anggota *International Law Commission* periode 2017-2021. Austria juga mendukung Indonesia sebagai anggota *International Maritime Organization Council* kategori C periode 2016-2017 dan Indonesia mendukung Austria sebagai anggota *Committee on the Rights of the Child* untuk 2017-2020.

B. Ekonomi Austria dan Hubungan Ekonomi dengan Indonesia

Sistem ekonomi Austria berkarakter ekonomi pasar terbuka dengan fokus sosial yang kuat yakni dengan juga memperhatikan anggota komunitas yang terlemah. Austria adalah negara industri yang sangat maju. Industri paling penting di Austria adalah industri makanan, barang-barang mewah, permesinan, konstruksi baja, kimia dan otomotif. Dalam bidang pertanian, tren kuat di Austria saat ini adalah pertanian organik dengan porsi pasar saat ini di seluruh Uni Eropa mencapai 22%.¹

Dalam bidang energi terbarukan, Austria merupakan sebagai salah satu pemimpin pasar dalam *hydroelectricity* (energi bertenaga air). Potensi energi berdasarkan *World Energy Resources 2016* yang diterbitkan *World Energy Council*, mencapai 150 TWh/tahun. Yang potential diberdayakan mencapai 75 TWh/tahun dengan 75%

¹ <http://www.austria.org/economy/>

diantaranya dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Saat ini kapasitas total terpasang mencapai 13.200 MW; dengan total generasi mencapai 37 TWh.²

Neraca Perdagangan Indonesia Austria terpapar dalam tabel di bawah ini:

(Nilai : Ribu US\$)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Trend (%) 2013 - 2017	Jan-Feb		Perub (%) 2018/ 2017
							2017	2018	
Total Perdagangan	433.628,3	383.241,6	345.468,8	387.176,1	368.257,4	-3,12	50.869,5	64.381,6	26,56
Migas	2,4	2,4	8,1	3,5	3,0	8,71	0,0	5,7	
Non Migas	433.626,0	383.239,2	345.460,7	387.172,6	368.254,4	-3,12	50.869,5	64.375,9	26,55
Ekspor	50.026,4	40.286,6	29.292,4	28.570,3	26.266,2	-15,06	4.727,1	4.117,9	-12,89
Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Non Migas	50.026,4	40.286,6	29.292,4	28.570,3	26.266,2	-15,06	4.727,1	4.117,9	-12,89
Impor	383.601,9	342.955,0	316.176,4	358.605,8	341.991,2	-1,83	46.142,4	60.263,7	30,60
Migas	2,4	2,4	8,1	3,5	3,0	8,71	0,0	5,7	
Non Migas	383.599,5	342.952,6	316.168,3	358.602,3	341.988,2	-1,83	46.142,4	60.258,0	30,59
Neraca Perdagangan	- 333.575,4	- 302.668,3	- 286.884,0	- 330.035,5	- 315.724,9	- -0,23	-41.415,4	-56.145,8	-35,57
Migas	-2,4	-2,4	-8,1	-3,5	-3,0	8,71	0,0	-5,7	
Non Migas	- 333.573,1	- 302.666,0	- 286.875,9	- 330.032,0	- 315.721,9	- -0,23	-41.415,4	-56.140,1	-35,55

Ekspor utama Indonesia ke Austria berupa aneka produk jadi, mesin dan kendaraan, furniture, kerajinan tangan serta bahan mentah. Sedangkan impor Indonesia tercatat mesin dan suku cadang kendaraan, elektronik, produk olahan dan produk kimia.

Dalam hal investasi, nilai penanaman modal Austria ke seluruh negara ASEAN masih terbatas. Nilai investasi Austria mencapai US\$ 75 juta pada 2016. Relatif kecil apabila dibandingkan dengan total investasi seluruh negara anggota Uni Eropa ke ASEAN yang mencapai US\$ 30.4 miliar pada 2016.³

Sementara untuk Indonesia, pada tahun 2017, total nilai investasi Austria adalah US\$ 3.2 juta dengan 44 proyek terdaftar.⁴

² <https://www.worldenergy.org/data/resources/country/austria/hydropower/>

³ ASEAN Investment Report 2017 – Foreign Direct Investment and Economic Zones in ASEAN, (ASEAN@50 Special Edition), Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2017. Hal: 4.

⁴ BKPM, Domestic and foreign Direct Investment Realization in Quarter IV and January-December 2017, Hal: 20.



Sejumlah kerja sama ekonomi juga telah dijalin antara Indonesia dengan Austria. Selain itu, pebisnis Austria juga dalam sejumlah kesempatan telah menyampaikan paparan mengenai produk-produk mereka, termasuk dalam bidang transportasi. Pada 2015 silam, sebanyak 9 perusahaan telah melakukan presentasi produk di Kementerian Perhubungan yakni AIT Austrian Institute of Technology GmbH; Bit Group GmbH; DELTA BLOC International GmbH; Doppelmayr Cable Car GmbH & Co KG; Frequentis Singapore Pte Ltd; Leisinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H; Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH; Siemens AG/PT Siemens Indonesia; dan Voestalpine VAE GmbH. Perusahaan-perusahaan ini tertarik untuk mengembangkan transportasi masal di Indonesia.

C. Kerja Sama Lainnya

Duta Besar (Dubes) Austria untuk Indonesia Helena Steinhausl pada 2017 silam telah mengunjungi sejumlah kota termasuk Solo untuk mendalami kerja sama terkait pembangunan rencana induk transportasi perkotaan. Ini merupakan wujud tindak lanjut kerja sama pengembangan transportasi perkotaan antara Indonesia dengan Austria sejak 2015. Landasan kerja sama ini terwujud dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Kementerian Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria tentang Kerja Sama di Sektor Transportasi yang ditandatangani pada 2014.

Terkait transportasi perkotaan, Austria juga saat ini tengah mendalami proses lelang internasional yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait *Electronic Road Pricing* (ERP). Menurut rencana pemenang lelang internasional tersebut akan diumumkan pada Oktober 2018.

Pada tahun 2014, Indonesia-Austria menandatangani MoU antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Keuangan dan Kerja Sama Keuangan Federal Austria. MoU tersebut intinya memberikan bantuan pinjaman kredit (skema *soft loan*) untuk pendanaan sejumlah proyek pembangunan di Indonesia. Realisasi pinjaman lunak tersebut mewujud dalam pembangunan sektor kesehatan khususnya renovasi sejumlah Rumah Sakit (RS) yakni: RS. Dr. Mintohardjo (8 Juta Euro), RSAU Dr. S Hardjolukito Tahap II (8 juta Euro), Renovasi RSPAD Gatot Subroto (11,5 juta Euro), RS. Dr. Midiyato, Bintan (7.7 juta Euro).

Di bidang energi, pada 2014, Menteri ESDM Republik Indonesia dan Menteri transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria menandatangani MoU Kerja Sama Teknologi Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sejak saat itu, telah ada sedikitnya lima kali *Joint Working Group* untuk pembahasan mendalam implementasi kerja sama MoU tersebut.

Progress sosial budaya lainnya adalah per Maret 2018, Universitas Vienna membuka Program kelas Bahasa Indonesia. Upaya ini merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia



untuk meningkatkan penguasaan Bahasa Indonesia di masyarakat Asing. Program tersebut saat ini menarik minat sedikitnya 96 mahasiswa sarjana dan pascasarjana.⁵

D. Austria, Kelapa Sawit dan Uni Eropa

Per 1 Juli 2018, Austria akan menjadi Presiden Dewan Uni Eropa untuk kali ketiga. Sebelumnya, Austria pernah menjabat Presiden Dewan Uni Eropa pada tahun 1998 dan 2006. Jabatan Presiden Dewan Uni Eropa saat ini dijabat oleh Bulgaria.

Dewan Uni Eropa adalah institusi dalam Traktat Lisbon yang dibentuk untuk mewakili pemerintah negara anggota UE. Ia adalah perkumpulan Menteri-menteri dari masing-masing negara anggota UE yang berfungsi untuk mengadopsi undang-undang/peraturan dan mengkoordinasikan kebijakan.

Kepemimpinan Dewan Uni Eropa dijabat oleh masing-masing negara dalam sistem rotasi enam bulan sekali. Sesuai mekanisme traktat, presidensi Dewan Uni Eropa dijabat bergiliran dengan koordinasi terbagi berdasar kelompok-kelompok per tiga negara (kerap disebut trio). Saat ini trio presidensi Dewan Uni Eropa adalah Estonia, Bulgaria dan Austria.

Posisi Presiden Dewan Uni Eropa (Dewan Menteri) terbilang cukup strategis dalam mengelola produk-produk legislasi. Presiden Dewan Uni Eropa dalam konteks kontribusinya terhadap produk legislasi Uni Eropa adalah memimpin negosiasi dialog dengan Parlemen Eropa dan Komisi Eropa untuk mendapatkan persetujuan akan usulan legislasi.⁶

Terkait usulan legislasi Uni Eropa, Parlemen Eropa per Januari 2018 menyetujui rancangan instruksi (*directive*) tentang Pemajuan Penggunaan Energi dari Sumber Daya yang Terbarukan (*Promotion of the use of Energy from Renewable Resources*). Rancangan Instruksi yang disahkan oleh Parlemen Eropa tersebut memuat naskah baru yang menargetkan **hilangnya biofuel dan bioliquid dari minyak kelapa sawit hingga 0% pada 2021** (usulan Pasal 7 paragraf 1 subparagraf 4).

Parlemen Eropa secara spesifik menasar hanya kelapa sawit, meskipun dalam rancangan awal Komisi Eropa tidak menyebut adanya hal terkait kelapa sawit. Paragraf awal berbicara mengenai pembatasan persentase terkait konsumsi energi dari sumber energi terbarukan yang merupakan *biofuels* dan *bioliquids* berasal dari tanaman pangan dan tanaman pakan (apapun) mencapai 7% dengan target hingga 2030 berkurang menjadi 3.8%. Dalam bagian resital (latar belakang), Parlemen Eropa juga mengusulkan paragraf baru (25A) yang menerangkan resolusi Parlemen Eropa 2017 silam telah menyerukan Komisi Eropa untuk mengambil langkah untuk

⁵ <http://kabar24.bisnis.com/read/20180315/255/750096/universitas-di-austria-buka-program-bahasa-indonesia>

⁶ <https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/european-policy/eu-presidency-2018/>



menghilangkan penggunaan minyak sayuran yang menyebabkan deforestasi, termasuk minyak kelapa sawit (tidak menyebut jenis lainnya).⁷

Proses legislasi Uni Eropa berjalan melalui proses bikameral. Parlemen Eropa melakukan pembahasan tahap pertama (*1st reading*) dari usulan direktif yang diajukan Komisi Eropa.⁸ Setelah tahap pertama di Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa juga akan melakukan pembahasan tahap pertama (*1st reading*) dari yang diajukan Parlemen Eropa. Saat ini proses trialog (diskusi tiga pihak antara *co-legislators* yakni Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa bersama dengan pengusul inisiatif rancangan direktif yakni Komisi Eropa) tengah dilakukan. Proses trialog dilakukan apabila *co-legislators* berkehendak untuk menyelesaikan rancangan direktif pada pembahasan tahap pertama.

Proses trialog saat ini tengah dilakukan dan dijadwalkan akan ada dua pertemuan trialog kembali hingga akhir Presidensi Bulgaria pada 30 Juni mendatang. Diperkirakan apabila tidak tercapai kesepakatan hingga akhir presidensi Bulgaria, maka Austria akan memimpin proses trialog berikutnya. (Catatan: Belum ada informasi resmi lebih lanjut mengenai hasil trialog sejauh ini).

Target penghapusan *biofuel* dan *bioliqoid* dari minyak kelapa sawit hingga 0% pada 2021 yang diajukan oleh Parlemen Eropa berpotensi menjadi hambatan perdagangan dalam skema perdagangan multilateral. Selain itu, dengan dalih kelapa sawit adalah penyebab deforestasi sehingga perlu masuk bagian rancangan direktif tersebut menunjukkan sikap politik Parlemen Eropa yang relatif diskriminatif terhadap produk-produk yang dianggap penyebab deforestasi. Berdasarkan data dan riset dari Food and Agricultural Organization (FAO) 2006, ternak merupakan pendorong utama deforestasi, terutama di Amerika Latin, dengan sekitar 70 persen lahan hutan Amazon diubah menjadi ladang rumput.⁹ Selain itu, kontributor lain deforestasi, dalam konteks minyak nabati/tanaman adalah kedelai, bunga rapa, hingga bunga matahari. Namun, komoditas tersebut tidak masuk dalam usulan Parlemen Eropa sebagai penyumbang *biofuel* dan *bioliqoid* yang harus dihapuskan pada 2021.

Patut menjadi catatan bahwa ekspor *Crude Palm Oil/CPO* ke Eropa pada tahun 2016, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai hampir 1.4 juta ton dengan nilai total US\$ 858 juta. Kendati demikian, Austria tidak masuk sebagai 10 besar negara Eropa pengimpor CPO dari Indonesia.¹⁰

Trio Presidensi Dewan Uni Eropa saat ini yakni Estonia, Bulgaria dan Austria telah merumuskan program prioritas mereka yakni:

1. *A union for jobs, growth and competitiveness*

⁷ Lihat Amendments adopted by the European Parliament on 17 January 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)).
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN>

⁸ https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/press_release_ep_vote_on_palm_oil_18.01.2018.pdf

⁹ <http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html>

¹⁰ BPS, Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2016, Badan Pusat Statistik, Jakarta. Hal: 47.



2. *A union that empowers and protects all its citizens*
3. *Towards an energy union with a forward-looking climate policy*
4. *A union of freedom, security and justice*
5. *The union as a strong global actor*

Keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) menjadi area prioritas trio Presidensi Dewan Uni Eropa dari program prioritas pertama mereka yakni *a union for jobs, growth and competitiveness*. Oleh karenanya, trio Presidensi Uni Eropa akan fokus pada ekonomi berfokus inisiatif inovasi lingkungan yang bertujuan pada penggunaan sumber daya secara efisien, mengurangi dampak lingkungan dalam produksi dan konsumsi, dan melaksanakan aksi yang mengarah pada lingkungan bebas racun.¹¹

Di Parlemen Eropa, ada sedikitnya 18 anggota Parlemen yang berasal dari Austria. Mereka berasal dari Progressive Alliance of Socialist and Democrats (S&D) sebanyak 5 anggota, European's People Party (EPP) sebanyak 5 anggota, Europe of Nations and Freedom Group (ENF) sebanyak 4 anggota, Group of the Greens/European Free Alliance (EFA) sebanyak 3 anggota dan Alliance for Liberals and Democrats (ALDE) sebanyak 1 anggota.¹² Total anggota Parlemen Eropa mencapai 751 anggota.

V. HASIL KUNJUNGAN

A. Kunjungan ke Siemens AG Austria Mobility Division, Leberstraße

Delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi Siemens AG Austria Mobility Division di Leberstraße, Vienna. Delegasi berdiskusi dengan jajaran manajemen Siemens Mobility Division yakni Sales Director, Metro (Subway) Department, Christoph Masopust dan juga *Commercial Head of Siemens Metros*, Mark Kolarschik.

Pada kesempatan tersebut Siemens Mobility Division memaparkan bahwa kiprah perusahaan tersebut di Austria telah mencapai 180 tahun dan memiliki seluruh lini bisnis terlengkap dalam konteks industri mobilitas. Siemens memiliki seluruh fungsi industri mobilitas mulai dari rekayasa teknik, mesin, produksi, manajemen hingga penyediaan jaringan maupun suku cadang. Kiprah Siemens telah terbukti dengan berpartisipasi dalam industri mobilitas ketika mengembangkan trem bawah tanah di London. Unit Bisnis Divisi Mobilitas Siemens terdiri dari manajemen mobilitas, *turnkey project and electrification*, lok dan kereta api, hingga layanan pelanggan (perawatan dan lainnya). Divisi Mobilitas beroperasi dan melayani seluruh dunia dengan enam pusat mobilitas (termasuk pabrik) dengan lebih dari 8.000 tenaga kerja. Saat ini juga hadir dengan pendirian baru (*startup*) di lebih dari 20 negara dan dalam bentuk *joint venture* di sekitar 10 negara.

¹¹ Council of the European Union, The Programme, 9934/17, Council of the EU, Brussel: 2017.

¹² <http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?country=AT>



Siemens memaparkan sejumlah proyek yang saat ini digarap termasuk proyek besar di Amerika Serikat yakni untuk penyediaan 152 kendaraan rel ringan (*light rail vehicles*) berjenis S-70 yang melayani Seattle dan Area Central Puget Sound. Di Asia, Siemens Mobility Division terlibat dalam penyediaan gerbong untuk kereta Metro Kuala Lumpur, Malaysia dan juga di Thailand. Rata-rata tingkat keawetan produk kereta Siemens mencapai 30 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Siemens Mobility Division juga mengungkapkan pengembangan produk terakhir dengan platform kereta komuter dan regional yakni Mireo. Siemens meyakini bahwa konsumen selalu dan cenderung untuk mempertimbangkan tidak hanya membeli produk tetapi juga faktor non-harga lainnya seperti bahan bakar (energi) dan perawatan purna jual. Sebagian besar produk Siemens bersifat hemat energi karena menggunakan listrik. Saat ini Siemens juga mengembangkan selain *green mobility* juga *green connectivity* melalui pengembangan infrastruktur informasi dan telekomunikasi (IT). Siemens mengembangkan perangkat aplikasi dan infrastruktur IT yang tidak hanya dapat menginformasikan bagaimana posisi terakhir kereta yang akan dinaiki penumpang tetapi juga menyediakan sistem yang memberikan informasi kepada penumpang mengenai rute tercepat yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan.

Dalam dialog Delegasi BKSAP mendalami peluang Siemens terlibat dalam proyek infrastruktur untuk memperkuat konektivitas di Indonesia. Tantangan mengenai pembiayaan infrastruktur menjadi sorotan, mengingat sejauh ini Tiongkok dapat hadir dengan menawarkan skema pembiayaan yang menarik kendati dengan syarat-syarat seperti penggunaan produk mereka dan juga pekerja mereka.



Merespon hal tersebut, Siemens AG mengungkapkan dalam konteks pembiayaan, Siemens memiliki sedikit kekurangan bila dibandingkan produk Tiongkok. Namun demikian, apabila melihat faktor harga secara keseluruhan, Siemens menawarkan tidak hanya pembelian, tetapi aspek lain seperti efisiensi energi dan perawatan. Siemens mengklaim menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan seluruh elemen perkeretaapian, mulai dari gerbong, mesin hingga peralatan teknis kendaraannya. Siemens kemudian memberi contoh bagaimana ia dapat memberikan layanan di Turki. Siemens berkomitmen untuk memasukan konten lokal, hingga penyelesaian komitmen terkait isu pekerja nasional. Siemens juga berkomitmen untuk transfer teknologi dalam setiap kerja sama.

Saat ini Siemens tengah berproses untuk merger dengan Alstom (Prancis), untuk menjadi perusahaan transportasi rel dan kereta api kelas berat Eropa. Merger tersebut disiapkan untuk bersaing dengan perusahaan Tiongkok China Railway Construction Corporation (CRCC).

Siemens berkomitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur dan menyatakan komitmennya untuk siap menjadi bagian dari perusahaan yang dapat mendukung sistem transportasi publik di Indonesia. Saat ini, PT INKA (Persero) juga tengah menjajaki kerja sama bersama dengan Siemens Mobility Division.

B. Pertemuan dengan Ministry of Transport, Innovation and Technology

Delegasi BKSAP DPR RI bertemu dengan Kepala Kelompok Staff untuk Transfer Teknologi dan Riset Keamanan, Kementerian Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria, Dr. Gernot Grimm. Divisi yang dia pimpin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas terapan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan teknologi. Anggaran yang diampu langsung mencapai 500 juta Euro dan total anggaran terkait riset dan pengembangan mencapai 1.2 miliar Euro. Total anggaran keseluruhan untuk riset dan pengembangan berdasar laporan Austrian Research and Technology Report 2017

mencapai 11.3 miliar Euro atau setara dengan 3.14% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menempati posisi kedua setelah Swedia (3.26% dari PDB) dalam konteks anggaran riset dan pengembangan di negara anggota UE.

Indonesia dan Austria berbagi kerja sama teknologi bersama-sama khususnya di bidang lingkungan seperti dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air (*hydropower*). Indonesia menjalin sejumlah kerja sama dengan Austria termasuk dalam bidang *hydropower* sejak 2014. Setidaknya dua *Memorandum of Understanding (MoU)* terjaln sejak 2014 yakni dalam bidang kerja sama pembangkit tenaga listrik dan kerja sama transportasi. Terkait *hydropower*, Austria membangun dua proyek percontohan hidrometrik di Indonesia, salah satunya adalah di Dam Perjaya, Palembang.



Saat ini, Austria juga tengah mengembangkan teknologi kota pintar bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wina tergolong kota besar dengan penduduk yang beragam. Lebih dari 50% penduduk Wina misalnya adalah imigran. Kota tersebut juga dianggap kota paling layak huni sedunia. Austria saat ini mengarah kepada pengembangan teknologi hijau dengan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan. Saat ini, sekitar 82% pasokan energi Austria diproduksi dari sumber energi terbarukan. 3 dari 9 provinsi di Austria dapat mencukupi kebutuhan energinya sendiri dari pasokan energi terbarukan. Kota Wina juga bahkan bisa mengolah sampah menjadi sumber energi terbarukan.

Dalam kerja sama transportasi, Austria adalah pemimpin di bidang manajemen lalu lintas udara. Dr. Grimm memaparkan bahwa Austria adalah pemasok sedikitnya 50% kebutuhan global dalam perangkat lalu lintas udara (melalui perusahaan swasta *Frequentis*). Austria juga adalah produsen kereta gantung dan melakukan inovasi pembangunan kereta gantung di perkotaan sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan.

Pada kesempatan tersebut, Dr Grimm juga menginfokan bahwa Austria tengah menawarkan solusi teknologi terkait *electronic road pricing (ERP)* di Jakarta. Austria telah memiliki teknologi tersebut dan saat ini telah secara elektronik terpantau lalu



lintas di seluruh jalan di Austria. Dengan perangkat teknologi ERP tersebut, pihaknya dapat mendeteksi dan melacak kendaraan, kecepatan kendaraan, memantau pelanggaran kecepatan bahkan melacak seseorang (belum diizinkan secara hukum).

Dalam bidang teknologi lainnya, Austria juga tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pemetaan karbon. Austria memiliki teknologi pula untuk mendeteksi titik api sebelum terbakar sehingga bermanfaat dalam pemetaan potensi kebakaran hutan. Bagi Austria, Jakarta adalah mitra kunci di kawasan.

Pada kesempatan tersebut, Dr Grimm menyampaikan keinginan Austria untuk kembali memperkuat kerja sama di bidang kesehatan. Produk teknologi kesehatan Austria menawarkan nilai tambah dan juga membuka ruang untuk transfer pengetahuan dan teknologi.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi BKSAP DPR RI memperdalam secara detail beberapa isu teknologi seperti dalam hal ERP dan bagaimana sistem transportasi nasional bekerja. Pada kesempatan tersebut, Dr. Grimm menguraikan mengenai secara umum bahwa sistem transportasi publik masih jauh lebih murah daripada transportasi swasta. Dalam sistem tol, Austria menerapkan skema pembayaran tol tidak melalui gerbang tol tetapi melalui pembelian stiker dengan nilai tertentu yang berlaku selama setahun. Sementara untuk truk mekanisme tol dihitung per km.

Pada akhir pertemuan, Dr Grimm menyampaikan harapannya agar dapat memperkuat kerja sama di bidang kesehatan dan juga dukungan untuk kelanjutan kerja sama di bidang lingkungan.

C. Pertemuan dengan Grup Kerja Sama Bilateral Asia Selatan dan Tenggara, Parlemen Austria

Delegasi diterima oleh Dr. Reinhold LOPATKA (OVP) dan juga Stefan Schennach (SPO) jajaran anggota Grup Kerja Sama Bilateral Asia Selatan dan Tenggara Parlemen Austria. Pada kesempatan pertama Delegasi BKSAP menerima informasi mengenai sistem bikameral Parlemen Austria yakni kamar pertama (National Council) dengan jumlah 183 kursi dan kamar kedua (Federal Council) dengan jumlah 62 kursi. Delegasi juga mendapatkan paparan mengenai visi Austria dalam Presidensi Dewan Eropa yakni Eropa yang melindungi (*Europe that Protects*). Istilah proteksi ini erat kaitannya dengan krisis finansial maupun krisis migrasi saat ini. Bagi parlemen, masa depan Austria di Uni Eropa (UE) adalah untuk memperkuat uni tersebut. Parlemen juga mendukung perluasan keanggotaan UE terutama di kawasan Balkan.

Delegasi BKSAP DPR RI diwakili Ketua Delegasi, Juliari Batubara menjelaskan maksud kunjungan yakni untuk menjalin kerja sama dan menggali informasi mengenai elaborasi integrasi ekonomi dalam perspektif integrasi kawasan. Lebih jauh, dalam kapasitas Austria sebagai Presiden Dewan Eropa yang akan menjabat pada paruh kedua tahun 2018, Delegasi BKSAP menyatakan keprihatinannya mengenai upaya Parlemen

Eropa menyetujui rancangan peraturan RED yang memasukkan target penghapusan minyak kelapa sawit (CPO) dari produk *biofuel* dan *bioliquids* pada 2021.



Parlemen Austria menerangkan bahwa saat ini gerakan lingkungan memang menjadi sentral isu di kawasan Eropa. Tak terkecuali pula di Parlemen Austria. Parlemen Austria tidak menjawab secara detail mengenai CPO tetapi menjelaskan bahwa dialektika isu-isu Parlemen Austria saat ini fokus pada isu perubahan iklim, mengingat saat ini dunia mulai kehilangan sekira 60% dari gletser saat ini. Austria unggul dalam produksi dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Dalam hal daur ulang air, Austria juga unggul dalam pengembangan rumah rendah energi.

Delegasi menerangkan bahwa Indonesia berkomitmen mengembangkan energi terbarukan. Bauran energi pada 2025 ditargetkan mencapai 23% dari energi terbarukan. Saat ini draf awal RUU terkait Energi Terbarukan mulai disusun untuk dibahas. BKSAP mengharapkan dukungan internasional termasuk Austria untuk mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi. Selain itu, Delegasi juga mengharapkan ke depan terjalin potensi kerja sama di sektor pariwisata.

Austria menyambut baik potensi kerja sama di bidang lingkungan bahkan juga mengungkapkan perkembangan teknologi energi terbarukan di Austria sangat pesat bahkan saat ini sektor swasta telah mampu memproduksi sistem pendingin dengan memanfaatkan energi panas matahari. Terkait sektor pariwisata, Austria secara teknis mengungkapkan bahwa Bali adalah destinasi wisata favorit masyarakat Austria tetapi biaya menuju Bali tidaklah murah. Austria sendiri juga merupakan kota wisata. Negara tersebut pernah menjamu wisatawan seluruh dunia yang menginap di Austria hingga mencapai 100 juta orang dalam semalam. Oleh karenanya, Austria terbuka untuk kerja sama sektor pariwisata dan menawarkan kerja sama pendidikan di bidang pariwisata mengingat negara tersebut memiliki banyak perguruan tinggi terkait pariwisata.



D. Pertemuan dengan Task Force Austrian Presidency to the EU dan Task Force Brexit, Federal Chancellery (Bundeskanzleramt)

Delegasi BKSAP diterima oleh Regina Kothmayr dan Karl Heinz Tanner yang masing-masing menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Kantor Presiden Austria untuk Dewan Uni Eropa (UE) dan Ketua Satuan Tugas Urusan Kelembagaan Uni Eropa dan Koordinasi Brexit. Pada kesempatan tersebut, Kothmayr menerangkan bahwa per Juli 2018, Austria akan menjadi Presiden Dewan Uni Eropa, institusi UE yang terdiri dari pemerintahan negara anggota (menteri-menteri). Jabatan tersebut merupakan jabatan ketiga yang pernah diemban oleh Austria. Menurut Kothmayr, Austria berkomitmen bekerja untuk berkoordinasi negara anggota, perantara yang jujur dan terbuka untuk bernegosiasi dengan Parlemen Eropa dan menuntaskan rancangan legislatif yang ada.

Pada kesempatan tersebut, Kothmayr menekankan bahwa Austria akan memberi prioritas pada beberapa isu yakni: (i) keamanan siber dan layanan digital serta perpajakan perusahaan digital, (ii) migrasi ilegal, (iii) proses perluasan keanggotaan UE. Selain itu, Austria juga akan menjadi motor untuk arah pembangunan terkait isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. *Tagline* Presidensi Austria adalah *Europe that Protects* yang berarti Austria akan memajukan Uni Eropa yang melindungi masyarakat Eropa dari berbagai tantangan seperti krisis finansial hingga migrasi ilegal.

Karl Heniz Tanner menerangkan bahwa pada tahun depan (29 Maret 2019), Inggris akan secara resmi berpisah dengan UE. Proses pembahasan Brexit berlangsung maraton untuk mempersiapkan beberapa aspek terkait ekonomi, proses politik dan lain sebagainya. Negosiasi terkait Brexit harus rampung pada Oktober tahun ini, sehingga proses Brexit dapat terlaksana dengan lancar pada Maret 2019. Pembahasan lainnya juga terkait dengan hal keuangan khususnya bagaimana UE membiayai institusinya pasca-Brexit terlebih dengan adanya pembentukan komisi baru dan juga pemilihan Parlemen Eropa pada 2019. Saat ini, UE sedang negosiasi poin-poin krusial seperti Withdrawal Agreement yang mencakup proses keluarnya Brexit dan juga hubungan ke depan antara Inggris dan UE. Hingga akhir Maret sekitar ¼ bagian dari perjanjian telah disepakati. Perjanjian internasional tersebut nantinya akan mengatur hal-hal terkait hak-hak kewarganegaraan, manfaat, konsekuensi finansial pasca-Brexit, hingga konsekuensi Brexit terhadap Irlandia Utara dan Irlandia.



Pada kesempatan tersebut, Delegasi BKSAP menggarisbawahi terkait pentingnya hubungan Indonesia dan UE. BKSAP menekankan pentingnya kedua pihak mendapatkan manfaat dari negosiasi Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Pada kesempatan tersebut, BKSAP juga menyampaikan keprihatinannya terkait draf rancangan direktif penggunaan energi terbarukan (*renewable energy directive/RED*) yang disepakati Parlemen Eropa dan memuat rencana penghapusan biofuel dan bioliqid dari minyak kelapa sawit (CPO) pada 2021.

BKSAP menyampaikan aspirasi pentingnya direktif tersebut tidak bersifat diskriminatif hanya pada satu produk tanaman tertentu yang dianggap berkontribusi terhadap deforestasi dan juga pentingnya pemahaman berimbang, komprehensif dan mendalam akan pengembangan kelapa sawit di Indonesia dan aspek *sustainability* yang dikembangkan Indonesia. Delegasi BKSAP juga mengungkapkan bahwa CPO menyerap jutaan tenaga kerja dan juga berkontribusi terhadap perekonomian mereka. Selain itu, Indonesia berkomitmen kuat untuk mengembangkan CPO sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan menyampaikan harapannya agar Austria dalam posisi-nya sebagai Presiden Dewan UE nanti dapat mendorong pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terkait CPO di UE.

Delegasi BKSAP juga berharap agar layanan visa, khususnya bebas visa, yang telah diterapkan Indonesia kepada 169 negara (dengan seluruh negara UE menerima kebijakan bebas visa ke Indonesia), dapat berlaku resiprokal. Selain itu, BKSAP juga berharap agar UE memperlancar layanan visa bagi pelajar Indonesia.



Terhadap hal-hal tersebut, kedua Satuan Tugas menyampaikan bahwa dalam hal isu CPO, Satgas Presidensi Austria akan memperhatikan aspirasi Delegasi BKSAP. Sejauh ini, proses dialog tengah dilakukan dan respon atas hal ini masih beragam. Terkait visa, Austria menyampaikan bahwa hal terkait visa diatur oleh UU UE dan juga 28 negara Schengen. Satuan Tugas tidak dalam posisi untuk mendukung hal tersebut, namun akan berupaya untuk meyakinkan kementeriannya untuk mengajukan usulan terkait bebas visa maupun kemudahan-kemudahan visa pelajar.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kunjungan kerja DPR RI ke Austria pada tanggal 20-26 Mei 2018 telah berjalan dengan lancar, aman dan sukses sehingga hasil kunjungan dapat menjadi output yang bermanfaat untuk peningkatan peran diplomasi parlemen oleh DPR RI.
2. Austria mengalokasikan anggaran riset dan pengembangan cukup tinggi dengan alokasi sedikitnya 3% dari PDB. Austria maju dalam hal riset dan pengembangan, khususnya dalam bidang-bidang yang terkait teknologi lingkungan. Beberapa kerja sama telah terbangun yakni dalam bidang pengembangan listrik tenaga air dan juga transportasi. Austria berharap kerja sama di bidang teknologi kesehatan dan juga lingkungan dapat berlanjut.
3. Industri transportasi berbasis rel yang dimiliki perusahaan dunia yang berpusat di Eropa, yakni Siemens AG Mobility Division memiliki keunggulan komparatif dalam hal layanan keseluruhan dari produk mereka. Sejauh ini, Siemens Mobility Division belum masuk ke pasar Indonesia namun berkomitmen siap berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menjadi bagian dari perusahaan yang dapat mendukung sistem transportasi publik di Indonesia. Siemens juga tengah berproses untuk merger dengan Alstom (perusahaan transportasi rel Prancis) untuk menjadi perusahaan besar Eropa.
4. Austria memiliki perhatian mendalam pada isu lingkungan mengingat isu tersebut sangat sentral di kawasan Eropa pada saat ini. Hal ini terlihat dari dialektika isu-isu Parlemen Austria yang fokus pada perubahan iklim. Parlemen Austria juga terbuka untuk kerja sama dalam bidang lingkungan dan pengembangan energi terbarukan terlebih dengan perkembangan teknologi Austria yang telah dapat menciptakan teknologi pendingin ruangan dari tenaga matahari (*solar air conditioning*).
5. Austria terbuka untuk mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam bidang pariwisata dan menawarkan kerja sama pendidikan di bidang pariwisata mengingat negara tersebut memiliki banyak perguruan tinggi terkait pariwisata.
6. UE tengah dalam proses negosiasi dengan Inggris dalam isu Brexit. Proses saat ini sekitar $\frac{3}{4}$ dari *Withdrawal Agreement* telah rampung dibahas dan proses Brexit



terjadwal dapat dilakukan pada Maret 2019. Proses keluarnya satu anggota dari integrasi ekonomi regional diikuti dengan pembahasan komprehensif dan menyeluruh terkait implikasi, konsekuensi dan dampaknya terhadap masa depan integrasi ekonomi kawasan.

7. BKSAP menyampaikan aspirasi Indonesia terkait rancangan direktif penggunaan energi terbarukan yang bersifat diskriminatif dan bertendensi menasar hanya produk CPO kepada Austria. BKSAP juga telah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap aspek pembangunan berkelanjutan termasuk dalam komoditas CPO. Austria sebagai Presiden Dewan UE pada Juli 2018 nanti telah mendengar dan mencatat masukan Delegasi BKSAP.

B. Saran

1. Alokasi dan kebijakan riset dan pengembangan (*research and development/R&D*) Austria telah maju dengan dukungan kebijakan negara. Terkait hal tersebut, sejalan dengan masuknya RUU tentang Perubahan atas UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2018), BKSAP dapat meneruskan hasil kunjungan ini ke Komisi VII (riset dan teknologi) dan Komisi X (pendidikan).
2. BKSAP untuk meneruskan prospek kerja sama di bidang teknologi kesehatan dan lingkungan dan pariwisata ke kementerian terkait. BKSAP sebaiknya meneruskan laporan kunjungan ini ke komisi terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
3. Penguatan diplomasi parlemen secara berkelanjutan untuk menjadi penyambung aspirasi layanan bebas visa ke negara anggota UE secara resiprokal. BKSAP perlu mendorong Kementerian Luar Negeri untuk terus memperjuangkan kebijakan layanan bebas visa ke negara anggota UE, mengingat seluruh negara anggota UE telah mendapatkan kebijakan bebas visa sesuai dengan Perpres 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Langkah ini dapat mendorong penguatan *people-to-people* dan *business-to-business contact*.
4. Terkait CPO, BKSAP perlu memantau secara periodik perkembangan rancangan direktif mengenai Penggunaan Energi Terbarukan dan proses lobi politik yang melibatkan Presiden Dewan UE, Parlemen Eropa dan juga Komisi Eropa.
5. Kunjungan kerja Delegasi DPR RI dalam rangka pendalaman isu-isu kerjasama ekonomi regional perlu dilanjutkan ke negara-negara lain yang memiliki kerja sama ekonomi dengan Indonesia.



VII. PENUTUP

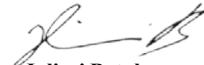
A. Kata Penutup

Demikian Laporan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Menindak lanjuti Resolusi-resolusi ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) terkait integrasi regional dan regionalisme ekonomi pada tanggal 20 – 26 Mei 2018 ke Vienna, Austria. Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

B. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi oleh pemberitaan media.

a.n. Delegasi DPR RI,
Ketua Delegasi



Juliari Batubara



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

**LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE TANGERANG - PROVINSI BANTEN, TANGGAL 27-29 JANUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional (Panja KER) Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI ke Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 27 – 29 Januari 2019 didasarkan pada Surat Tugas Nomor: 07/D/ST/PD-DN/BKSAP-KSR/1/2019 tanggal 24 Januari 2019.

B. SUSUNAN ANGGOTA PANJA

Susunan Delegasi Panja KER yang mengikuti kunjungan kerja ke Tangerang, Provinsi Banten adalah sebagai berikut:



Yth. Sdr. Juliari P. Batubara

Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional



Yth. Sdr. KRMT Roy Suryo
Anggota Panja/F-PD



Yth. Sdr. Jazuli Juwaini
Anggota Panja/F-PKS

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN PANJA

1. Sosialisasi mengenai peran serta Parlemen terutama BKSAP dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI.
2. Diskusi terkait implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perdagangan, industri dan investasi terutama di era perdagangan bebas seperti saat ini.
3. Menyerap aspirasi stakeholders di daerah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mendapatkan masukan pemerintah daerah dan DPRD untuk DPR sebagai bahan perumusan kebijakan untuk skala nasional.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi kunjungan lapangan dipersiapkan oleh tim pendamping Panja yang terdiri dari Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP dan Tenaga Ahli BKSAP. Materi disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Untuk persiapan teknis, Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP telah melakukan peninjauan dan komunikasi intensif dengan Pemda Kabupaten Tangerang.



II. ISI LAPORAN

A. URAIAN TENTANG KUNJUNGAN PANJA

Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga masa bakti Panja Kerjasama Ekonomi Regional (KER). Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, Panja diharapkan untuk berperan sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu dalam membuat legislasi/perundang-undangan dan melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif. Tahun ini Panja KER mengambil agenda utama pembahasan mengenai Daya Saing Ekonomi Nasional di tengah Unilateralisme/Proteksionisme.

Perkembangan ekonomi dunia semakin mengarah pada tatanan global dimana perdagangan bebas telah menjadi arus utama sistem perdagangan internasional dan meningkatkan interdependensi antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal telah turut ambil bagian dalam liberalisasi ekonomi dunia. Meskipun administrasi pemerintahan berganti, namun visi ekonomi perdagangan Indonesia tetap berorientasi pada kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro pasar. Agenda liberalisasi perdagangan yang dijalankan Pemerintah RI utamanya untuk mengeliminasi distorsi – distorsi perdagangan. Melalui keikutsertaan aktif dalam World Trade Organization (WTO) sejak penandatanganan GATT yang menjadi cikal bakal WTO, Indonesia ingin menjamin bahwa perdagangan dunia tetap berpijak pada mekanisme perdagangan yang seimbang dan non – diskriminatif.

Di tataran regional, kerjasama ekonomi ASEAN telah pula diarahkan menuju pasar tunggal dan basis produksi bersama melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015. Meskipun liberalisasi perdagangan berorientasi pada pasar, campur tangan pemerintah tetap dibutuhkan. Hal ini dilakukan melalui keikutsertaan Indonesia dalam berbagai Free Trade Agreements (FTA). Fungsi pengawasan DPR menjadi suatu kebutuhan untuk menjamin bahwa pelibatan Indonesia dalam negosiasi antar pemerintah dan kerjasama ekonomi antar negara dibentuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini untuk memastikan pula Indonesia dapat mengambil peran aktif dan tidak hanya menjadi pasar bagi produk – produk impor.



Salah satu industri unggulan Indonesia adalah industri manufaktur. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2018 terdapat tujuh sektor unggulan manufaktur yaitu logam dasar, makanan-minuman, alat angkutan, mesin dan perlengkapan, kimia, farmasi, serta elektronik. Di tahun 2018, industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 20,27 persen terhadap perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian mencatat sektor manufaktur yang kinerjanya di atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional antara lain industri alat angkutan yang tumbuh sebesar (11,3 persen), industri pakaian jadi (10,9 persen) industri logam dasar (9,94 persen), serta industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (7,36 persen). Oleh karena itu di tahun 2019 ini Pemerintah RI masih tetap berfokus pada mendorong pengembangan sektor manufaktur terutama dalam menghadapi persaingan yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan.

Di tataran ASEAN, sektor manufaktur Indonesia masih unggul. *Manufacturing Value Added (MVA)* Indonesia mampu mencapai kisaran 4,84 persen di atas rata – rata ASEAN yaitu 4,5 persen. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah saat ini yang berorientasi pada pendekatan rantai pasok industri nasional agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global.

Memasuki tahun 2018, tatanan perdagangan dunia menghadapi tantangan kebijakan normalisasi perdagangan yang diterapkan Pemerintah Amerika Serikat untuk mereduksi defisit neraca perdagangan. Kebijakan – kebijakan tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip – prinsip perdagangan bebas yang selama ini berupaya untuk mengeliminasi hambatan perdagangan dan menjauhkan diri dari proteksionisme. Pengenaan tarif impor bagi beberapa produk manufaktur termasuk baja telah memantik perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa kekuatan ekonomi dunia termasuk Cina, Uni Eropa, Meksiko dan Kanada. Penerapan tarif dan bea masuk tentunya akan berdampak bagi daya saing produk – produk Indonesia yang secara langsung memasuki pasar Amerika Serikat maupun secara tidak langsung bagi industri – industri yang menjadi bagian dari rantai pasok global.



Provinsi Banten merupakan daerah di Indonesia yang perekonomiannya masih sangat didominasi oleh industri manufaktur. Terdapat sekitar 20 kawasan industri yang tersebar di Banten, meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Hal ini karena pembangunan kawasan industri yang terintegrasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional karena mampu menyediakan lapangan kerja yang luas dan membawa *multiplier effect* bagi lingkungan sekitar.

Sebagai bagian dari Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan daerah terdepan dalam pengembangan industri. Saat ini pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mendorong percepatan realisasi pembangunan lima kawasan industri di wilayahnya agar pengawasan dan pengendalian industri lebih efektif karena berada dalam sebuah kawasan. Kelima kawasan industri tersebut adalah Kawasan Industri Millenium, Kawasan Industri Cikupa Mas, Kawasan Industri Balaraja, Kawasan Industri Laksana Business Park, serta Kawasan Industri Cileles. Diantara kelima kawasan industri tersebut, Kawasan Industri Cikupa Mas dan Kawasan Industri Balaraja merupakan kawasan industri yang sudah terbentuk, sedangkan kawasan yang lainnya merupakan kawasan baru. Pembentukan kawasan industri ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Industri yang sesuai dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2014.

B. AGENDA KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan panja terdiri dari sejumlah agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Bupati Tangerang, Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Kunjungan ke industri makanan ringan, PT. Indofood Fritolay Makmur.



C. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

1. Pertemuan dengan Bupati Tangerang dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang

Pertemuan antara Anggota Panja KER dengan Bupati Tangerang, **Yth. Ahmed Zaki Iskandar B. Bus.**, didampingi jajaran SKPD, dan dipimpin oleh **Yth. Sdr. Juliari. P. Batubara** selaku Ketua Panja, dilaksanakan di Kantor Bupati Tangerang. Pertemuan yang berlangsung dengan hangat dan dinamis tersebut menghasilkan beberapa masukan terkait implementasi kebijakan perdagangan, industri, investasi dan ketenagakerjaan.

Bupati Tangerang menyampaikan saat ini populasi penduduk Tangerang tercatat sekitar 3,5 juta orang. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu 3 persen dan diproyeksi akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2022. Selain itu terdapat sekitar 60 ribu kaum urban yang datang ke Tangerang khusus untuk mencari pekerjaan.

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang, terdata jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 5,62 juta orang. Hal itu naik sekitar 108 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2017.

Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,75 persen menjadi 7,77 persen. TPT lulusan SMP menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 12,02 persen pada Februari 2018. Secara umum, industri padat karya yang saat ini berada di Kabupaten Tangerang mengalami tantangan dari segi Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang hampir mencapai batas maksimal di besaran Rp. 3,826,000. Hal ini memberatkan pengusaha dan banyak perusahaan memilih pindah dari Tangerang sehingga dapat menimbulkan masalah baru dari sisi pengangguran. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang secara kontinyu mencari langkah – langkah inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.



Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui revitalisasi tata ruang. Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini tengah gencar mengembangkan kota – kota satelit baru sebagai kota industri. Konsep kota industri berbeda dengan kawasan industri dan konsep kota yang mengintegrasikan kawasan industri, hunian dan komersial dengan konsentrasi kegiatan penduduk yang tinggi dengan konektivitas yang baik dengan daerah-daerah sekitarnya.



Belajar dari Bintaro dan BSD, pembangunan kota – kota satelit ini diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* dan pengaruh polarisasi kekuatan lokal yang sangat besar. Pengembangan kota industri akan turut mendorong pertumbuhan berbagai sektor di daerahnya, termasuk potensi sosio-ekonomi dan sumber daya lokal.

Terkait implementasi kebijakan dan UU, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah sinergi antara provinsi dan kabupaten. Hal ini terutama dengan adanya pemisahan fungsi pengawasan yang dipindahkan kewenangannya ke daerah tingkat I dengan fungsi penyelesaian yang masih menjadi wewenang daerah tingkat II menyusul implementasi UU Otonomi Daerah yang baru (UU No. 23 tahun 2014). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1), Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mencatat saat ini terdapat 5415 perusahaan dan industri di Tangerang yang terdiri dari 3789 perdagangan dan jasa serta 1626 industri. Pada tahun 2018 nilai perdagangan mencapai 1,4 miliar USD untuk 10 komoditas terbesar yaitu alas kaki, garmen, makanan dan minuman ringan, keramik, kerajinan tangan, sepeda dan suku cadangnya, metal, bulu mata palsu, plastik dan produk kimia dan hasil awalnya. Negara tujuan ekspor utama Tangerang adalah China, Belgia, Jepang, Korea, Jerman, Australia dan Arab. Saat ini telah ada 70 industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor dengan produk utama rotan, minyak aspiri dan batu fosil. Pemisahan antara wewenang penyelesaian dan pengawasan menyulitkan Pemkab karena penyelesaian masalah menjadi tanggung jawab daerah tingkat II akan tetapi pengawasan operasional sehari-hari menjadi wewenang daerah tingkat I.



Terkait ketenagakerjaan, Tangerang menghadapi tantangan dari segi kecepatan penyelesaian pengaduan isu – isu ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh jumlah mediator yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang saat ini hanya 6 orang. Mengingat jumlah kasus – kasus yang ditangani mencapai 4700 kasus normatif ketenagakerjaan, secara ideal diperlukan sekitar 12 orang mediator. Namun wewenang rekrutmen CPNS yang berada di pusat membuat daerah tingkat II harus mengikuti formasi yang ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pemda Kabupaten Tangerang secara berkesinambungan terus mengembangkan keahlian tenaga kerja terutama melalui pelatihan keterampilan melalui BLK. Selain untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, hal ini dilakukan untuk menyiapkan mereka berkompetisi di era Revolusi 4.0. Saat ini Kabupaten Tangerang baru memiliki satu BLK yang berlokasi di Jayanti dan akan membentuk BLK – BLK baru. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten memberikan beasiswa pelatihan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah memiliki MoU dengan berbagai industri di kawasan Tangerang. Dari 800 orang lulusan SMA/SMK yang mendapat beasiswa tahun lalu, 30 persen telah terserap oleh industri.

2. Kunjungan ke Industri Makanan Ringan, PT. Indofood Fritolay Makmur



Panja KER melakukan kunjungan lapangan ke PT. Indofood Fritolay Makmur sebagai salah satu perusahaan pengolahan berskala internasional di kawasan industri Tangerang. Indofood Fritolay Makmur merupakan divisi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang merupakan salah satu produsen terkemuka di sektor produsen konsumen bermerk. PT Indofood Fritolay Makmur memproduksi dan memasarkan makanan ringan dengan merek Lays, Cheetos, Chitato, Chiki, dan JetZ. Perusahaan juga menawarkan keripik singkong dengan merek Qtela.

Sejak 17 Maret 2010, PT Indofood Fritolay Makmur menjadi perusahaan patungan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan Pepsico, Inc dengan komposisi saham 51 – 49 persen. Saat ini PT Indofood Fritolay Makmur memperkerjakan karyawan tetap sebanyak 900 orang.



Sebagai bagian dari *corporate social responsibility*, PT. Indofood Fritolay Makmur menjalin kemitraan agro penanaman kentang. Salah satu proyek agro di bawah kemitraan tersebut adalah program kemitraan dengan petani kentang di Kecamatan Pangalengan sejak tahun 1997 dengan menyediakan bibit unggul kentang bersertifikasi bagi petani dan melatih semua ketua kelompok tani yang dibentuk untuk tujuan kemitraan agar trampil dalam pembibitan kentang.



Panja KER melihat pula proses produksi makanan ringan. PT. Indofood Fritolay Makmur merupakan salah satu dari 4 perusahaan pengolahan makanan ringan di dunia yang memiliki *Own Machine Seasoning* (OMS). Perusahaan ini telah pula mengimplementasikan SAP untuk mengelola administrasi data dan keuangan perusahaan. Perusahaan ini telah mengantongi status PROPER BLUE. PROPER merupakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 2005 dan tata cara penilaiannya diatur dalam Peraturan Menteri No. 06/2013.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kunjungan lapangan Panja mendapati bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan rekomendasi Panja yaitu penyelesaian masalah perizinan menyusul implementasi One Single Submission (OSS), pembahasan usulan penambahan jumlah mediator untuk mempercepat penyelesaian isu – isu ketenagakerjaan, dan sejalan dengan implementasi UU Otonomi Daerah yang baru. Panja juga memutuskan akan melakukan follow up atas masukan-masukan dari stakeholders terkait.

B. SARAN

1. Hasil kunjungan lapangan Panja sekiranya dapat dikomunikasikan ke Komisi-komisi terkait guna mendapatkan tindak lanjut yang sesuai.
2. Hasil kunjungan Panja ini dapat menjadi basis bagi kunjungan lapangan Panja selanjutnya.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 3 (tiga) Anggota DPR RI, 2 (dua) orang Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, 3 (tiga) orang Pejabat dan staf Sekretariat BKSAP (Sekretaris Delegasi), 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP, dan 1 (satu) orang wartawan adalah sebesar Rp 60.951.000 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- Presentasi Ketua Panja KER
- Presentasi PT. Indofood Fritolay Makmur
- Kliping Berita



C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Lapangan Panja berlangsung pada tanggal 27 – 29 Januari 2019 di Banten. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama panja, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2019
a.n. Delegasi DPR RI
Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional,

Juliari P. Batubara

A-168



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

**LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA KERJASAMA EKONOMI REGIONAL
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 16 – 18 SEPTEMBER 2019, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan Panitia Kerja Kerjasama Ekonomi Regional (Panja KER) pada tanggal 16 – 18 September 2019 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 26 /PIMP /1 /2019-2020 tanggal 23 Agustus 2019.

B. SUSUNAN ANGGOTA PANJA

Susunan anggota panja adalah sebagai berikut:



Yth. Sdr. Juliari P. Batubara,
Wakil Ketua BKSAP/Ketua Panja KER



Yth. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
Ketua BKSAP



Yth. H. Achmad Fariat
Wakil Ketua BKSAP



Yth. Sdri. Mercy Christy Barends, ST



Yth. KH. Jalaludin Rakhmat



Yth. Dr. Jerry Sambuaga



Yth. Ir. Dwita Ria Gunadi



Yth. Sdri. Susy Marleni Bachsin, SE., MM.



Yth. H. Nurzahedi, SE.



Yth. Sdr. Bara K. Hasibuan, M.A.



Yth. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN PANJA

MAKSUD

1. Sosialisasi mengenai peran serta Parlemen terutama BKSAP dalam mendukung diplomasi ekonomi yang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah RI.
2. Diskusi terkait implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kawasan ekonomi khusus, perdagangan dan industri jasa terutama di era perdagangan bebas seperti saat ini.

TUJUAN

1. Menyerap aspirasi stakeholders di daerah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah terlebih di daerah yang terdampak bencana alam.



2. Mendapatkan masukan pemerintah daerah dan DPRD untuk DPR sebagai bahan perumusan kebijakan untuk skala nasional.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi kunjungan lapangan dipersiapkan oleh tim pendamping Panja yang terdiri dari Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP dan Tenaga Ahli BKSAP. Materi disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Untuk persiapan teknis, Sekretariat Kerja Sama Regional BKSAP telah melakukan peninjauan dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi NTB.

II. ISI LAPORAN

A. URAIAN TENTANG KUNJUNGAN PANJA

Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga masa bakti Panja Kerjasama Ekonomi Regional (KER). Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, Panja diharapkan untuk berperan sebagai forum yang menyediakan ruang dialog dan pengayaan isu-isu dalam membuat legislasi/perundang-undangan dan melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan kerjasama ekonomi yang efektif. Anggota Panja terdiri dari Anggota BKSAP dan bersifat lintas komisi sehingga dapat berperan dalam memastikan sinergi antara resolusi/keputusan yang diambil dalam sidang-sidang parlemen regional dengan pembahasan-pembahasan di komisinya. Sejalan dengan mandat BKSAP untuk mewakili kepentingan diplomasi parlemen Indonesia, anggota Panja dapat menggalang kerja sama dengan Anggota Parlemen negara lain melalui organisasi-organisasi keparlemenan yang memiliki agenda kerjasama ekonomi antara lain *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, dan *Asian Parliamentary Assembly (APA)*. Hasil kerja Panja berupa saran/rekomendasi terkait kerjasama ekonomi regional kepada pihak eksekutif/pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang didistribusikan di akhir masa kerja Panja.



Dasar dari pembentukan Panitia Kerja ini adalah adanya sebuah kebutuhan untuk dapat membangun dialog dan berbagi pengalaman dengan parlemen negara-negara lainnya dan mendukung misi diplomasi ekonomi Pemerintah RI. Panja KER juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada bidang perdagangan, pariwisata, investasi dan kerja sama pembangunan agar nantinya partisipasi Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Indonesia.

Tahun ini Panja KER mengambil agenda utama pembahasan mengenai Daya Saing Ekonomi Nasional di tengah Unilateralisme/Proteksionisme. Secara khusus, Panja KER menyoroti mengenai Kawasan Ekonomi Khusus dan Daya Saing Ekonomi Nasional di tengah Liberalisasi Perdagangan. Hal ini mengingat daerah memiliki peran paradiplomasi dan dapat berperan aktif dalam melakukan perjanjian kerjasama dan aktivitas ekonomi dengan negara-negara lain.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan Indonesia telah membuka peluang peningkatan daya saing antar daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi



ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Salah satu upaya memperkuat basis perekonomian daerah adalah melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Maksud pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Pemberlakuan MEA di tahun 2015 tentunya menjadi pemicu peningkatan arus lalu lintas barang, jasa dan tenaga kerja antar negara – negara anggota ASEAN. Menyikapi hal ini, keberadaan kawasan ekonomi khusus menjadi signifikan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan kawasan ekonomi khusus yang ditandai oleh upaya – upaya untuk melengkapi ketersediaan infrastruktur, keberadaan industri pendukung, dan efektifitas pembentukan modal tentunya berdampak bagi pembangunan daerah dimana kawasan ekonomi khusus tersebut diberlakukan. Pada kesempatan terdahulu Panja telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang memiliki sektor ekonomi unggulan perdagangan barang dan manufaktur. Sebagai upaya pembandingan, Panja melakukan pula kunjungan kerja ke daerah yang memiliki sektor unggulan perdagangan jasa, dalam hal ini jasa pariwisata.

Sektor jasa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan NTB. Dengan ditetapkannya KEK Mandalika sebagai KEK Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014, diharapkan semakin memajukan industri pariwisata di NTB dan memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat setempat. Untuk menarik aliran investasi ke KEK, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No 91 tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Kemudahan Berusaha. Pemerintah menargetkan hingga 2019 akan terwujud 25 wilayah sebagai KEK. Dari 12 KEK, terdapat 8 KEK bertema manufaktur dan 4 KEK bertema kepariwisataan seperti di Mandalika.

B. AGENDA KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan panja terdiri dari sejumlah agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur NTB dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB
2. Kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

C. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

1. Pertemuan dengan Gubernur NTB dan jajaran SKPD Provinsi NTB

Pertemuan antara Anggota Panja KER dengan Gubernur Provinsi NTB, **Yth. Dr. Zulkfliemansyah**, didampingi jajaran SKPD, dan dipimpin oleh **Yth. Sdr. Juliari P. Batubara** selaku Ketua Panja. Pertemuan yang berlangsung dengan hangat dan dinamis tersebut menghasilkan beberapa masukan terkait implementasi kebijakan pengembangan KEK.



Ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV 2018 mengalami kontraksi sebesar 1,43% (yoy), disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor luar negeri. Namun demikian



kontraksi tersebut tidak sedalam kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 14,12% (yoy). Di luar sektor tambang, ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV 2018 mulai tumbuh positif sebesar 1,80% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,54%(yoy). Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang mulai pulih pasca bencana gempa bumi yang terjadi di triwulan III 2018. Beberapa sektor ekonomi yang terdampak bencana gempa seperti perdagangan dan konstruksi mulai tumbuh menguat di triwulan IV 2018, sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi NTB Non-Tambang. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi non-tambang di triwulan IV 2018 terhambat oleh pertumbuhan sektor pertanian dan transportasi yang masih berkontraksi¹. Kedepan, pemulihan ekonomi Provinsi NTB diperkirakan kembali berlanjut. Sumber pemulihan ekonomi NTB diperkirakan berasal dari proyek pembangunan yang mulai kembali berjalan pasca tertunda saat bencana gempa bumi terjadi. Selain itu, akselerasi di sektor konstruksi akan didorong oleh langkah rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana gempa.

Pembangunan KEK Mandalika memberikan sumbangan bagi sektor konstruksi dan pemulihan ekonomi NTB pasca gempa bumi. Beberapa upaya perbaikan fasilitas penunjang bagi pengembangan kawasan pariwisata ini yang telah dilakukan pemerintah antara lain perpanjangan *runway* Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu yang berjarak sangat dekat dengan KEK Mandalika, revitalisasi Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan transportasi laut utama di NTB, serta penanganan jaringan air bersih kawasan Kuta dan sekitarnya yang menjadi lokasi KEK Mandalika. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan KEK dimana keberadaan KEK menjadi signifikan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan KEK yang ditandai upaya-upaya untuk melengkapi ketersediaan infrastruktur, keberadaan industri pendukung, dan efektifitas pembentukan modal tentunya berdampak bagi pembangunan daerah dimana KEK tersebut diberlakukan

¹ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/ntb/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-NTB-Mei-2019.aspx>

2. Kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Didampingi Gubernur Provinsi NTB, Panja melakukan kunjungan ke kantor *Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* sebagai BUMN yang menjadi fasilitator pembangunan KEK Mandalika dan tinjauan lapangan ke lokasi KEK Mandalika.



KEK Mandalika memiliki lahan kelola seluas 1.175 hektar yang telah berstatus *clean and clear*. ITDC optimistis KEK Mandalika dapat membawa multiplier effect perekonomian yang besar bagi masyarakat sekitar kawasan dan mendukung visi pembangunan dari pinggiran yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Secara efektif kelembagaan dan SDM, ITDC telah menyiapkan kantor administrator untuk mendukung proses pembangunan kawasan pariwisata terpadu ini. Berbagai fasilitas pendukung telah pula disiapkan, antara lain instalasi pengolahan air bersih berteknologi *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)* tahap I yang telah beroperasi sejak November 2016. Selanjutnya, Pemerintah telah pula memfasilitasi pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika dalam bentuk kemudahan-kemudahan dan fasilitas



di bidang kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus serta PP Nomor 96 Tahun 2015. Dari sisi tenaga kerja, setidaknya dalam lima tahun ke depan diperkirakan KEK Mandalika akan menyerap setidaknya 5000 tenaga kerja lokal. Hingga saat ini, total keseluruhan komitmen investasi yang masuk ke KEK Mandalika telah mencapai Rp 12,7 Triliun. Salah satu investasi utama adalah proyek Mandalika *Street Race Circuit Cluster* seluas 120 Ha dengan nilai investasi mencapai Rp 6,7 Triliun.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Panja optimis bahwa ke depannya NTB akan menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian dunia terutama dengan terwujudnya pembangunan Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Kunjungan lapangan Panja mendapati bahwa pembangunan KEK Mandalika berjalan dengan lancar. Panja mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Provinsi NTB dan ITDC dalam mengawal proses penyelesaian pembangunan kawasan seluas Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo telah beberapa kali melakukan kunjungan ke NTB untuk meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur utama yaitu Sirkuit MotoGP maupun infrastruktur penunjang seperti akomodasi dan fasilitas publik.

Kebijakan desentralisasi yang diterapkan Indonesia telah membuka peluang peningkatan daya saing antar daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dalam hal daya saing, Panja merekomendasikan agar NTB terus berupaya meningkatkan kapasitas daerah terutama dari sisi kesiapan menjadi tuan rumah event-event internasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Dari sisi kesiapsiagaan bencana, wilayah KEK Mandalika relatif aman dari ancaman bencana gempa bumi. Namun tentunya masyarakat setempat tetap harus dibekali dengan kemampuan mitigasi bencana alam.

B. SARAN

1. Hasil kunjungan lapangan Panja sekiranya dapat dikomunikasikan ke Komisi-komisi terkait guna mendapatkan tindak lanjut yang sesuai.
2. Hasil kunjungan Panja ini dapat memperkuat rekomendasi Panja tahun 2019 mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terutama karena negara-negara anggota ASEAN telah melakukan penandatanganan *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)* di sela-sela pertemuan *ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat* ke-25 bulan April 2019. ATISA semakin memperkuat liberalisasi sektor jasa di ASEAN dan mempermudah arus mobilitas tenaga kerja antar negara anggota ASEAN. Panja merekomendasikan pula perbaikan manajemen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga nantinya setiap KEK di Indonesia dapat mempertahankan keberlanjutannya dan meminimalisir persaingan antar KEK itu sendiri.



IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 11 Anggota DPR RI, 2 (dua) orang Pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 (dua) orang staf Sekretariat BKSAP (Sekretaris Delegasi), 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP, 2 (dua) orang wartawan adalah sebesar Rp 226.995.300,- (Dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

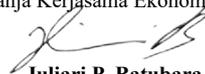
B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran Kliping Berita.

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Lapangan Panja berlangsung pada tanggal 16–18 September 2019 di NTB. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama panja, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 25 September 2019
Ketua Panja Kerjasama Ekonomi Regional,


Juliari P. Batubara

A-168



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

LAPORAN DELEGASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA
BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN (BKSAP)
GUNA MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) DAN
ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF)

BUDAPEST – HUNGARIA, 11 – 17 MARET 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu prioritas kebijakan utama Presiden Indonesia dan Wakil Presiden selama masa jabatan mereka 2014-2019. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk merangsang investasi asing. Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi relatif kuat. Pertumbuhan pada kuartal kedua tahun 2018 stabil di sekitar lebih dari 5% year-on-year sementara tingkat inflasi berada di bawah kendali dan dalam kisaran target Bank Indonesia 3-5%.

Selain itu, Indonesia mencatat prestasi ekonomi makro lainnya, yaitu penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta tingkat kesenjangan yang dibuktikan dengan rasio Gini yang saat ini berada di 0,389. Ini tentu saja merupakan hasil yang menguntungkan bagi pertumbuhan investasi domestik dan untuk peluang kerja sama ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia per Oktober 2018 mencapai nilai US \$ 15,80 miliar, naik 5,87 persen dibandingkan dengan ekspor pada September 2018. Ada peningkatan 3,59 persen tahun-ke-tahun dibandingkan dengan September 2017.



Catatan Anggaran yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2016 menyebutkan bahwa stabilitas dan ketahanan ekonomi serta peningkatan daya saing ekonomi akan tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, upaya menuju tujuan ini akan mencakup, antara lain, meningkatkan ekspor dan investasi melalui instrumen fiskal dan insentif serta memastikan pelaksanaan reformasi perizinan yang efektif.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah komite tetap DPR yang diberi mandat untuk melakukan diplomasi parlemen. Dalam menjalankan mandat ini, BKSAP dapat mengambil bagian dalam diplomasi ekonomi, karena ini adalah bidang prioritas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kegiatan diplomasi parlemen juga dapat berfungsi untuk melengkapi tugas pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kerja sama ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah, guna memastikan bahwa semua bentuk kerja sama berada di jalur mewujudkan visi kemandirian ekonomi dan bahwa mereka akan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, BKSAP telah membentuk Panitia Kerja untuk Kerjasama Ekonomi Regional (KER).

Regionalisme Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan

Berdasarkan perspektif politik global, globalisasi dan liberalisasi ekonomi saling terkait. Globalisasi diharapkan dapat membentuk komunitas transnasional di mana batas-batas wilayah nasional tidak lagi dipandang sebagai hambatan untuk interaksi manusia, terutama dalam ekonomi dan perdagangan. Di satu sisi, globalisasi memang membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengakses pasar, teknologi, dan informasi ekonomi maju. Di sisi lain, globalisasi mempertinggi persaingan pasar, dan para pesaing dalam perdagangan yang diliberalisasi dan terglobalisasi terdiri dari teman dan musuh. Oleh karena itu, keberadaan dan peran negara tetap dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Teori tentang liberalisasi perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan bebas dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara dengan, membuat harga barang dan jasa lebih terjangkau, meningkatkan daya saing, dan menggerakkan kekuatan inovatif negara tersebut. Sejak 2015, negara-negara Asia Tenggara telah bergabung bersama di bawah komunitas ekonomi ASEAN (AEC) dan Cetak Biru AEC 2025 menuju integrasi regional telah diresmikan. Blok perdagangan bebas di wilayah ini dapat berdampak baik pada aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Ken Itakura dari Nagoya City University dan ERIA telah melakukan simulasi ekonomi dan menyimpulkan bahwa FTA di antara negara-negara ASEAN akan berkontribusi terhadap 30% dari output dan perdagangan global, khususnya FTA antara 6 negara pendiri ASEAN termasuk Indonesia.

Penghapusan hambatan perdagangan di satu sisi memang berdampak positif bagi perekonomian suatu negara. Namun, hal itu juga akan menciptakan persaingan tidak hanya dalam hal produk tetapi juga tenaga kerja profesional antara negara-negara ASEAN. Semua jenis perusahaan, termasuk yang kecil dan menengah, dan profesional harus memperkuat daya saing mereka agar dapat bersaing di tingkat regional. Indonesia perlu memetakan potensi daya saingnya dalam menghadapi regionalisme ASEAN untuk mengoptimalkan strategi dan kinerja FTA di mana Indonesia adalah salah satu pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan "Nawa Cita", aspirasi nasional yang memandu kebijakan pemerintah Indonesia saat ini.

Saat ini Regionalisme ekonomi dan liberalisasi juga menghadapi tantangan yang timbul dari kebijakan sepihak yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu memaksakan hambatan perdagangan terutama melalui mekanisme tarif impor. Jika ini terus berlanjut, kebijakan AS dapat meningkat menjadi perang dagang global. Negara-negara Asia Tenggara akan diharapkan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang melambat dan gangguan terhadap bisnis dan konsumen, yang diakibatkan oleh rantai produksi global yang terganggu dan kenaikan harga impor. Selain itu, komitmen dari negara-negara di dunia juga perlu diperbarui untuk secara proaktif mempertahankan kebijakan perdagangan bebas global melalui forum-forum seperti G20 dan WTO (World Trade Organization), guna meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan global, untuk mengurangi ketegangan perdagangan, dan untuk mencegah kebijakan perdagangan yang merusak.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka kunjungan kerja Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) guna menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) pada tanggal 11 – 17 Maret 2019 ke Hungaria didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 20/ PIMP/ VI/ 2018-2019 tertanggal 8 Maret 2019.

II. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR-RI dalam rangka kunjungan kerja BKSAP guna menindaklanjuti Resolusi-resolusi AIPA dan APPF adalah sebagai berikut:



Yth. Sdr. Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Delegasi
F-PDIP



Yth. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf
Ketua BKSAP
F-PD



Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME
Wakil Ketua BKSAP
F-PG



Yth. Sdr. Ono Surono
Anggota BKSAP
F-PDIP



Yth. Sdri. Dwie Aroem Hadiatie, S.I.Kom.
Anggota BKSAP
F-PG



Yth. Sdr. H. Jon Erizal, SE., MBA.
Anggota BKSAP
F-PAN



Yth. Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Anggota BKSAP
F-PKS



Yth. Sdr. H. Achmad Farial
Anggota BKSAP
F-PPP



Yth. Sdr. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE.
Anggota BKSAP
F-P.Hanura

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja BKSAP adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara di kawasan Eropa terkait integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional melalui perspektif negara mitra wicara ASEAN.
3. Meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen dengan negara-negara yang tergabung dalam kerangka kerjasama ekonomi regional Uni Eropa dalam hal ini Hungaria.
4. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama regional.

IV. SEKILAS MENGENAI HUNGARIA

Populasi	: 9,797,561 (per-2017)
Luas Wilayah	: 93,030 km ²
Bentuk Pemerintahan	: Unitary Parliamentary Republic
Kepala Negara	: János Áder
Perdana Menteri	: Viktor Orbán
Ketua Parlemen	: László Kövér
GDP (total)	: \$325.134
GDP (per-kapita)	: \$16,905
Bergabung ke Uni Eropa:	1 Mei 2004



Fokus Hubungan RI – Hungaria dan Potensi Hungaria



1. Peningkatan hubungan bilateral
2. Perdagangan, Investasi, Pendidikan dan Pariwisata

Isu yang menjadi perhatian Indonesia

1. Peningkatan perdagangan bilateral, investasi dan kunjungan wisatawan asal Hungaria.
2. Meminta dukungan Hungaria untuk menerima lebih banyak komoditas unggulan Indonesia.
3. Dukungan Hungaria terhadap pencalonan Indonesia di organisasi internasional.
4. Penambahan kuota beasiswa dari pemerintah Hungaria untuk mahasiswa Indonesia.
5. Kerjasama di bidang teknologi dan ekonomi digital

Isu yang menjadi perhatian Hungaria

1. Peningkatan hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi; perdagangan dan investasi, pendidikan, dan pariwisata.
2. Kerjasama dalam bidang pengelolaan sumber air bersih dan sumber energi terbarukan.
3. Hungaria menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara percontohan dalam hal strategi perdagangan

Informasi Kunci

1. Hungaria merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-7 di Eropa Tengah dan Eropa Timur.
2. Hungaria bergabung ke dalam NATO pada tahun 1999 bersamaan dengan Polandia dan Republik Ceko

Kerjasama Ekonomi

1. Indonesia merupakan salah satu mitra ekonomi utama untuk Hungaria di kawasan Asia Tenggara. Hubungan perdagangan bilateral kedua negara pernah dipengaruhi secara negatif oleh krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada akhir tahun 90-an di Indonesia.
2. Komisi Bersama tentang Kerjasama Ekonomi Bilateral (JCEC) antara Indonesia dan Hungaria didirikan pada tahun 1988, namun setelah tiga sesi badan tersebut menghentikan fungsinya pada tahun 1993.
3. Dalam perjalanan kunjungan Presiden Indonesia ke Hungaria pada tahun 2002, fungsi dari JCEC diaktifkan kembali.
4. Pengaktifan kembali JCEC mampu meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara:



- Perdagangan bilateral tumbuh dari US \$ 37 juta pada 1993 menjadi US \$ 216 juta pada 2003.
 - Menurun pada 2004 menjadi US \$ 126,3 juta, US \$ 124,8 juta pada 2005.
 - US \$ 101,9 juta pada 2006, dan US \$ 114,9 juta pada 2007.
 - Pada 2010, volume perdagangan bilateral mencapai US \$ 220,83 juta, dan naik menjadi US \$ 438,34 juta pada 2011. Namun, perlambatan ekonomi yang melanda Eropa menyebabkan perdagangan merosot menjadi US \$ 183,5 juta untuk periode Januari - Oktober 2012.
 - Nilai perdagangan Hungaria-Indonesia pada Januari-Juni 2016 mengalami peningkatan hingga 14,91%, meningkat menjadi USD 59,64 juta.
 - Pada 2015 total perdagangan kedua negara mencapai USD 103,4 miliar. Indonesia berada di atas angin dalam hal ini dengan surplus perdagangan 6,8 miliar dolar AS.
5. Komoditas ekspor Indonesia ke Hungaria meliputi karet, produk hasil olahan karet, tekstil, produk alas kaki, minyak kelapa sawit, rempah-rempah, kulit, rotan, produk plastik dan barang kerajinan lainnya. Sementara Hungaria mengekspor produk farmasi, bahan kimia, produk listrik, elektronik dan optic serta berbagai mesin ke Indonesia.
 6. Tercatat pada 2015, kunjungan wisatawan Hungaria ke Indonesia sebesar 7.896, sementara 2016 meningkat menjadi 10.021 sedangkan 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 12.600 dan 2018 sebanyak 13.413 wisatawan dari Hungaria yang berlibur ke Indonesia.
 7. Jumlah WNI di Hungaria Berdasarkan catatan KBRI Budapest hingga Juli 2018, jumlah WNI yang menetap di seluruh Hungaria sebanyak 336 orang, termasuk Balita dan anak-anak.
 8. Adapun nilai investasi Hungaria di Indonesia mencapai 228 ribu (Kuartal I 2016) dan USD 1,16 juta untuk periode 2010-2015.
 9. Tercatat ada beberapa perusahaan Hungaria yang berinvestasi di Indonesia yaitu Transelektro, Diagon dan Hungarindo serta Budapest Waterworks.
 10. Nilai Investasi Budapest Waterworks dalam proyek sistem pengelolaan air bersih di 34 wilayah se-Indonesia senilai 37,6 juta dolar AS.
 11. Perusahaan IT dari Hungaria juga berencana untuk melakukan pengembangan senilai 1,6 juta dollar AS.
 12. Khusus untuk kerjasama antara Indonesia dengan Hungaria, bank ekspor impor Hungaria telah menentukan batas kredit baru sebesar 200 juta euro untuk mendukung kemitraan bisnis antara perusahaan Hungaria dan Indonesia.



Perdagangan Indonesia – Hungaria Periode 2013 – 2018

Description	2013	2014	2015	2016	2017	Trend (%) 13-17	Jan-Dec		Change (%) 18/17
							2017	2018	
TOTAL TRADE	201.517,4	149.295,4	120.571,0	122.216,2	133.231,8	-9,77	133.231,8	148.362,2	11,36
OIL & GAS	1.312,4	855,7	760,1	540,2	492,6	-21,49	492,6	526,3	6,83
NON OIL & GAS	200.205,0	148.439,7	119.810,9	121.676,0	132.739,2	-9,70	132.739,2	147.836,0	11,37
EXPORT	91.235,1	86.871,3	58.324,4	60.761,9	64.863,5	-9,88	64.863,5	73.689,7	13,61
OIL & GAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
NON OIL & GAS	91.235,1	86.871,3	58.324,4	60.761,9	64.863,5	-9,88	64.863,5	73.689,7	13,61
IMPORT	110.282,3	62.424,1	62.246,6	61.454,3	68.368,3	-9,26	68.368,3	74.672,5	9,22
OIL & GAS	1.312,4	855,7	760,1	540,2	492,6	-21,49	492,6	526,3	6,83
NON OIL & GAS	108.969,9	61.568,4	61.486,5	60.914,1	67.875,7	-9,13	67.875,7	74.146,3	9,24
BALANCE OF TRADE	-19.047,2	24.447,2	-3.922,2	-692,3	-3.504,9		-3.504,9	-982,8	71,96
OIL & GAS	-1.312,4	-855,7	-760,1	-540,2	-492,6	-21,49	-492,6	-526,3	-6,83
NON OIL & GAS	-17.734,8	25.302,9	-3.162,1	-152,1	-3.012,3		-3.012,3	-456,6	84,84

Kerjasama Pendidikan

Dalam konteks kerjasama pendidikan, setiap tahunnya ada 30 hingga 40 pelajar dari Hungaria berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar dengan pelajar Indonesia. Program pertukaran pelajar ini cukup efektif sebagai media untuk memperkenalkan budaya masing-masing negara dalam rangka meningkatkan interaksi people-to-people. Dalam pendandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria pada tahun 2018, pemerintah Hungaria menyetujui permintaan pemerintah Indonesia untuk menambah kuota jumlah mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari pemerintah Hungaria, dari 50 orang menjadi 100 orang per-tahun.

Kerjasama Pengelolaan Sumber Air Bersih

Menindaklanjuti kunjungan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban pada tahun 2016, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam manajemen air bersih melalui proyek Sistem Penyediaan Air di Ibu Kota dan Kabupaten (SPAM IKK) yang akan dibangun di 34 lokasi di seluruh Indonesia. Pasokan air bersih merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia yang juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan oleh perusahaan air dari Hungaria yaitu *Budapest Waterworks*.

Kerjasama Sumber Energi Terbarukan



Indonesia dan Hungaria menyatakan komitmen untuk meningkatkan kerjasama bilateral mengenai sumber energi terbarukan dengan target Indonesia dapat mencapai 23 persen dari total daya yang disediakan oleh sumber energi terbarukan pada tahun 2025. Saat ini, hanya 6 persen energi yang berada di Indonesia berasal dari sumber energi yang terbarukan. Meskipun Indonesia memiliki beragam sumber daya energi terbarukan yang melimpah, dari tenaga air hingga geothermal, pengembangannya masih menghadapi banyak kendala seperti anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

Kerjasama Pengembangan Ekonomi Digital

Indonesia dan Hungaria juga sepakat untuk mengembangkan ekonomi digital di masa depan. Pada tahun 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kedutaan Besar Hungaria di Indonesia menyelenggarakan kegiatan HUNINDOTECH Business Forum 2018 “*Revolutionary Hungary*”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta di kedua negara pada sektor digital. Forum ini juga menjadi sarana menambah wawasan, menciptakan ide baru dan sharing best practice berbagai tema sektor, sekaligus ajang business networking antara pengusaha Indonesia dan Hungaria.

Kerjasama Pertanian

Indonesia melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Hungaria untuk berinvestasi di perkebunan gandum di Indonesia. Hal ini didasari oleh semakin meningkatnya konsumsi gandum oleh masyarakat Indonesia sehingga dirasa perlu untuk dapat bekerjasama dengan Hungaria dalam memproduksi gandum. Hungaria adalah produsen gandum terbesar di Eropa dengan kapasitas produksi rata-rata 7 ton per-hektar. Rencana ini disampaikan oleh Indonesia pada saat menerima kunjungan Perdana Menteri Viktor Orban pada tahun 2016. Selain gandum, Sulaiman juga meminta investasi Hungaria ke Indonesia untuk mendorong produksi gula, jagung, dan daging sapi. Mengenai jagung, kedua negara akan bekerja sama (bertukar teknologi dan pengetahuan) untuk meningkatkan produksi jagung di Indonesia (dimulai dengan uji coba untuk jagung jenis IPB3S).

V. HASIL KUNJUNGAN

Selama kunjungan kerja ke Budapest, Delegasi DPR RI melaksanakan sejumlah pertemuan, yaitu:

A. Pertemuan Dengan Kamar Dagang dan Industri Hungaria

Pada pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Hungaria, Delegasi DPR RI diterima oleh **Mr. Atilla Galambos** selaku Presiden KADIN Hungaria,

Ms. Flora Palmay selaku Deputi Direktur Internasional, serta **Mr. Kristof Vegvari** yang merupakan *Area Manager* untuk kawasan ASEAN.



Delegasi DPR RI berdiskusi dengan KADIN Hungaria

KADIN Hungaria menyambut dengan baik kunjungan yang dilakukan oleh Delegasi DPR RI. Dalam sambutannya, **Mr. Attila Galambos** menyampaikan bahwa Indonesia juga merupakan mitra penting bagi Hungaria dalam hal perdagangan khususnya di kawasan ASEAN. KADIN Hungaria juga menjelaskan posisinya sebagai penyambung lidah bagi perusahaan Hungaria yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia. Saat ini tercatat ada beberapa perusahaan Hungaria yang telah melakukan investasi di Indonesia, salah satu paling utama adalah *Budapest Waterworks* yang bekerja sama dalam pengelolaan air bersih di Indonesia, kemudian ada tiga perusahaan Hungaria lainnya yang berinvestasi di Indonesia yaitu *Transelektro*, *Diagon* dan *Hungarindo*. Galambos juga menyampaikan bahwa kerja sama antara KADIN kedua negara sejak 1985 antara lain melalui didirikannya *Indonesia-Hungaria Joint Business Council*, yang cukup berperan penting dalam upaya-upaya peningkatan hubungan dagang kedua negara.

Wakil Ketua BKSAP, **Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME** mengatakan, bahwa Indonesia dan Hungaria merupakan mitra perdagangan bilateral yang masing-masing menganggap negaranya penting. Hungaria merupakan pasar strategis karena berada di tengah Eropa, sementara Indonesia juga merupakan pintu masuk strategis bagi pasar ASEAN. Disampaikan juga bahwa salah satu tujuan daripada dilaksanakannya kunjungan kerja ini adalah melaksanakan studi banding mengenai bagaimana kerja sama ekonomi regional (dalam hal ini Uni Eropa), bisa secara optimal menguntungkan negara anggotanya. Kemudian tantangan apa saja yang dihadapi oleh Hungaria sebagai anggota Uni Eropa, khususnya yang berkaitan dengan isu Brexit.



Penyerahan cinderamata dari Wakil Ketua BKSAP, Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME., kepada Presiden KADIN Hungaria, Mr. Atilla Galambos

Presiden KADIN Hungaria, **Mr. Atilla Galambos** menjelaskan bahwa melalui keanggotaannya di Uni Eropa Hungaria mendapatkan akses pasar yang sangat luas bagi produk-produk Hungaria, terutama dengan dipangkasnya seluruh pajak dan tarif bagi produk Hungaria di seluruh negara anggota Uni Eropa. Ini menyebabkan keuntungan dalam hal perdagangan yang didapatkan oleh Hungaria bisa optimal. Namun demikian hal ini dicapai dengan tetap menghargai kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

Anggota delegasi juga aktif terlibat diskusi dengan KADIN Hungaria, antara lain seputar upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KADIN Hungaria dalam mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah. Menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh **Yth. Sdr. H. Jazuli Juwaini** ini **Ms. Flora Palmay** menyampaikan bahwa KADIN Hungaria seringkali menyelenggarakan event internasional atau regional, yang tujuannya adalah untuk melakukan promosi mengenai potensi bisnis yang ada di Hungaria.

Selain itu juga membentuk komite dagang yang anggotanya merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi. **Yth. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie** juga menambahkan bahwa Ekspor Indonesia ke Hungaria masih perlu ditingkatkan, terutama untuk komoditas tertentu, seperti kelapa dan produk olahannya. Ekspor Indonesia belum bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada di Hungaria. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya ekspor karena letak geografis yang jauh antara Hungaria dan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar bersama yang tidak merugikan dan bisa meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Menutup pertemuan, KADIN Hungaria mendorong delegasi DPR RI untuk menginformasikan kepada pengusaha Indonesia bahwa peluang bisnis dalam melakukan ekspor bahan makanan seperti kopi dan rempah-rempah ke Hungaria cukup menjanjikan mengingat permintaan terhadap bahan-bahan tersebut cukup tinggi. Masyarakat Hungaria menyukai Kopi yang berasal dari Indonesia.

B. Pertemuan Dengan Wakil Ketua Parlemen Hungaria

Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Hungaria, **Hon. Mr. Jakab Istvan** di Gedung Parlemen Hungaria di Budapest, Ketua delegasi yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP, **Yth. Sdr. Juliari P. Batubara** menyampaikan bahwa Indonesia dan Hungaria harus mempererat kerja sama perdagangan agar keduanya tidak menjadi pihak-pihak yang dirugikan oleh perkembangan perekonomian global yang semakin tidak menentu, khususnya di tengah maraknya proteksionisme dan perang dagang antara dua negara besara yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Menanggapi hal tersebut **Hon. Mr. Jakab Istvan** menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra dagang strategis bagi Hungaria sejak dulu.



Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Parlemen Hungaria

Hubungan baik antara kedua negara juga telah beberapa kali ditandai oleh saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, dimana pada bulan Februari tahun 2016, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan diterima oleh Presiden RI Joko Widodo. Disamping itu pada bulan September 2016, Menteri Luar Negeri RI melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Hungaria, Péter Szijjártó, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, New York. Kemudian yang terakhir pada bulan Juli 2018, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan kunjungan ke Hungaria bertemu beberapa pejabat Hungaria dan membahas rencana kunjungan Presiden Hungaria ke Indonesia yang direncanakan pada tahun 2019.



**Penyerahan Cenderamata dari Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Delegasi,
Yth. Sdr. Juliari P. Batubara kepada Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Hon. Jakab Istvan**

Wakil Ketua Parlemen Hungaria, **Hon. Mr. Jakab Istvan** juga menyatakan kegembiraannya atas diaktifkannya kembali Grup Persahabatan Honggaria-Indonesia di Parlemen Hungaria dan berharap bahwa dengan diaktifkannya kembali Grup Persahabatan tersebut, kerja sama antara kedua Parlemen terus ditingkatkan.

Delegasi DPR RI di Gedung Parlemen Hungaria

C. Pertemuan Dengan Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Hungaria dan Ketua Grup Persahabatan ASEAN-Hungaria

Pertemuan dengan Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Hungaria yaitu **Hon. Mr. Lajos Olah** dan Ketua Grup Persahabatan ASEAN-Hungaria, **Hon. Mr. Istvan Simicsko** dilaksanakan dalam sebuah jamuan makan siang di gedung Parlemen Hungaria. Pada pertemuan yang berlangsung dengan santai dan penuh suasana kekeluargaan tersebut, Wakil Ketua BKSAP yang juga merupakan Ketua Delegasi Juliari Batubara menyampaikan bahwa Hungaria adalah mitra dagang yang cukup



penting bagi Indonesia di Eropa. Namun demikian, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir volume perdagangan antara kedua negara tercatat mengalami penurunan. Oleh karena itu penting bagi parlemen kedua negara untuk duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan dalam perdagangan kedua negara.

Menyambut pernyataan yang disampaikan oleh **Yth. Sdr. Juliari P. Batubara** selaku Ketua Delegasi DPR RI, **Hon. Mr. Istvan Simicsko** mengatakan bahwa bagi Hungaria Indonesia merupakan mitra strategis dan penting. Oleh karena itu kedua negara harus aktif berkomunikasi dalam rangka meningkatkan hubungan dagang dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar perdagangan. Untuk meningkatkan perdagangan, Pemerintah Hungaria menyediakan insentif pajak dan fiskal ataupun insentif lainnya bagi perusahaan Indonesia yang ingin melakukan investasi di Hungaria. Terutama jika berkaitan dengan usaha berbasis teknologi.

**Jamuan makan siang oleh Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Hungaria dan
Ketua Grup Persahabatan ASEAN-Hungaria**

Wakil Ketua BKSAP, **Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno** menambahkan bahwa Indonesia saat ini memiliki keunggulan dalam bidang industri makanan olahan seperti mie instan. Produk mie instan Indonesia sudah terdistribusi secara global dan memiliki pabrik di Eropa. Namun permintaan akan gandum di Indonesia saat ini cukup tinggi, sehingga sangat mungkin tercipta peluang ekspor baru bagi Hungaria khususnya gandum.

Ketua Delegasi, **Yth. Sdr. Juliari Batubara** menambahkan bahwa jika Indonesia hendak mengimpor gandum dari Hungaria, maka tidak akan dikenakan bea impor. Namun apakah jika Indonesia mengeksport kopi kemasan ke Hungaria, akan diberlakukan kebijakan serupa oleh pemerintah Hungaria?

Menjawab pertanyaan tersebut, **Hon. Mr. Lajos Olah** mengatakan bahwa kebijakan perdagangan Hungaria tidak bisa sepenuhnya diterapkan sesuai keinginan Hungaria. Ini dikarenakan Hungaria adalah bagian dari Uni Eropa sehingga harus mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Uni Eropa mengenai perdagangan. Oleh karena itu perlu di bicarakan lebih lanjut oleh parlemen Hungaria apakah Hungaria bisa melakukan kebijakan yang resiprokal dengan Indonesia, khususnya mengenai perdagangan.



Jamuan makan siang oleh Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Hungaria dan Ketua Grup Persahabatan ASEAN-Hungaria

Diskusi mengenai pemberlakuan penghapusan tarif impor tersebut mengakhiri pertemuan antara Delegasi DPR RI dengan Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Hungaria yaitu **Hon. Mr. Lajos Olah** dan Ketua Grup Persahabatan ASEAN-Hungaria, **Hon. Mr. Istvan Simicsko**. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama dan tur keliling gedung Parlemen Hungaria.

D. Pertemuan Dengan Deputy State Secretary for Increasing Exports, Hungarian Ministry of Trade and Foreign Affairs

Selama kunjungan ke Budapest Delegasi juga berkesempatan untuk bertemu dengan **Mr. Istvan Joo** selaku Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria dalam urusan peningkatan ekspor. Dalam pertemuan tersebut **Mr. Istvan Joo** juga didampingi oleh beberapa perwakilan dari Bank Pemerintah Hungaria. Diskusi yang berlangsung antara Delegasi DPR RI dengan Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria terpusat seputar mekanisme insentif yang

disediakan oleh pemerintah Hungaria jika ada perusahaan dari Indonesia yang berkeinginan untuk melakukan bisnis di Hungaria. Disamping itu diskusi juga berkembang membahas keanggotaan Hungaria di Uni Eropa dan ketentuan-ketentuan perdagangan Uni Eropa yang harus diikuti oleh Hungaria sebagai negara anggota Uni Eropa.



Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria

Terkait Uni Eropa, Ketua Delegasi, **Yth. Sdr. Juliari Batubara** menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana Hungaria sebagai sebuah negara berdaulat bisa mendapatkan keuntungan yang optimal dari keanggotaannya di Uni Eropa. Dalam hal ini dengan adanya kenyataan bahwa ternyata Hungaria tidak bisa serta merta menentukan kebijakannya sendiri dan harus mengikuti ketentuan Uni Eropa.

Bukankah hal ini cukup menyusahkan Hungaria? Hal ini menjadi penting untuk ditanyakan, mengingat Indonesia dalam konteks ASEAN juga perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi *ASEAN Economic Community*.

Menanggapi pertanyaan tersebut Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, **Mr. Istvan Joo** menjawab bahwa lebih banyak keuntungan yang mereka peroleh jika tetap bersama Uni Eropa. Misalnya peluang dalam hal pendidikan yang terbuka luas bagi masyarakat Hungaria jika ingin bersekolah dimanapun di Eropa, atau peluang ekonomi bagi masyarakat Hungaria yang ingin bekerja dimanapun di Eropa. Keanggotaan dalam Uni Eropa memberikan lebih banyak kesempatan bagi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sehingga disparitas antara negara-negara anggotanya tidak terpaut jauh. Ini merupakan salah satu keunggulan dari dilaksanakannya integrasi ekonomi regional.



Penyerahan Cenderamata dari Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Delegasi, Yth. Sdr. Juliari P. Batubara kepada Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria, Mr. Istvan Joo

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dijelaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria bahwa Pemerintah Hungaria memberikan insentif tidak hanya bagi kegiatan ekspor ke Hungaria, namun juga memberikan insentif bagi Usaha Kecil Menengah seperti insentif fiskal ataupun melalui pemberlakuan pajak korporasi yang rendah. Di Hungaria, pajak korporasi hanya sebesar 4%. Ini merupakan jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan pajak korporasi yang berlaku di Indonesia. Dengan rendahnya pajak, pemerintah Hungaria berharap dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Hungaria dan kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Delegasi DPR RI telah menjalankan tugas sesuai dengan misi dari kunjungan dan telah mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat mengenai kebijakan ekonomi Hungaria yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi di tingkat supranasional Uni Eropa. Sebagai contoh; pemberlakuan penghapusan tarif impor atas produk dari Hungaria di Indonesia tidak bisa berlaku resiprokal karena Hungaria harus mengikuti ketentuan perdagangan Uni Eropa.
2. Bagi Hungaria, integrasi ekonomi regional seperti Uni Eropa membawa lebih banyak manfaat khususnya dalam hal pemerataan kesempatan ekonomi dan kesejahteraan diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini berdampak



positif kepada peningkatan daya saing nasional Hungaria yang bisa disejajarkan dengan negara-negara lain di Eropa.

3. Hungaria sangat mendukung peningkatan hubungan perdagangan dengan Indonesia dan mendorong agar pengusaha-pengusaha Indonesia tertarik untuk berinvestasi ke Hungaria. Ini juga diperkuat dengan insentif fiskal dan pajak yang disediakan oleh Pemerintah Hungaria, Terutama bagi investasi berbasis teknologi.
4. Hungaria saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan investasi khususnya di bidang usaha berbasis teknologi. Hal ini karena Hungaria juga melihat peluang yang baik melalui pengembangan ekonomi digital.

B. Saran

1. Indonesia dan Hungaria memiliki kesamaan pandangan terkait perlunya peningkatan volume perdagangan antara kedua negara. Untuk mendukung hal ini Pemerintah Hungaria menyediakan sejumlah insentif fiskal dan pajak untuk pelaku usaha bahan makanan seperti kopi dan pelaku usaha berbasis teknologi. Mempertimbangkan posisi Hungaria di Eropa Tengah yang strategis, maka hal ini layak untuk dikaji lebih lanjut oleh Komisi VI yang membidangi perdagangan internasional.
2. Indonesia dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peluang kerja sama berbasis teknologi dengan Hungaria yang juga memiliki ketertarikan untuk mengembangkan ekonomi digital seperti Indonesia. Hal ini sejalan dengan semakin mengemukanya *trend* penerimaan devisa negara dari sektor industri kreatif dan *e-commerce*.

Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang didominasi oleh teknologi automasi dan pertukaran data melalui program *Making Indonesia 4.0* yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo. Selain itu, peningkatan kemampuan dalam bidang IT dapat membantu Indonesia untuk mengkapitalisasi potensi kreatif generasi muda seiring dengan bonus demografi di tahun 2030.

3. Menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Community* dapat tercipta pemerataan kesempatan ekonomi dan kesejahteraan yang sama sebagaimana dengan yang terjadi di Uni Eropa, mengingat bahwa saat ini disparitas antara negara-negara di ASEAN cukup mencolok dalam hal ekonomi dan teknologi.



VII. PENUTUP

A. Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 9 (sembilan) Anggota, 3 (tiga) Sekretaris Delegasi, 1 (satu) Tenaga Ahli BKSAP dan 1 (satu) Wartawan adalah Rp 1.458.362.750 (Satu Milyar Empat ratus Lima puluh Delapan juta Tiga ratus Enam puluh Dua Tujuh ratus Lima puluh Rupiah)

B. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka kunjungan kerja Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) guna menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* pada tanggal 11-17 Maret 2019 ke Budapest. Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi oleh pemberitaan media.

Jakarta, Maret 2019

Ketua Delegasi,

Juliari P. Batubara

A-168



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

LAPORAN DELEGASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA
BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN (BKSAP)
GUNA MENINDAKLANJUTI RESOLUSI-RESOLUSI
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) DAN
ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF)

ROMA – ITALIA, 11 – 17 MEI 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu prioritas kebijakan utama Presiden Indonesia dan Wakil Presiden selama masa jabatan mereka 2014-2019. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk merangsang investasi asing. Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi relatif kuat. Pertumbuhan pada kuartal kedua tahun 2018 stabil di sekitar lebih dari 5% year-on-year sementara tingkat inflasi berada di bawah kendali dan dalam kisaran target Bank Indonesia 3-5%.

Selain itu, Indonesia mencatat prestasi ekonomi makro lainnya, yaitu penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta tingkat kesenjangan yang dibuktikan dengan rasio Gini yang saat ini berada di 0,389. Ini tentu saja merupakan hasil yang menguntungkan bagi pertumbuhan investasi domestik dan untuk peluang kerja sama ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia per Oktober 2018 mencapai nilai US \$ 15,80 miliar, naik 5,87 persen dibandingkan dengan ekspor pada September 2018. Ada peningkatan 3,59 persen tahun-ke-tahun dibandingkan dengan September 2017.

Catatan Anggaran yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2016 menyebutkan bahwa stabilitas dan ketahanan ekonomi serta peningkatan daya saing ekonomi akan tetap menjadi fokus utama



bagi pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, upaya menuju tujuan ini akan mencakup, antara lain, meningkatkan ekspor dan investasi melalui instrumen fiskal dan insentif serta memastikan pelaksanaan reformasi perizinan yang efektif.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah komite tetap DPR yang diberi mandat untuk melakukan diplomasi parlemen. Dalam menjalankan mandat ini, BKSAP dapat mengambil bagian dalam diplomasi ekonomi, karena ini adalah bidang prioritas diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kegiatan diplomasi parlemen juga dapat berfungsi untuk melengkapi tugas pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kerja sama ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah, guna memastikan bahwa semua bentuk kerja sama berada di jalur mewujudkan visi kemandirian ekonomi dan bahwa mereka akan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, BKSAP telah membentuk Panitia Kerja untuk Kerjasama Ekonomi Regional (KER).

Regionalisme Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan

Berdasarkan perspektif politik global, globalisasi dan liberalisasi ekonomi saling terkait. Globalisasi diharapkan dapat membentuk komunitas transnasional di mana batas-batas wilayah nasional tidak lagi dipandang sebagai hambatan untuk interaksi manusia, terutama dalam ekonomi dan perdagangan.

Di satu sisi, globalisasi memang membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengakses pasar, teknologi, dan informasi ekonomi maju. Di sisi lain, globalisasi mempertinggi persaingan pasar, dan para pesaing dalam perdagangan yang diliberalisasi dan terglobalisasi terdiri dari teman dan musuh. Oleh karena itu, keberadaan dan peran negara tetap dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Teori tentang liberalisasi perdagangan menyebutkan bahwa perdagangan bebas dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara dengan, membuat harga barang dan jasa lebih terjangkau, meningkatkan daya saing, dan menggerakkan kekuatan inovatif negara tersebut. Sejak 2015, negara-negara Asia Tenggara telah bergabung bersama di bawah komunitas ekonomi ASEAN (AEC) dan Cetak Biru AEC 2025 menuju integrasi regional telah diresmikan. Blok perdagangan bebas di wilayah ini dapat berdampak baik pada aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Ken Itakura dari Nagoya City University dan ERIA telah melakukan simulasi ekonomi dan menyimpulkan bahwa FTA di antara negara-negara ASEAN akan berkontribusi terhadap 30% dari output dan perdagangan global, khususnya FTA antara 6 negara pendiri ASEAN termasuk Indonesia.

Penghapusan hambatan perdagangan di satu sisi memang berdampak positif bagi perekonomian suatu negara. Namun, hal itu juga akan menciptakan persaingan tidak hanya dalam hal produk tetapi juga tenaga kerja profesional antara negara-negara ASEAN. Semua jenis perusahaan, termasuk yang kecil dan menengah, dan

profesional harus memperkuat daya saing mereka agar dapat bersaing di tingkat regional. Indonesia perlu memetakan potensi daya saingnya dalam menghadapi regionalisme ASEAN untuk mengoptimalkan strategi dan kinerja FTA di mana Indonesia adalah salah satu pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan "Nawa Cita", aspirasi nasional yang memandu kebijakan pemerintah Indonesia saat ini.

Saat ini regionalisme ekonomi dan liberalisasi juga menghadapi tantangan yang timbul dari kebijakan sepihak yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu memaksakan hambatan perdagangan terutama melalui mekanisme tarif impor. Jika ini terus berlanjut, kebijakan AS dapat meningkat menjadi perang dagang global. Negara-negara Asia Tenggara akan diharapkan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang melambat dan gangguan terhadap bisnis dan konsumen, yang diakibatkan oleh rantai produksi global yang terganggu dan kenaikan harga impor.

Selain itu, komitmen dari negara-negara di dunia juga perlu diperbarui untuk secara proaktif mempertahankan kebijakan perdagangan bebas global melalui forum-forum seperti G20 dan WTO (World Trade Organization), guna meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan global, untuk mengurangi ketegangan perdagangan, dan untuk mencegah kebijakan perdagangan yang merusak.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka kunjungan kerja Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) guna menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) pada tanggal 11 – 17 Maret 2019 ke Hungaria didasarkan atas Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 9/ PIMP/ V/ 2018-2019 tertanggal 9 Mei 2019.

II. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR-RI dalam rangka kunjungan kerja BKSAP guna menindaklanjuti Resolusi-resolusi AIPA dan APFF adalah sebagai berikut:



Yth. Sdr. Juliari P. Batubara
Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Delegasi
F-PDIP



Yth. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf
Ketua BKSAP
F-PD



Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME
Wakil Ketua BKSAP
F-PG



Yth. Sdri. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS
Anggota BKSAP
F-PDIP



Yth. Sdri. Mercy Christy Barends
Anggota BKSAP
F-PDIP



Yth. Sdr. H. Muhidin M. Said., SE., MBA
Anggota BKSAP
F-PG



Yth. Dr. Jerry Sambuaga
Anggota BKSAP
F-PG



Yth. Ir. Dwita Ria Gunadi
Anggota BKSAP
F-P.Gerindra



Yth. Sdri. Susi Marleny Bachsin
Anggota BKSAP
F-P. Gerindra



Yth. Sdr. Roy Suryo Notodiprojo
Anggota BKSAP
F-PD



Yth. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA
Anggota BKSAP
F-PKB



Yth. Sdr. Rofi' Munawar, Lc
Anggota BKSAP
F-PKS



III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja BKSAP adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi negara-negara di kawasan Eropa terkait integrasi regional serta strategi yang diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.
2. Memperoleh gambaran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam konteks integrasi regional melalui perspektif negara mitra wicara ASEAN.
3. Meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antar-parlemen dengan negara-negara yang tergabung dalam kerangka kerjasama ekonomi regional Uni Eropa dalam hal ini Hongaria.
4. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama regional.

IV. SEKILAS MENGENAI ITALIA

Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa. Terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino dan Vatikan. Italia mencakup area seluas 301.338 km² (116.347 mi²), dan dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim mediterania. Dilihat dari bentuknya, peta Italia berbentuk seperti sepatu bot atau di Italia sering disebut *lo Stivale*. Dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa, Italia merupakan negara anggota UE keempat yang paling banyak penduduknya.

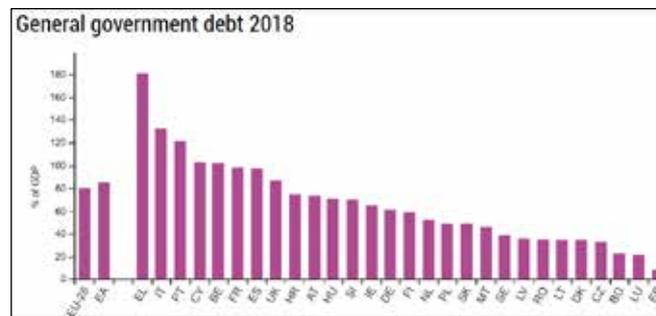
Saat ini, Italia memiliki ekonomi terbesar ketiga di Zona Euro dan kedelapan terbesar di dunia. Memiliki tingkat perkembangan manusia yang sangat tinggi dan berada di peringkat keenam dunia untuk harapan hidup. Negara ini berperan penting dalam urusan ekonomi, militer, budaya dan diplomatik regional maupun global, dan merupakan kekuatan regional dan kekuatan besar. Italia adalah pendiri dan anggota terkemuka Uni Eropa dan anggota berbagai lembaga internasional seperti PBB, NATO, OECD, OSCE, WTO, G7/G8, G20, Uni untuk Mediterania, Majelis Eropa, Uniting for Consensus, dan banyak lagi. Sebagai cerminan akan kekayaan budayanya, Italia adalah rumah bagi 51 Situs Warisan Dunia, merupakan yang paling banyak, dan merupakan negara yang paling banyak dikunjungi kelima di dunia.

Situasi Ekonomi

Bloomberg menyebut pada akhir 2018, Italia mengalami resesi. Data dari *Istituto Nazionale di Statistica* (Istat) Italia, menguraikan bahwa output ekonomi menyusut hingga 0.2 persen pada tiga bulan terakhir 2018, menyusul penurunan hingga 0.3 persen pada kuartel ketiga tahun serupa.¹

¹ <https://www.istat.it/en/economic-trends>

Salah satu isu ekonomi utama di Italia adalah utang negara. Utang tersebut berkontribusi pada penurunan ekonomi yang terjadi saat ini. Data dari Eurostat per 23 April 2019 menunjukkan bahwa Italia adalah pemegang rekor kedua tertinggi dalam proporsi utang (*debt to GDP ratio*) setelah Yunani. Rasio utang 2018 dari Italia mencapai 132.2% dari GDP sementara Yunani 181.1% dari GDP. Jauh di atas rata-rata utang 28 negara Uni Eropa yang mencapai 80.0% dari GDP.



Sumber: Eurostat (per 23.04.2019)²

Dokumen Kerja Komisi Eropa yang disusun Februari 2019 terkait *Country Report Italia* memproyeksikan rasio utang ke GDP dari Italia akan meningkat hingga di atas 132% pada 2019. Ini dengan mempertimbangkan risiko penurunan atas proyeksi makroekonomi dan defisit yang dilakukan pemerintah. Padahal pemerintah merencanakan penurunan rasio utang menjadi 130.7% pada 2019 dengan asumsi proses privatisasi mencapai 1% dari GDP. Namun, menurut Komisi Eropa asumsi tersebut tidak realistis, mengingat hampir tidak ada proses privatisasi yang tercatat pada 2016-2018 (meskipun ditargetkan 0.5% dari GDP tiap tahun).³

Situasi Politik

Pada 26 Mei, Italia akan menggelar pemilihan Parlemen Uni Eropa (UE). Partai-partai yang ada di Italia akan memperebutkan jatah 73 kursi (76 bila Inggris tidak ikut) untuk Italia di Parlemen UE. Jumlah pemilih pada tahun 2019 mencapai 46,5 juta jiwa.⁴

Pada April 2019, Partai Liga Italia (League), mencanangkan aliansi kanan jauh dengan sejumlah partai Eropa lainnya untuk pemilihan Parlemen Uni Eropa Mei ini. Aliansi yang disebut Aliansi Rakyat dan Bangsa Eropa (*European Alliance of Peoples and Nations*) tersebut terdiri dari Partai Liga Italia, Partai Alternatif untuk Jerman

² https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics

³ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_en.pdf

Hal 13-14.

⁴ <https://www.politico.eu/2019-european-elections/italy/>



(*Alternative für Deutschland*), Partai Finns dan juga Partai Rakyat Denmark (*Danish People's Party*).⁵

Berdasar data dari POLITICO, sebuah organisasi berita politik dan kebijakan global, salah satu publikasi berpengaruh dalam isu-isu eropa, memprediksi Partai Liga Italia memenangi suara Parlemen Eropa di Italia pada akhir Mei ini.

Berikut berturut-turut prediksi yang disusun oleh POLITICO, per 6 Mei: Partai Liga/*Lega* dengan haluan kanan jauh (26 kursi), Partai Pergerakan Lima Bintang/*Movimento 5 Stelle* dengan haluan populisme/anti kemapanan (18 kursi), Partai Demokrat/*Partito Democratico* dengan haluan sosialis demokrasi (17 kursi), Partai Kekuatan Italia/*Forza Italia* dengan haluan kanan tengah (8 kursi), dan Partai Persaudaraan Italia/*Fratelli d' Italia* dengan haluan konservatif (4 kursi).⁶ Sementara itu, berdasarkan hasil Pemilu 2018, DPR Italia yang terdiri dari maksimal 630 kursi dan Senat Italia yang terdiri dari maksimal 320 kursi diisi oleh partai partai sebagai berikut:

Kamar Parlemen	Fraksi	Jumlah Kursi
Chamber of Deputies (DPR)	<i>5 Star Movement</i>	219
	<i>Lega – Salvini Premier</i>	123
	<i>Democratic Party</i>	112
	<i>Forza Italia</i>	105
	<i>Brothers of Italy</i>	32
	<i>Gabungan (mixed)</i>	23
	<i>Free and Equal</i>	14
Senate of Italy	<i>5 Star Movement</i>	112
	<i>Lega – Salvini Premier</i>	58
	<i>Forza Italia</i>	58
	<i>Democratic Party</i>	53
	<i>Brothers of Italy</i>	16
	<i>Us with Italy</i>	5
	<i>Free and Equal</i>	4
	<i>SVP – PATT (regional)</i>	3
	<i>More Europe+</i>	1
	<i>Popular Civic List</i>	1
	<i>Together</i>	1
	<i>Aosta Valley</i>	1
	<i>Associative Movement Italy Abroad</i>	1
<i>South American Union Italian Emigrants</i>	1	

⁵ <https://www.eurotopics.net/en/218023/can-salvini-unite-europe-s-right>

⁶ <https://www.politico.eu/2019-european-elections/european-elections-data-visualized/>



Menjelang Pemilu Parlemen Eropa, sikap dua partai besar yang tergabung dalam koalisi pemerintah seolah-olah terbelah. Pembahasan rencana ekonomi Italia pada April 2019 dikabarkan terbelah oleh perbedaan sikap khususnya *5 Star Movement* dan *Legia*. Hal ini terjadi karena dua partai tersebut bersaing untuk suara dalam Pemilu Parlemen Eropa. Luigi Di Maio, pemimpin *5 Star Movement* yang menjadi Wakil Perdana Menteri dan juga Menteri untuk Pembangunan Ekonomi kerap berbeda pandangan dengan Matteo Salvini, pemimpin *Legia*, yang juga Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Pemerintahan Italia kali ini.⁷

Kerja Sama Indonesia-Italia

Indonesia dan Italia merayakan 70 tahun hubungan kedua negara pada tahun 2019. Dalam sejumlah kesempatan Duta Besar Italia untuk Indonesia, Vittorio Sandalli mengungkapkan potensi kerja sama ke depan bagi kedua negara yakni di sektor lingkungan dan kesehatan. Italia merupakan pemimpin pengembangan energi panas bumi dengan pengalaman 150 tahun karena memiliki lima gunung berapi. Sementara industri farmasi Italia tergolong paling maju karena mengekspor 80% obat-obatan ke luar negeri.

Januari 2019, Pertamina dan ENI menandatangani perjanjian kerja sama untuk penyulingan minyak nabati di Indonesia sekaligus *term sheet* untuk pemrosesan CPO. Perjanjian berikutnya adalah dalam bidang *circular economy*, produk rendah karbon dan energi terbarukan.

Pada Oktober 2018 dalam Trade Expo Indonesia Delegasi Bisnis Italia membukukan transaksi bisnis senilai USD 41.6 juta diperoleh dari tiga perusahaan Italia yang bergerak di usaha kertas dan furnitur yakni Nadila Srl dengan mitranya PT Kunindo Pratama Jaya, Asia Palmi Snc dengan Sentana Art Wood, dan APP Italia dengan Indah Kiat Pulp and Paper.⁸

Nilai perdagangan Indonesia dengan Italia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2016. Saat ini total perdagangan mencapai USD 3.7 miliar dengan surplus bagi Indonesia senilai USD 80.7 juta. Sejumlah komoditas utama ekspor Indonesia ke Italia di antaranya batubara, minyak kelapa sawit, kopi, garmen, sepatu kulit dan sebagainya. Berikut ditampilkan neraca perdagangan kedua negara berdasarkan data yang diunduh dari Kementerian Perdagangan.

⁷ <https://www.reuters.com/article/us-italy-politics/italian-cabinet-infighting-overshadows-growth-plan-idUSKCN1S00JH>

⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/762718/datang-ke-indonesia-pengusaha-italia-teken-kontrak-dagang-40-juta-dolar>



**NERACA PERDAGANGAN
 INDONESIA dengan ITALIA**
 Periode: 2014 - 2019

(Nilai: Ribu US\$)

Unsur	2014	2015	2016	2017	2018	Trend(%) 14-18	Jan-Feb	
							2018	2019
TOTAL PERDAGANGAN	4.009.787,1	3.241.146,2	2.959.322,2	3.502.901,7	3.761.452,3	-0,50	545.093,1	570.210,7
MIGAS	973,8	482,4	331,7	2.433,4	689,3	9,72	82,4	85,0
NON MIGAS	4.008.703,4	3.240.663,8	2.958.990,4	3.500.468,3	3.760.763,0	-0,50	545.000,8	570.125,7
EKSPOR	2.286.899,0	1.872.932,6	1.572.117,7	1.932.612,4	1.921.126,8	-3,12	298.207,0	278.020,1
MIGAS	342,8	0,1	49,0	27,4	42,4	13,29	19,7	0,0
NON MIGAS	2.286.556,2	1.872.932,5	1.572.068,7	1.932.585,0	1.921.084,5	-3,12	298.187,3	278.020,1
IMPOR	1.722.808,1	1.368.213,6	1.387.204,5	1.670.289,3	1.840.325,5	2,72	246.776,1	292.190,6
MIGAS	630,9	482,3	282,3	2.406,1	646,9	18,03	62,6	85,0
NON MIGAS	1.722.277,2	1.367.731,3	1.386.921,7	1.667.882,2	1.839.678,5	2,72	245.713,5	292.105,7
NERACA PERDAGANGAN	863.959,8	804.638,7	194.910,2	862.325,1	800.14,4	-34,41	92.530,0	-20.170,5
MIGAS	-288,1	-482,1	-233,3	-2.078,7	-604,6	36,05	-42,9	-85,0
NON MIGAS	864.239,0	805.180,8	195.147,3	864.703,8	81.409,9	-34,28	92.573,8	-20.085,5

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

V. HASIL KUNJUNGAN

Selama kunjungan kerja ke Roma, Delegasi DPR RI mengadakan sejumlah pertemuan, yaitu:

A. Pertemuan dengan Parlemen Italia (*Camera dei Deputati/Chamber of Deputies*)

Delegasi DPR RRI melakukan pertemuan dengan DPR Italia di Gedung Parlemen Italia, (Palazzo Montecitorio) Roma, Selasa (14/5) pukul 15.00 waktu setempat. Delegasi DPR RI terdiri dari Ketua Delegasi, **Yth. Sdr. Juliari P. Batubara** (Wakil Ketua BKSAP/FPDIP) dan **Yth. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf** (Ketua BKSAP/FPD) dan **Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME** (Wakil Ketua BKSAP/FPG) bertemu dengan Presiden Komite Luar Negeri dan Eropa Parlemen Italia, **Hon. Mrs. Marta Grande** dan juga Presiden Kelompok Persahabatan Parlemen Italia – Indonesia, **Hon. Mrs. Danielle del Grosso**. Duta Besar RI untuk Italia, **Yth. Ibu Esti Andayani**, turut mendampingi pertemuan tersebut.



Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Parlemen Italia

Pertemuan parlemen kedua negara tersebut merupakan bagian dari momentum peringatan 70 (tujuh puluh) tahun hubungan Indonesia dan Italia yang jatuh pada tahun 2019. Secara spesifik, kunjungan BKSAP ke Roma terselenggara juga untuk memperkokoh kerja sama antarpallemen kedua negara dan juga menggali ragam pandangan terkait upaya memperkuat daya saing masing-masing negara dalam lingkup integrasi ekonomi kawasan.

Ketua Delegasi, **Yth. Sdr. Juliari P. Batubara**, menyampaikan keinginan untuk mempererat kerja sama dengan Parlemen Italia sekaligus mendengar lebih jauh pengalaman Italia dalam beragam keunggulan komparatif seperti dalam sector pariwisata, lingkungan hingga Pendidikan.

Keinginan untuk mempererat hubungan antarpallemen disambut baik oleh Presiden Komite Luar Negeri dan Eropa Parlemen Italia, **Hon. Mrs. Martha Grande**. Parlemen kedua negara kerap berinteraksi dalam berbagai forum antarpallemen termasuk IPU. Namun, dengan beragam kesibukan dalam forum-forum tersebut, interaksi bilateral kerap tertinggal. Maka, ia menyambut adanya hubungan yang lebih mendalam antarpallemen kedua negara. Bahkan ia menginformasikan adanya rencana Parlemen Italia untuk membentuk Grup persahabatan Italia Indonesia yang dipimpin oleh **Hon. Mrs. Danielle del Grosso**.

Menurut **Hon. Mrs. Danielle**, Kelompok Persahabatan Italia-Indonesia siap dibentuk untuk periode DPR Italia hasil Pemilu 2018. Ia mengaku telah mendapatkan minat bergabung dari sekitar 10-15 anggota parlemen Italia. Anggota Kelompok Persahabatan tersebut akan terdiri dari seluruh kelompok faksi, baik dari penguasa maupun oposisi.



Wakil Ketua BKSAP/ Ketua Delegasi DPR RI, Sdr. Juliari P. Batubara menyerahkan cinderamata kepada Ketua Komite Luar Negeri *Italian Chamber of Deputies*, Mrs. Marta Grande

Dalam pertemuan tersebut, kedua parlemen juga berbagi pandangan terkait isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan perubahan iklim. **Yth. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf** menyampaikan bahwa berbagai aktivitas parlemen untuk mendukung SDGs telah dilakukan termasuk dalam fora internasional. Selain di IPU, Indonesia juga menjadi penggagas *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPSD), sebuah forum global antarparlemen yang membahas isu pembangunan berkelanjutan secara mendalam. Forum tersebut sukses terselenggara selama dua tahun.

BKSAP secara lisan menyampaikan undangan kepada Italia untuk berpartisipasi aktif dan hadir dalam WPSD tahun 2019 nanti sekaligus menjadi anggota Komite Eksekutif dari Forum tersebut. Undangan tersebut direspon positif oleh *Hon. Mrs. Martha Grande* dengan menyatakan siap untuk mengunjungi balik Indonesia baik dalam rangka WPSD maupun melalui Grup Persahabatan.

Pada kesempatan tersebut, **Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME** juga menyampaikan mengenai tantangan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa khususnya dalam isu *Crude Palm Oil* (CPO). Italia adalah pasar ketiga terbesar untuk impor CPO dari Indonesia. Italia adalah konsumen CPO terbesar ketiga di Indonesia, setelah Belanda dan Spanyol, setidaknya hingga 2017-2018. Hingga April 2018, Italia membukukan impor CPO dari Indonesia sebesar US\$ 215,4 juta.

Nilai perdagangan Indonesia dengan Italia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2016. Pada 2018, total perdagangan mencapai US\$ 3,7 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar US\$ 80,7 juta. Sejumlah komoditas utama ekspor Indonesia ke Italia di antaranya batubara, minyak kelapa sawit, kopi, garmen, sepatu kulit, dan sebagainya.

Selama ini kontribusi kelapa sawit terhadap perdagangan Indonesia Italia cukup positif. Namun, kelapa sawit Indonesia mendapatkan tantangan berupa kampanye negatif dan kebijakan diskriminatif dari aturan pelaksana dari perintah energi terbarukan Uni Eropa (RED II). Sementara perkembangan kelapa sawit di Indonesia semakin menunjukkan progres positif dalam hal-hal *sustainability* seperti ISPO hingga luasan lahan yg ditanami kembali.



Delegasi DPR RI dan Duta Besar RI
untuk Italia di depan Gedung Parlemen
Italia

B. Pertemuan dengan *Italian Trade Agency* (ITA)

Pada Selasa (14/5), pukul 14.30 waktu setempat. Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan dengan *Italian Trade Agency* (ITA). Delegasi DPR RI yang hadir pada kesempatan tersebut terdiri dari: **Yth. Sdri. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS** (F-PDIP), **Yth. Sdri. Mercy Christy Barends** (F-PDIP), **Yth. Sdr. H. Muhidin M. Said., SE., MBA** (F-PG), **Yth. Dr. Jerry Sambuaga** (F-PG), **Yth. Ir. Dwita Ria Gunadi** (F-P.Gerindra), **Yth. Sdri. Susi Marleny Bachsin** (F-P. Gerindra), **Yth. Sdr. Roy Suryo Notodiprojo** (F-PD), **Yth. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA** (F-PKB), dan **Yth. Sdr. Rofi' Munawar, Lc** (F-PKS).

Mewakili ITA pada pertemuan itu adalah *Managing Director*, **Mr. Roberto Luongo**, Direktur Departemen Marketing Antonino Laspina, Direktur Koordinator Promosi Made in Italia, **Mrs. Ines Aronadia** dan **Mr. Giuseppe Federico** dari Kantor Promosi dan Investasi.



Delegasi DPR RI berdiskusi dengan *Italian Trade Agency* (ITA)

Pada pertemuan tersebut, Delegasi DPR RI, **Yth. Sdri. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS.**, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan eksplorasi lebih jauh potensi kerja sama kedua negara seiring peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Italia. Masih banyak peluang kerja sama yang potensial untuk dikembangkan guna memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara. Kunjungan ke ITA juga untuk mendengar secara langsung mengenai minat, tantangan dan peluang dari pelaku usaha Italia untuk berusaha di Indonesia, dan sebaliknya. Delegasi DPR RI juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai langkah Italia dalam meningkatkan kemudahan berbisnis (*ease of doing business*). Pasalnya, pada 2018, Italia berada di urutan 51 daftar negara dengan kemudahan berbisnis dari 190 negara berdasarkan ranking *World Bank*.

Mr. Roberto Luongo menyambut baik pertemuan ini mengingat banyak peluang kerja sama ekonomi yang potensial untuk ditingkatkan lagi antara kedua negara. Potensi untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara sangat besar. Italia memiliki keunggulan di bidang teknologi dan kami menawarkan kolaborasi kepada Indonesia untuk memperkuat teknologi, seperti *high and medium technology* dalam pemrosesan bahan material mentah yang dimiliki Indonesia.



Delegasi DPR RI di depan Gedung *Italian Trade Agency* (ITA)

ITA, sebagai badan yang berfungsi sebagai kantor promosi perdagangan dan investasi Italia menawarkan sektor tersebut sebagai peluang kerja sama lebih jauh dengan Indonesia. Sektor lain yang potensial untuk ditingkatkan kerja samanya adalah industri kimia dan produk kimia, dan *consumer goods*, dan produk kulit dan aksesoris.

ITA merupakan kantor promosi dagang dan investasi Italia dengan tujuan menyediakan informasi, bantuan, konsultasi, promosi dan pelatihan kepada bisnis kecil dan menengah dari Italia. ITA mempromosikan kehandalan produk *made of Italy* di dunia melalui berbagai upaya. ITA mendapatkan budget promosi dari pemerintah sebesar 183,5 juta Euro pada 2019. Bermarkas di Roma, ITA memiliki 64 kantor di luar negeri yang tersebar di 77 negara.

Berdasarkan data ITA, sekitar 35 persen investasi perusahaan Italia di Indonesia ditanamkan di sektor manufaktur, 35 persen sektor pertambangan, 13 persen sektor transportasi dan logistik, sisanya 17 persen ke sektor-sektor lainnya. Beberapa perusahaan besar Italia yang berinvestasi di Indonesia di antaranya Intesa San Paolo, Telecom, Techint, Eni, Pirelli, dan Enel. Sementara dalam konteks investasi Italia di Indonesia, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada 2018 nilai investasi beragam perusahaan Italia ada di Indonesia mencapai US\$32,09 juta (per 2018) dengan 187 proyek.



C. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Italia

Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, **Yth. Ibu Esti Andayani** di Wisma Duta Besar Republik Indonesia, Via Piemonte, 129, Roma, Selasa (14/5) pukul 20.00 waktu setempat. Pada pertemuan tersebut, Dubes selain memperkenalkan jajaran pejabat dan staf KBRI Roma, juga menginformasikan daftar negara yang terakreditasi ke KBRI Italia yakni Italia, Malta, Siprus dan San Marino. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga menjadi jangkauan kerja KBRI Italia yakni *Food and Agricultural Organization (FAO)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *World Food Programme (WFP)*, *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)*.

Ketua BKSAP, Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf menyerahkan cinderamata kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Ibu Esti Andayani

Dubes juga menginformasikan bahwa pada tahun 2019 ini, hubungan kedua negara telah mencapai 70 tahun. Memperluas hubungan dengan Indonesia menjadi salah satu prioritas Italia mengingat negara tersebut saat ini memiliki kebijakan yang lebih menengok ke Timur, termasuk ASEAN. Dubes mengungkapkan sejauh ini telah banyak kajian dan seminar terkait hubungan Italia dan ASEAN.

Kunjungan BKSAP dilakukan pada momentum yang tepat mengingat selain hubungan bilateral yang mencapai 70 tahun, Parlemen Italia juga baru terbentuk sehingga layak dikunjungi untuk penguatan hubungan antarpemerintah. Dari pertemuan dengan parlemen yang dilakukan dengan BKSAP, terlihat pula bahwa DPR Italia juga tertarik berkunjung ke Indonesia. Pada kesempatan itu, Dubes juga mengungkapkan bahwa fokus isu perayaan 70 tahun Indonesia-Italia adalah ekonomi kreatif dan UMKM. Pertemuan tersebut ditutup dengan berbuka puasa bersama antara Delegasi DPR RI dengan KBRI Italia.

D. Kunjungan ke Cinecitta

Delegasi DPR RI berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Cinecitta Studio, studio film Italia, yang juga dikenal sebagai salah satu studio terbesar di Eropa dan kerap disebut dengan Hollywood Eropa, Rabu (15/5). Cinecitta terletak di Via Tuscolana, sekitar 20 menit dari pusat Kota Roma. Sales and Business Development Luce Cinecitta, Francesca Rotondo dan tim mendampingi Delegasi DPR RI dalam kunjungan lapangan tersebut.

Saat ini, Cinecitta Studios menjadi salah satu *leading players* di industri film Eropa yang mencakup produksi film, dokumenter, serial TV, produk komersial dan video musik.



Delegasi DPR RI mengunjungi salah satu studio di Cinecitta

Fasilitas studio film di Cinecitta mencakup 5.000 professional dan menjadi pusat produksi lebih dari 3.000 film termasuk film terkenal *Ben-Hur* dan *Cleopatra*. Luas Cinecitta mencapai 100 acre atau sekitar 40,4 hektar dengan 19 *sound stages* permanen untuk proyek audiovisual, 300 *dressing room*, 21 studio *make up* dan 14 studio untuk pascaproduksi. Di dalam studio, pengunjung dapat menemukan jejak menarik berupa foto, dokumentasi film, hingga kostum yang dipakai bintang film yang *booming* pada 1940-1950-an. Mulai dari Audrey Hapburn hingga Elizabeth Taylor. Pengunjung yang datang ke Cinecitta juga dapat menyaksikan set panggung Ancient Rome yang monumental, dan Temple of Jerusalem yang dirancang untuk film *The Young Messiah* (2016). Cinecitta menjadi pusat kreatif dan menggerakkan keseluruhan proses produksi proyek audiovisual. Mulai dari pra hingga post produksi, *special effect* hingga distribusi dan promosi.



Delegasi DPR RI mengunjungi salah satu studio di Cinecittà

Industri perfilman Italia khususnya Cinecittà Studios menjadi industri strategis yang dikunjungi Delegasi DPR RI untuk mendapatkan gambaran dan menggali lebih jauh mengenai pengembangan sektor kreatif di negeri ini. Sektor kreatif bersama dengan UKM menjadi tema dari peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dengan Italia pada 2019 ini.

E. Pertemuan dengan Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia

Pertemuan dengan Kementerian Pembangunan Ekonomi berlangsung pada Kamis (16/5), pukul 10.00 waktu setempat. Wakil Ketua BKSAP, **Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME.**, memimpin pertemuan tersebut dengan didampingi Anggota Delegasi, **Yth. Sdr. Rofi Munawar, Lc (FPKS)**. Delegasi berdiskusi mendalam dengan Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Italia, **Mr. Michele Geraci**.

Pada pertemuan tersebut, **Yth. Sdr. Dave Akbarshah Fikarno, ME.**, mengungkapkan bahwa DPR RI berkeinginan mendengar dan menggali peluang-peluang kerja sama untuk meningkatkan nilai perdagangan Indonesia-Italia. Indonesia dan Italia merupakan negara yang sama-sama memiliki perhatian besar pada sektor usaha kecil menengah dan ekonomi kreatif. Delegasi juga ingin mengetahui langkah Italia dalam pengembangan sektor tersebut.



**Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Italia,
Mr. Michele Geraci**

Sebagai catatan, neraca perdagangan Italia-Indonesia mengalami peningkatan dari US\$ 3,2 miliar pada 2015 menjadi US\$3,76 miliar pada 2018. Pada tahun lalu, Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan dengan Italia senilai US\$80,7 juta. Sementara pada sektor investasi, Italia berada pada peringkat top 9 negara-negara Eropa yang berinvestasi di Indonesia. Total investasi Italia di Indonesia pada 2018 mencapai US\$32,09 miliar.

Keinginan Delegasi tersebut disambut baik oleh **Mr. Michele Geraci**. Untuk itu, sebagai wujud komitmen Italia meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi antarkedua negara, Italia berencana memiliki paviliun permanen di sejumlah kota di Indonesia. Paviliun tersebut merupakan sarana pameran produk-produk Italia dan tempat diskusi bisnis dan meskipun direncanakan tidak begitu besar namun berada di kawasan *high street* sejumlah kota di Indonesia. Jakarta menjadi kota pertama untuk lokasi paviliun tersebut dan ia ingin mendengar masukan dari Delegasi DPR RI terkait tempat ataupun kota lainnya yang dapat dijangkau.

Pada pertemuan tersebut, Kementerian Pembangunan Ekonomi menjelaskan pula situasi ekonomi Italia yang mampu bertumbuh 0,2% pada kuartal pertama tahun 2019. Pada tahun ini, ekonomi Italia ditargetkan tumbuh di kisaran 1%, setelah mengalami resesi pada akhir 2018. Data dari Istituto Nazionale di Statistica (Istat) Italia, menunjukkan bahwa output ekonomi menyusut hingga 0,2% pada tiga bulan terakhir 2018, menyusul penurunan hingga 0,3% pada kuartal ketiga tahun serupa.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Parlemen Italia berencana membentuk Grup Persahabatan Italia-Indonesia dengan keanggotaan yang terdiri dari seluruh kelompok partai yang ada di parlemen baik penguasa maupun oposisi. Parlemen Italia juga menyambut baik undangan untuk turut berpartisipasi aktif di *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (WPSD) yang akan diselenggarakan di Bali, awal September 2019.
2. Italia memiliki keunggulan di bidang teknologi dan kami menawarkan kolaborasi kepada Indonesia untuk memperkuat teknologi, seperti *high and medium technology* dalam pemrosesan bahan material mentah yang dimiliki Indonesia.
3. Studio Film Cinecitta yang merupakan studio film terbesar di Eropa memiliki kompleks dan manajemen pengelolaan yang terpadu. Cinecitta tidak hanya menjadi lokasi pengambilan gambar, tetapi juga sebagai tempat belajar dan institut sinema sekaligus sebagai lokasi wisata. Cinecitta juga melibatkan kelompok usaha kecil dan menengah dalam penyiapan beragam properti studio.
4. Italia tengah menjajaki lokasi untuk mendirikan paviliun permanen di sejumlah kota di Indonesia. Pavilion akan dibangun di lahan yang tidak begitu luas tetapi berada strategis di kawasan jantung perkotaan. Tujuan pembangunan paviliun permanen Italia adalah sebagai tempat *showroom* ataupun pameran produk-produk *made in Italy* dan juga tempat negosiasi bisnis.

B. Saran

1. BKSAP untuk segera menyampaikan undangan WPSD ke Parlemen Italia sekaligus mengundang anggota Grup Persahabatan Parlemen Italia – Indonesia untuk berkunjung ke Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.
2. BKSAP untuk dapat menyampaikan kepada komisi terkait untuk menindaklanjuti tawaran ITA dalam hal penguatan teknologi pemrosesan bahan material mentah dari Indonesia.



3. Penguatan ekonomi kreatif harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif dengan tujuan menghasilkan *multiplier effect* yang merata dan berimbang pada seluruh lapisan ekonomi, termasuk pada industri kecil dan menengah. Terkait hal tersebut, sejalan dengan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif, BKSAP dapat meneruskan hasil kunjungan ini khususnya yang terkait kunjungan lapangan ke Studio Cinecitta ke Komisi X (Pendidikan, Olahraga, Sejarah).
4. BKSAP dapat menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Kementerian Pengembangan Ekonomi Italia secara tertulis mengenai lokasi maupun rencana pendirian Paviliun Permanen Italia di sejumlah kota di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pendirian Paviliun Permanen tersebut memberi manfaat maksimal bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

VII. PENUTUP

A. Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 12 (dua belas) Anggota, 3 (tiga) Sekretaris Delegasi, 1 (satu) Tenaga Ahli BKSAP dan 1 (satu) Wartawan adalah Rp 2.344.009.065 (Dua Milyar Tiga ratus Empat puluh Empat juta Sembilan ribu Enam puluh Lima Rupiah).

B. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka kunjungan kerja Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) guna menindaklanjuti Resolusi-resolusi *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) pada tanggal 11-17 Mei 2019 ke Roma. Diharapkan dari kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja BKSAP. Atas nama Delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi oleh pemberitaan media.

Jakarta, Mei 2019

Ketua Delegasi,

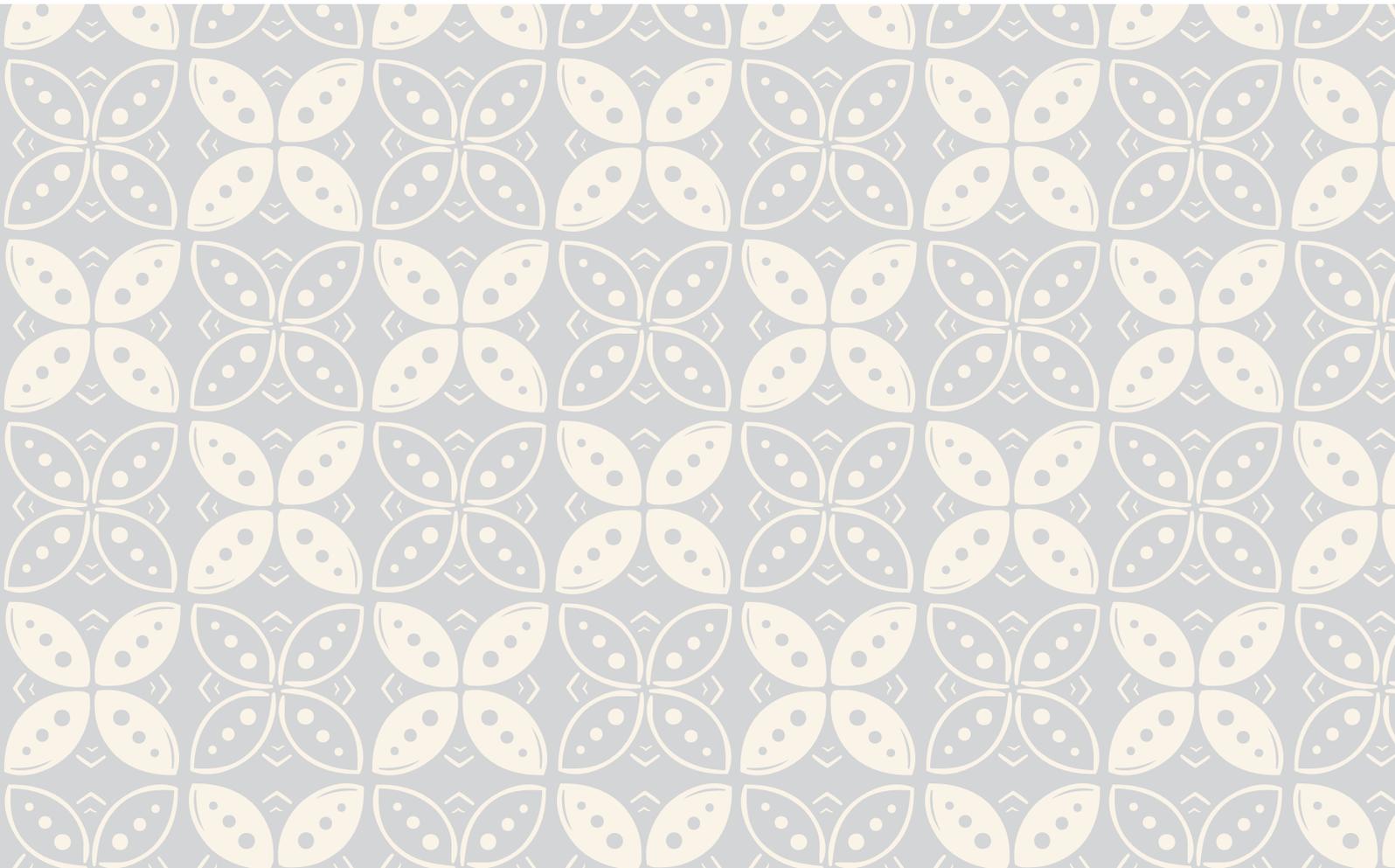
Juliari P. Batubara

A-168



LAMPIRAN KLIPING MEDIA

Panja Kerja Sama Ekonomi Regional
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia



<http://m.mediaindonesia.com/read/detail/203678-bksap-dpr-kunjungi-proyek-digital-di-batam>

BKSAP DPR Kunjungi Proyek Digital di Batam

Penulis: Hilarius U Gani - 12 December 2018, 09:03 WIB



MI/Hilarius U Gani

BADAN Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mengunjungi Batam, Kepulauan Riau, untuk meninjau kemajuan pembangunan proyek Nongsa Digital Park (NDP). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Panja BKSAP Juliari Batubara.

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Singapura yang diwakili oleh Perdana Menteri Lee Hsien Long bersepakat untuk menandatangani sejumlah MOU (Memorandum of Understanding) terkait kerja sama dalam berbagai bidang. Salah satu bidang kerja sama yang utama dalam MOU tersebut adalah pengembangan ekonomi digital di Batam. Batam dipilih menjadi pusat pengembangan ekonomi digital karena kedua negara memandang bahwa pulau ini memiliki letak yang sangat strategis, yaitu antara Indonesia dan Singapura.

Bentuk kerja sama dalam pengembangan ekonomi digital antara Indonesia dan Singapura adalah melalui pembangunan Nongsa Digital Park (NDP) sebagai pusat aktivitas pelaku industri kreatif berbasis digital dengan bentuk kegiatan berupa pengembangan aplikasi, web, program digital, animasi, dan juga film.



<http://m.mediaindonesia.com/read/detail/203678-bksap-dpr-kunjungi-proyek-digital-di-batam>

Pemerintah Indonesia berharap NDP mampu menarik investasi sebesar 500 juta dollar di bidang industri digital dan start up kreatif yang mampu menyerap kesempatan kerja baru bagi 10.000 pekerja. Pembangunan NDP ini juga merupakan upaya realisasi pemerintah untuk mendukung berkembangnya revolusi industry 4.0 dan menyikapi trend masa depan ekonomi dunia. Lebih jauh lagi, NDP akan dimanfaatkan sebagai "jembatan digital" kerja sama bilateral dengan sentra ekonomi digital di Indonesia.

NDP sendiri telah diresmikan pada 20 Maret 2018 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Dr. Vivian Balakrishnan. NDP merupakan taman digital terpadu yang menyediakan tempat bagi bisnis digital untuk berkembang, sekaligus merupakan lokasi yang ideal untuk dijadikan pengembangan pusat data. NDP juga terintegrasi dengan kawasan wisata Nongsa Resort yang saat ini dioperasikan oleh pihak swasta yaitu Grup Citramas.

Secara topografis, NDP terletak di sisi timur kota Batam yang jauh dari garis patahan seismik. Sehingga lokasi ini secara geografis aman bagi pengembangan Pusat Data dan baik bagi pengembangan bisnis, yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Lokasi pengembangan NDP terletak di area seluas 180 ha, yang sebagian telah dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Village, Lapangan Golf serta Studio Film & Animasi Kinea, yang juga dilengkapi dengan Terminal Feri Nongsapura untuk mendukung kemudahan sarana transportasi.

Kawasan ini diharapkan mampu menjadi salah satu "Gerbang Ekonomi" digital utama di Indonesia, sekaligus memperkuat citra kawasan Nongsa yang telah lebih dulu dikenal sebagai destinasi wisata domestik dan internasional yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. (RO/OL-6)

<http://mediaindonesia.com/read/detail/204079-bksap-dpr-ri-dorong-pengembangan-ekonomi-digital>

BKSAP DPR RI Dorong Pengembangan Ekonomi Digital

Penulis: **Hillarius U Gani** Pada: Kamis, 13 Des 2018, 18:40 WIB [NUSANTARA](#)



Ist

KELOMPOK Kerja (Panja) Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, Rabu (12/12), sebagai salah satu program kerja.

Dasar pemilihan Provinsi Kepri sebagai daerah tujuan kunker adalah sebagai salah satu daerah terdepan Indonesia, Kepri, khususnya Kota Batam, juga merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di provinsi ini diharapkan akan menjadikan Batam sebagai salah satu lokomotif ekonomi Indonesia. Di samping itu, Batam juga memiliki posisi strategis untuk menjadi pintu gerbang perdagangan dan investasi di tingkat sub-regional.

Delegasi Panja KER BKSAP DPR RI diketuai oleh Juliari Batubara yang merupakan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, hadir pula beberapa anggota Panja antara lain Wiryanti Sukamdani, anggota Komisi X Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng, anggota Komisi IV Fraksi PDIP, Jerry Sambuaga, anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar, Meilani Leimena Suharli, anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat, Susi Marleny Bachsin, anggota Komisi IV Fraksi Partai Gerindra, Jon Erizal, anggota Komisi XI Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Dwita Ria Gunadi, anggota Komisi X Fraksi Partai Gerindra.



<http://mediaindonesia.com/read/detail/204079-bksap-dpr-ri-dorong-pengembangan-ekonomi-digital>

Kunjungan Panja KER dimaksudkan untuk memastikan bahwa peran pengawasan atas kerja sama ekonomi yang diambil pemerintah agar selalu berpegang pada visi kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pada kunjungan tersebut, delegasi Panja KER berkesempatan untuk mengunjungi Nongsa Digital Park yang merupakan realisasi dari pengembangan ekonomi digital. Pada 2017 lalu, Indonesia dan Singapura sepakat untuk menandatangani sejumlah kerja sama. Salah satunya pengembangan ekonomi digital di Batam.

Batam menjadi pilihan karena dua pimpinan negara menganggap pulau ini terletak di antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Salah satu investor terbesar dan terkemuka di Nongsa Digital Park ialah Infinite Studio milik PT Kinema Systrans Multimedia, sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi film, animasi, serta konten media digital.

Dalam keterangannya, Ketua Panja KER, Juliari Batubara, mengungkapkan bahwa pemerintah hendaknya dapat lebih intensif mempromosikan potensi yang dimiliki oleh Kota Batam, khususnya Nongsa Digital Park, minimal di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini khususnya karena mengingat bahwa Nongsa Digital Park (NDP) diproyeksikan untuk bisa menarik investasi sebesar US\$500 juta di bidang industri digital dan startup kreatif yang diharapkan mampu menyerap kesempatan kerja baru bagi 10.000 pekerja.

Pembangunan NDP ini juga merupakan upaya realisasi pemerintah untuk mendukung berkembangnya revolusi industri 4.0 dan menyikapi tren masa depan ekonomi dunia. Lebih jauh lagi, NDP akan dimanfaatkan sebagai 'jembatan digital' kerja sama bilateral dengan sentra ekonomi digital di Indonesia.

Lebih jauh Juliari menjelaskan bahwa saat ini Batam memiliki studio pembuatan film dan animasi yang fasilitasnya sangat baik dan telah berhasil bekerja sama dengan industri perfilman dan animasi yang ada di dunia.

Perwakilan Infinite Studio juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan pelatihan pembuatan animasi untuk anak-anak muda Indonesia. Program pelatihan pembuatan animasi ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia di Batam, dan daerah sekitarnya yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil khususnya dalam bidang teknologi digital.

Setelah selesai mengikuti pelatihan pembuatan animasi, anak-anak muda Indonesia ini nantinya akan memiliki peluang untuk bisa bekerja di Infinite Studio. Saat ini, Infinite Studio mempekerjakan sebanyak 280 orang, dengan mayoritas animator dari Indonesia.

Senada dengan Ketua Panja KER, anggota Komisi XI Meilani Leimena berharap kemajuan industri perfilman dan animasi Indonesia saat ini dapat memiliki kontribusi yang signifikan pada pendapatan negara, dan mampu bersaing dengan negara-negara maju di masa yang akan datang.



<http://mediaindonesia.com/read/detail/204079-bksap-dpr-ri-dorong-pengembangan-ekonomi-digital>

NDP dirancang untuk menjadi taman digital terpadu yang menyediakan tempat bagi bisnis digital untuk berkembang, sekaligus merupakan lokasi yang ideal untuk dijadikan pengembangan pusat data. Saat ini, NDP telah terintegrasi dengan kawasan wisata Nongsa yang merupakan kawasan wisata terpadu seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Village dan Lapangan Golf yang saat ini dioperasikan oleh pihak swasta yaitu Grup Citramas.

Keberadaan NDP menegaskan bahwa sebagai daerah terdepan, Batam memiliki posisi strategis untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pembangunan di daerah terdepan. Kerja sama RI dengan Singapura dalam pengembangan ekonomi digital ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi implementasi konsep KEK. (OL-1)

<http://m.mediaindonesia.com/read/detail/203801-panja-bksap-dukung-batam-jadi-kawasan-khusus-pariwisata>

Panja BKSAP Dukung Batam Jadi Kawasan Khusus Pariwisata

Penulis: Hillarius U. Gani - 12 December 2018, 17:57 WIB



MI/Hillarius U. Gani

PANJA Kerja Sama Ekonomi Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendukung rencana strategis Pemprov Kepri untuk menjadikan Batam sebagai kawasan khusus pariwisata. Dukungan tersebut dikemukakan dalam pertemuan dengan pimpinan Pemprov Kepri, di Batam, Rabu (12/12).

Panja yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari Batubara dan didampingi sembilan anggota, diterima oleh Wakil Gubernur Kepri Isdianto serta para organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Ari, panggilan akrab Juliari Batubara, produk akhir dari panja yang dipimpinnya tersebut berupa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh setiap komisi DPR. "Anggota panja ini berasal dari berbagai komisi. Apa yang kita bicarakan ini akan menjadi masukan untuk dibahas di komisi masing-masing," jelasnya.

Selama ini, kata Ari, BKSAP telah berkunjung ke berbagai negara untuk memperoleh gambaran mengenai daya saing sehingga dapat ditindaklanjuti di dalam negeri. "Daya saing ini penting karena di ASEAN saja kita belum masuk empat besar," papar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.



<http://m.mediaindonesia.com/read/detail/203801-panja-bksap-dukung-batam-jadi-kawasan-khusus-pariwisata>

Ia menilai Batam memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata dunia karena berbatasan langsung dengan empat negara, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. "Daerah ini sangat unggul di bidang pariwisata, terutama wisata bahari." tandasnya.

Dalam kaitan itu pula, Ari menyoroti soal produk UKM yang selama ini kalah bersaing dan sulit untuk diekspor. "Harus ada industri yang bisa mendongkrak produk UKM yang bisa bersaing dengan produk negara tetangga. Perlu pembenahan dari hulu," cetusnya.

Sementara itu, Ismanto berharap ada sinergi antara pemda, pemerintah pusat, dan DPR agar rencana pembangunan Batam ke depan dapat terealisasi sebagaimana diharapkan. "Sinergitas ini penting karena daerah tidak bisa berjalan sendirian," tukasnya.

Ia menyambut baik gagasan tentang kawasan khusus pariwisata Batam karena akan mempermudah proses perizinan. "Kalau izinnnya mudah, investor tidak akan ragu-ragu," ucapnya. (OL-6)



Indonesia & Rumania Perlu Perkuat Kerja Sama

Maret 14/ 2018

Oleh : Inria Zulfikar

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (9/4). - Antara/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Rumania perlu meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi guna memacu potensi yang dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha kedua negara.

Juliari P. Batubara, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, mengatakan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan langsung dengan pejabat Kementerian Lingkungan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Rumania yang dijadwalkan berlangsung di Bukares, ibukota negara Eropa Timur tersebut.

Rencana pertemuan itu merupakan bagian dari agenda acara kunjungan delegasi BKSAP ke Rumania pada 18-23 Maret mendatang, yang juga mencakup pertemuan dengan parlemen negara itu, perwakilan kamar dagang dan industri Rumania serta perusahaan teknologi informasi.

"Rumania adalah negara Eropa dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat," ujar Juliari saat melakukan pembicaraan dengan Dubes Rumania untuk Indonesia, Valerica Epure di Jakarta, Rabu (14/3).

Dalam kesempatan itu Juliari didampingi Agustina Wilujeng, anggota DPR yang juga salah satu delegasi dalam kunjungan itu.

Menurut dia, BKSAP ingin menggali informasi sebanyak mungkin dari para mitra dialog di Rumania mengenai peluang kerja sama yang potensial dikembangkan kalangan dunia usaha kedua negara.

Selama ini hubungan dagang kedua negara belum terlalu bergairah. Hal ini bisa dilihat dari nilai perdagangan Indonesia-Rumania pada 2017 yang hanya mencapai US\$113,52 juta. Indonesia menikmati surplus sebesar US\$54,2 juta.

Komoditas dari Indonesia yang diekspor ke negara itu antara lain karet, kertas dan cardboard, pesawat telepon, polimer sintetis, dan staple fibre.

"Kami ingin mendengar langsung, komoditas apa saja yang layak dipasarkan di kedua negara," kata Juliari.

Perkembangan ekonomi Rumania yang makin dinamis tidak dapat diabaikan, karena posisinya makin diperhitungkan di Eropa. Apalagi, kata Juliari, Rumania sudah mencanangkan visinya untuk menjadi hub digital di kawasan Eropa.

Dalam kesempatan yang sama Dubes Valerica mengatakan pihaknya berharap banyak dari hasil kunjungan BKSAP ke negaranya pekan depan agar kerja sama perdagangan dan investasi dapat lebih dipacu lagi.



Menurut dia, pelaku bisnis kedua negara, baik swasta maupun BUMN, sangat terbuka untuk menjalin kerja sama bisnis yang lebih erat, karena masing-masing memiliki keunikan yang bisa dimanfaatkan.

Valerica menjelaskan Rumania sudah sejak lama dikenal kuat untuk industri kereta api, galangan kapal, komoditas pertanian hingga pengelolaan pelabuhan.

"Kami ingin mendengar langsung dari Anda [Indonesia], sektor-sektor apa saja yang potensial dikembangkan."

Sumber: <http://industri.bisnis.com/read/20180314/12/749832/indonesia-rumania-perlu-perkuat-kerja-sama>



INDONESIA-RUMANIA: Sektor Dagang & Pariwisata Dipacu

Oleh: Inria Zulfikar 22 Maret 2018 | 02:00 WIB

BUKARES— Pemerintah Indonesia agar memacu memacu kerja sama dengan Rumania untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan perdagangan.

Juliari P. Batubara, ketua delegasi parlemen Indonesia yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI, mengemukakan Indonesia harus mulai melihat Eropa dalam perspektif dan paradigma baru dengan tidak hanya mengandalkan pasar tradisional semata. Palsanya negara Eropa lainnya di kawasan tengah dan tenggara seperti halnya Rumania juga potensial untuk dikembangkan.

Menurut Juliari, secara geografis Rumania memiliki posisi strategis di kawasan Eropa, karena bisa menjadi pintu masuk ke Rusia, misalnya.

"Sudah saatnya hubungan bilateral ini dipacu lagi dengan melibatkan kalangan dunia usaha kedua negara," ujarnya saat bertemu dengan wakil parlemen Rumania yang dipimpin Ben-Oni Ardelean, Vice President Chamber of Deputies, Rabu (21/3).

Pada kesempatan yang sama, Ardelean juga memaparkan berbagai peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan pelaku bisnis dari Indonesia seperti di sektor transportasi, pelabuhan, perdagangan komoditas hingga teknologi informasi.

Seperti diketahui kinerja perdagangan dan sektor pariwisata Indonesia di Rumania masih belum menggembirakan.

Jumlah wisatawan Rumania yang berkunjung ke Indonesia misalnya, bisa jadi pada 2017 masih di kisaran 12.000 orang. Karena bila mengacu pada materi yang disiapkan BKSAP DPR dalam rangka kunjungan ke negara ini pada 18-24 Maret 2018, diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan turis Rumania masih sedikit.

Pada 2016 (Januari-Oktober), pelancong yang datang tercatat 9.758 orang. Empat tahun sebelumnya berturut-turut lebih sedikit yaitu 9.020 orang (2015), 7.802 orang (2014), 7.508 orang (2013), dan 6.303 orang (2012).

Sebaliknya belum diketahui pasti jumlah orang Indonesia yang berwisata ke negara yang dipimpin Presiden Klaus Iohannis ini. Dari data KBRI di Bukares, yang tercatat hanya jumlah WNI yang saat ini tinggal di Rumania, yakni sekitar 163 orang. Itu pun termasuk staf dan keluarga karyawan KBRI.

Seorang pejabat di KBRI juga tidak terlalu optimistis ketika Bisnis memperkirakan turis asal Indonesia mencapai sekitar 10.000 orang per tahun.

Padahal ada dua hal yang menjadi fokus hubungan RI-Rumania saat ini. Pertama, mitra bagi kerja sama di forum internasional. Kedua, mitra dagang ke-5 bagi Indonesia di kawasan Eropa Timur dan Tenggara. Selanjutnya salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia adalah peningkatan perdagangan bilateral, investasi dan kunjungan wisatawan asal Rumania.

Sebagai gambaran, nilai perdagangan kedua negara pada 2017 (Januari-Agustus) sebesar US\$113,52 juta dan surplus di pihak Indonesia mencapai US\$52,5 juta. Padahal tahun



sebelumnya lebih besar yaitu US\$134,6 juta dan Indonesia juga menikmati surplus US\$50,4 juta.

Malah secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir terdapat penurunan pertumbuhan nilai perdagangan RI-Rumania, sehingga anjlok menjadi minus 6,39%.

Indonesia juga belum menjadi negara tujuan investasi utama bagi Rumania. Tak heran pada 2016 investasi negara itu hanya menempati peringkat ke-57 dengan nilai US\$420.000. Oleh karena itu pentingnya peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara. (Inria Zulfikar)

Sumber: <http://papua.bisnis.com/read/20180322/448/752681/indonesia-rumania-sektor-dagang-pariwisata-dipacu>

Rumania Tawarkan Pelabuhan Constanta Untuk Perluas Pasar Ekspor Indonesia

Maret 22/ 2018

Oleh : Inria Zulfikar



Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR, Juliari P. Batubara (kedua kiri) dan Susilawati Bakrie, Charge d'Affaires KBRI Rumania (kiri) sedang menyimak informasi yang disampaikan eksekutif Kamar Dagang Rumania mengenai potensi ekonomi negara itu dalam diskusi yang berlangsung di Bukares, Rabu (21/3/2018). - JIBI/Inria Zulfikar

Bisnis.com, BUKARES - Rumania menawarkan kepada Indonesia untuk memanfaatkan pelabuhan Constanta yang berada di tepi Laut Hitam sebagai hub logistik utama bagi masuknya komoditas impor nasional ke negara itu.

Paula-Marinela Pirvanescu, Wakil Menteri Lingkungan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Rumania, menegaskan pihaknya sangat menyambut baik bila pebisnis dari Indonesia berniat melebarkan sayap usahanya ke negara itu dengan memanfaatkan pelabuhan utama Constanta sebagai pintu masuk arus barang.

"Kami bisa memberikan pelayanan di Constanta. Kapasitas dan kualitasnya segera kami tingkatkan. Constanta akan kami perluas," ujarnya saat menerima kunjungan delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang dipimpin Juliari P. Batubara di Bukares, Rabu (21/3/2018).

Paula mengemukakan pemerintah Rumania tengah serius meningkatkan daya saing pelabuhan tersebut agar mampu sejajar dengan standar dan kinerja pelabuhan utama yang telah mapan di Eropa, seperti misalnya di Rotterdam, Belanda.



Kementerian tersebut bahkan mengusulkan agar Indonesia melakukan studi lebih dulu mengenai masuknya barang impor melalui Constanta sebagai dasar pijakan sebelum menjadikannya sebagai pelabuhan tujuan ekspor nasional ke negara itu.

Menanggapi hal itu, Jon Erizal, anggota delegasi BKSAP, mengatakan tawaran tersebut sangat menarik dikaji lebih jauh sepanjang volume arus barangnya ekonomis. "Menurut saya perlu dibentuk tim kecil untuk melihat lebih jauh masalah ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mencoba menggal permasalahannya yang masih mengganjal hubungan dagang dan investasi kedua negara.

Rumania ingin neraca perdagangan luar negeri mereka yang defisit terhadap Indonesia dapat lebih seimbang. Mengenai isu ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, Rumania pada prinsipnya mendukung langkah Indonesia agar komoditas itu bisa masuk ke Eropa. Namun persoalannya, keputusan bukan berada di pihak pemerintah.

Mereka juga berharap Indonesia bisa cepat menuntaskan beberapa ketentuan perdagangan seperti yang dilakukan Vietnam.

"Kami ingin meningkatkan ekspor peralatan pertanian ke Indonesia. Kami tertarik juga untuk impor kopi," kata Paula.

Selama 2013-2017 Indonesia terus menikmati surplus dalam perdagangan bilateral dengan Rumania dengan total nilai diperkirakan mencapai US\$300 juta.

Sebelumnya delegasi BKSAP DPR juga berkunjung ke parlemen negara itu dan diterima oleh Ben-Oni Ardelean, Vice President Chamber of Deputies beserta jajarannya.

Dalam kesempatan terpisah, pihak Kamar Dagang Rumania juga memandang Indonesia sebagai mitra dagang yang penting, dan berharap Jakarta memanfaatkan pelabuhan Constanta sebagai hub logistik untuk memperluas penetrasi produk ekspor ke pasar Eropa lainnya.

"Silakan dimanfaatkan karena lokasinya sangat strategis," kata Virgil Goaga, Director of Foreign Affairs Kamar Dagang Rumania saat bertemu dengan delegasi BKSAP DPR.

Delegasi Indonesia juga menanyakan sejumlah isu yang tengah dihadapi para pebisnis Rumania serta bagaimana cara pemerintah mengatasinya.

Sumber: <http://industri.bisnis.com/read/20180322/12/752895/rumania-tawarkan-pelabuhan-constantan-untuk-perluas-pasar-ekspor-indonesia>

Perluas Pasar Ekspor Indonesia, Rumania Tawarkan Pelabuhan

Jumat 23 March 2018 16:07 WIB



kunjungan Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubata dengan eksekutif Kamar Dagang Rumania di Bukares, Rumania, Rabu (21/3).

Foto: DPR RI

Kamar Dagang Rumania memandang Indonesia sebagai mitra dagang yang penting.

REPUBLIKA.CO.ID, BUKARES -- Indonesia dan Rumania telah menyetujui kerja sama sektor perdagangan sejak lama. Bagi Indonesia, Rumania adalah pintu masuk menuju pasar Uni Eropa, sementara Indonesia merupakan pintu masuk menuju pasar ASEAN. Karenanya, untuk memaksimalkan pasar ekspor Indonesia, Rumania menawarkan Pelabuhan Constanta yang berada di tepi Laut Hitam sebagai hub logistik utama bagi masuknya komoditas impor nasional ke negara itu.

Demikian mengemuka dalam kunjungan Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubata dengan eksekutif Kamar Dagang Rumania di Bukares, Rumania, Rabu (21/3) lalu waktu setempat. Menanggapi hal itu, Anggota BKSAP Jon Erizal mengatakan, tawaran tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih jauh sepanjang volume arus perdagangannya ekonomis.

“Menurut saya, perlu dibentuk tim kecil untuk melihat lebih jauh masalah ini,” ujar politikus F-PAN ini, seperti dalam siaran persnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Rumania, Paula-Marinela Pirvanescu menegaskan pihaknya sangat menyambut baik bila pebisnis dari Indonesia berniat melebarkan sayap usahanya ke negara itu dengan memanfaatkan pelabuhan



utama Constanta sebagai pintu masuk arus barang. “Kami bisa memberikan pelayanan di Constanta. Kapasitas dan kualitasnya segera kami tingkatkan. Constanta akan kami perluas,” ujar Paula Marinela.

Paula mengemukakan pemerintah Rumania serius meningkatkan daya saing pelabuhan tersebut agar mampu sejajar dengan standar dan kinerja pelabuhan utama yang telah mapan di Eropa, seperti misalnya di Rotterdam, Belanda. Paula menambahkan, pihaknya bahkan mengusulkan agar Indonesia melakukan studi lebih dulu mengenai masuknya barang impor melalui Constanta sebagai dasar pijakan sebelum menjadikannya sebagai pelabuhan tujuan ekspor nasional ke negara itu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mencoba menggali permasalahan yang masih mengganjal hubungan dagang dan investasi kedua negara. Menurutnya, Rumania ingin neraca perdagangan luar negeri mereka yang defisit terhadap Indonesia dapat lebih seimbang. Mengenai isu ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, Rumania pada prinsipnya mendukung langkah Indonesia agar komoditas itu bisa masuk ke Eropa. Namun persoalannya, keputusan bukan berada di pihak pemerintah.

Mereka juga berharap Indonesia bisa cepat menuntaskan beberapa ketentuan perdagangan seperti yang dilakukan Vietnam. “Kami ingin meningkatkan ekspor peralatan pertanian ke Indonesia. Kami tertarik juga untuk impor kopi,” imbuh Paula.

Dalam kesempatan terpisah, pihak Kamar Dagang Rumania juga memandang Indonesia sebagai mitra dagang yang penting. Mereka berharap Jakarta memanfaatkan Pelabuhan Constanta sebagai hub logistik untuk memperluas penetrasi produk ekspor ke pasar Eropa lainnya.

“Silakan dimanfaatkan karena lokasinya sangat strategis,” kata Director of Foreign Affairs Kamar Dagang Rumania, Virgil Goaga.

Delegasi Indonesia juga menanyakan sejumlah isu yang tengah dihadapi para pebisnis Rumania serta bagaimana cara pemerintah mengatasinya. Diketahui, selama 2013-2017 Indonesia terus menikmati surplus dalam perdagangan bilateral dengan Rumania dengan total nilai diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS.

Sebelumnya delegasi BKSAP DPR juga berkunjung ke parlemen negara itu dan diterima oleh Ben-Oni Ardelean, Vice President Chamber of Deputies beserta jajarannya.

Sumber: <http://republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/18/03/23/p61dc6423-perluas-pasar-ekspor-indonesia-rumania-tawarkan-pelabuhan>



Segera Tuntaskan Penghambat Perdagangan & Pariwisata Indonesia-Rumania

Maret 21/ 2018

Oleh : Inria Zulfikar

Bukares, Rumania. - Istimewa

Bisnis.com, BUKARES - Pemerintah Indonesia dan Rumania perlu segera menuntaskan sejumlah masalah untuk memacu kerja sama sektor pariwisata dan perdagangan kedua negara.

Data-data yang ada menunjukkan bahwa geliat bisnis di kedua sektor tersebut belum mengembirakan.

Jumlah wisatawan Rumania yang berkunjung ke Indonesia, misalnya, pada 2017 masih di kisaran 12.000 orang. Bila mengacu pada materi yang disiapkan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dalam rangka kunjungan ke negara ini pada 18-24 Maret 2018, diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan turis Rumania sedikit sekali.

Pada 2016 (Januari-Oktober), pelancong yang datang tercatat 9.758 orang. Empat tahun sebelumnya berturut-turut lebih sedikit lagi yaitu 9.020 orang (2015), 7.802 orang (2014), 7.508 orang (2013), dan 6.303 orang (2012).

Sebaliknya, belum diketahui pasti jumlah orang Indonesia yang berwisata ke negara yang dipimpin Presiden Klaus Iohannis ini. Dari data KBRI di Bukares, yang tercatat hanya jumlah WNI yang saat ini tinggal di Rumania, yakni sekitar 163 orang. Itu pun termasuk staf dan keluarga karyawan KBRI.

Seorang pejabat di KBRI juga tidak terlalu optimistis ketika Bisnis memperkirakan turis asal Indonesia mencapai sekitar 10.000 orang per tahun.

Padahal, ada dua hal yang menjadi fokus hubungan RI-Rumania saat ini. Pertama, mitra bagi kerja sama di forum internasional. Kedua, mitra dagang ke-5 bagi Indonesia di kawasan Eropa Timur dan Tenggara. Selanjutnya, salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia adalah peningkatan perdagangan bilateral, investasi dan kunjungan wisatawan asal Rumania.

Sebagai gambaran, nilai perdagangan kedua negara pada 2017 (Januari-Agustus) sebesar US\$113,52 juta dan surplus di pihak Indonesia mencapai US\$52,5 juta. Padahal, tahun sebelumnya lebih besar yaitu US\$134,6 juta dan Indonesia juga menikmati surplus US\$50,4 juta.

Malah secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir terdapat penurunan pertumbuhan nilai perdagangan RI-Rumania, sehingga anjlok menjadi -6,39%.

Indonesia juga belum menjadi negara tujuan investasi utama bagi Rumania. Tak heran pada 2016 investasi negara itu hanya menempati peringkat ke-57 dengan nilai US\$420.000.

Oleh karena itu, pentingnya peningkatan hubungan bilateral ini juga kembali ditekankan oleh Dubes Rumania untuk Indonesia Valerica Epure dan Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubara dalam pertemuan di Jakarta pekan lalu.

Dari sisi kerja sama sektor pariwisata, ada kendala yang belum dituntaskan pihak Indonesia, sehingga dari data yang ada sejauh ini masih berstatus draf perjanjian kerja sama di bidang pariwisata.

Sumber: <http://industri.bisnis.com/read/20180321/12/752482/segera-tuntaskan-penghambat-perdagangan-pariwisata-indonesia-rumania>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20180523/15/798593/siemens-mobility-berminat-terlibat-dalam-proyek-transportasi-publik-di-indonesia>

23Mei/ 2018 08:32 WIB

Siemens Mobility Berminat Terlibat dalam Proyek Transportasi Publik di Indonesia

Oleh: *Indyah Sutringrum*



Anggota Delegasi BKSAP berfoto bersama Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust (tengah) di depan sejumlah kereta yang merupakan produksi Siemens Mobility di Wina, Austria, Selasa (22/5). - Bisnis/Indyah Sutringrum

Bisnis.com, WINA -- Siemens Mobility berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan transportasi publik di Indonesia, terutama untuk transportasi massal kereta api.

Saat ini, kereta api produksi Siemens telah dipakai di sejumlah negara, antara lain Malaysia, AS, China, Polandia, Arab Saudi, dan Thailand.

"Indonesia potensinya sangat besar, tentu saja kami ingin berpartisipasi dalam pembangunan sistem transportasi di Indonesia," ujar Director of Sales Siemens



<http://kabar24.bisnis.com/read/20180523/15/798593/siemens-mobility-berminat-terlibat-dalam-proyek-transportasi-publik-di-indonesia>

Mobility Christoph Masopust saat menerima kunjungan delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Wina, Austria, Selasa (22/5/2018). Kunjungan ke Siemens Mobility merupakan rangkaian dari kunjungan kerja BKSAP ke Austria. Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Juliari P. Batubara.

Hadir dalam kunjungan itu Rofi' Munawar, Nazarudin Kiemas, SB Wiryanti Sukamdani, Jalaludin Rakhmat, Syamsul Bachri, Rachel Maryam Sayidina, Melani Leimena Suharli, Bara K. Hasibuan, Mahfudz Abdurrahman, Achmad Farial, Ahmad Syahrone, dan Mukhtar Tompo.

SB Wiryanti Sukamdani mengemukakan saat ini Indonesia sedang membangun transportasi publik berbasis rel, antara lain Mass Rapid Transit (MRT), kereta layang, dan kereta cepat. Dia mempertanyakan nilai yang bisa ditawarkan oleh Siemens.

Hal senada diungkapkan Rachel Maryam Sayidina. Dia mengungkapkan di tengah upaya pemerintah membangun infrastruktur ada masalah pendanaan. Rachel mempertanyakan apakah Siemens dapat memberikan harga yang kompetitif, tapi di sisi lain tidak menimbulkan masalah tenaga kerja di Indonesia. Hal ini terkait dengan isu penggunaan tenaga kerja asing yang menuai pro kontra di masyarakat.

"Apakah Siemens punya solusi finansial dan masalah tenaga kerja?" ungkapnya. Terkait hal ini, Masopust mengatakan pihaknya dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan di antara kedua pihak, antara lain menyangkut finansial, tenaga kerja, maupun transfer teknologi.

Tag : *dpr, siemens*
Editor : Annisa Margrit

<http://kabar24.bisnis.com/read/20180522/19/798430/laporan-dari-austria-bksap-dpr-kunjungi-pabrik-kereta-api-siemens>

22Mei / 2018 20:18 WIB

Laporan dari Austria: BKSAP DPR Kunjungi Pabrik Kereta Api Siemens

Oleh : *Indyah Sutriningrum*



Anggota BKSAP DPR RI SB. Wiryanti Sukamdani (ketiga kiri), Rachel Maryam Sayidina (tengah), Melani Leimena Suharli (kedua kanan) mendengarkan penjelasan Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust (kanan) saat factory tour di fasilitas Siemens, di Wina, Austria, Selasa (22/5/2018). Kunjungan ke Siemens Mobility di Wina merupakan salah satu rangkaian kunjungan BKSAP ke Austria. - JIBI/Indyah Sutriningrum

Bisnis.com, WINA – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan *company visit* ke fasilitas Siemens Mobility, di Wina Austria. Kunjungan tersebut merupakan salah satu kegiatan BKSAP ke Austria. Kunjungan yang diikuti oleh sejumlah anggota BKSAP itu dipimpin oleh Juliari P. Batubara, yang juga Wakil Ketua BKSAP. Anggota yang hadir dalam pertemuan itu adalah Rofi' Munawar, Nazarudin Kiemas, SB Wiryanti Sukamdani, Jalaludin Rakhmat, Syamsul Bachri, Rachel Maryam Sayidina, Melani Leimena Suharli, Bars K. Hasibuan, Mahfudz Abdurrahman, Achmad Fariq, Ahmad Syahroni, dan Mukhtar Tompo.



<http://kabar24.bisnis.com/read/20180522/19/798430/laporan-dari-austria-bksap-dpr-kunjungi-pabrik-kereta-api-siemens>

Di fasilitas seluas 14 ha di Ibu kota Austria itu, rombongan berkesempatan melihat Dari dekat proses perakitan kereta Dari rangka sampai menjadi barang jadi.

BKSAP DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Austria dalam rangka meningkatkan hubungan antarkedua negara.

Selama di Austria, delegasi BKSAP akan melaikan kunjungan ke industri, instansi pemerintah dan parlemen negara tersebut. Industri yang akan dikunjungi adalah Siemens AG. Selain itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria.

Pada kunjungan ini, delegasi BKSAP juga akan menjelaskan situasi dan kondisi di dalam negeri, terkait dengan isu terorisme. Bahwa keamanan Indonesia tetap terkendali dan aman untuk dikunjungi.

Tag : *dpr, austria*

Editor : Sutarno

<http://kabar24.bisnis.com/read/20180522/15/797962/laporan-dari-wina-genjot-hubungan-antarnegara-bksap-dpr-kunjungi-austria>

LAPORAN DARI WINA: Genjot Hubungan Antarnegara, BKSAP DPR Kunjungi Austria

Mei

22

/ 2018
00:37 WIB

Oleh :Indyah Sutringrum



Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Austria dalam rangka meningkatkan hubungan antarkedua negara dan diikuti oleh 14 anggota BKSAP di bawah Ketua Delegasi Juliari P. Batubara (dasi merah) - Istimewa

Bisnis.com, WINA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Austria dalam rangka meningkatkan hubungan antarkedua negara.



<http://kabar24.bisnis.com/read/20180522/15/797962/laporan-dari-wina-genjot-hubungan-antar-negara-bksap-dpr-kunjungi-austria>

Kunjungan kerja ini diikuti oleh 14 anggota BKSAP, yaitu Juliari P. Batubara (ketua delegasi), Rofi' Munawar, Nazarudin Kiemas, S.B. Wiryanti Sukamdani, Jalaludin Rakhmat, Dwi Arum Hadiatie, Syamsul Bachrie, dan Rachel Maryam Sayidina.

Selain itu, diikuti pula oleh Melani Leimena Suharli, Bara K. Hasibuan, Mahfudz Abdurrahman, Achmad Farihal, Ahmad Syahrini, dan Muchtar Tompo.

Selama di Austria, delegasi BKSAP akan melaikan kunjungan ke industri, instansi pemerintah dan parlemen negara tersebut. Industri yang akan dikunjungi adalah Siemens AG. Selain itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria.

Hubungan RI dengan Austria sudah terjalin sejak 1954, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam bidang politik kedua negara saling mendukung dalam pencalonan wakil di badan PBB dan organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh, Austria mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Sebaliknya Indonesia juga mendukung pencalonan Austria sebagai anggota tidak tetap PBB 2027-2028.

Dalam bidang ekonomi Indonesia mengeksport a.l. Furnitur, kerajinan tangan, bahan mentah. Sedangkan impor Indonesia dari Austria antara lain mesin dan suku cadang kendaraan, elektronik, produk olahan dan produk kimia.

Pada kunjungan ini, delegasi BKSAP juga akan menjelaskan situasi dan kondisi di dalam negeri, terkait dengan isu terorisme. Bahwa keamanan Indonesia tetap terkendali dan aman untuk dikunjungi.

Selain itu, saat ini Indonesia sedang giat membangun berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik, yang membutuhkan investas yang besar. Dari sekitar US\$157 miliar yang dibutuhkan, hanya sedikit pembiayaan dari APBN. Hal ini berarti terbukanya kesempatan bisnis bagi sektor swasta.

Tag : *dpr*
Editor : Martin Sihombing

<http://industri.bisnis.com/read/20180525/12/799743/kerja-sama-indonesia-austria-diharapkan-dorong-kunjungan-turis-austria#.Wwemm8tfuv8.whatsapp>

Kerja Sama Indonesia-Austria Diharapkan Dorong Kunjungan Turis Austria

25 Mei/ 2018 12:04 WIB

Oleh :Indyah Sutrinigrum



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Juliari P. Batubara (keempat kanan) menyerahkan cendera mata kepada Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust, sesuai pertemuan di Wina, Austria, Selasa (22/5/2018). Kunjungan ke Siemens Mobility di Wina merupakan salah satu rangkaian kunjungan BKSAP ke Austria. - JIBI/Indyah Sutrinigrum

Bisnis.com, WINA -- Indonesia berharap kunjungan turis Austria semakin meningkat mengingat negara tersebut termasuk dalam daftar bebas visa yang diterapkan Pemerintah Indonesia.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR SB Wiryanti Sukamdani mengatakan kunjungan wisatawan dari Austria ke Indonesia masih sangat kecil, dengan angka berkisar 30.000 per tahun.



<http://industri.bisnis.com/read/20180525/12/799743/kerja-sama-indonesia-austria-diharapkan-dorong-kunjungan-turis-austria#.Wwemm8tfuv8.whatsapp>

"Sebaliknya, kunjungan dari Indonesia ke Austria cukup besar kendati wisatawan harus mengurus visa," ungkapnya kepada *Bisnis* di sela-sela kunjungan BKSAP ke Wina, Austria, pekan ini.

Menurut Yanti, Indonesia memiliki wisata yang lengkap yang dapat dinikmati oleh turis Austria seperti wisata bahari, budaya, kuliner, kekayaan alam, dan lainnya. Anggota dari Fraksi PDIP itu menilai tidak ada masalah konektivitas karena saat ini sudah banyak maskapai yang menghubungkan kedua negara.

"Banyak sekali tempat wisata yang dapat dinikmati oleh turis Austria, selain itu *connectivity* juga cukup baik. Oleh karena itu, kami sampaikan tolong untuk bisa mendorong warga Austria berkunjung ke Indonesia," ujarnya.

Saat ini, warga Austria dinilai lebih banyak berkunjung ke negara-negara tetangga mereka seperti Italia, Yunani, dan Eropa Timur. Sementara itu, perjalanan ke Indonesia dinilai masih mahal.

Yanti menuturkan salah satu perhatian Austria adalah bencana alam, seperti gunung meletus.

"Kalau untuk bencana memang di luar kekuatan kita, tetapi kalau harga mahal sudah ada solusi seperti adanya low cost carrier," lanjutnya.

Dengan semakin meningkatnya kerja sama antara Indonesia dan Austria, seperti dalam bidang transportasi dan energi, diharapkan dapat membantu mengerek kunjungan dari negara tersebut.

Yanti menerangkan salah satu tipikal turis Eropa adalah adanya kedekatan emosi dengan negara yang dikunjungi, contohnya turis dari Belanda lebih banyak datang ke Indonesia karena banyak dari mereka keturunan Indonesia. Dengan semakin banyaknya investasi dari Austria diharapkan semakin banyak orang mengenal Indonesia dan terdorong untuk berkunjung.

Di lain pihak, *stakeholder* pariwisata di Indonesia diharapkan juga meningkatkan promosi di kawasan Eropa, termasuk Austria, agar Indonesia bisa menjadi pilihan destinasi selain Singapura dan Thailand.

Kunjungan kerja BKSAP DPR ke Austria ini dipimpin oleh Juliari P. Batubara, dengan anggota Rofi' Munawar, Nazarudin Kiemas, SB. Wiryanti Sukamdani, Jalaludin Rakhmat, Dwie Arum Hadiatie, Syamsul Bachri, Rachel Maryam Sayidina, Melani Leimena Suharli, Mahfudz Abdurrahman, Achmad Farial, Akhmad Sahroni, Bara K. Hasibuan, dan Mukhtar Tompo.

Tag : *pariwisata, austria*
Editor : Annisa Margrit

<http://jakarta.bisnis.com/read/20180523/77/798534/laporan-dari-wina-lalu-lintas-jakarta-semrawut-ini-solusi-austria#.WwenFJOm6K4.whatsapp>

LAPORAN DARI WINA:

Lalu Lintas Jakarta Semrawut, Ini Solusi Austria

Oleh : *Indyah Sutrinigrum*

23Mei/ 2018 01:07 WIB



Cable car di La Paz, Bolivia. - Reuters/David Mercado

Bisnis.com, WINA - Austria menawarkan solusi cable cars sebagai salah satu upaya menata sistem transportasi publik di Jakarta.

Konsep tersebut mengemuka dalam pertemuan antara delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Kementerian Federal untuk Transportasi, Inovasi dan Teknologi Austria, di Wina, Austria, pada Selasa (23/5/2018).

Kepala Grup Staf untuk Transfer Teknologi dan Riset Keamanan Germot Grimm mengatakan teknologi cable cars pada awalnya dipakai untuk wisata ski, dapat aplikasikan menjadi transportasi publik. Penggunaan cable car untuk transportasi publik ini sudah dipakai di Meksiko.



<http://jakarta.bisnis.com/read/20180523/77/798534/laporan-dari-wina-lalu-lintas-jakarta-semrawut-ini-solusi-austria#.WwenFJOM6K4.whatsapp>

"Di Jakarta, cable cars dapat diaplikasikan dengan menghubungkan antara gedung bertingkat," ujarnya kepada delegasi BKSAP yang dipimpin Juliari P. Batubara.

BKSAP DPR RI melakukan kunjungan kerja di Austria, dan salah satu agendanya adalah pertemuan dengan Kementerian Federal untuk Transportasi, Inovasi dan Teknologi.

Menurut Grimm, penggunaan cable cars ini relatif mudah dalam pelaksanaannya, salah satunya tidak memerlukan lahan khusus. Apalagi Jakarta sudah memiliki banyak gedung bertingkat.

Penggunaan cable cars ini merupakan salah satu poin yang diusulkan dalam rencana kerja sama sektor transportasi Indonesia dan Austria.

Dalam kunjungan Federal Minister Doris Bures ke Indonesia pada 2014, ditandatangani dua MoU yaitu hydro power dan sektor transportasi.

Di sektor transportasi, Austria mengajukan kerja sama dalam air traffic management, penggunaan cable car di area urban, monitoring lalu lintas, dan perkeretaapian. Austria merupakan salah satu negara yang memiliki sistem transportasi publik terbaik di dunia.

Tag : *lalu lintas*

Editor : M. Syahrhan W. Lubis

<http://industri.bisnis.com/read/20180524/12/799217/indonesia-berharap-austria-terapkan-bebas-visa-bagi-wni#.WweoGx6UDrQ.whatsapp>

Indonesia Berharap Austria Terapkan Bebas Visa Bagi WNI
Oleh :Indyah Sutriningrum

24 Mei/ 2018 12:21 WIB



Delegasi BKSAP DPR yang dipimpin oleh Juliari P. Batubara (berdiri-kiri) dalam pertemuan dengan Task Force Untuk Presidency Austria di Wina, Austria Rabu (23/5). - Bisnis/Indyah Sutriningrum

Bisnis.com, WINA -- Indonesia berharap Austria dapat memberikan kesetaraan dalam pemberian visa kunjungan. Saat ini, Austria menikmati visa bebas kunjungan ke Indonesia sedangkan Indonesia harus mengurus visa untuk masuk ke negara tersebut.

Permintaan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR pada kunjungan ke Parlemen Austria dan Task Force untuk Presidency Austria.

Anggota BKSAP SB Wiryanti Sukamdani mengatakan saat ini Indonesia memberikan kebijakan bebas visa kunjungan untuk Austria.

"Tentu kami berharap Austria memberikan kebijakan bebas visa yang sama untuk Indonesia," ujarnya kepada anggota Parlemen Austria di Wina, Rabu (23/5/2018).

Dalam pertemuan dengan Task Force untuk Presidency Austria, anggota BKSAP Rachel Maryam Sayidina juga menyampaikan hal senada. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu menjelaskan Indonesia ingin mengajukan persamaan *treatment* dalam hal visa.



<http://industri.bisnis.com/read/20180524/12/799217/indonesia-berharap-austria-terapkan-bebas-visa-bagi-wni#.WweoGx6UDrQ.whatsapp>

"Apalagi, kami sampaikan dengan 250 juta penduduk, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk turisme," tuturnya.

Terkait hal ini, Ketua Task Force European Union dan Brexit Karl Heinz Tanner menjelaskan kebijakan visa ini adalah dari Uni Eropa (UE) yang beranggotakan 27 negara.

"Tentu masalah visa harus didiskusikan di tingkat UE," sebutnya kepada delegasi BKSAP DPR.

Kunjungan kerja BKSAP DPR ke Austria ini dipimpin oleh Juliari P. Batubara, dengan anggota Rofi' Munawar, Nazarudin Kiemas, SB. Wiryanti Sukamdani, Jalaludin Rakhmat, Dwie Arum Hadiatie, Syamsul Bachri, Rachel Maryam Sayidina, Melani Leimena Suharli, Mahfudz Abdurrahman, Achmad Farial, Akhmad Sahrani, Bara K. Hasibuan, dan Mukhtar Tompo.

Tag : *dpr, visa*

Editor : Annisa Margrit

<http://industri.bisnis.com/read/20180524/99/799195/dpr-berha-austria-bantu-cpo-indonesia-di-eropa#.WweoRPPwO8.whatsapp>

DPR BERHARAP AUSTRIA BANTU CPO INDONESIA DI EROPA
Oleh :Indyah Sutrinigrum

24 Mei/ 2018 11:24 WIB



Delegasi BKSAP DPR yang dipimpin oleh Juliari P. Batubara (berdiri-kiri) dalam pertemuan dengan Task Force Untuk Presidency Austria di Wina, Austria Rabu (23/5). Isu kelapa sawit merupakan salah satu topik yang dibawa dalam kunjungan kerja BKSAP DPR ke Austria. - Bisnis/Indyah Sutrinigrum

Bisnis.com, WINA -- DPR memperjuangkan agar *Crude Palm Oil* (CPO) tetap dapat diterima oleh pasar Uni Eropa (UE) menyusun rencana kawasan tersebut melarang CPO karena dianggap tidak ramah lingkungan.

Perjuangan tersebut disampaikan delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dalam kunjungannya ke Austria. UE memiliki target untuk menghapus biofuel dan bioliquid dari minyak sawit hingga 0% pada 2021.

Sementara itu, ekspor CPO ke Eropa pada 2016 berdasarkan data BPS mencapai hampir 1,4 juta ton dengan nilai US\$858 juta.

Dalam pertemuan dengan Parlemen Austria, Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubara berharap Austria dapat memperjuangkan produk CPO Indonesia ke tingkat UE mengingat CPO adalah salah satu andalan ekspor Indonesia.



<http://industri.bisnis.com/read/20180524/99/799195/dpr-berha-austria-bantu-cpo-indonesia-di-eropa#.WweogRPPwO8.whatsapp>

"Kami berharap UE tidak melarang produk CPO Indonesia," ujarnya pada kunjungan BKSAP di Parlemen Austria, Wina, Rabu (23/5/2018) waktu setempat.

Dalam pertemuan terpisah dengan Task Force for Presidency Austria, anggota BKSAP Rachel Maryam Sayidina menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan langkah koreksi terkait dengan pengelolaan CPO di Indonesia, baik dalam isu lingkungan, kesehatan, maupun deforestasi.

"Indonesia telah melakukan *improvement* dalam pengelolaan sawit di Indonesia dan kami berharap Parlemen UE dapat mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Taks Force untuk Presidency Austria Regina Rothmayr yang menerima delegasi BKSAP Indonesia mengatakan CPO menjadi perhatian di UE yang terus mencanangkan keberlanjutan lingkungan. Namun, pihaknya berupaya menyampaikan usulan Indonesia ini ke parlemen. Saat ini, Austria menjadi anggota Trio Presidensi Dewan UE bersama Estonia dan Bulgaria.

Kunjungan kerja BKSAP DPR ke Austria ini dipimpin oleh Juliari P. Batubara, dengan anggota Rofi' Munawar, Nazarudin Kiemas, SB. Wiryanti Sukamdani, Jalaludin Rakhmat, Dwie Arum Hadiatie, Syamsul Bachri, Rachel Maryam Sayidina, Melani Leimena Suharli, Mahfudz Abdurrahman, Achmad Farial, Akhmad Sahroni, Bara K. Hasibuan, dan Mukhtar Tompo.

Tag : *dpr, minyak sawit*

Editor : Annisa Margrit

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/15/883680/kunker-dpr-sinkronisasi-oss-jadi-kendala-di-kabupaten-tangerang>

Kunker DPR : Sinkronisasi OSS Jadi Kendala di Kabupaten Tangerang

Persoalan sinkronisasi layanan ijin usaha terintegrasi (online single submission/OSS) menjadi sorotan utama kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kerjasama Ekonomi Regional (KER) DPR ke Provinsi Banten.

John Andhi Oktaveri | 29 Januari 2019 20:31 WIB



Ketua Panja KER DPR, Juliani P Batubara menyerahkan cinderamata kepada Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar disaksikan anggota Panja masing-masing Jazuli Juwaini (PKS) dan Roy Suryo (Demokrat), Selasa (29 - 1)

Bisnis.com, TANGERANG—Persoalan sinkronisasi layanan ijin usaha terintegrasi (online single submission/OSS) menjadi sorotan utama kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kerjasama Ekonomi Regional (KER) DPR ke Provinsi Banten.



<https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/15/883680/kunker-dpr-sinkronisasi-oss-jadi-kendala-di-kabupaten-tangerang>

Ketua Panja KER Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Juliari P Batubara mengatakan bahwa sistem OSS merupakan kebijakan pemerintah yang sangat bagus. Hanya saja, karena belum sinkronnya sistem yang digunakan pemerintah di tingkat pusat dengan pemerintah daerah termasuk, Kabupaten Tangerang, maka hal itu menjadi kendala bagi masuknya investasi asing maupun dalam negeri.

Baca juga: Pembunuh Jurnalis dapat Remisi, Keadilan Ternodai

Padahal, ujarnya, melalui sistem integrasi itu semua pihak bisa melihat sistem perijinan secara menyeluruh dan termonitor dalam satu atap.

Apalagi, hingga kini sektor industri manufaktur masih tumbuh dengan baik di Indonesia. Buktinya pada tahun lalu, sektor tersebut memberi kontribusi hingga 20,27% terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Liliyana Natsir Pensiun dari Tepok Bulu

Juliari juga menambahkan bahwa sistem OSS harus terintegrasi dengan sistem peta tunggal (one single map). Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan zonasi karena di seluruh wilayah Indonesia hanya ada satu peta acuan atau peta tunggal.

"Sistem ini bisa dikontrol sehingga tumpang tindih perijinan bisa terminimalisir. Artinya, kendala yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus diketahui oleh pemerintah pusat," kata politisi PDIP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BKSAP tersebut di Kantor Bupati Tangerang, Selasa (29/1). Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Panja KER, Roy Suryo dari Fraksi Demokrat dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS.

Baca juga: Usia Pensiun Tamtama & Bintara jadi 58 Tahun

Selain bertemu para pejabat jajaran Pemkab Tangerang, para politisi itu juga melakukan kunjungan ke industri makanan ringan PT. Indofood Fritolay Makmur di kawasan industri cikupa Mas.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Provinsi Banten, Ahmed Zaki Iskandar mengakui selama ini kendala yang dihadapi sektor industri di wilayahnya tidak saja persoalan OSS, tapi juga persoalan ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam hal OSS, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan sinkronisasi sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). OSS, ujarnya, perlu disinkronkan dengan sistem Tata Ruang dan izin lokasi.



<https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/15/883680/kunker-dpr-sinkronisasi-oss-jadi-kendala-di-kabupaten-tangerang>

”Kita menemukan dilapangan ketidaksesuaian data lapangan dari para pelaku usaha sehingga hal ini menjadi kendala pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan,” katanya.

Karena itu dia berharap kunjungan kerja anggota Panja KER tersebut akan bisa membawa aspirasi rakyat kabupaten berpenduduk tiga setengah juta jiwa tersebut.

Dia mengakui sebagai kabupaten bertajuk seribu industri, Tangerang merupakan kawasan industri dengan pertumbuhan lima tertinggi di Indonesia.

Tag : *dpr, tangerang, online single submission*

Editor : Rustam Agus

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/15/883448/panja-ker-bksap-dpr-kunjungan-kerja-ke-provinsi>

Panja KER BKSAP DPR Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten

Untuk memastikan sektor industri di daerah mampu bersaing secara global, sejumlah anggota Panitia Kerja (Panja) Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) DPR hari ini, Selasa (29/1/2019) melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri di Provinsi Banten.

John Andhi Oktaveri | 29 Januari 2019 12:20 WIB



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Juliani P. Batubara (kiri) dan Witjaksana Adji, Deputy Chief of Mission Kedubes RI dan Perwakilan Tetap di PBB dan Organisasi Internasional Lain di Wina, Austria mendengarkan paparan dari Siemens, di fasilitasnya di Wina, Selasa (22/5/2018). Kunjungan ke Siemens Mobility di Wina merupakan salah satu rangkaian kunjungan BKSAP ke Austria. - JIBI/Indyah Sutringrum

Bisnis.com, TANGERANG - Untuk memastikan sektor industri di daerah mampu bersaing secara global, sejumlah anggota Panitia Kerja (Panja) Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) DPR hari ini, Selasa (29/1/2019) melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri di Provinsi Banten.



<https://kabar24.bisnis.com/read/20190129/15/883448/panja-ker-bksap-dpr-kunjungan-kerja-ke-provinsi>

Selain bertemu dengan Bupati Tangerang Zaki Iskandar dan jajaran Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Tangerang, rombongan yang dipimpin oleh Ketua Panja KER, Juliari P Batubara juga akan berkunjung ke Kawasan Industri Cikupa Mas atau Kawasan Industri Balaraja.

Turut dalam rombongan kunjungan kerja selama dua hari itu di antaranya Anggota Panja KER Jazuli Juwaini (PKS) dan Roy Suryo dari Fraksi Demokrat DPR.

BKSAP menyebut kunjungan kerja itu dilakukan sebagai bentuk fungsi kedewanan dalam menyerap aspirasi pelaku industri, terutama di sektor industri manufaktur.

BKSAP DPR merupakan alat kelengkapan bersifat tetap yang memiliki mandat diplomasi parlemen. Dalam menjalankan fungsi tersebut, visi diplomasi DPR diarahkan pada penguatan diplomasi Pemerintah RI.

Dalam hal ini BKASP kemudian membentuk Panja KER untuk mendukung visi diplomasi ekonomi. Tujuannya agar pelibatan pemerintah dalam kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi, baik melalui MoU bilateral, Fee Trade Agreements maupun peleburan dalam kawasan ekonomi bersama, selalu merefleksikan kepentingan rakyat, menurut BKSAP.

Memasuki tahun 2019, industri manufaktur masih menjadi unggulan Indonesia. Tahun lalu, industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 20,27% terhadap perekonomian nasional.

Oleh karena, itu pemerintah masih fokus pada pengembangan industri itu untuk meningkatkan daya saing nasional di tengah liberalisasi ekonomi.

Tag : *dpr*

Editor : Nancy Junita

BKSAP DPR Dorong Pemprov NTB Kembangkan Potensi

19-09-2019 / B.K.S.A.P.

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/25966/t/BKSAP+DPR+Dorong+Pemprov+NTB+Kembangkan+Potensi>



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari P. Batubara. Foto: Agung/mr

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Juliari P. Batubara mengatakan perkembangan ekonomi dunia saat ini telah mengarah pada tatanan global. Perdagangan bebas telah menjadi arus utama sistem perdagangan internasional dan meningkatkan interdependensi antar negara. Menurutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu mempersiapkan dan mengembangkan potensi, sehingga dapat berdaya saing untuk meningkatkan perekonomian daerah.

“Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan fasilitas pendukung sebagai upaya kesiapan dalam penyelenggaraan event kelas dunia,” katanya saat memimpin pertemuan tim Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, guna memperoleh gambaran kesiapan dan daya saing daerah-daerah di Indonesia dalam kerangka kerja sama regional dan liberalisasi perdagangan, di Mataram, NTB, Selasa (17/9/2019).



Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal telah turut ambil bagian dalam liberalisasi ekonomi dunia. Meskipun administrasi pemerintahan berganti, namun visi ekonomi perdagangan Indonesia tetap berorientasi pada kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro pasar. Indonesia ingin menjamin bahwa perdagangan dunia tetap berpijak pada mekanisme perdagangan yang seimbang dan non-diskriminatif.

“Di tataran regional, kerja sama ekonomi ASEAN telah pula diarahkan menuju pasar tunggal dan basis produksi bersama melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015. Meskipun liberalisasi perdagangan berorientasi pada pasar, campur tangan pemerintah tetap dibutuhkan,” jelas Juliari. Pemberlakuan MEA di tahun 2015 tentunya menjadi pemicu peningkatan arus lalu lintas barang, jasa dan tenaga kerja antar negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu upaya memperkuat basis perekonomian daerah adalah melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Keberadaan KEK menjadi signifikan untuk meningkatkan investasi, perdagangan dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan KEK yang ditandai upaya-upaya untuk melengkapi ketersediaan infrastruktur, keberadaan industri pendukung, dan efektifitas pembentukan modal tentunya berdampak bagi pembangunan daerah dimana KEK tersebut diberlakukan,” papar Juliari.

KEK adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Maksud pengembangan KEK adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Legislator dapil Jawa Tengah I itu menambahkan, fungsi pengawasan DPR RI menjadi suatu kebutuhan untuk menjamin bahwa pelibatan Indonesia dalam negosiasi antar pemerintah dan kerja sama ekonomi antar negara yang dibentuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini untuk memastikan pula Indonesia dapat mengambil peran aktif dan manfaat dari kerja sama ekonomi kawasan.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI itu kebijakan desentralisasi yang diterapkan Indonesia telah membuka peluang peningkatan daya saing antar daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (as/sf)

Tim Panja BKSAP DPR Tinjau Progres Pembangunan KEK Mandalika

<http://peloporkrimsus.com/bksap-dpr-ri-diprediksi-ntb-usai-ajang-motogp-akan-jadi-tempat-wisata-yang-mendunia/>

<https://www.realitarakyat.com/2019/09/17/tim-panja-bksap-dpr-tinjau-progres-pembangunan-kek-mandalika/>



Mataram, Peloporkrimsus.com – Rombongan tim delegasi panitia kerja (Panja), kerjasama ekonomi regional, badan kerjasama antar perlemen (BKSAP) DPR RI selama 17/9/2019, meninjau progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok tengah. Rombongan tim delegasi panitia kerja (Panja) dipimpin Wakil Ketua BKSAP, “Juliari Batubara” didampingi Gubernur Ntb Dr. H Zulkieflimansyah dalam kunjungan di lokasi sirkuit MotoGP Mandalika Lombok tengah, mengungkapkan kekagumannya terhadap progres pembangunan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan super prioritas oleh pemerintah pusat tersebut. Menurut Juliari Batubara, “sebentar lagi NTB akan menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian dunia”.

Hal itu karena akan segera terwujudnya pembangunan Sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

“Sirkuit MotoGP Mandalika ini sangat keren, desainnya luar biasa, ini sungguh keren sekali,” ungkapnya usai menonton video presentasi di Kantor ITDC Mandalika. (Mus)

BKSAP DPR : Gara-gara Karhutla, Diplomasi Kelapa Sawit Makin Runyam

Dewan Perwakilan Rakyat gerah dengan berulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena kian menyulitkan strategi diplomasi kelapa sawit Indonesia di luar negeri.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/99/1149985/bksap-dpr-gara-gara-karhutla-diplomasi-kelapa-sawit-makin-runyam>



Bisnis.com, MATARAM -- Dewan Perwakilan Rakyat gerah dengan berulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena kian menyulitkan strategi diplomasi kelapa sawit Indonesia di luar negeri.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Peter Batubara mengakui sulitnya menangkis kampanye negatif produk kelapa sawit, terutama di benua Eropa. Menurut dia, diplomasi semakin bertambah sukar tatkala karhutla berskala cukup besar membara akhir-akhir ini.

“Orang-orang ini [pelaku pembakaran lahan] tak bisa dibilangin. Saya tidak ngomong baik-baik saja tentang kelapa sawit, tapi susah memang kalau [berdiplomasi] di Eropa,” katanya usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, Selasa (17/9/2019). Di negara-negara Uni Eropa, kalangan legislator mengambil bagian dalam upaya memperburuk citra industri kelapa sawit Indonesia.

Pada April 2017, Parlemen Eropa meloloskan resolusi Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang merekomendasikan penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap karena dituduh memicu deforestasi dan eksekusi negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi



manusia. Lambat laun, eksekutif Uni Eropa pun mulai terpancing untuk mendiskriminasi kelapa sawit. Komisi Eropa memperbaharui Renewable Energy Directive (RED) pada Maret 2019 dengan target menihilkan penggunaan sumber energi berbahan kelapa sawit hingga 0% pada 2030.

Juliari menilai upaya meyakinkan kolega parlemen di Eropa akan sia-sia bila fakta di Indonesia bertolak belakang. Di Tanah Air, aturan perundang-undangan telah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi pelaku masih mempraktikkannya untuk membuka areal perkebunan.

Seharusnya, tambah Juliari, pemerintah memberikan sanksi tegas kepada para pembakar lahan. Bila pelakunya adalah korporasi, semestinya tidak cukup sekadar memberikan teguran atau menyegel lahan. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sanksi tegas saja, cabut izinnya. Kan takut,” ujarnya.

Juliari tambah menyesalkan pembakaran lahan apabila bermotif untuk memperluas perkebunan kelapa sawit. Ketimbang melakukan ekstensifikasi lahan, dia berpendapat seharusnya pelaku usaha kepala sawit Indonesia semakin serius menggarap hilirisasi.

Saat ini, kata dia, harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) semakin dibanderol murah. Sebaliknya, produk hilir kelapa sawit semisal oleokimia bernilai tambah lebih besar plus pasarnya masih terbuka lebar. “Kalau sekarang, industri hilir kurang jalan, lahan juga terlalu luas,” tutur Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (18/9/2019) pukul 09.00 WIB, titik panas di seantero Indonesia tercatat sebanyak 2.719 titik. Adapun, lahan terbakar dari Januari-Agustus seluas 328.724 hektara (ha) dan dipastikan membengkak karena belum memasukkan data September.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo sependapat bahwa motif pembakaran lahan adalah untuk membuka kebun. Faktanya, kata dia, 80% lahan bekas terbakar kemudian terkonversi menjadi areal perkebunan. “Berdasarkan data yang saya kumpulkan semenjak 6 bulan dilantik, karhutla disebabkan oleh manusia,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Doni menilai pengetatan izin dapat menjadi salah satu pola pencegahan karhutla. Pemerintah daerah selaku pemberi izin wajib pula melakukan pengawasan hingga memberikan sanksi administratif bagi pelanggar. “Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen,” tutur mantan Komandan Jenderal Kopassus ini.

https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20190315/90/900368/laporan-dari-hongaria-perdagangan-meredup-parlemen-cari-celah-peningkatan-ekspor?usqp=mq331AQCCAE%3D&_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s

LAPORAN DARI HONGARIA: Perdagangan Meredup, Parlemen Cari Celah Peningkatan Ekspor

15 Mar 2019, 12:52 WIB - Oleh: **Hendri Tri Widi Asworo**



Bisnis.com, BUDAPEST— Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan lawatan ke Hongaria. Berbagai agenda pertemuan dilakukan dengan pemangku kepentingan di bidang ekonomi.

Salah satunya melakukan pertemuan dengan anggota Parlemen Hongaria, yaitu Lajos Olah selaku Ketua Grup Persahabatan Indonesia-Hongaria dan Istvan Simicsko selaku Ketua Grup Persahabatan Asean-Hongaria.

Dalam pertemuan makan siang, Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional BKSAP DPR RI Juliari Batubara menyampaikan bahwa Hongaria adalah mitra dagang yang cukup penting bagi Indonesia di Eropa.

Namun demikian, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir volume perdagangan antara kedua negara tercatat mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting bagi parlemen kedua negara untuk duduk bersama dan berdialog untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan dalam perdagangan kedua negara.



https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.bisnis.com/amp/read/20190315/90/900368/laporan-dari-hongaria-perdagangan-meredup-parlemen-cari-celah-peningkatan-ekspor?usqp=mq331AQCCAE%3D&_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s

“Di samping itu kedua negara juga hendaknya tetap mengutamakan pendekatan multilateral dan mengutamakan dialog yang didasari oleh saling menghormati dan menghargai antar negara dalam mencari solusi bagi permasalahan perdagangan internasional, terutama di tengah menguatnya sentimen proteksionisme dan perang dagang antara dua negara adidaya yaitu AS dan China,” ujarnya di Gedung Parlemen Hongaria, Kamis (14/3/2019) sore.

Menanggapi Juliari, Istvan Simicsko mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis dan penting. Oleh karena itu, dia sepakat bahwa kedua negara harus aktif berkomunikasi dalam rangka meningkatkan hubungan dagang dan menyelesaikan permasalahan seputar perdagangan.

Menurutnya, pemerintah Hongaria menyediakan insentif pajak dan fiskal ataupun insentif lainnya bagi perusahaan Indonesia yang ingin melakukan investasi di negara bangsa Magyar tersebut.

“Demikian halnya jika ada perusahaan Hongaria yang ingin melakukan investasi, terutama jika berkaitan dengan usaha berbasis teknologi,” ujarnya.

Berdasarkan data Eurostat, nilai perdagangan RI-Hongaria selama 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) mengalami *rebound*. Pada 2015 nilai perdagangan mencapai 197,38 juta euro dan menurun signifikan pada 2016 sebesar 7,6% menjadi 182,38 juta euro sebagai imbas krisis di Eropa.

Namun, dalam jangka setahun menguat kembali sebesar 6,20% menjadi 193,69 juta euro. Akan tetapi, pada kurun waktu yang sama, ekspor RI ke Hongaria menunjukkan tren nyaris stagnan sebesar 0,65% per tahun.

Sebaliknya impor RI dari Hongaria menunjukkan tren pertumbuhan negatif sebesar 6,82% per tahun, dengan surplus perdagangan yang selalu berada di pihak Indonesia yaitu senilai 118,67 juta euro (2017).

Sementara jika dilihat secara kumulatif, nilai perdagangan RI-Hongaria untuk periode Januari s/d November 2018 tercatat 176,11 juta euro, dari jumlah ini ekspor RI ke Hongaria tercatat senilai 138,77 juta dan impor RI dari Hongaria senilai 37,34 juta euro. Angka tersebut menunjukkan adanya surplus perdagangan bagi pihak Indonesia sebesar 101,43 juta euro.

Editor: Hendri Tri Widi Asworo

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190314/12/899709/laporan-dari-hongaria-ini-peluang-ekspor-dan-investasi-di-budapest>

LAPORAN DARI HONGARIA : Ini Peluang Ekspor dan Investasi di Budapest

Sejumlah prospek investasi dan ekspor bisa dilakukan pengusaha Indonesia di Hongaria, yang juga dikenal sebagai negara bangsa Magyar.

Hendri Tri Widi Asworo | 14 Maret 2019 15:27 WIB



Area Manager Department for International Affairs Kadin Hongaria Vegvari Kristof (kanan), Deputy Director Department for International Affairs Flora Palmay (kiri), dan President of the Committee Attila Galambos (tengah) saat audiensi dengan Ketua dan Anggota BKSAP-DPR RI - Bisnis / Hendri T. Asworo

Bisnis.com, BUDAPEST— Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Hongaria.

Dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa sejumlah prospek investasi dan ekspor yang bisa dilakukan di negara bangsa Magyar tersebut.

Vegvari Kristof, Area Manager Department for International Affairs Hungarian Chamber of Commerce and Industry Hongaria, mengatakan Hongaria banyak mengimpor bahan makanan dari Indonesia, karena produk tersebut tidak ada di Eropa.

“Misal produk kelapa, kakao, dan potensinya masih besar apabila ada pengusaha Indonesia yang ingin meningkatkan eksportnya,” ujar Vegvari, Rabu (13/3/2019) sore.



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190314/12/899709/laporan-dari-hongaria-ini-peluang-ekspor-dan-investasi-di-budapest>

Selain itu, sambungnya, apabila pengusaha Indonesia ingin membuka usaha kuliner khas di sini juga terbuka lebar, terutama kedai kopi asal Indonesia yang sangat terkenal di Eropa khususnya Hongaria.

“Kopi Indonesia sangat terkenal di sini, karena kebanyakan impor dari Indonesia. Nah, itu peluang untuk investasi,” terangnya.

President of the Committee Kadin Hongaria Attila Galambos menyampaikan, volume perdagangan kedua negara pada tahun lalu sekitar \$342 juta.

Nilai tersebut masih relatif kecil padahal kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri kedua negara telah dilakukan sejak 1985. “Ini ke depan perlu ditingkatkan,” tambah Attila.

Anggota Panja Kerja Sama Regional yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie menilai ekspor Indonesia ke Hongaria masih perlu ditingkatkan. Terutama, tegas Dwie, untuk komoditas tertentu seperti kelapa dan produk olahannya mengingat ekspor Indonesia belum bisa memenuhi semua permintaan di negara tersebut.

“Ini karena tingginya biaya ekspor karena letak geografis yang jauh antara Hongaria dan Indonesia dan masih bergantung pengiriman barang melalui jalur laut, kami tertarik untuk mendengar pandangan Kadin Hongaria untuk mencari solusi alternatif permasalahan ini,” terang Dwie.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190314/19/899695/laporan-dari-hongaria-bksap-dpr-ri-sambangi-kamar-dagang-hongaria>

LAPORAN DARI HONGARIA : BKSAP-DPR RI Sambangi Kamar Dagang Hongaria

BKSAP-DPR RI bertemu kamar dagang Hongaria dan melakukan studi banding terkait sejumlah hal yang bisa diterapkan di Indonesia.

Hendri Tri Widi Asworo | 14 Maret 2019 14:27 WIB



Pertemuan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Kadin Hongaria. (kiri-kanan) Area Manager Department for International Affairs Kadin Hongaria Vegvari Kristof, Anggota Panja Jazuli Juwaini, Deputy Director Department for International Affairs Flora Palmay, President of the Committee Attila Galambos, Wakil Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional Dave Akbarshah Fikarno, Anggota Panja Dwie Aroem Hadiatie, Jon Erizal. - Bisnis/Hendri T. Asworo

Bisnis.com, BUDAPEST— Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertemu dengan Kadin Hongaria. Pertemuan dilangsungkan dalam rangka peningkatan kerja sama ekonomi regional.

Pertemuan dilakukan di kantor *Hungarian Chamber of Commerce and Industry* atau kamar dagang Hongaria, Rabu (13/3/2019) sore.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP sekaligus Wakil Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Dave Akbarshah Fikarno, Anggota Panja yang juga Anggota



<https://kabar24.bisnis.com/read/20190314/19/899695/laporan-dari-hongaria-bksap-dpr-ri-sambangi-kamar-dagang-hongaria>

Komisi VI Dwie Aroem Hadiatie, Anggota Panja yang juga Anggota Komisi XI Jon Erizal, dan Anggota Panja yang juga Anggota Komisi I Jazuli Juwaini.

Dari pihak Kamar Dagang Hongaria hadir President of the Committee Attila Galambos, Deputy Director Department for International Affairs Flora Palmay, dan Area Manager Department for International Affairs Vegvari Kristof.

Dalam pertemuan tersebut dibahas isu peningkatan perdagangan kedua negara, prospek komoditas yang dibutuhkan kedua negara, pembangunan infrastruktur, investasi, hingga upaya peningkatan usaha kecil menengah.

“Tujuan dari kunjungan ini sebagai studi banding mengenai bagaimana kerja sama ekonomi regional berjalan di kawasan lain, selain di kawasan Asia Tenggara. Hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana kerja sama ekonomi regional bisa secara optimal menguntungkan negara,” kata Dave.

Sementara itu, Jon Erizal tertarik untuk mengetahui skema pembiayaan infrastruktur di Hongaria, karena memiliki fasilitas terbaik dan terdepan di kawasan Eropa Tengah tersebut.

“Ini penting mengingat Indonesia tengah menggalakkan pembangunan infrastruktur sehingga perlu data pembanding. Terutama untuk harga pembangunan infrastruktur,” ujar Jon.

Dwie Aroem menilai ekspor Indonesia ke Hongaria masih perlu ditingkatkan, terutama untuk komoditas tertentu, seperti kelapa dan produk olahannya mengingat ekspor Indonesia belum bisa memenuhi semua permintaan di negara tersebut.

“Ini disebabkan tingginya biaya ekspor karena letak geografis yang jauh antara Hongaria dan Indonesia dan masih bergantung pengiriman barang melalui jalur laut, kami tertarik untuk mendengar pandangan Kamar dagang Hongaria untuk mencari solusi alternatif permasalahan ini,” terang Dwie.

Jazuli Juwaini menambahkan, legislatif ingin mendengarkan upaya apa yang perlu dilakukan kedua negara dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara.

Selain itu, sambung Jazuli, untuk mengetahui apa yang dilakukan Kamar dagang Hongaria dalam mendorong usaha kecil hingga bisa tumbuh menjadi usaha besar di kawasan.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190515/19/922776/laporan-dari-italia-parlemen-italia-dan-indonesia-sepakat-perkokoh-kerja-sama>

LAPORAN DARI ITALIA: PARLEMEN ITALIA DAN INDONESIA SEPAKAT PERKOKOH KERJA SAMA

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bertemu dengan Parlemen Italia untuk memperkuat kerja sama antarparlemen.

Siti Munawaroh | 15 Mei 2019 09:06 WIB



Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR bertemu dengan Parlemen Italia di Gedung Palazzo Montecitorio, Selasa (14/05/2019) sore di Roma Italia. Parlemen dari kedua negara sepakat untuk memperkokoh kerja sama guna meningkatkan hubungan Indonesia-Italia. JIBI/Bisnis - Siti Munawaroh

Bisnis.com, ROMA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bertemu dengan Parlemen [Italia](#) untuk memperkuat kerja sama antarparlemen.

Pertemuan itu dilakukan di Gedung Parlemen Italia (Palazzo Montecitorio), Selasa (14/05/2019) sore, dalam rangkaian lawatan BKSAP DPR-RI ke Roma Italia.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua BKSAP Juliari Batubara, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Dave Akbarshah Fikamo.

Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, turut mendampingi pertemuan delegasi BKSAP dengan Parlemen Italia.

Adapun dari Parlemen Italia disambut oleh Ketua Komisi III (Urusan Hubungan Luar Negeri dan Komunitas) Marta Grande dan Presiden Parliamentary Friendship Group Italy-Indonesia Daniele del Grosso.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190515/19/922776/laporan-dari-italia-parlemen-italia-dan-indonesia-sepakat-perkokoh-kerja-sama>

Kedua parlemen sepakat untuk memperkokoh kerja sama antarpemerintah. Peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dan Italia pada 2019 ini menjadi momentum penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Juliari mengungkapkan pertemuan ini didasari semangat untuk mempererat hubungan kedua negara, mengingat Italia memiliki sejumlah keunggulan komparatif.

"Ingin menggali pengalaman di bidang - bidang yang menjadi keunggulan komparatif Italia, termasuk di sektor pariwisata, lingkungan hingga pendidikan," ujar Juliari yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja Sama Ekonomi Regional (KER).



Pada kesempatan tersebut, Martha Grande menyambut baik kehadiran Delegasi BKSAP ke Parlemen Italia dan siap mempererat hubungan parlemen kedua negara baik dalam forum bilateral maupun antarpemerintah.

Martha berharap hubungan Italia-Indonesia semakin erat, ditandai komitmen erat Italia untuk membentuk grup persahabatan antarpemerintah.

"Karena parlemen baru maka akan dibentuk grup persahabatan untuk Indonesia," tukasnya. Sementara itu, Danielle del Grosso menegaskan kesiapannya untuk membentuk kelompok persahabatan antarpemerintah Italia-Indonesia.

Untuk diketahui Parlemen Italia saat ini adalah hasil pemilu 2018, sehingga kelompok persahabatan antarpemerintah perlu diperbarui.

Danielle mengungkapkan telah ada minat dari 10-15 anggota parlemen untuk bergabung. Dalam pertemuan itu, kedua parlemen juga berbagi pandangan terkait isu SDGs dan perubahan iklim.



<https://kabar24.bisnis.com/read/20190515/19/922776/laporan-dari-italia-parlemen-italia-dan-indonesia-sepakat-perkokoh-kerja-sama>

Nurhayati menyampaikan bahwa Indonesia pendukung SDGs dan DPR RI telah dua kali menginisiasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPSD). Nurhayati mengundang Parlemen Italia untuk berpartisipasi pada WPSD 2019.

"Mereka antusias dan semangat sekali untuk mempererat hubungan kerja sama Italia Indonesia. Mereka juga tertarik untuk berkunjung ke Indonesia menghadiri WPSD. Jadi misi ini sukses, karena gayung bersambut," jelas Nurhayati.

Nilai perdagangan Indonesia dengan Italia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2016. Pada 2018, total perdagangan mencapai US\$ 3,7 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar US\$ 80,7 juta.

Sejumlah komoditas utama ekspor Indonesia ke Italia di antaranya batubara, minyak kelapa sawit, kopi, garmen, sepatu kulit, dan sebagainya.

Terkait kelapa sawit, Dave Akbarshah menguraikan bahwa selama ini kontribusi kelapa sawit terhadap perdagangan Indonesia Italia cukup positif.

Namun, lanjut Dave, kelapa sawit Indonesia mendapatkan tantangan berupa kampanye negatif dan kebijakan diskriminatif regulasi penerapan perintah energi terbarukan Uni Eropa (RED II).

"Padahal perkembangan kelapa sawit di Indonesia semakin menunjukkan progres positif dalam hal-hal sustainability seperti ISPO hingga luasan lahan yg ditanami kembali," tegasnya.

Italia adalah konsumen CPO terbesar ketiga di Indonesia, setelah Belanda dan Spanyol, setidaknya hingga 2017-2018. Hingga April 2018, Italia membukukan impor CPO dari Indonesia sebesar US\$ 215,4 juta.

"Kami menjelaskan bahwa isu yang dilontarkan Uni Eropa itu tidak benar. Bagaimana mungkin kita ini merusak lingkungan. Padahal Indonesia sangat berkomitmen mengembangkan mekanisme produksi dan produk CPO yang berkelanjutan," tutup Nurhayati.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190515/9/922686/laporan-dari-italia-bksap-dpr-ri-kunjungi-italian-trade-agency>

LAPORAN DARI ITALIA: BKSAP-DPR RI KUNJUNGI ITALIAN TRADE AGENCY

Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertemu dengan Italian Trade Agency (ITA). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kerja sama ekonomi regional.

Siti Munawaroh | 15 Mei 2019 03:05 WIB



Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) mengunjungi Italy Trade Agency di Roma, Selasa (14/05/2019) sore. Kunjungan ini dalam rangka menggali potensi kerja sama dan bisnis untuk memperkuat kerja sama ekonomi regional - Bisnis/Siti Munawaroh

Bisnis.com, ROMA – Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertemu dengan Italian Trade Agency (ITA). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kerja sama ekonomi regional.

ITA merupakan badan pemerintah yang mendukung pengembangan bisnis perusahaan Italia di luar negeri dan mempromosikan investasi asing di Italia. Pertemuan dilakukan di kantor pusat ITA di Roma, Selasa (14/5/2019) sore.

Delegasi BKSAP dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Anggota BKSAP dan Anggota Komisi IV. Anggota BKSAP lainnya yang hadir yakni Mercy Christy Barends (Anggota Komisi VII), Muhidin M. Said (Anggota Komisi V) Jerry Sambuaga (Anggota Komisi I).

Selain itu Dwita Ria Gunadi (Anggota Komisi X), Susi Marleny Bachsin (Anggota Komisi IV), Roy Suryo (Anggota Komisi I), dan Siti Masrifah (Anggota Komisi IX).

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190515/9/922686/laporan-dari-italia-bksap-dpr-ri-kunjungi-italian-trade-agency>

Dari pihak ITA hadir Managing Director Roberto Luongo, Direktur Departemen Marketing Antonino Laspina, Direktur Koordinator Promosi Made in Italia Ines Aronadia dan Giuseppe Federico dari Kantor Promosi dan Investasi.

Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan seiring peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Italia, masih banyak peluang kerja sama yang potensial untuk dikembangkan guna memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.

"Maksud kunjungan kami ke kantor ITA ini untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai potensi-potensi kerja sama, termasuk mendengar secara langsung mengenai minat, tantangan dan peluang dari pelaku usaha Italia untuk berusaha di Indonesia, dan sebaliknya," kata Agustina.

Menurut Agustina, pihaknya juga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai langkah Italia dalam meningkatkan kemudahan berbisnis (*ease of doing business*). Pasalnya, pada 2018, Italia berada di urutan 51 daftar negara dengan kemudahan berbisnis dari 190 negara berdasarkan rangking World Bank.



Sementara itu, Roberto Luongo menuturkan, pihaknya menyambut baik pertemuan ini mengingat banyak peluang kerja sama ekonomi yang potensial untuk ditingkatkan lagi antara kedua negara.

"Potensi untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara sangat besar. Italia memiliki keunggulan di bidang teknologi dan kami menawarkan kolaborasi kepada Indonesia untuk memperkuat teknologi, seperti high and medium technology dalam pemrosesan bahan material mentah yang dimiliki Indonesia," ujar Roberto.

Sektor lain yang potensial untuk ditingkatkan kerja samanya adalah industri kimia dan produk kimia, dan consumer goods, dan produk kulit dan aksesoris.



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190515/9/922686/laporan-dari-italia-bksap-dpr-ri-kunjungi-italian-trade-agency>

Berdasarkan data ITA, sekitar 35 persen investasi perusahaan Italia di Indonesia ditanamkan di sektor manufaktur, 35 persen sektor pertambangan, 13 persen sektor transportasi dan logistik, sisanya 17 persen ke sektor-sektor lainnya.

Beberapa perusahaan besar Italia yang berinvestasi di Indonesia di antaranya Intesa San Paolo, Telecom, Techint, Eni, Pirelli, dan Enel.

Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beragam perusahaan Italia ada di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US\$32,09 juta (per 2018) dengan 187 proyek.

ITA, lanjut Roberto, menyediakan informasi, bantuan, konsultasi, promosi dan pelatihan kepada bisnis kecil dan menengah dari Italia. ITA mempromosikan kehandalan produk made of Italy di dunia melalui berbagai upaya.

ITA mendapatkan bujet promosi dari pemerintah sebesar 183,5 juta Euro pada 2019. Bermarkas di Roma, ITA memiliki 64 kantor di luar negeri yang tersebar di 77 negara.

"Aktivitas utama kami adalah promosi, menarik investasi dan marketing. Kami memberikan pelatihan gratis bagi pelaku bisnis kecil dan menengah, termasuk pelatihan mengenai digital marketing. Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi pelaku usaha. Ini yang kami lakukan," tutupnya.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190515/19/922959/laporan-dari-italia-kbri-roma-dorong-peningkatan-nilai-perdagangan-indonesia-italia>

LAPORAN DARI ITALIA : KBRI Roma Dorong Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia - Italia

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Italia berupaya mendorong meningkatnya nilai perdagangan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Italia. Hal itu dilakukan seiring dengan prospek investasi dan ekspor yang bisa dilakukan di negara Spagheti tersebut.

Siti Munawaroh | 15 Mei 2019 14:49 WIB



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf bertukar cinderamata dengan Dubes RI untuk Italia Esti Andayani di Wisma Indonesia Roma. KBRI Roma bertekad untuk mendorong meningkatnya nilai perdagangan dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Italia. - Bisnis/Siti Munawaroh

Bisnis.com, ROMA – Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Italia berupaya mendorong meningkatnya nilai perdagangan dan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan **Italia**. Hal itu dilakukan seiring dengan prospek investasi dan ekspor yang bisa dilakukan di negara Spagheti tersebut.

Dubes RI untuk Italia Esti Andayani mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir Italia memiliki kebijakan 'Melihat ke Timur' dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi.

"Dengan kebijakan yang kemungkinan sejak 5 tahun lalu, Italia mungkin ingin memperluas pasarnya. Ini mengingat pasar di sini mulai jenuh untuk produk-produk mereka dan mereka mulai melihat ke Timur, dan Asean berkembang sangat stabil," kata Dubes Esti kepada **Bisnis**, di sela-sela acara jamuan buka puasa dengan Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Wisma Indonesia di Roma, Selasa (14/5/2019) malam.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190515/19/922959/laporan-dari-italia-kbri-roma-dorong-peningkatan-nilai-perdagangan-indonesia-italia>



Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP Dave Akbarshah Fikarno, dan anggota delegasi di antaranya Muhidin M. Said, Roy Suryo, Jerry Sambuaga dan Rofi Munawar.

Delegasi BKSAP DPR RI bertfoto bersama dengan Dubes RI untuk Italia Esti Andayani usai jamuan Buka Puasa di Wisma Indonesia Roma, Selasa (14/05/2019) malam waktu Roma./Bisnis-Siti Munawaroh

Esti menuturkan Italia membentuk Asosiasi Asean-Italia yang bertujuan untuk mendekatkan diri ke negara-negara Asean. Tidak hanya pelaku bisnis di negara ini, Italia juga mengajak pemikir dan mahasiswa di negaranya untuk mengenal lebih jauh ke Timur.

"Sekarang kami tidak selalu menganggap investasi menjadi penting meskipun investasi di masa saya meningkat cukup tinggi. Justru sekarang saya melihatnya, mampu tidak kita [pelaku usaha Indonesia] berinvestasi di Italia. Yang penting lagi perdagangannya harus meningkat," papar Dubes Esti.

Nilai perdagangan Indonesia dengan Italia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2016. Saat ini total perdagangan mencapai US\$3,7 miliar dengan surplus bagi Indonesia senilai US\$80,7 juta (per 2018).

"Sekarang baru sekitar US\$ 3 miliar lebih, kita harusnya bisa lebih tinggi lagi karena Italia ini nomor tiga di Eropa, setelah Jerman dan Belanda. Peluangnya masih banyak sekali. Saya pikir ini yang harus kita kejar," tegasnya.

Dubes Esti mencontohkan, salah satu produk Indonesia yang memiliki prospek cerah untuk pasar ekspor Italia adalah produk kosmetik yakni bulu mata palsu. Nilai penjualan produk



<https://kabar24.bisnis.com/read/20190515/19/922959/laporan-dari-italia-kbri-roma-dorong-peningkatan-nilai-perdagangan-indonesia-italia>

bulu mata palsu buatan Indonesia di Italia pada tahun ini diperkirakan mencapai hingga US\$8 juta.

Pada 2017, nilai transaksi penjualan produk bulu mata palsu ini hanya US\$ 5 juta, lalu meningkat mencapai US\$8 juta pada tahun lalu.

"Tidak pernah ada orang yang menyangka bulu mata palsu asal Purbalingga laku sekali di Italia. Setelah melihat itu, kami berpikir ada produk-produk kecantikan lainnya dari Indonesia yang potensial untuk diekspor dan itu mulai diperkenalkan. Kami juga mulai kembali mempromosikan batik," papar Esti.

Lebih lanjut, Esti mengutarakan KBRI terus melakukan upaya untuk mempromosikan potensi Indonesia melalui berbagai kegiatan dan seminar. Langkah tersebut pada tahun ini semakin ditingkatkan, seiring momentum perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Italia.

"Di bulan Mei ini kami menggelar banyak kegiatan, seperti seminar dua babak 70 tahun Indonesia-Italia. Kami perkuat peranan Asean dan peranan Indonesia di Asean, lalu bagaimana membangun kerja sama ekonomi antara Italia dan negara-negara Asean, khususnya Indonesia," imbuhnya.

Selain menargetkan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan Italia, Esti juga berharap *people to people contact* antara kedua negara dapat lebih tinggi lagi.

"Itu dengan sangat mudah kita lakukan kalau lebih banyak lagi pertukaran pelajar, lebih banyak lagi mahasiswa untuk belajar di sini. Banyak tempat kuliah bagus dan beasiswa di Italia. KBRI terbuka untuk memfasilitasinya," tutup Esti.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190516/15/923425/laporan-dari-italia-menengok-cinecitta-studios-studio-film-terbesar-di-eropa-yang-legendaris>

LAPORAN DARI ITALIA: MENENGOK CINECITTA STUDIOS, STUDIO FILM TERBESAR DI EROPA YANG LEGENDARIS

Saat ini, *Cinecitta Studios* menjadi salah satu *leading players* di industri film Eropa yang mencakup produksi film, dokumenter, serial TV, produk komersial dan video musik.

Siti Munawaroh | 16 Mei 2019 13:05 WIB



Cinecitta Studios, rumah produksi film terbesar di daratan Eropa dan telah menggarap lebih dari 3.000 produksi film. - Bisnis/Siti Munawaroh

Bisnis.com, ROMA – Ibu Kota Italia tidak hanya dikenal dengan kekayaan bangunan bersejarah Kekaisaran Romawi seperti Colloseum, Roman Forum, Fontana di Trevi hingga Pantheon. Roma juga memiliki Cinecitta Studios, rumah produksi film terbesar di dataran Eropa yang legendaris.

Saat ini, *Cinecitta Studios* menjadi salah satu *leading players* di industri film Eropa yang mencakup produksi film, dokumenter, serial TV, produk komersial dan video musik.

Fasilitas studio film di Cinecitta mencakup 5.000 professional dan telah menggarap lebih dari 3.000 film termasuk film terkenal *Ben-Hur* dan *Cleopatra*. Cinecitta Studio kerap disebut sebagai Hollywood-nya Eropa.

Terhampar di lahan seluas 100 acre atau sekitar 40,4 hektar, Cinecitta memiliki 19 *sound stages* permanen untuk proyek audiovisual, 300 *dressing room*, 21 studio *make up* dan 14 studio untuk pascaproduksi.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190516/15/923425/laporan-dari-italia-menengok-cinecitta-studios-studio-film-terbesar-di-eropa-yang-legendaris>

Studio film yang didirikan oleh Benito Mussolini ini dibuat dengan desain Timur Tengah. Di dalam studio, pengunjung dapat menemukan jejak menarik berupa foto, dokumentasi film, hingga kostum yang dipakai bintang film yang *booming* pada 1940-1950-an. Mulai dari Audrey Hapburn hingga Elizabeth Taylor.

Pengunjung yang datang ke Cinecitta juga dapat menyaksikan set panggung Ancient Rome yang monumental, dan Temple of Jerusalem yang dirancang untuk film *The Young Messiah* (2016).

Cinecitta menjadi pusat kreatif dan menggerakkan keseluruhan proses produksi proyek audiovisual. Mulai dari pra hingga post produksi, *special effect* hingga distribusi dan promosi.

Dalam kunjungan kerja ke Roma, delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berkesempatan untuk mengunjungi Cinecitta Studios, Rabu (15/05/2019) siang waktu Roma. Cinecitta terletak di Via Tuscolana, sekitar 20 menit dari pusat Kota Roma.



Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI mengunjungi Cinecitta Studios dan diterima oleh Sales and Business Development Luce Cinecitta, Francesca Rotondo, pada Rabu (15/05/2019).

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan diikuti Wakil Ketua BKSAP Dave Akbarshah Firkano serta anggota BKSAP lainnya yakni Muhidin M. Said, Rofi Munawar, Jerry Sambuaga, Agustina Pramestuti, Mercy Barends, Siti Masrifah, dan Roy Suryo.

Kedatangan Delegasi BKSAP diterima oleh Sales and Business Development Luce Cinecitta, Francesca Rotondo dan dua orang timnya.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190516/15/923425/laporan-dari-italia-menengok-cinecitta-studios-studio-film-terbesar-di-eropa-yang-legendaris>

Industri perfilman Italia khususnya Cinecitta Studios menjadi industri strategis yang dikunjungi delegasi BKASP DPR RI untuk mendapatkan gambaran dan menggali lebih jauh mengenai pengembangan sektor kreatif di negeri ini. Sektor kreatif bersama dengan UKM menjadi tema dari peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dengan Italia pada 2019 ini.

"Industri perfilman saat ini dikuasai oleh China, India dan Hollywood. Namun, Italia mampu menunjukkan eksistensinya dan masyarakatnya masih haus akan film produksi mereka sendiri (*made in Italy*). Mereka mampu mengembangkan potensi dan pemerintahnya mendukung. Kita sebenarnya juga punya potensi dan industri perfilman dalam negeri perlu kita dorong," ujar Dave Akbarshah.



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190517/12/923844/italia-komitmen-tingkatkan-nilai-perdagangan-dengan-indonesia>

ITALIA KOMITMEN TINGKATKAN NILAI PERDAGANGAN DENGAN INDONESIA

Selama empat tahun terakhir, neraca perdagangan Italia-Indonesia mengalami peningkatan dari US\$ 3,2 miliar pada 2015 menjadi US\$3,76 miliar pada 2018. Pada tahun lalu, Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan dengan Italia senilai US\$80,7 juta.

Siti Munawaroh | 17 Mei 2019 07:00 WIB



Pertemuan delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia di Roma, Kamis (16/05/2019). – Bisnis/Siti Munawaroh.

Bisnis.com, ROMA— Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi antara Italia dengan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Italia Michele Geraci ketika menerima kunjungan Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di kantornya di Via Vittorio Veneto, Roma, pada Kamis (16/05/2019) waktu Roma.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi BKSP DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP sekaligus Wakil Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Dave Akbarshah Fikarno dan anggota delegasi Rofi Munawar.

Michele Geraci menilai nilai perdagangan antara Italia dengan Indonesia saat ini masih relatif kecil dan perlu untuk ditingkatkan.



<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190517/12/923844/italia-komitmen-tingkatkan-nilai-perdagangan-dengan-indonesia>

Selama empat tahun terakhir, neraca perdagangan Italia-Indonesia mengalami peningkatan dari US\$ 3,2 miliar pada 2015 menjadi US\$3,76 miliar pada 2018. Pada tahun lalu, Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan dengan Italia senilai US\$80,7 juta.

"Nilai itu masih terlalu kecil, kita harus tingkatkan lagi. Untuk itu kita perlu bersama-sama menggali ide dan peluang sektor-sektor yang bisa difokuskan untuk dikembangkan," kata Michele Geraci.

Sementara itu, Dave Akbarshah mengatakan sejalan dengan keinginan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, pertemuan ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh peluang-peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan.

"Kami tertarik untuk mengetahui lebih lanjut potensi kerja sama perdagangan dan investasi, dengan harapan dapat memperkokoh hubungan bilateral di masa mendatang," ujar Dave.

Italia berada pada peringkat top 9 negara-negara Eropa yang berinvestasi di Indonesia. Total investasi Italia di Indonesia pada 2018 mencapai US\$32,09 miliar.

"Indonesia dan Italia memiliki kesamaan concern dalam pengembangan usaha kecil dan menengah serta ekonomi kreatif. Kami ingin mengetahui langkah Italia dalam pengembangan sektor tersebut," tambah Dave.

Lebih lanjut, Michele Geraci mengungkapkan pihaknya berencana memperluas pasar dan melakukan promosi dagang ke sejumlah negara seperti Jepang, India, China, Vietnam dan Indonesia.

"Kami ingin mempromosikan produk Italia dengan membuka semacam Italy High Street di pusat perbelanjaan di Indonesia. Jakarta bisa menjadi lokasi, atau ada masukan kota-kota lain yang potensial di Indonesia," terang Michele Geraci.

Di lain sisi, dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Italia mampu bertumbuh 0,2 % pada kuartal 1/2019. Pada tahun ini, ekonomi Italia ditargetkan tumbuh di kisaran 1%, setelah mengalami resesi pada akhir 2018.

Data dari Istituto Nazionale di Statistica (Istat) Italia, menunjukkan bahwa output ekonomi menyusut hingga 0,2% pada tiga bulan terakhir 2018, menyusul penurunan hingga 0,3% pada kuartal ketiga tahun serupa.



**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 4
Komplek Gedung MPR / DPR / DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021-5715814, 5715907
Faksimil : 021-5734460



@bksapdpr



DPRRI



@bksapdpr



BKSAP DPR RI